



**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024-2026**



**BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH
TAHUN 2023**



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada Tahun 2024;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025, maka diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. bahwa agar pembangunan di Kabupaten Madiun dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat, maka perlu menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan Daerah periode tahun 2024-2026;

- d. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan kepada Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai pedoman bagi pj. Bupati untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029, digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang kedaruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

- Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia No 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD ;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun

- 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029;
 33. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Pasal 2

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan:

- a. penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
- c. hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023;

- d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023;
- e. isu-isu strategis yang berkembang;
- f. kebijakan nasional; dan
- g. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH;
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
- BAB IV : PERMASALAHAN DAERAH DAN ISU STRATEGIS;
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS;
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
- BAB IX : PENUTUP.

- (2) Uraian dari sistematika Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dan menjabarkannya ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dan kondisi *existing*;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
 - c. terjadi perubahan mendasar;
- (2) Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, kejadian luar biasa dan perintah dari perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 24 Maret 2023

BUPATI MADIUN,

ttd.

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 24 Maret 2023

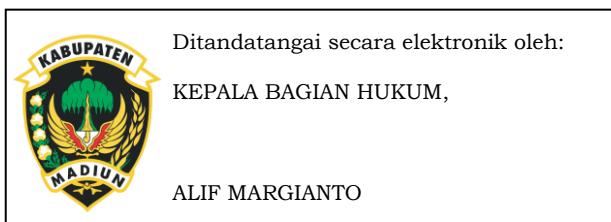
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR GRAFIK ix

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1. Latar Belakang 1

 1.2. Dasar Hukum..... 2

 1.3. Hubungan Antar Dokumen..... 6

 1.4. Maksud dan Tujuan 8

 1.5. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH..... 11

 2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI..... 11

 2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT..... 84

 2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM..... 99

 2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH 140

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH..... 162

 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu 163

 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu 186

 3.3 Kerangka Pendanaan..... 217

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 231

 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Madiun 231

 4.2 Isu Strategis Daerah 234

BAB V TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN 270

 5.1. Tujuan I “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Pengembangan Sektor-sektor Unggulan Daerah”. 272

 5.2 Tujuan II “Menurunkan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat”. 275

 5.3 Tujuan III “Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia” 275

 5.4 Tujuan IV “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional, dan Akuntabel”..... 277

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 281



6.1. Strategi Pembangunan Daerah	281
6.2. Arah Kebijakan	282
6.3. Program Pembangunan Daerah	286
BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	314
BAB VIII KINERJA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH	504
BAB IX PENUTUP	529
9.1 Pedoman Transisi	529
9.2 Kaidah Pelaksanaan	529
9.3 Penutup	531



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun12

Tabel 2.2 Jenis dan Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun.....14

Tabel 2.3 Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun15

Tabel 2.4 Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun.....16

Tabel 2.5 Data Sungai di Kabupaten Madiun.....16

Tabel 2.6 Waduk/ Embung di Kabupaten Madiun17

Tabel 2.7 Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Madiun18

Tabel 2.8 Destinasi Wisata di Kabupaten Madiun24

Tabel 2.9 Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun34

Tabel 2.10 Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun36

Tabel 2.11 Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun37

Tabel 2.12 Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari.....51

Tabel 2.13 Kejadian Bencana Tahun 2018-2022 di Kabupaten Madiun ...53

Tabel 2.14 Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun61

Tabel 2.15 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Madiun Tahun 2021-202262

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan.63

Tabel 2.17 Rasio Jenis Kelamin Atau Sex Ratio Kabupaten Madiun Tahun 202263

Tabel 2.18 Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun65

Tabel 2.19 Panjang Ruas Jalan Prioritas Pembangunan Kabupaten Madiun70

Tabel 2.20 Panjang Rencana Pembangunan Jalan Penghubung.....71

Tabel 2.21 Ruas Jalan Tembus Potensial Kabupaten Madiun73

Tabel 2.22 Capaian Pelayanan Persampahan Kabupaten Madiun80

Tabel 2.23 Sarana Prasarana Olah Raga.....83

Tabel 2.24 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2017-2022 (dalam juta).....86

Tabel 2.25 Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga Berlaku tahun 2017-2022 (dalam juta)87

Tabel 2.26 Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Madiun.....89



Tabel 2.27 Indeks Pembangunan Gender kabupaten Madiun Tahun 2018-202298

Tabel 2.28 Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020-2022116

Tabel 2.29 capaian urusan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Madiun pada tahun 2017-2022.....116

Tabel 2.30 Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman117

Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Madiun118

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Madiun120

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun121

Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Madiun123

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2022123

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup124

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2022125

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa126

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Madiun126

Tabel 2.40 Indikator Layanan Umum Kominfo Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022128

Tabel 2.41 Kinerja urusan Kebudayaan Kab. Madiun Tahun 2018-2022 ..128

Tabel 2.42 Layanan perpustakaan di Kab. Madiun Tahun 2018-2022129

Tabel 2.43 Layanan Kearsipan Kab. Madiun Tahun 2018-2022129

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun130

Tabel 2.45 Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2017-2021131

Tabel 2.46 Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022131

Tabel 2.47 Nilai LPPD Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022.....133

Tabel 2.48 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017–2021134

Tabel 2.49 Capaian SAKIP Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021.....135



Tabel 2.50 Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022136

Tabel 2.51 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021138

Tabel 2.52 Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana139

Tabel 2.53 Data Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Madiun Tahun 2022145

Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022145

Tabel 2.55 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017 – 2022.....160

Tabel 2.56 Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2017 – 2022161

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2021165

Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021170

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021172

Tabel 3.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021174

Tabel 3.3 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021177

Tabel 3.4 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021180

Tabel 3.5 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021188

Tabel 3.6 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021196

Tabel 3.7 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2021.....203

Tabel 3.8 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021206

Tabel 3.9 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026208

Tabel 3.10 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021210

Tabel 3.11 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021211

Tabel 3.12 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021213



Tabel 3.13 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021214

Tabel 3.14 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026216

Tabel 3.15 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026222

Tabel 3.16 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026228

Tabel 3.17 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026230

Tabel 4.1 Rekapitulasi Indikator TPB / SDGs Kab. Tahun 2021238

Tabel 4.2 Target Pembangunan Yang Ditetapkan Provinsi Jawa Timur
.....256

Tabel 5.1 Kesesuaian Tujuan I RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025273

Tabel 5.2 Kesesuaian antara Tujuan RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025275

Tabel 5.3 Kesesuaian antara Tujuan III RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025277

Tabel 5.4 Kesesuaian Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025280

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Madiun Periode Tahun 2024-2026282

Tabel 6.2 Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Madiun....283

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026287

Tabel 7.1 Program Prioritas I Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026316

Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 505

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Madiun 2024-2026505

Tabel 8.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Madiun 2023.....506



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dengan Dokumen Perencanaan yang lain.7

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Madiun13

Gambar 2.2 Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Madiun30

Gambar 2.3 Peta Kerawanan Tanah Longsor Kabupaten Madiun.....31

Gambar 2.4 Peta Kerawanan Kebakaran Kabupaten Madiun32

Gambar 2.5 Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Madiun33

Gambar 2.6 Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun34

Gambar 2.7 Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan38

Gambar 2.8 Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan39

Gambar 2.9 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih40

Gambar 2.10 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim.....42

Gambar 2.11 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim43

Gambar 2.12 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir44

Gambar 2.13 Peta Jasa Ekosistem Tata Aliran Air dan Banjir.....45

Gambar 2.14 Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam46

Gambar 2.15 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana47

Gambar 2.16 Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara.....48

Gambar 2.17 Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara.....49

Gambar 2.18 Peta Daya Dukung Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas51

Gambar 2.1 Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun.....57

Gambar 2.20 Peta Kerawanan Tanah Longsor di Kabupaten Madiun.....58

Gambar 2.21 Peta Kawasan Kebarakan di Kabupaten Madiun.....59

Gambar 2.22 Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun.....60

Gambar 2.23 Peta Kerawanan Puting Beliung di Kabupaten Madiun61

Gambar 2.24 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah64

Gambar 2.25 Wilayah Agropolitan di Kabupaten Madiun66

Gambar 2.26 Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun69

Gambar 2.27 Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun.....71

Gambar 4.1 Tujuan Sustainable Development Goals236

Gambar 4.2 Empat Pilar SDG’s238

Gambar 4.3 Visi dan Misi RPJMN 2020-2024252



Gambar 5.1 Cascading Kinerja (pohon kinerja) Tujuan I274

Gambar 5.2. Logical Framework Tujuan I RPD Kabupaten Madiun.....275

Gambar 5.3 Cascading Kinerja (Pohon Kinerja) Tujuan 2276

Gambar 5.4 Logical Framework Tujuan II RPD Kabupaten Madiun,.....277

Gambar 5.5 Cascading Kinerja (pohon kinerja) tujuan III.....278

Gambar 5.6 Logical Framework Tujuan III RPD Kabupaten Madiun
Tahun 2024-2026279

Gambar 5.7 Cascading kinerja (pohon kinerja) tujuan IV280

Gambar 5.8 Logical Framework Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun
Tahun 2024-2026280



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Madiun Tahun 2017-202252

Grafik 2.2 Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 hingga 2022.....54

Grafik 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 202262

Grafik 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Berbanding Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 202289

Grafik 2.5 Pertumbuhan dan Distribusi Per Sektor Tahun 2022.....90

Grafik 2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun Berbanding Provinsi dan nasional.....91

Grafik 2.7 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.....91

Grafik 2.8 Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 – 2022.....92

Grafik 2.9 Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....93

Grafik 2.10 Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....93

Grafik 2.11 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....94

Grafik 2.12 Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018 - 2022.....94

Grafik 2.13 Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.....95

Grafik 2.14 Perbandingan Pengeluaran perkapita Disesuaikan Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional96

Grafik 2.15 Pengeluaran perkapita Disesuaikan Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 202296

Grafik 2.16 Persentase Kemiskinan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-202297

Grafik 2.17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota.....97

Grafik 2.18 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018 -202299

Grafik 2.19 Angka Kematian bayi Kabupaten Madiun Tahun 2017-202299

Grafik 2.20 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun100



Grafik 2.21 Angka Kematian Balita di Kabupaten Madiun100

Grafik 2.22 Jumlah Penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Madiun.....101

Grafik 2.23 Kasus dan Jumlah Penderita TBC dan BTA Positif102

Grafik 2.24 Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan102

Grafik 2.25 Jumlah Posyandu dan Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022104

Grafik 2.26 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021105

Grafik 2.27 Cakupan Desa UCI di Kabupaten Madiun105

Grafik 2.28 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD106

Grafik 2.29 Prevalensi Balita Stunting dan Gizi Buruk106

Grafik 2.30 Indeks Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022107

Grafik 2.31 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun.....108

Grafik 2.32 Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021110

Grafik 2.33 Angka Partisipasi Murni Kab. Madiun Tahun 2017-2021111

Grafik 2.34 Angka Partisipasi Sekolah SD/M I dan SMP/MTs Kabupaten Madiun tahun 2017-2021111

Grafik 2.35 Partisipasi Pendidikan PAUD112

Grafik 2.36 Partisipasi Pendidikan Dasar.....112

Grafik 2.37 Partisipasi Pendidikan Kesetaraan113

Grafik 2.38 Indeks Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022113

Grafik 2.39 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Madiun.....114

Grafik 2.40 Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022115

Grafik 2.41 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Persentase Penduduk berakses air minum Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022115

Grafik 2.42 Gambaran Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022117

Grafik 2.43 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022118

Grafik 2.44 Gambaran Penanganan PMKS di Kabupaten Madiun119

Grafik 2.45 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Madiun.....133

Grafik 2.46 Persentase Fungsional Auditor Kabupaten Madiun140

Grafik 2.47 Analisis Klassen Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2022...141

Grafik 2.48 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita142

Grafik 2.49 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022143



Grafik 2.50 Nilai Tukar Petani Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022.....	144
Grafik 2.51 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	146
Grafik 2.52 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	147
Grafik 2.53 Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	147
Grafik 2.54 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	148
Grafik 2.55 Luas Lahan Tegal di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022 ...	149
Grafik 2.56 Luas Wilayah Kebanjiran di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	150
Grafik 2.57 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	150
Grafik 2.58 Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Madiun	151
Grafik 2.59 Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Madiun	151
Grafik 2.60 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	153
Grafik 2.61 Jumlah Demo di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	153
Grafik 2.62 Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2018- 2022	154
Grafik 2.63 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021	155
Grafik 2.64 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Madiun.....	157
Grafik 2.65 Persentase Rasio Ketergantungan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021	158
Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 (dalam milyar Rupiah).....	164
Grafik 3.2 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022	167
Grafik 3.3 Pajak Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022.....	167
Grafik 3.4 Retribusi Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022	168
Grafik 3.5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 (dalam Milyar Rupiah).....	171
Grafik 3.6 Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Pemerintah.....	184
Grafik 3.7 Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021	184
Grafik 3.8 Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Pemerintah.....	184



Grafik 3.9 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021187

Grafik 3.10 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021190

Grafik 3.11 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021191

Grafik 3.12 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021192

Grafik 3.13 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021194

Grafik 3.14 Rasio Efektivitas Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021195

Grafik 3.15 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021198

Grafik 3.16 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021199

Grafik 3.17 Realisasi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021200

Grafik 3.18 Proporsi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021200

Grafik 3.19 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021201

Grafik 3.20 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021202

Grafik 4.1 Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun.242



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menindaklanjuti amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Kepala Daerah Kabupaten Madiun tepatnya pada bulan September Tahun 2023, masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2018-2023 yakni pasangan **H. Ahmad Dawami Ragil Saputro dan H. Hari Wuryanto** akan berakhir.

Berkaitan dengan regulasi pemerintah pusat berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang baru akan ditindaklanjuti pada tahun 2024, hal tersebut berdampak pada kekosongan kepemimpinan di Kabupaten Madiun pada tahun 2023, hingga tahun 2024. Selain itu hingga saat ini dinamika regulasi pemerintah pusat masih sangat dinamis, dimana masih adanya perbedaan persepsi berkaitan dengan waktu pemilihan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga skenario paling cepat kepala daerah dapat dilantik ialah pada awal tahun 2025. Tidak hanya berkaitan dengan kekosongan kepala daerah namun dampak lain dari hal tersebut ialah demisionernya kepala daerah khususnya untuk yang masa jabatannya selesai pada tahun 2022 dan 2023 diikuti pula dengan berakhirnya periode perencanaan jangka menengah daerah. Untuk itu Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru.

Terbitnya Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah daerah, sehingga nantinya daerah yang periode RPJMD telah berakhir maka tahun perencanaan 2024 hingga tahun 2026 mengacu terhadap Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.



Menindaklanjuti tidak adanya platform politik dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagai cita-cita pembangunan, Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 mengacu terhadap RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 terbagi menjadi 4 periode tahun perencanaan jangka menengah. Periode pertama adalah tahun 2005 – 2010, periode kedua adalah tahun 2010-2015, periode ketiga ialah tahun perencanaan jangka menengah tahun 2015-2020, dan terakhir ialah periode tahun 2020-2025. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan tahapan terakhir perencanaan jangka panjang daerah. Sehingga ruang untuk memastikan bahwa RPJPD Kabupaten Madiun telah dapat mencapai Visi dan Misi daerah harus tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun tahun 2024-2026.

Mengisi ruang kosong pendekatan politis dalam dokumen perencanaan jangka menengah, pendekatan dominan yang dituangkan dalam dokumen RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 ialah pendekatan teknokratis. Sekurang-kurangnya RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan 1) Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024; 2) Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Madiun hingga tahun 2025; 3) Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023; 4) RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024; 5) Kebijakan Nasional; dan 6) Regulasi lain yang berlaku dalam penyusunan dokumen ini.

Dengan disusunnya dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, maka Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 nantinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan perencanaan tahunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 hingga tahun 2026. Begitu juga secara tidak langsung Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026, harus mengacu terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026 adalah sebagai berikut :



1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 13)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);



16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10) ;
18. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang ke daruratan kesehatan masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia No 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5, Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 2, Seri D);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;



33. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029.
34. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023

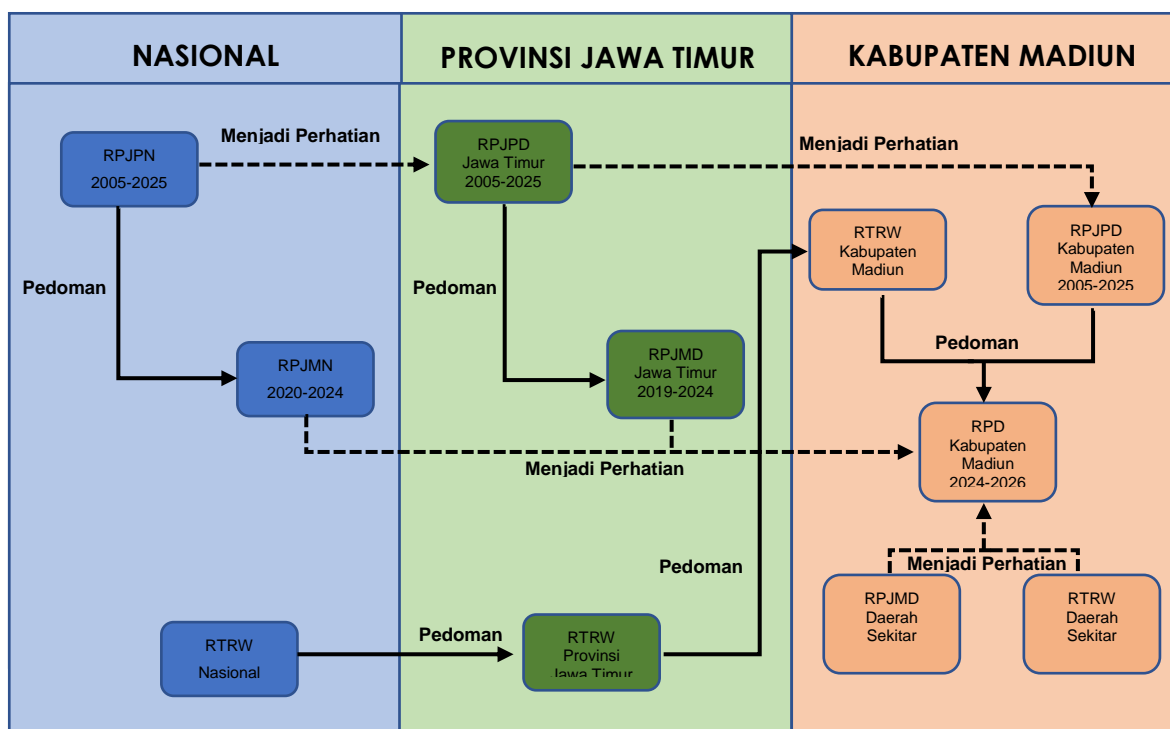
1.3. Hubungan Antar Dokumen

Pada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru dijelaskan bahwa penyusunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Madiun hingga 2025;
3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023;
4. RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional; dan
7. Regulasi yang berlaku.

Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dengan dokumen perencanaan yang lainnya dapat dilihat dalam ilustrasi sebagai berikut.

Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun dengan Dokumen Perencanaan yang lain.





Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan lainnya yakni sebagai berikut:

1. RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun dengan memerhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, hal tersebut dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian dari pembangunan nasional. Sehingga RPJMN menjadi pedoman bagi penyusunan RPD Kabupaten Madiun dengan melihat arah pembangunan nasional 2020-2024.
2. RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Penyelarasan terhadap Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur dilakukan sebagai upaya sinkronisasi pembangunan antar wilayah baik Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jawa Timur.
3. RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 Tahap IV. Dengan demikian dalam penyusunannya, juga memerhatikan arah kebijakan dan sasaran pembangunan RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025 Tahap IV.
4. Penyusunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 memperhatikan rencana pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Madiun, seperti yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Madiun. Hal yang perlu diperhatikan dalam RTRW adalah rencana pola dan struktur ruang sebagai acuan dalam pembangunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.4. Maksud dan Tujuan

Sejalan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, penyusunan dokumen RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 memiliki maksud untuk memberikan arah terhadap pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026. RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 juga memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas satuan perangkat daerah, dan program kewilayahan dalam rangka menjamin keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025.



Tujuan dari disusunnya dokumen RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 yakni:

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
2. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, dan kebijakan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026;
3. Sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana strategis perangkat daerah tahun 2024-2026; dan
4. Sebagai tolok ukur dalam pengukuran dan evaluasi kinerja tahunan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sepenuhnya mengacu kepada Inmendagri Nomor 52 Tahun 2022 yang terdiri dari 9 bab , dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kabupaten Madiun yang meliputi gambaran dari aspek geografi dan demografi, capaian kinerja visi misi kepala daerah, kesejahteraan masyarakat, daya saing dan pelayanan umum Gambaran umum kondisi Kabupaten Madiun saat ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah serta perumusan rencana pembangunan dalam tiga tahun mendatang.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah empat tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan tiga tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Pada bab ini diuraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama tiga tahun ke depan, berdasarkan hasil analisis data pada bab Gambaran Umum Kondisi Daerah.



BAB V TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini berisikan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, sekaligus juga dengan indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sebagai representasi dari tolok ukur keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024-2026.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bab sebelumnya. Bab ini juga menguraikan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, serta berbagai program pembangunan daerah sampai pada tahun 2026 mendatang.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program pembangunan disajikan beserta indikator kinerja, nilai target indikator, pagu indikatif, serta perangkat daerah penanggung jawab penyelenggaraan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB IX PENUTUP

Dalam Bab ini diuraikan pedoman transisi serta kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dan demografi memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi geografis daerah mencakup karakteristik fisik dan potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana, serta luas wilayah menurut batas administrasi pemerintah kabupaten. Aspek geografi dan demografi merupakan informasi dasar untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk memetakan pengembangan wilayah dalam menunjang kemajuan pembangunan daerah.

2.1.1 KARAKTERISTIK LOKASI DAN WILAYAH

2.1.1.1 LUAS DAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 Tentang Pemberian Dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Dan Pulau Tahun 2021 bahwa luas Kabupaten Madiun 1.113,63 Km². Sebelum adanya pemutakhiran ini Kabupaten Madiun memiliki wilayah seluas 101.086 Ha atau 1.010,86 Km². Data luas kecamatan masih menggunakan data lama karena saat ini masih dilakukan pemutakhiran luas Kecamatan. Secara Astronomis terletak pada 111° 25' 45"–111° 51' Bujur Timur dan 7° 12' –7° 48' 30" Lintang Selatan dengan batas–batas secara administratif sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Bojonegoro
2. Sebelah Timur : Kabupaten Nganjuk
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Ponorogo
4. Sebelah Barat : Kabupaten Magetan dan Ngawi

Jarak antara Kabupaten Madiun dengan Ibukota Provinsi Jawa Timur ±175 km ke arah timur, sedangkan jarak dengan Ibukota negara ±775 km dengan arah sebaliknya. Secara administratif Kabupaten Madiun terdiri dari 206 desa/ kelurahan (198 desa dan 8 kelurahan) yang tersebar di 15 kecamatan. Berikut rinciannya disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 2.1
Jumlah Desa/ Kelurahan dan Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Madiun

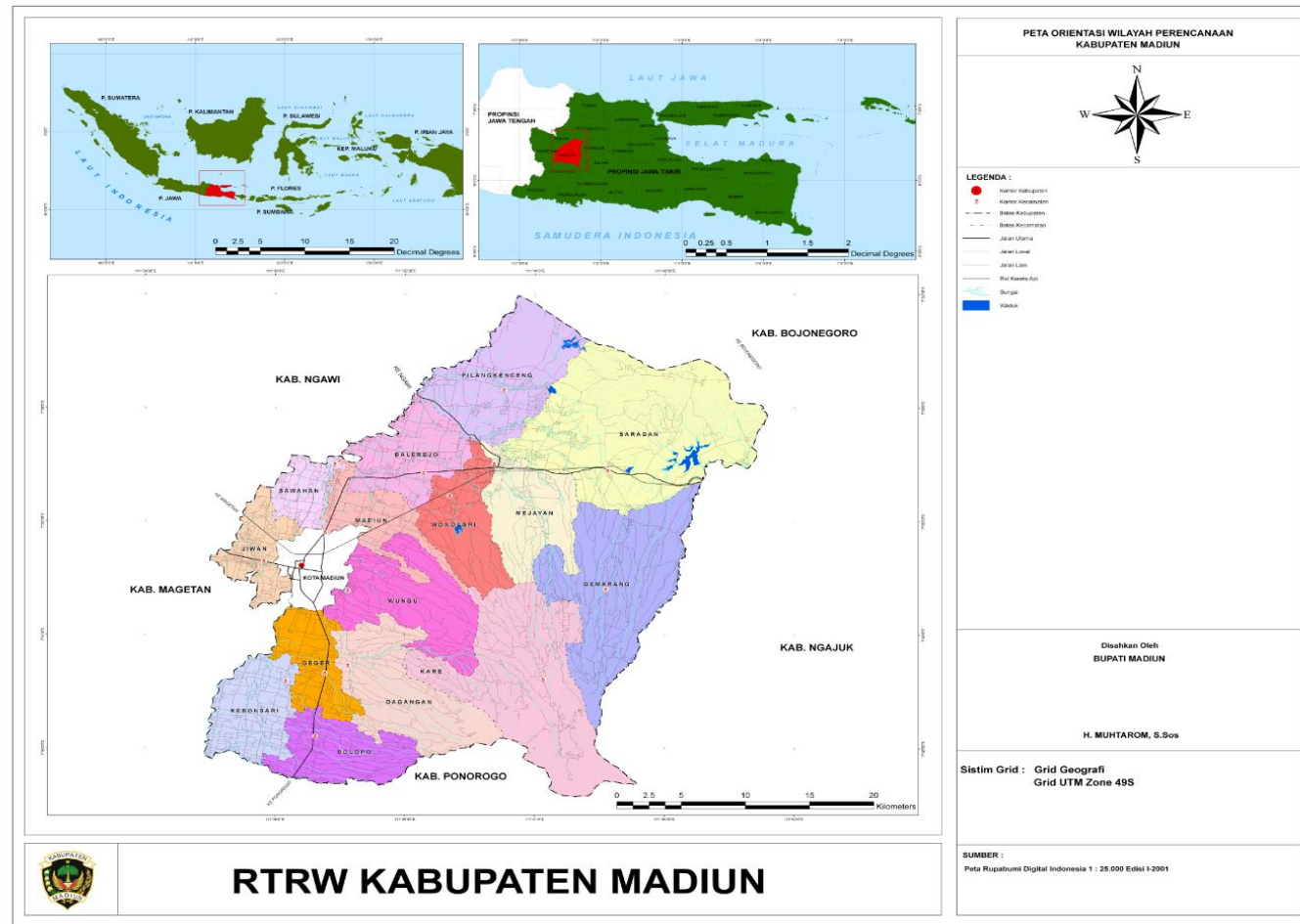
No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Kebonsari	14	-	47,45
2	Geger	19	-	36,61
3	Dolopo	10	2	48,85
4	Dagangan	17	-	72,36
5	Wungu	12	2	45,54
6	Kare	8	-	190,85
7	Gemarang	7	-	101,97
8	Saradan	15	-	152,92
9	Pilangkenceng	18	-	81,34
10	Mejayan	11	3	55,22
11	Wonoasri	10	-	33,93
12	Balerejo	18	-	51,98
13	Madiun	12	1	35,93
14	Sawahan	13	-	22,15
15	Jiwan	14	-	33,76
JUMLAH		198	8	1.010,86

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Kecamatan paling luas yang ada di Kabupaten Madiun adalah Kecamatan Kare dengan luas 190,85 km², sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Sawahan dengan luas 22,15 km². Berikut juga disajikan gambar peta administrasi Kabupaten Madiun:



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Madiun



Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029



2.1.1.2 TOPOGRAFI

2.1.1.2.1. KEMIRINGAN LAHAN

Sebagaimana halnya topografi, kelerengan di Kabupaten Madiun juga beragam, mulai dari kelerengan 0-8% sampai lebih dari 45%. Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengan wilayah di atas 25%. Kecamatan yang dimaksud adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri, dimana beberapa kecamatan tersebut umumnya berada di bagian selatan berdekatan dengan Pegunungan Wilis.

Tabel 2.2
Jenis dan Luas Kemiringan Lahan Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Kemiringan Lahan (Ha)					Jumlah
		0-8%	8-15%	15-25%	25-45%	>45%	
1.	Kebonsari	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	3.403,50	255,45	2,04	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.890,02	1.562,29	1.406,07	21,04	21,04	4.885,00
4.	Dagangan	1.021,50	1.948,52	1.112,50	2.499,55	2.499,55	7.236,00
5.	Wungu	1.075,50	1.589,73	1.853,53	19,48	19,48	4.554,00
6.	Kare	0,00	231,47	5.425,47	10.685,75	10.685,75	19.085,00
7.	Gemarang	1.538,62	1.797,02	3.685,77	1.523,53	1.523,53	10.197,00
8.	Saradan	14.881,34	410,66	0,00	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	8.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	1.602,27	2.128,89	1.448,12	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	1.406,66	513,63	1.147,45	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	3.055,90	95,02	411,48	0,00	0,00	3.59,00
14.	Sawahan	2.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		53.543,31	10.532,67	16.492,43	5.768,23	14.749,36	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.2.2. KETINGGIAN LAHAN

Topografi di Kabupaten Madiun membujur dari utara ke selatan. Posisi terendah berada di lembah-lembah Bengawan Madiun yang berdekatan dengan pusat Kota Madiun dengan ketinggian antara 21-100 mdpl. Kemudian berturut-turut ke arah selatan yang semakin bertambah tinggi hingga ketinggian hampir 2.000 mdpl. Kecamatan dengan ketinggian antara 1000-2000 mdpl diantaranya adalah Kecamatan Kare, Gemarang dan Dagangan sedangkan kecamatan dengan ketinggian >2000 mdpl adalah Kecamatan Kare.

Tabel 2.3
Jenis dan Luas Topografi Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Topografi (Ha)						Jumlah
		0-50	50-100	100-500	500-1000	1000-2000	>2000	
		m dpl	m dpl	m dpl	m dpl	m dpl	m dpl	
1.	Kebonsari	0,00	3.940,16	804,84	0,00	0,00	0,00	4.745,00
2.	Geger	0,00	2.427,94	1.233,06	0,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	0,00	0,41	4.881,93	2,66	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	0,00	485,14	5.134,75	1.378,99	237,12	0,00	7.236,00
5.	Wungu	0,00	1.809,78	2.744,22	0,00	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	0,00	0,00	8.885,10	6.125,13	4.002,56	72,21	19.085,00
7.	Gemarang	0,00	0,00	0,18	8.790,93	1.391,16	14,73	10.197,00
8.	Saradan	0,00	2.540,13	12.579,44	172,42	0,00	0,00	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	6.034,58	2.099,42	0,00	0,00	0,00	8.134,00
10.	Mejayan	0,00	2.290,89	3.231,11	0,00	0,00	0,00	5.522,00
11.	Wonoasri	0,00	2.059,79	1.333,21	0,00	0,00	0,00	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	1,89	3.263,73	327,38	0,00	0,00	0,00	3.593,00
14.	Sawahan	12,07	2.202,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		13,96	35.629,49	43.254,63	16.470,13	5.630,84	86,95	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.3 GEOLOGI

Jenis tanah di Kabupaten Madiun juga cukup beragam. Jenis tanah ini sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan dikembangkan di Kabupaten Madiun. Selain itu, berdasarkan jenis tanah dapat diketahui kesesuaian pemanfaatan lahan yang ada di daerah.

Berdasarkan data yang diperoleh, jenis tanah di Kabupaten Madiun didominasi oleh jenis tanah alluvial dengan persentase sebesar 36% dari seluruh luas wilayah Kabupaten Madiun dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare dan Gemarang. Kemudian jenis tanah mediteran dengan persentase sebesar 26% dengan penyebaran seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Pilangkenceng, Jiwan dan Sawahan. Jenis tanah grumosol dengan persentase sebesar 21% dengan penyebaran hanya beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Madiun dan Sawahan. Jenis tanah latosol dengan persentase sebesar 13% penyebarannya meliputi Kecamatan Dolopo, Wungu, Kare, Gemarang, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Untuk jenis tanah dengan luasan terkecil yaitu jenis tanah litosol dengan persentase sebesar 4% penyebarannya meliputi Kecamatan Dagangan, Kare dan Saradan. Jenis tanah di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Jenis dan Luas Tanah di Kabupaten Madiun

No	Kecamatan	Jenis dan Luas Tanah (Ha)					Jumlah
		Mediteran	Latosol	Alluvial	Litosol	Grumosol	
1.	Kebonsari	129,27	0,00	4.615,73	0,00	0,00	4.475,00
2.	Geger	1.951,00	9,01	1.701,00	0,00	0,00	3.661,00
3.	Dolopo	1.285,74	758,03	2.841,24	0,00	0,00	4.885,00
4.	Dagangan	6.116,44	0,00	1.020,77	98,79	0,00	7.236,00
5.	Wungu	2.934,65	1.314,79	304,55	0,00	0,00	4.554,00
6.	Kare	5.133,95	9.511,10	0,00	4.439,95	0,00	19.085,00
7.	Gemarang	6.437,24	3.759,76	0,00	0,00	0,00	10.197,00
8.	Saradan	3.082,14	0,00	12.044,43	165,43	10.747,49	15.292,00
9.	Pilangkenceng	0,00	0,00	8.134,00	0,00	1.694,23	8.134,00
10.	Mejayan	3.438,37	638,65	1.444,99	0,00	860,73	5.522,00
11.	Wonoasri	2.050,28	0,93	1.341,78	0,00	48,32	3.393,00
12.	Balerejo	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00
13.	Madiun	399,02	203,93	2.990,05	0,00	38,96	3.593,00
14.	Sawahan	0,00	0,00	2.215,00	0,00	13.655,28	2.215,00
15.	Jiwan	0,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	3.376,00
JUMLAH		32.958,09	16.196,20	47.227,54	4.704,17	27.045,01	101.086,00

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.1.4 HIDROLOGI

Kabupaten Madiun memiliki 41 (empat puluh satu) sungai yang memuat debit aliran dan manfaat irigasi dari masing-masing sungai tersebut. Pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Madiun tersebut pada umumnya memiliki pola radial, dengan sebagian besar merupakan sungai musiman yaitu sungai yang meresapkan air hujan ke dalam tanah, atau disebut juga sungai *influen*. Sedangkan sungai pola radial merupakan ciri khas sungai yang mengalir di daerah gunung berapi.

Tabel 2.5
Data Sungai di Kabupaten Madiun

No	Nama sungai	Panjang Sungai	Manfaat Irigasi
		(km)	(ha)
1.	Kali Madiun	27,90	3.278,00
2.	Kali Asin	8,00	2.803,00
3.	Kali Jerohan	50,60	-
4.	Kali Berangkal	14,50	227,00
5.	Kali Catur	32,00	2.854,00
6.	Kali Gunting	32,25	252,00
7.	Kali Glonggong	4,70	232,00
8.	Sungai Kelepek	12,50	433,00
9.	Kali Sareng	20,25	1.366,00
10.	Kali Batil	17,25	1.108,00
11.	Sungai Gondang	9,10	372,00
12.	Sungai Semawur	4,55	404,00



No	Nama sungai	Panjang Sungai	Manfaat Irigasi
		(km)	(ha)
13.	Kali Sono	10,00	314,00
14.	Kali Piring	10,00	280,00
15	Kali Bribis	10,00	197,00
16	Kali Blodro	10,00	422,00
17	Kali Kentar	10,40	106,00
18	Kali Kembang	30,40	2.167,00
19	Kali Abu	14,40	374,00
20	Kali Gondang	15,00	14,00
21	Kali Mundu	30,40	479,00
22	Kali Sukoliman	5,00	30,00
23	Kali Uluh	21,20	86,00
24	Kali Sarangan	20,00	630,00
25	Kali Jumok	15,00	320,00
26	Kali Padas	13,00	86,00
27	Kali Lengkowo	7,00	242,00
28	Kedung Brubus	9,00	-
29	Ngasinan	12,50	-
30	Notopuro	33,75	3.089,00
31	Gede	21,25	483,00
32	Tangkil	5,00	-
33	Gruwok	13,75	2.238
34	Nampu	7,50	47,00
35	Sukorejo	5,00	-
36	Kali Palem	5,00	Suplisi Waduk Notopuro
37	Sumber Agung	6,75	-
38	Kali Gendo	1,75	Saluran Suplisi Waduk Notopuro
39	Kali Ulomati	1,25	Suplisi Waduk Saradan
40	Kali Lemah bang	1,00	Suplisi Waduk Saradan
41	Saradan/Blangambi	6,25	-

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Beberapa sungai yang ada di wilayah Kabupaten Madiun ada yang menyuplai kebutuhan air di 4 (empat) waduk Kabupaten Madiun, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.6
Waduk/ Embung di Kabupaten Madiun

No.	Nama Waduk	Lokasi Desa	Kecamatan
1.	Dawuhan	Sidomulyo	Wonoasri
2.	Notopuro	Duren	Pilangkenceng
3.	Saradan	Sugihwaras	Saradan
4.	Kedungbrubus	Bulu	Pilangkenceng
5.	Kresek	Kresek	Wungu

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2017 (RTRW 2009-2029)

2.1.1.5 KLIMATOLOGI

Kondisi iklim ditandai dengan keadaan dimana suatu wilayah mempunyai keadaan bulan basah dan bulan kering. Keadaan iklim di Kabupaten Madiun ditandai dengan keadaan curah hujan dengan intensitas hujan sedang. Dengan tipe iklim yang ada di Kabupaten Madiun, maka berdasarkan Schmidt dan Ferguson, wilayah ini termasuk iklim dengan Tipe C yaitu iklim sedang yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah.

Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20°-35° C.

Intensitas hujan merupakan nilai perbandingan antara curah hujan dengan hari hujan baik dalam bulanan maupun tahunan. Berdasarkan jumlah hari hujan di masing-masing kecamatan, rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Berikut disajikan dalam tabel terkait kondisi klimatologi di Kabupaten Madiun:

Tabel 2.7
Rata-rata Jumlah Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Kabupaten Madiun

No	Bulan	2018		2019		2020		2021		2022	
		Rata-rata jumlah curah hujan (mm)	Rata-rata hari curah hujan (hari)	Rata-rata jumlah curah hujan (mm)	Rata-rata hari curah hujan (hari)	Rata-rata jumlah curah hujan (mm)	Rata-rata hari curah hujan (hari)	Rata-rata jumlah curah hujan (mm)	Rata-rata hari curah hujan (hari)	Rata-rata jumlah curah hujan (mm)	Rata-rata hari curah hujan (hari)
1	Januari	303,31	14	227,20	13	279,63	13	320,63	16	335,37	16
2	Februari	347,40	14	306,46	14	429,26	17	289,03	16	233,66	14
3	Maret	250,40	11	433,71	14	258,20	15	398,29	15	409,84	18
4	April	133,46	7	217,54	9	241,09	10	207,49	8	154,61	9
5	Mei	10,51	1	32,74	2	250,34	8	41,83	3	125,89	9
6	Juni	8,43	1	0,46	0	15,89	1	157,69	8	9,66	1
7	Juli	0,00	0	1,63	0	2,49	0	5,41	0	1,66	0
8	Agustus	0,00	0	0,00	0	18,37	1	2,40	0	2,80	0
9	September	3,17	0	0,31	0	3,97	0	64,41	3	55,40	4
10	Oktober	1,60	0	0,00	0	77,91	4	49,36	3	105,06	8
11	November	227,74	10	34,29	3	287,17	9	388,39	17	333,57	8
12	Desember	173,29	10	308,06	12	414,40	17	334,23	15	344,77	8
Rata-rata		121,61	6	130,20	6	189,89	8	188,26	9	176,02	8

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.1.1.6 PENGGUNAAN LAHAN

2.1.1.6.1. KAWASAN BUDIDAYA

2.1.1.6.1.1 Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi adalah kawasan hutan yang dibudidayakan dengan tujuan diambil hasil hutannya, baik hasil hutan kayu maupun non kayu. Kawasan hutan produksi merupakan kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya pembangunan, mendukung pengembangan industri dan ekspor. Meskipun kawasan hutan produksi merupakan kawasan budidaya tetapi juga memiliki fungsi perlindungan sebagai daerah resapan air. Kawasan ini tidak boleh di alih fungsikan untuk

kegiatan lain, dan harus dikendalikan secara ketat. Luas kawasan hutan produksi di Kabupaten Madiun ± 40.631 ha ($\pm 40\%$ dari luas wilayah Kabupaten Madiun) yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun.

2.1.1.6.1.2. Kawasan Hutan Rakyat

Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50%. Kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Madiun mencapai luas ± 5.821 ha ($\pm 5\%$ dari luas wilayah Kabupaten Madiun) yang tersebar di kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri.

2.1.1.6.1.3. Kawasan Peruntukan Pertanian

Lahan pertanian di Kabupaten Madiun meliputi persawahan sepanjang tahun yang dapat ditanami padi karena adanya cukup air, baik dari irigasi teknis maupun irigasi sederhana. Sedangkan pertanian lahan kering biasanya beragam, saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, seperti: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Alokasi pemanfaatan kawasan budidaya pertanian dibedakan menjadi beberapa bagian, diantaranya:

a. Pertanian Sawah

Penggunaan sawah di Kabupaten Madiun meliputi sawah irigasi teknis, sawah setengah teknis, sawah irigasi sederhana, irigasi desa/ Non PU dan sawah tadah hujan. Perkembangan wilayah di Kabupaten Madiun menuntut adanya penyediaan lahan untuk pengembangan kegiatan budidaya, permukiman, perdagangan dan jasa, industri maupun fasilitas umum. Dengan akan ditetapkannya Perkotaan Mejayan sebagai Ibukota Kabupaten Madiun, maka secara tidak langsung pada kawasan tersebut akan berkembang kegiatan terbangun. Konsekuensinya adalah akan terjadi perubahan penggunaan lahan non budidaya ke budidaya. Kenyataannya, Perkotaan Mejayan berada pada kawasan yang sebagian besar wilayahnya diperuntukkan areal persawahan. Kondisi ini tidak bisa dihindari, sehingga perubahan penggunaan lahan dari sawah menjadi lahan terbangun di Perkotaan Mejayan dapat diganti pada wilayah lain dengan melakukan peningkatan dari sawah tadah hutan, sawah irigasi sederhana menjadi sawah irigasi teknis. Luasan kawasan

pertanian sawah yang direncanakan ±31.594 ha (±31 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun).

Dari rencana luas lahan pertanian sawah tersebut, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas ±21.587,4 ha yang tersebar di 15 kecamatan. Adapun penyebaran lahan sawah beririgasi di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kebonsari, Geger, Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, Madiun, Sawahan dan Jiwan. Sedangkan penyebaran lahan sawah tadah hujan meliputi Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri, Balerejo, dan Madiun.

b. Tegal/ Kebun/ Ladang

Kawasan pertanian lahan kering adalah kawasan yang biasanya pada saat musim hujan ditanami padi dan saat kemarau ditanami jagung, tembakau atau palawija, seperti: kacang hijau, kedelai, kacang tanah, dan ubi kayu. Kawasan pertanian lahan kering yang dimaksud adalah tegal/ kebun/ ladang. Tegal/ kebun/ ladang yang direncanakan di Kabupaten Madiun seluas ±2.643 ha (±2 % dari luas wilayah Kabupaten Madiun). Luas tegal/ kebun/ ladang mengalami penurunan karena dimanfaatkan untuk lahan terbangun. Adapun penyebarannya berada di seluruh kecamatan. Untuk peningkatan nilai manfaat dilakukan melalui penerapan sistem pergiliran, tumpang sari dan sebagainya.

c. Hortikultura

Kawasan hortikultura merupakan kawasan komoditi buah-buahan dan sayuran. Kawasan hortikultura tersebar di seluruh kecamatan seluas ±2.321 ha (±2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun).

2.1.1.6.1.4. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikembangkan berdasarkan fungsi kawasan dan potensi yang ada pada daerah masing-masing serta prospek ekonomi yang dimiliki. Berdasarkan komoditasnya, pengembangan perkebunan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu perkebunan tanaman tahunan seperti kopi, coklat dan karet, dan perkebunan tanaman semusim antara lain tembakau, tebu, panili dan sebagainya. Kawasan perkebunan di Kabupaten Madiun dikelola oleh perusahaan seperti perkebunan kopi Kandangan yang terletak di Kecamatan Kare dengan luas mencapai ±862 ha dan di Kecamatan Wungu seluas ±1 ha. Kawasan ini sekaligus berfungsi sebagai fungsi hutan lindung. Luas keseluruhan

kawasan peruntukkan perkebunan ±18.912 ha, meliputi kecamatan Gemarang, Kare, Dagangan, Dolopo, dan Saradan.

2.1.1.6.1.5. Kawasan Peruntukan Perikanan

Perikanan di Kabupaten Madiun adalah perikanan darat yang dikembangkan di kolam/ sungai, waduk. Adapun arahan pengelolaan kawasan perikanan adalah mengembangkan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan khususnya kolam/ sungai dan waduk. Pengembangan budidaya perikanan kolam diarahkan di Kecamatan Dolopo, Kebonsari, dan Balerejo sedangkan pengembangan budidaya perikanan waduk diarahkan di Kecamatan Wungu, Wonoasri, Pilangkenceng, dan Saradan.

2.1.1.6.1.6. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pada dasarnya penambangan adalah proses pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Semakin besar eksploitasi sumber daya alam akan semakin besar pula gangguan terhadap keseimbangan lingkungan dengan demikian kemungkinan terjadinya degradasi semakin besar pula, metode penambangan akan mempengaruhi besar kecilnya perubahan terhadap bentang alam. Potensi jenis tambang yang ada di Kabupaten Madiun meliputi Kecamatan Kare dan Dagangan berupa pertambangan mineral logam berupa emas, seluruh wilayah kabupaten Madiun berupa pertambangan mineral bukan logam serta pertambangan batuan berupa tanah urug dan sirtu. Potensi Panas Bumi di Desa Mendak Kecamatan Dagangan dan Desa Klangon Kecamatan Saradan, Sedangkan dalam proses eksplorasi adalah panas bumi berada di Desa Mendak Kecamatan Dagangan.

2.1.1.6.1.7. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Madiun merupakan kebutuhan pembangunan wilayah mengingat peran strategis sektor industri dalam meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan penyerapan tenaga kerja. Pengembangan kawasan industri didasarkan pada aspek ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, permintaan pasar, ketersediaan infrastruktur dan perkembangan perekonomian regional.

Industri di Kabupaten Madiun sebagian besar berupa industri kecil dan sedang. Lokasi industri pada umumnya berkembang ke arah selatan tepatnya di Kecamatan Geger dan Wungu yang berbatasan langsung dengan Kota Madiun. Industri yang ada di Kabupaten Madiun antara lain Pabrik Gula Pagotan, *Chemical* Industri, Pabrik Gula Kanigoro yang semuanya

berada di Kecamatan Geger dan Wungu. Selain ke arah selatan, industri dan pergudangan juga tumbuh dan berkembang ke arah Timur karena pengaruh dari Jalan arteri primer Surabaya–Madiun.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan, Kawasan Bromo–Tengger–Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kawasan Peruntukkan Industri di Kabupaten Madiun termasuk dalam program percepatan dalam pengembangan kawasan industri. Luas kawasan industri ini direncanakan seluas ±431 Ha yang berada di Kecamatan Pilangkenceng dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebelah Barat Exit Toll Caruban.

2.1.1.6.1.8. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Sektor pariwisata di Kabupaten Madiun sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan karena memiliki obyek wisata yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Kabupaten Madiun. Potensi pariwisata di Kabupaten Madiun meliputi, pariwisata di bidang agro yang terletak di kawasan Gunung Wilis dengan perkebunan kopi dan kakao, pariwisata seni budaya dengan kesenian dongkrek. Untuk pariwisata sejarah dengan Monumen Kresek yang merupakan saksi sejarah pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, dan pariwisata pelestarian lingkungan dan pembenihan berupa waduk dan persemaian kayu jati.

Berdasarkan Peraturan Daerah no. 14 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Madiun, untuk perwilayahan pariwisata di Kabupaten Madiun yaitu:

- (1) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) Caruban Raya, dengan arahan:
 - a. Tema produk pariwisata adalah pariwisata budaya tradisi dan pariwisata kreatif;
 - b. Mencakup wilayah Kecamatan Mejayan, Madiun, Wonoasri, Balerejo, Jiwan, dan Sawahan;
 - c. Sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya budaya tradisi dan industri kreatif sebagai produk pariwisata kreatif berdaya saing internasional;
 - d. Target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus olahraga tradisional, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus olahraga tradisional.



- (2) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Wilis dan sekitarnya, dengan arahan:
- a. Tema produk pariwisata adalah pariwisata sejarah dan wisata agro;
 - b. Mencakup wilayah Kecamatan Kare, Gemarang, Wungu, Dagangan, Dolopo, Kebonsari, dan Geger;
 - c. Sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk pariwisata yang memadukan upaya perlindungan terhadap peninggalan sejarah masa lalu dengan pengembangan sumber daya alam berbasis agro sebagai produk pariwisata berkelanjutan dan berdaya saing dunia;
 - d. Target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus sejarah, cagar budaya, dan pendidikan agro, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus sejarah dan cagar budaya.
- (3) Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) Kawasan Lereng Gunung Pandan dan sekitarnya, dengan arahan:
- a. Tema produk pariwisata adalah ekowisata alam dan warisan budaya;
 - b. Mencakup wilayah Kecamatan Saradan dan Pilangkenceng;
 - c. Sasaran pengembangan kawasan adalah terwujudnya produk ekowisata alam dan budaya berdaya saing internasional;
 - d. Target utama pasar wisatawan adalah wisatawan nusantara segmen keluarga, pelajar, mahasiswa, dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya, serta wisatawan mancanegara segmen keluarga dan minat khusus keanekaragaman hayati dan cagar budaya.

Berdasarkan SK Bupati Madiun No. 188.45/441/KPTS/402.013/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Madiun No. 188.45/396A/KPTS/402.013/2016 tentang Destinasi Wisata Kabupaten Madiun, dapat disajikan obyek wisata di Kabupaten Madiun, antara lain:

Tabel 2.8
Destinasi Wisata di Kabupaten Madiun

NO	DESTINASI WISATA	LOKASI
A. WISATA ALAM		
1	Wana Wisata Grape	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Dungus Forest Park	Kel. Wungu, Kecamatan Wungu
3	Air Terjun Seweru/Slampir	Desa Kare, Kecamatan Kare
4	Agro Wisata Perkebunan Kopi Kandangan	Desa Kare, Kecamatan Kare



NO	DESTINASI WISATA	LOKASI
5	Wana Wisata Tambak Lare	Desa Kare, Kecamatan Kare
6	Wana Wisata Nongko Ijo	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Air Terjun Krecekan Denu	Desa Kepel, Kecamatan Kare
8	Air Terjun Banyu Lawe	Desa Kepel, Kecamatan Kare
9	Gligi Forest Park	Desa Kepel, Kecamatan Kare
10	Air Terjun Selo Aji	Desa Randu Alas, Kecamatan Kare
11	Air Terjun Coban Kromo	Desa Bodag, Kecamatan Kare
12	Wana Wisata Selo Gedong	Desa Bodag, Kecamatan Kare
13	Air Terjun Panguripan	Desa Cermo, Kecamatan Kare
14	Hutan Pinus Hargo Wilis Poleng	Desa Cermo, Kecamatan Kare
15	Wana Wisata Watu Rumpuk	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
16	Air Terjun Jambu	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
17	Pesanggrahan	Desa Segulung, Kecamatan Dagangan
18	Bukit Asmara Puyangan	Desa Durenan, Kecamatan Saradan
19	Air Terjun Coban Drajat	Desa Durenan, Kecamatan Gemarang
20	Air Terjun Jomblang Tengah	Desa Sidomulto, Kecamatan Wonoasri
B. WISATA BUATAN		
1	Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 Madiun	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Madiun Umbul Square	Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo
3	Waduk Bening Widas	Desa Pajaran, Kecamatan Saradan
4	Waduk Notopuro	Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng
5	Waduk Saradan	Desa Sugihwaras, Kecamatan Saradan
6	Waduk Kedung Brubus	Desa Bulu, Kecamatan Pilangkenceng
7	Waduk Dawuhan	Desa Wonoasri, Kecamatan Wonoasri
8	Pesona Kali Wungu	Kelurahan Wungu, Kecamatan Wungu
C. DESA WISATA		
1	Desa Wisata Kresek	Desa Kresek, Kecamatan Wungu
2	Desa Wisata Brumbun	Desa Brumbun, Kecamatan Wungu
3	Desa Wisata Nglambangan	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Desa Wisata Batok	Desa Batok, Kecamatan Gemarang
5	Desa Wisata Durenan	Desa Durenan, Kecamatan Gemarang
6	Desa Wisata Gunungsari	Desa Gunungsari, Kecamatan Madiun
7	Desa Wisata Segulung	Desa Segulung, Kecamatan Dagangan
8	Desa Wisata Mendak	Desa Mendak, Kecamatan Dagangan
9	Desa Wisata Kare	Desa Kare, Kecamatan Kare
10	Desa Wisata Candimulyo	Desa Candimulyo, Kecamatan Dolopo
11	Desa Wisata Singgahan	Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari
12	Desa Wisata Tambakmas	Desa Tambakmas, Kecamatan Kebonsari
13	Desa Wisata Kaliabu	Desa Kaliabu, Kecamatan Mejayan
D. WISATA SEJARAH		
1	Candi Wonorejo	Desa Wonorejo, Kecamatan Mejayan
2	Prasasti Mruwak	Desa Mruwak, Kecamatan Dagangan
3	Prasasti Klagenserut	Desa Klagenserut, Kecamatan Jiwan
4	Prasasti Bibrik	Desa Bibrik, Kecamatan Jiwan
5	Situs Ngurawan	Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo
E. WISATA RELIGI		
1	Makam KH. Basyariah	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
2	Masjid Agung dan Makam Desa Sewulan	Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan
3	Makam/Punden Lambang Kuning	Desa Nglambangan, Kecamatan Wungu
4	Makam Kuncen	Desa Kuncen, Kecamatan Mejayan
5	Masjid Quba	Kecamatan Mejayan
6	Makam Syekh Maulana Abdullah	Desa Bodag, Kecamatan Kare
F. WISATA BUDAYA		
1	Sanggara Kesenian Dongkrek	Desa Sumberbening , Kecamatan Balerejo, Kelurahan Pandean, Kecamatan Mejayan
2	Padepokan Seni Kirun	Desa Bagi, Kecamatan Madiun
3	SEPASMA	Kecamatan Mejayan

NO	DESTINASI WISATA	LOKASI
4	Perguruan Ilmu Sejati	Desa Sukorejo, Kecamatan Saradan
5	Padepokan IKS (Ikatan Kera Sakti)	Desa Buduran, Kecamatan Wonoasri
6	Padepokan Pencak Silat Pandan Alas	Desa Kare, Kecamatan Kare
7	Larung Sesaji Wadung Bening Widas	Desa Pajaran, Kecamatan Saradan
8	Kurasan Sumber Belerang di Umbul	Desa Glonggong, Kecamatan Dolopo
G. RENCANA RUANG TERBUKA HIJAU KABUPATEN MADIUN		
1	Lapangan Sugihwaras	Kecamatan Saradan
2	Lapangan Ngale	Kecamatan Pilangkenceng
3	Lapangan Buduran	Kecamatan Wonoasri
4	Lapangan Simo	Kecamatan Balerejo
5	Lapangan Kelurahan Nglames	Kecamatan Madiun
6	Lapangan Sawahan	Kecamatan Sawahan
7	Lapangan Wayut	Kecamatan Jiwan
8	Lapangan Purworejo	Kecamatan Geger
9	Lapangan Sewulan	Kecamatan Dagangan
10	Lapangan Balerejo	Kecamatan Balerejo
11	Lapangan Mojopurno	Kecamatan Wungu
12	Lapangan Batok Dusun Kebatu	Kecamatan Gemarang
13	RTH Seweru Kare	Kecamatan Kare
14	Lapangan Mlilir	Kecamatan Dolopo

Sumber: Disparpora Kabupaten Madiun, Tahun 2019 (SK Destinasi Wisata 2019)

Sektor pariwisata di Kabupaten Madiun sebenarnya cukup berpotensi untuk dikembangkan dan mempunyai kontribusi terhadap PAD sebesar Rp. 3.792.091.161,59. Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara berkisar 1 sampai dengan 2 hari. Jumlah wisatawan mancanegara yang tinggal berjumlah 8 orang.

2.1.1.6.1.9. Kawasan Peruntukan Permukiman

Tujuan pengembangan perumahan dan permukiman di Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

- Mendistribusikan perkembangan fisik, kependudukan dan keramaian Kabupaten Madiun ke arah selatan, barat dan utara;
- Menyediakan lahan untuk memenuhi kebutuhan akan permukiman di Kabupaten Madiun;
- Menciptakan generator bagi Kabupaten Madiun, khususnya pada bagian selatan, barat dan utara.

Berdasarkan konsep tersebut, maka permukiman di Kabupaten Madiun dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Permukiman perkotaan dan Permukiman perdesaan dengan luas rencana pengembangan ±13.861 ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

2.1.1.6.1.10. Kawasan Peruntukan Lainnya

Pemanfaatan kawasan peruntukan lainnya difokuskan pada pemanfaatan kawasan peternakan. Pada saat ini di wilayah Kabupaten Madiun mulai tumbuh beberapa kawasan peternakan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, saat ini terjadi aglomerasi pengembangan ternak ayam pada suatu lokasi seperti di kecamatan Wungu tepatnya di Desa

Bantengan. Kawasan peternakan dalam skala besar diarahkan di Kecamatan Wungu seluas ±16 ha dan Kecamatan Mejayan seluas ±16 ha. Pengembangan peternakan yang dilakukan setiap keluarga diarahkan di semua kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2.1.1.6.2. KAWASAN LINDUNG

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan mempunyai nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan lindung yang ditetapkan di Kabupaten Madiun adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan lindung yang terdapat di bagian selatan dan sebagian di utara meliputi Kecamatan Dagangan, Kare, Gemarang, dan Saradan dengan luas mencapai 4.938,7 ha.

Permasalahan yang muncul saat ini adalah adanya perubahan alih fungsi lahan dari hutan lindung menjadi lahan budidaya pada beberapa titik. Cara menjaga kawasan lindung agar tetap lestari diperlukan pengelolaan seperti berikut:

1. Membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
2. Melarang alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
3. Membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
4. Melakukan optimasi pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis kawasan lindung melalui pemanfaatan untuk obyek wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup;
5. Mengembalikan kegiatan yang mendorong pengembangan fungsi lindung;
6. Meningkatkan keanekaragaman hayati kawasan lindung;
7. Mengendalikan kawasan sekitar secara ketat; dan
8. Menjaga keseimbangan fungsi ekosistem dan lingkungan di bagian barat Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya untuk rencana pola ruang kawasan lindung di Kabupaten Madiun meliputi, kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung geologi.

2.1.1.6.2.1. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung di Kabupaten Madiun seluas ±5.314 ha, yang tersebar di kecamatan Kare, Gemarang, Dagangan, dan Saradan.

2.1.1.6.2.2. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan dibawahnya

Kawasan ini meliputi kawasan resapan air di Kabupaten Madiun. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya yaitu kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah. Tujuan penetapan kawasan ini adalah untuk menjaga fungsi kawasan tersebut agar tetap berfungsi dengan optimal. Luasan kawasan ini di Kabupaten Madiun adalah seluas ±70.887 ha.

2.1.1.6.2.3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/ waduk, dan kawasan sekitar sumber mata air. Berikut rinciannya:

a. Kawasan Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan-kiri sungai, termasuk sungai buatan, kanal, atau saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Tujuan ditetapkan kawasan sempadan sungai adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai. Adapun luasan kawasan sempadan sungai yang ada di Kabupaten Madiun adalah ±2.573 ha meliputi Kali Madiun, Kali Asin, Kali Jerohan, Kali Brangkal, Kali Catur, Kali Bunting, Kali Glonggong, Sungai Klepek, Kali Sareng, Kali Batil, Sungai Gondang, Sungai Semawur, Kali Sono, Kali Piring, Kali Bribis, Kali Blodro, Kali Kentar, Kali Kembang, Kali Abu, Kali Gondang, Kali Mundu, Kali Sukoliman, Kali Uluh, Kali Sarangan, Kali Jumok, Kali Padas, Kali Lengkowo, Sungai Kedungbrubus, Sungai Ngasinan, Sungai Notopuro, Sungai Gede, Sungai Tangkil, Sungai Bruwok, Sungai Nampu, Sungai Sukorejo, Kali Palem, Sungai Sumber Agung, Kali Gendo, Kali Ulomati, Kali Lemahbang, dan Sungai Saradan/ Blangambi.

b. Kawasan Sekitar Danau/ Waduk/ Embung

Kawasan sekitar danau atau waduk merupakan kawasan tertentu di sekeliling danau atau waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau atau waduk. Adapun kriteria penetapan sempadan danau/ waduk adalah daratan sepanjang tepian danau atau waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/ waduk antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Penetapan sempadan danau/ waduk mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/ waduk sebagai potensi sumberdaya air permukaan. Sempadan danau/ waduk yang direncanakan di Kabupaten Madiun antara lain: Sempadan Waduk Widas, Waduk Saradan dan Notopuro, Dawuhan dan Kedungbrubus serta Embung Kresek.

c. Kawasan Sekitar Mata Air

Mata air yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak. Berdasarkan data dari Dinas PU Pengairan Kabupaten Madiun, mata air yang ada di Kabupaten Madiun sebanyak 114 mata air yang sudah dimanfaatkan untuk air irigasi dan air minum. Dari 114 mata air yang ada di Kabupaten Madiun, mata air dengan debit maksimum 100 liter/ detik antara lain Mata Air Dilem di Desa Kare Kecamatan Kare, Mata Air Sambong di Desa Batok Kecamatan Kare, Mata Air Sekebo di Desa Randualas Kecamatan Kare, Mata Air Jirak di Desa Tawangrejo Kecamatan Kare dan Mata Air Gebangarum di Desa Plumpungrejo Kecamatan Wonoasri, dimana mata air tersebut dimanfaatkan untuk irigasi.

2.1.1.6.2.4. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya adalah kawasan dimana lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bantuan geologi alami yang telah ada. Adapun tujuan perlindungan adalah melindungi kekayaan hasil budaya bangsa berupa peninggalan sejarah, bangunan astrologi, monumen nasional, keragaman bentuk geologi yang berguna untuk pengembangan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun bencana. Di Kabupaten Madiun terdapat cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) bagian yaitu lingkungan non-bangunan, lingkungan bangunan non-gedung, lingkungan bangunan gedung dan halamannya serta kebun raya. Kabupaten Madiun yang dikategorikan sebagai kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

a. Lingkungan Non Bangunan

Di Kabupaten Madiun dijumpai kawasan lingkungan non-bangunan sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- Monumen Kresek/ Madiun Affair 48
- Peninggalan Sejarah Nglambangan

b. Lingkungan Bangunan Gedung

Di Kabupaten Madiun lingkungan bangunan non-gedung yang berfungsi sebagai cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah:

- a) Makam Kuncen
- b) Situs Sewulan
- c) Makam Mbah Moch Bin Oemar dan Masjid Al Muttaqin
- d) Makam Patih Kutho Miring Dusun Gentong Desa Putat Kecamatan Geger dan Makam Ki Ageng Rendeng Desa Kincangwetan Kecamatan Jiwan
- e) Komplek Madiun Lama (Dusun Ngrawan Desa Dolopo Kecamatan Dolopo)

c. Lingkungan Bangunan Gedung dan Halamannya

Kawasan lingkungan bangunan gedung dan halamannya merupakan cagar budaya yang bersifat pelestarian terhadap bangunan kuno peninggalan bersejarah yang harus dilestarikan sebagai ciri cagar budaya setempat. Bangunan gedung cagar budaya di Jawa Timur meliputi Pabrik Gula Pagotan dan Kanigoro.

2.1.1.6.2.5. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam diantaranya, rawan banjir dan rawan kebakaran.

2.1.1.6.2.6. Kawasan Lindung Geologi

Kabupaten Madiun merupakan wilayah rawan bencana alam geologi diantaranya, rawan letusan gunung berapi, rawan gempa, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

2.1.1.6.2.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

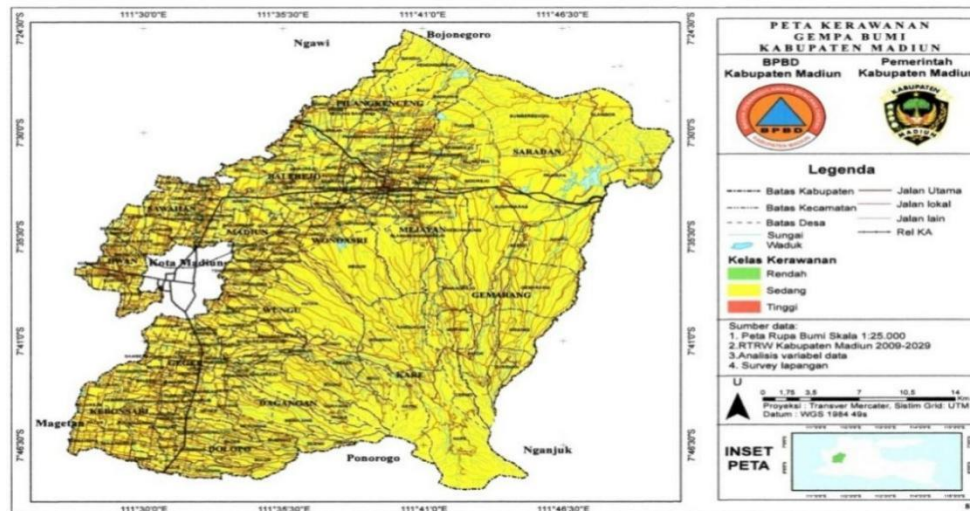
Kawasan pertahanan dan keamanan Kabupaten Madiun merupakan kawasan militer dengan luas 94,3 Ha. Kawasan militer tersebut yaitu berupa Gudang Amunisi Divisi Peralatan TNI AD yang berlokasi di Kecamatan Saradan dan Pangkalan Udara Iswahyudi yang berada di Kecamatan Jiwan.

2.1.2 WILAYAH RAWAN BENCANA

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi:

1. Kawasan Rawan Gerakan Tanah

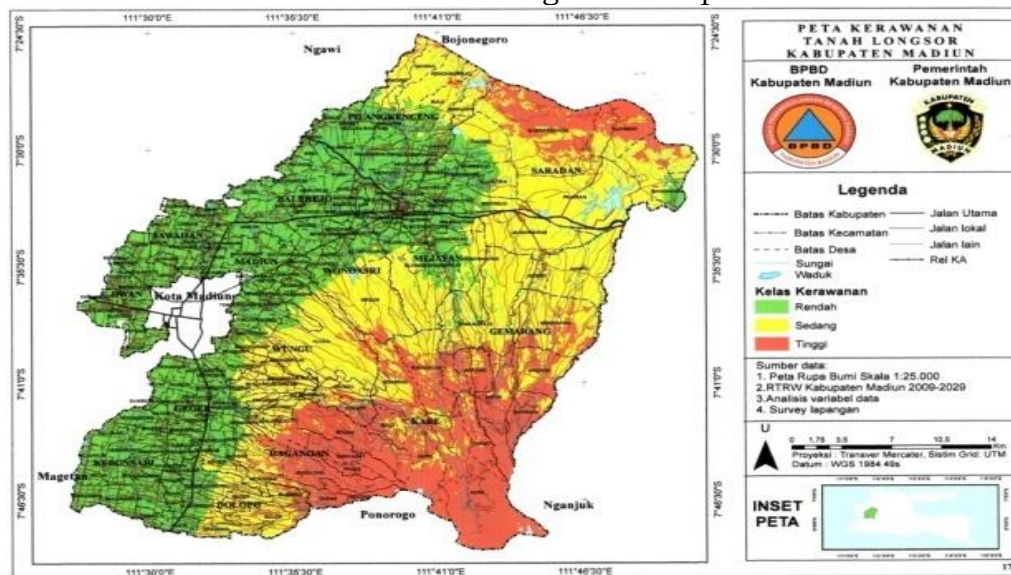
Gambar 2.2
Peta Kerawanan Gempa Bumi Kabupaten Madiun



Sumber : BPBD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah bagian utara Kecamatan Saradan. Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa guncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya-timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral).

Gambar 2.3
Peta Kerawanan Tanah Longsor Kabupaten Madiun



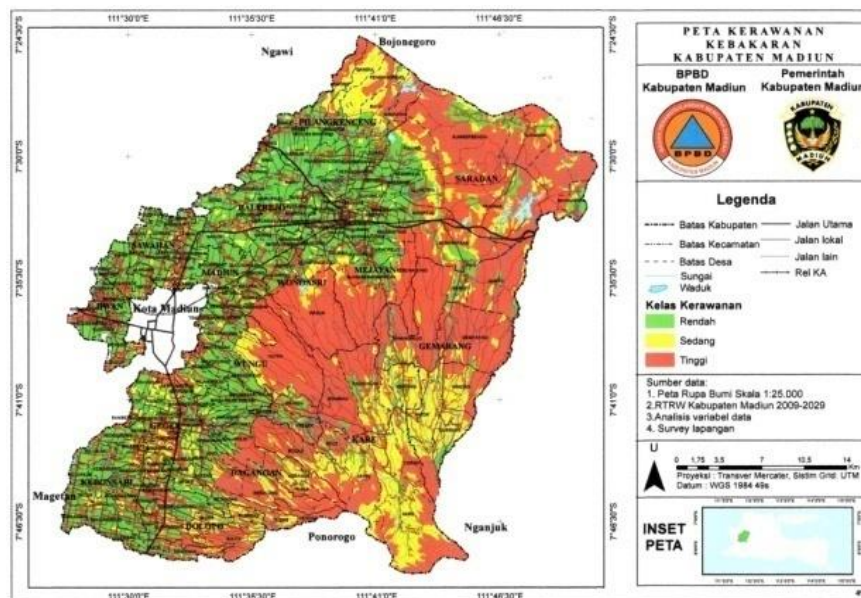
Sumber : BPBD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerenghan 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerenghan wilayah di atas 25%. Kondisi lereng demikian memiliki potensi ancaman gerakan tanah (tanah longsor) cukup tinggi. Beberapa wilayah yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri.

2. Kawasan Rawan Kebakaran

Bencana kebakaran tidak terlepas dari kondisi kerawanan kekeringan di Kabupaten Madiun. Sebagian dari kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu: Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil; dan Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

Gambar 2.4
Peta Kerawanan Kebakaran Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai ±40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

3. Kawasan Rawan Banjir

Di Kabupaten Madiun terdapat 2 (dua) kriteria genangan di daerah sekitar Kali Madiun yang sering mengalami banjir. 2 (dua) kriteria tersebut adalah:

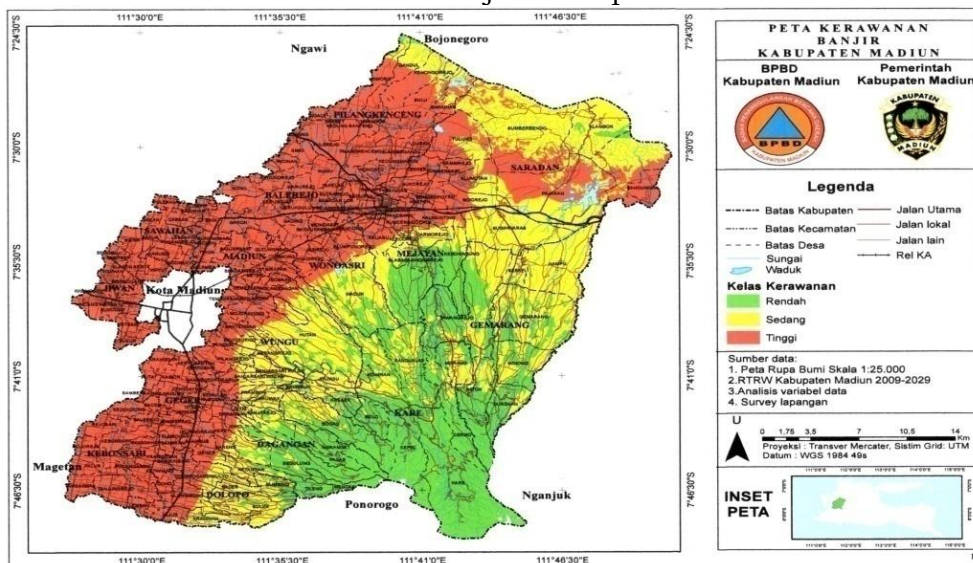
a. Genangan banjir akibat hujan lokal

Genangan banjir akibat hujan lokal ini sering terjadi di sekitar anak sungai yang disebabkan oleh tingginya curah hujan lokal, yang tidak dapat di alirkan secara gravitasi ke anak sungai atau ke Kali Madiun karena tingginya permukaan air di anak sungai tersebut.

b. Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo

Genangan banjir akibat luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo ini sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati Perkotaan Mejayan.

Gambar 2.5
Peta Kerawanan Banjir Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

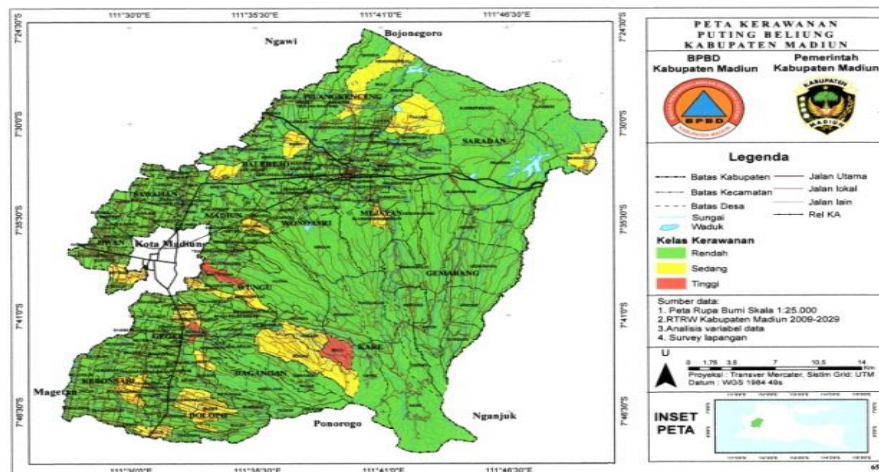
Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo.

Selain itu kondisi klimatologi Kabupaten Madiun juga mempengaruhi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober. Berdasarkan data-data kejadian bencana di Kabupaten Madiun, bencana banjir sebagian besar terjadi pada saat musim hujan di sekitar awal tahun. Beberapa daerah yang rawan bencana banjir adalah Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Wungu, dan Kecamatan Madiun. Banjir di Kabupaten Madiun selain diakibatkan oleh hujan lokal dengan intensitas curah hujan yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo. Genangan banjir sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati kawasan perkotaan Mejayan. Banjir besar yang pernah terjadi pada tahun 2018 menggenangi beberapa kecamatan meliputi Balerejo, Madiun, Sawahan, Jiwan, Kebonsari dan Geger.

4. Kawasan Rawan Puting Beliung

Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat 61 kejadian bencana Angin puting beliung.

Gambar 2.6
Peta Kerawanan Puting Beliung Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.1.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG

2.1.3.1 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan Hidup

2.1.3.1.1. Daya Dukung Air Permukaan

Daya dukung air meliputi kapasitas lingkungan dalam mendukung penggunaan sumberdaya air di Kabupaten Madiun. Aspek pengukuran daya dukung air meliputi ketersediaan air dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) dipengaruhi oleh koefisien limpasan yang menginterpretasikan jumlah air limpasan yang dihasilkan oleh hujan di setiap jenis penggunaan lahan yang berbeda. Kebutuhan air diukur berdasarkan pada jumlah penduduk dan nilai kebutuhan air untuk kehidupan layak. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air di suatu wilayah. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika $SA > DA$, status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika $SA < DA$.

Tabel 2.9

Perhitungan Daya Dukung Air Kabupaten Madiun

Tahun	2019	2029
Ketersediaan (juta m3/tahun)	1264,26	1209,21
Luas Area (Ha)	101.086	101.086
Curah Hujan (mm/tahun)	1603	1603
Koefisien	0,78	0,75
Kebutuhan Air (juta m3/tahun)	622,5	817,6
Domestik (juta m3/tahun)	32,9	35,9
Non Domestik (juta m3/tahun)	9,9	10,8
Industri (juta m3/tahun)	1,2	6,8
Pertanian (juta m3/tahun)	574,9	760,4
Peternakan (juta m3/tahun)	3,6	3,7
Daya Dukung Air (DDA)	2,03	1,48
Keterangan	Surplus	Surplus
Kebutuhan Air (juta m3/tahun)	622,5	817,6

Sumber: Laporan KLHS Kabupaten Madiun 2018-2023

Hasil perhitungan daya dukung air permukaan di Kabupaten Madiun ditunjukkan pada tabel 2.10. Ketersediaan air diproyeksikan mengalami penurunan dari 1264,26 juta m³/tahun menjadi 1209,21 juta m³/tahun dengan asumsi rata-rata curah hujan yang relatif konstan. Perubahan penggunaan lahan dari 2019 sampai 2029 diperkirakan akan memberikan kontribusi terhadap perubahan koefisien cadangan air $\pm 0,03$ yang berdampak terhadap menurunnya ketersediaan air di Kabupaten Madiun. Disisi lain jumlah kebutuhan air memiliki trend meningkat dari 622,5 juta m³/tahun pada tahun 2019 menjadi 817,6 juta m³/tahun pada tahun 2029. Sektor Pertanian memiliki kontribusi paling besar terhadap meningkatnya kebutuhan air di Kabupaten Madiun. Hasil analisis daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara potensi ketersediaan air permukaan dan kebutuhan air. Secara lebih jelas daya dukung air permukaan Kabupaten Madiun dihitung sebagai berikut:

$$\text{DDA}_{2019} = 1264,26 \text{ juta} / 622,5 \text{ juta}$$

$$= 2,03$$

$$\text{DDA}_{2029} = 1209,21 \text{ juta} / 817,6 \text{ juta}$$

$$= 1,48$$

Keterangan :

DDA < 1 : Daya dukung air terlampaui atau buruk

DDA 1-3 : Daya dukung air bersyarat atau sedang

DDA > 3 : Daya dukung air aman atau baik

Nilai Daya Dukung Air (DDA) di Kabupaten Madiun Tahun 2019 berdasarkan perhitungan di atas yakni 2,03 yang berarti daya dukung airnya termasuk dalam kategori aman atau baik. Sedangkan pada tahun 2029 nilai DDA Kabupaten Madiun menjadi 1,48 yang juga masih dalam kategori aman atau baik. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun diproyeksikan maemiliki kondisi surplus air sampai tahun 2029 atau daya dukung air yang masih terkendali.

2.1.3.1.2. Daya Dukung Pangan

Status daya dukung pangan diperoleh melalui pendekatan kuantitatif untuk memetakannya serta menggunakan sistem grid skala ragam. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Konsep skala ragam (multiscale) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan



pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

Tabel 2.10
Perhitungan Daya Dukung Pangan Kabupaten Madiun

Tahun	Tingkat Produktivitas Lahan Sawah/ Supply Beras (ton/kap/th)	Keterangan	Daya Dukung Lahan (α)	Keterangan
2019	0.31	Surplus	2.47	Swasembada Pangan
2020	0.33	Surplus	2.66	Swasembada Pangan
2024	0.38	Surplus	3.00	Swasembada Pangan
2029	0.43	Surplus	3.44	Swasembada Pangan

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2020

Hasil perhitungan daya dukung pangan yang ditunjukkan pada Tabel 2.11 memperlihatkan bahwa secara umum penyediaan pangan di Kabupaten Madiun masih akan mengalami surplus serta memungkinkan adanya swasembada pangan sampai tahun 2029. Ketersediaan pangan hasil panen padi atau beras masih relatif lebih besar dibanding dengan kebutuhan konsumsi pangannya selama periode 2019-2029.

2.1.3.1.3 Daya Dukung Lahan Bangun

Daya dukung lahan bangun (DDLB) menunjukkan kapasitas atau kemampuan lahan untuk pengembangan lahan bangunan. DDLB Kabupaten Madiun secara umum termasuk dalam klasifikasi baik artinya pemanfaatan lahan terbangun masih cukup terbuka untuk perencanaan dan pembangunan daerah ke depan. Namun untuk masa yang akan datang, harus tetap memperhatikan karakteristik Kabupaten Madiun.

Tabel 2.11
Daya Dukung Lahan Bangun (DDLB) Kabupaten Madiun

Tahun	LB	LTp	LTb	Lw	α	DDLB	Keterangan
2019	14387	4316.105	18703	101086	0.7	5.4	Baik
2029	18707	5611.997	24319	101086	0.7	4.2	Baik

Sumber: Laporan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, 2020

Keterangan:

- LB : Luas lahan bangunan (Ha)
LTp : Luas lahan untuk infrastruktur (PermenPR No 11 Tahun 2008:30% luas lahan bangunan)
LTb : Luas lahan terbangun (LB+LTp)
Lw : Luas wilayah (Ha)
 α : Koefisien luas lahan terbangun maksimal (UU No. 26 Tahun 2017: 70%)
DDLB : Daya dukung lahan untuk bangunan $((\alpha \times Lw)/LTb)$

2.1.3.2 Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem

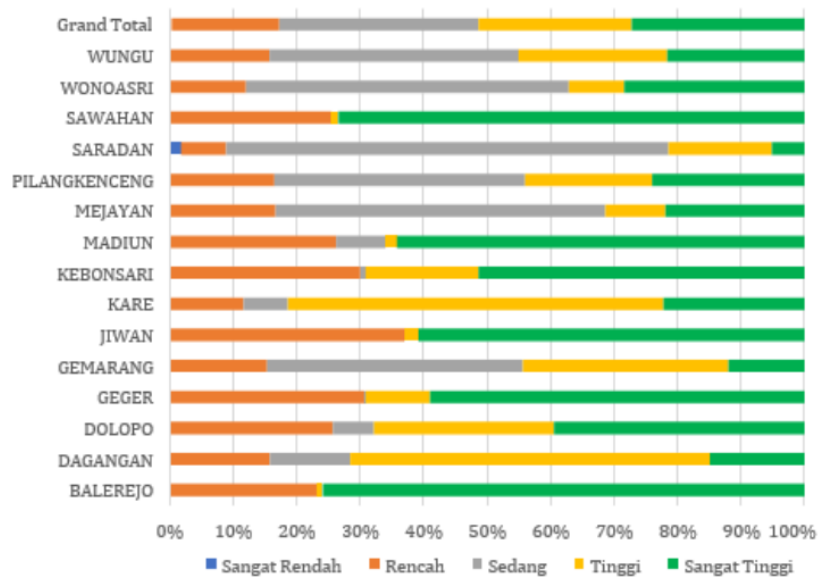
Kinerja layanan atau jasa ekosistem berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Pasal 13 ayat (1) huruf c merupakan ukuran perubahan kapasitas dan kualitas layanan ekosistem dari kondisi awal yang disepakati dengan kondisi aktual saat pemantauan. Jasa ekosistem terdiri dari 20 jenis yang terbagi atas empat kelompok utama yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa budaya (*cultural*), jasa pendukung (*supporting*) yang mewakili unsur daya dukung lingkungan dan jasa pengaturan (*regulating*) yang mewakili unsur daya tampung lingkungan. Berikut ini beberapa jasa ekosistem yang cukup penting bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Madiun.

2.1.3.2.1 Jasa Ekosistem Penyedia Pangan

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Gambar 3.23 menunjukkan distribusi serta luas jasa penyedia pangan di setiap Kecamatan di Kabupaten Madiun. Jasa ekosistem tersebut di bagi menjadi lima kelas yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Gambar 2.7

Distribusi Luas Kelas Jasa Ekosistem Penyedia Pangan



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

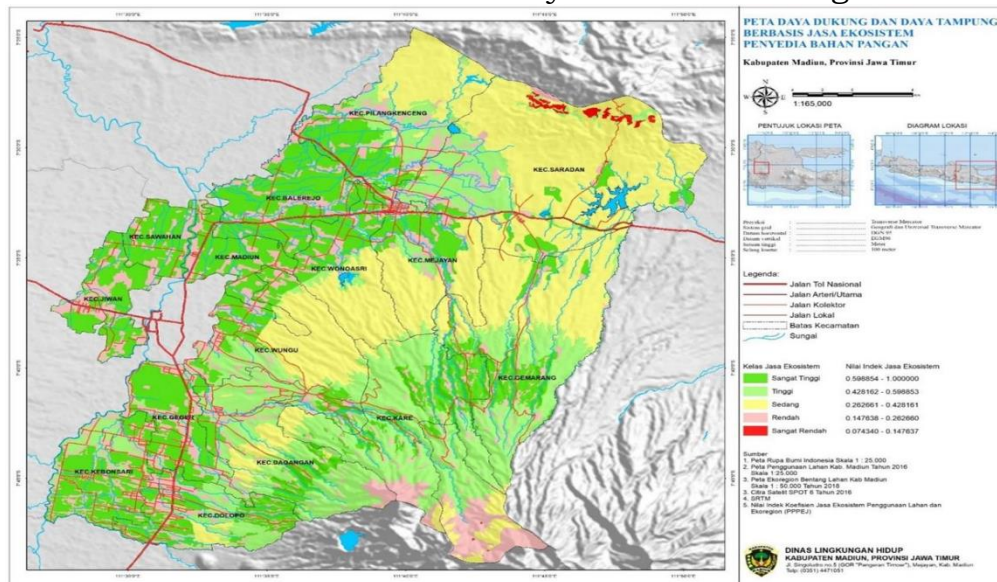
Jasa ekosistem penyedia pangan tinggi memberikan gambaran/cerminan bahwa wilayah atau daerah tersebut memiliki suatu ekosistem dengan daya dukung serta kemampuan dalam menyediakan pangan tinggi. Diamati dari grafik pada Gambar menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun didominasi oleh jasa ekosistem penyedia pangan dengan kelas sedang. Sekitar 350.456,57 ha atau 31,35% lahan merupakan kategori sedang dan sekitar 348,43 ha atau sekitar 0,31% termasuk dalam kategori sangat rendah. Kecamatan dengan luasan jasa ekosistem penyedia pangan terluas pada kelas sedang adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 13.229,5 ha. Sementara yang paling rendah adalah Kecamatan Sawahan dan Kecamatan Jiwan dengan luas lahan 0 ha. Sedangkan untuk kelas sangat rendah sendiri yang tertinggi luasannya adalah Kecamatan Saradan dengan luas 342,18 ha.

Kelas jasa ekosistem penyedia pangan di Kabupaten Madiun memang sangat dominan pada kategori sedang. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa distribusi jasa ekosistem penyedia pangan kategori sangat tinggi dan tinggi merupakan kelas jasa ekosistem yang dominan setelah kelas jasa ekosistem kategori sedang. Luas jasa ekosistem kategori sangat tinggi memiliki luas 30418,36 ha atau sekitar 27,21% dari luas wilayah sedangkan jasa ekosistem kategori tinggi memiliki luasan 27.007 ha atau sekitar 24,16%.

Luasnya lahan yang memiliki kategori jasa ekosistem dari sangat tinggi, tinggi dan sedang dipengaruhi luasnya tutupan lahan yang masih berupa sawah dan tegalan. Luasan kawasan pertanian sawah yang direncanakan

kurang lebih 31.594 ha (kurang lebih 31% dari luas wilayah (Kabupaten Madiun) dan dari rencana luas lahan wasah tersebut, yang ditetapkan sebagai kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan seluas kurang lebih 21.587,4 ha. Sedangkan luas lahan tegalan ialah 2.643 atau sekitar 2% dari luas wilayah Kabupaten Madiun.

Gambar 2.8
Peta Jasa Ekosistem Penyedia Bahan Pangan



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

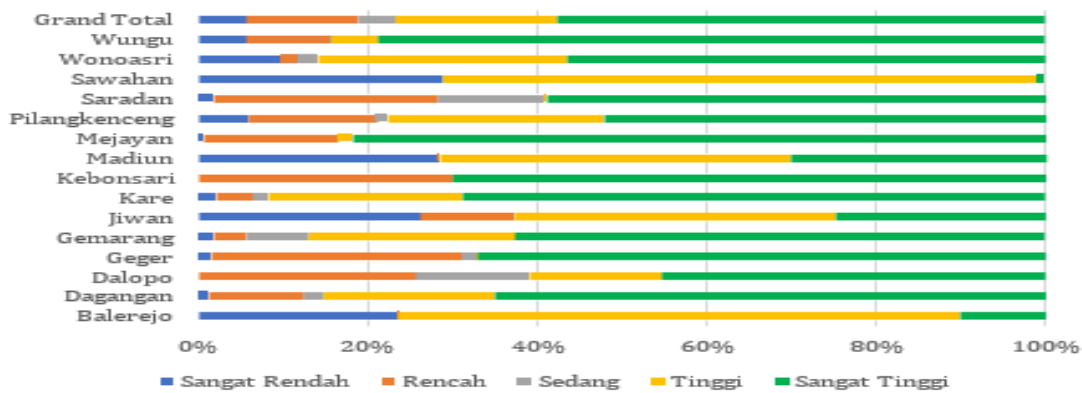
2.1.3.2.2. Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih

Air bersih merupakan salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari ekosistem. Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air bersih sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang lain seperti bentang lahan, vegetasi dan tutupan lahan.

Sama halnya dengan jasa ekosistem penyedia pangan, jasa ekosistem penyedia air bersih dikategorikan ke dalam lima kelas. Kelas dengan jasa ekosistem tinggi dan sangat tinggi menunjukkan kemampuan wilayah tersebut untuk menyediakan air bersih untuk penggunaan oleh mahluk hidup, hal ini juga dapat diartikan bahwa area dengan kelas jasa ekosistem penyedia air bersih tinggi mempunyai daya dukung tinggi untuk memenuhi kebutuhan air bersih manusia. Tabel dan gambar di bawah menunjukkan daya dukung lingkungan berbasis jasa ekosistem penyediaan air bersih di

Kabupaten Madiun. Sebesar 64.258,26 ha atau 57,48% dari luas wilayah Kabupaten Madiun diklasifikasikan sebagai area dengan jasa ekosistem penyedia air bersih sangat tinggi, sementara 21.313,77 ha (19,7%) diklasifikasikan sebagai area dominan dengan jasa ekosistem penyedia air bersih sedang.

Gambar 2.9
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Penyedia Air Bersih



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Dua klasifikasi ini mendominasi di Kabupaten Madiun yang menandakan bahwa daya dukung penyediaan air bersih di Kabupaten Madiun masih baik. Hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Madiun secara morfologi merupakan Dataran Fluvio Vulkanik. Kondisi hidrologi pada ekosistem dataran fluvio vulkanik umumnya mempunyai akuifer yang sangat baik. Hal tersebut karena material penyusunnya berupa material piroklastik dengan komposisi pasir, kerikil, dan kerakal yang merupakan komposisi material yang mampu mengalirkan air dengan baik (permeabilitas tinggi) sehingga membentuk akuifer yang sangat potensial. Ekosistem dataran fluvio vulkanik merupakan wilayah bertopografi berupa dataran, dengan morfologi atau relief datar hingga landai dengan kemiringan lereng secara umum 0-3% dan pada beberapa lokasi mempunyai kemiringan lereng 3-8%. Dukungan morfologi yang datar hingga cekung menjadikan satuan ini sebagai daerah cadangan air tanah sangat potensial sehingga membentuk reservoir air tanah atau cekungan hidrogeologi. Daya dukung penyedia air bersih yang masih baik juga dibuktikan dengan data prediksi jumlah kebutuhan air baku pada tahun 2029 di Kabupaten Madiun ialah 325,08 liter/detik, sedangkan kapasitas terpasang PDAM hingga tahun 2008 sebesar 383 liter/detik.

Artinya, hingga 10 tahun mendatang kapasitas yang tersedia masih mencukupi kebutuhan air di Kabupaten Madiun. Kecamatan dengan dengan luasan jasa ekosistem penyedia air bersih terluas pada kelas sangat tinggi

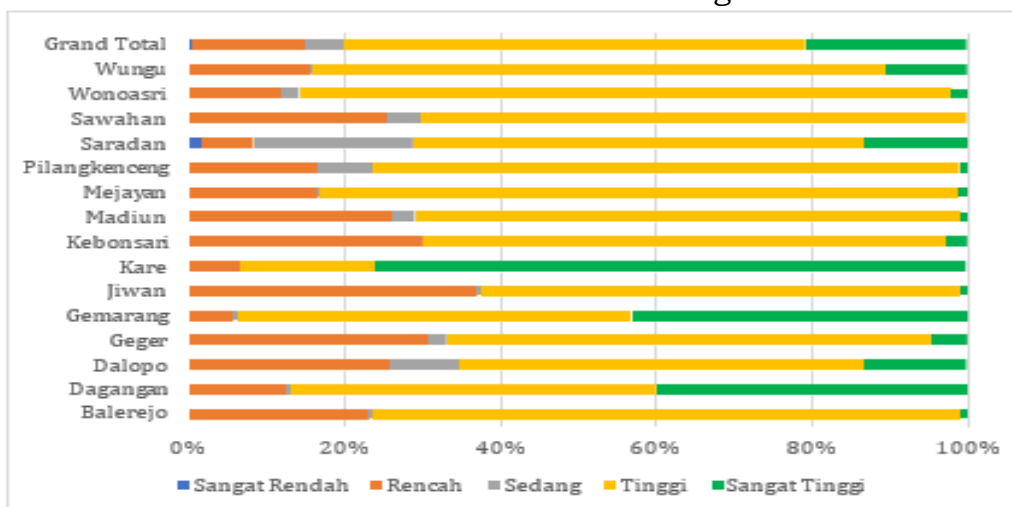
adalah Kecamatan Saradan dengan luas lahan 11173,99 ha, sedangkan pada kelas tinggi, Kecamatan Gemarang merupakan kecamatan dengan luas terbesar yaitu 4171,54 ha. Analisis jasa ekosistem penyedia air bersih yang dilakukan diharapkan mampu menjadi panduan bagi pengembangan daerah dan perlindungan lingkungan Kabupaten Madiun, dengan kondisi lingkungan yang terjaga serta didukung dengan keberadaan ruang terbuka hijau dan vegetasi yang terus ditingkatkan jumlahnya maka kebutuhan air di Kabupaten Madiun dapat dipenuhi di masa yang akan datang.

2.1.3.2.3 Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim

Jasa ekosistem Pengaturan (regulating) adalah jasa yang dimiliki oleh ekosistem untuk mengatur kondisi lingkungan. Terdapat delapan jenis jasa ekosistem pengatur, yang pertama dan akan dipaparkan dalam pembahasan ini adalah jasa ekosistem pengatur iklim. Secara alamiah ekosistem memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrem dan gelombang panas.

Untuk menentukan daya tampung yang dimiliki suatu kawasan dilakukanlah klasifikasi jasa ekosistem di wilayah tersebut menjadi lima kelas yaitu kelas jasa pengaturan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi. Klasifikasi ini dapat membantu untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan perencanaan wilayah, area dengan jasa ekosistem kelas tinggi dan sangat tinggi diartikan bahwa area tersebut memiliki kemampuan daya tampung lingkungan yang baik. Persebaran kelas jasa ekosistem di Kabupaten Madiun dipaparkan dalam gambar di bawah.

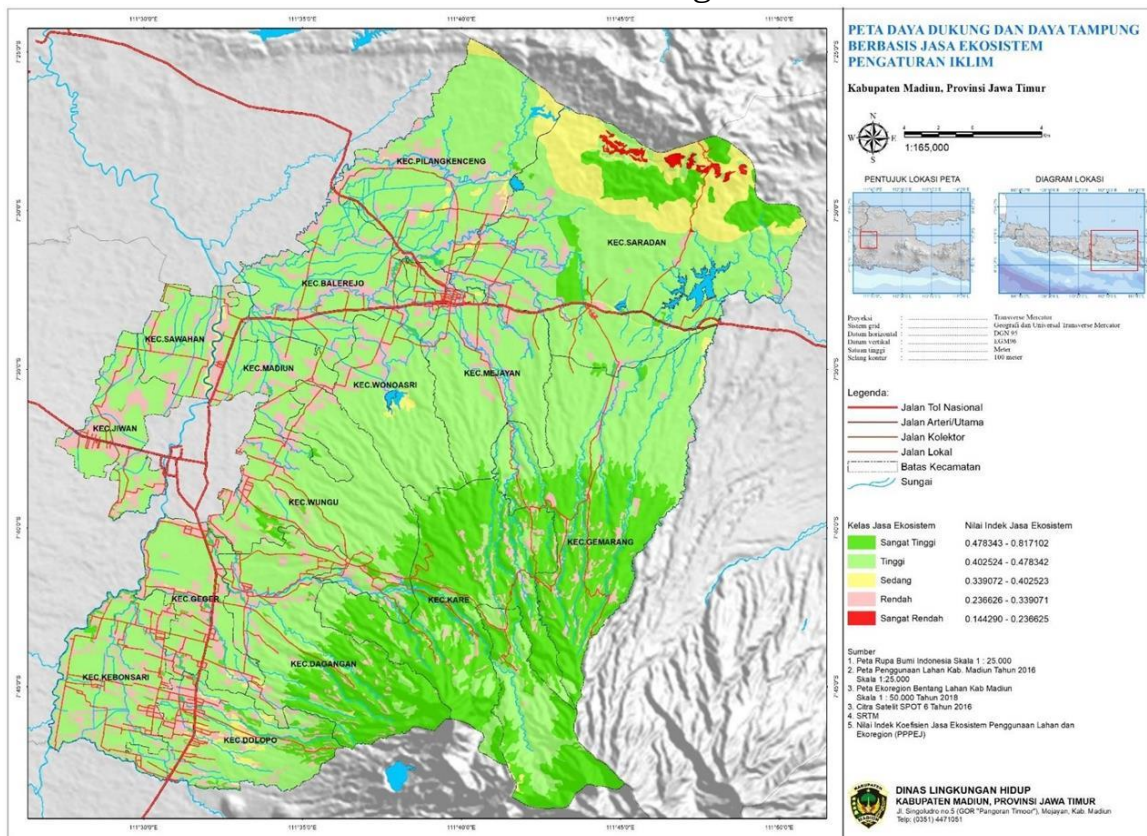
Gambar 2.10
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Secara umum perhitungan yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan iklim yang sangat baik. Luasan jasa ekosistem pengaturan iklim yang paling dominan berada pada kategori tinggi dan sangat tinggi dengan luas berturut turut yaitu 66.331,92 ha (59,33%) dan 23.027 ha (20,60%). Tingginya jasa pengaturan iklim di Kabupaten Madiun diasumsikan terjadi karena lahan di Kabupaten Madiun masih banyak berupa area bervegetasi seperti lahan pertanian, hutan, dan kebun/tegalan. Menurut data penggunaan lahan, area bervegetasi non bangunan di Kabupaten Madiun pada tahun 2016 ialah seluas 75.671,16 ha atau sekitar 67,7% dari luas wilayah Kabupaten Madiun. Area bervegetasi dengan luasan yang cukup akan mengurangi efek pemanasan akibat radiasi matahari karena kemampuannya dalam mengintersepsi, merefleksikan, dan mengabsorpsi serta mentransmisikan sinar matahari.

Gambar 2.11
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim



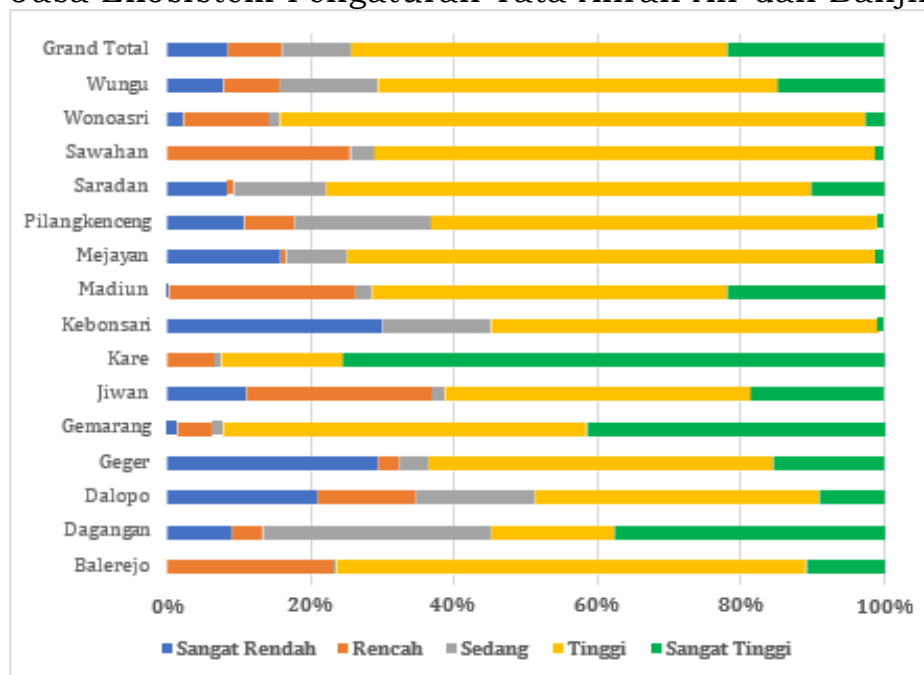
Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.3.2.4 Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir

Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir berkaitan dengan kemampuan serta infrastruktur alam dari suatu wilayah untuk menampung, mengelola dan menjalankan siklus hidrologi yang efektif sehingga air dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dengan optimal sekaligus meminimalisir bencana akibat luapan air. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir (R2) sangat dipengaruhi oleh Siklus hidrologi. Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi) dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

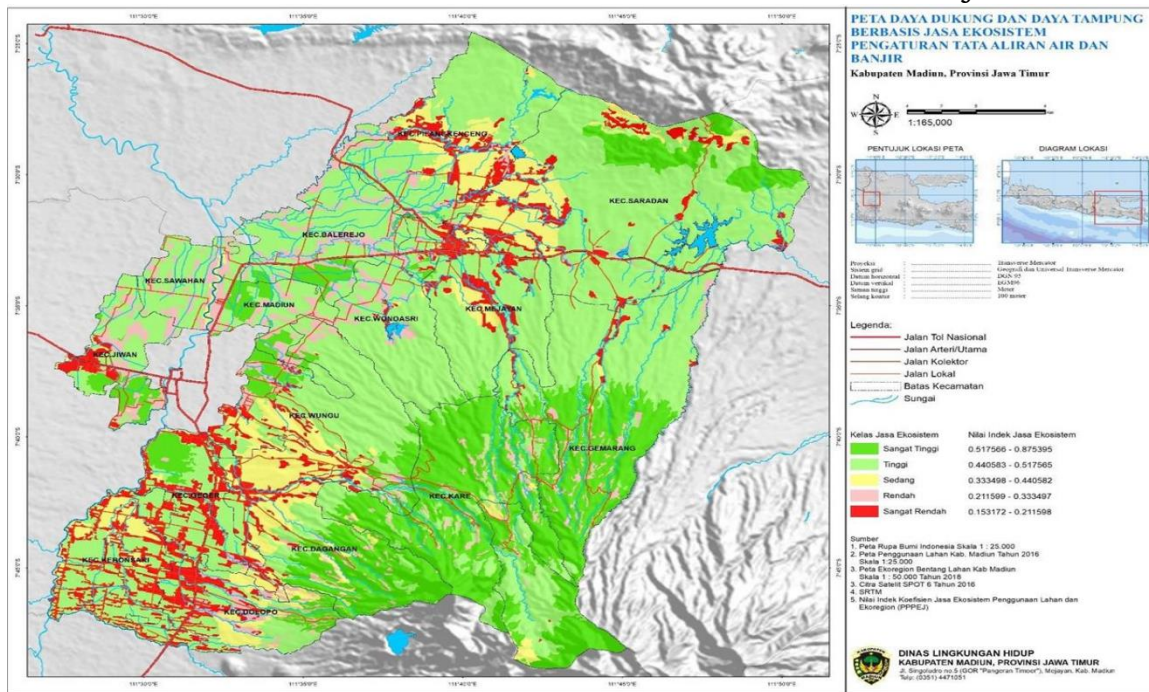
Jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun yang memiliki kelas tinggi yang relatif luas dan melebihi separuh luas wilayah secara keseluruhan yaitu 58.634,33 ha atau sekeitar 52,45%. Luas tertinggi kedua ialah pada kategori sangat tinggi dengan luasan 24.425,41 ha atau 21,85%. Tingginya luasan lahan yang memiliki pengaturan tata aliran air dan banjir di Kabupaten Madiun berkaitan dengan luas tutupan lahan yang terbangun yang memiliki luasan lebih rendah dibandingkan area non terbangun. Area terbangun memiliki luasan kurang lebih 36.121,15 ha atau hanya sekitar 32,3% dari luas wilayah keseluruhan. Persentase luasan lahan non terbangun yang lebih besar dan terdapatnya vegetasi memungkinkan vegetasi yang berada di kecamatan ini mampu mencegah run off berlebihan yang sering memicu terjadinya banjir karena kemampuan akar serta seresah yang mampu menyerap serta menyimpan air sehingga akan menghambat atau menunda bagian hujan ini mencapai limpasan permukaan dan memberi kesempatan bagi air untuk melakukan infiltrasi.

Gambar 2.12
Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Gambar 2.13
Peta Jasa Ekosistem Tata Aliran Air dan Banjir



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

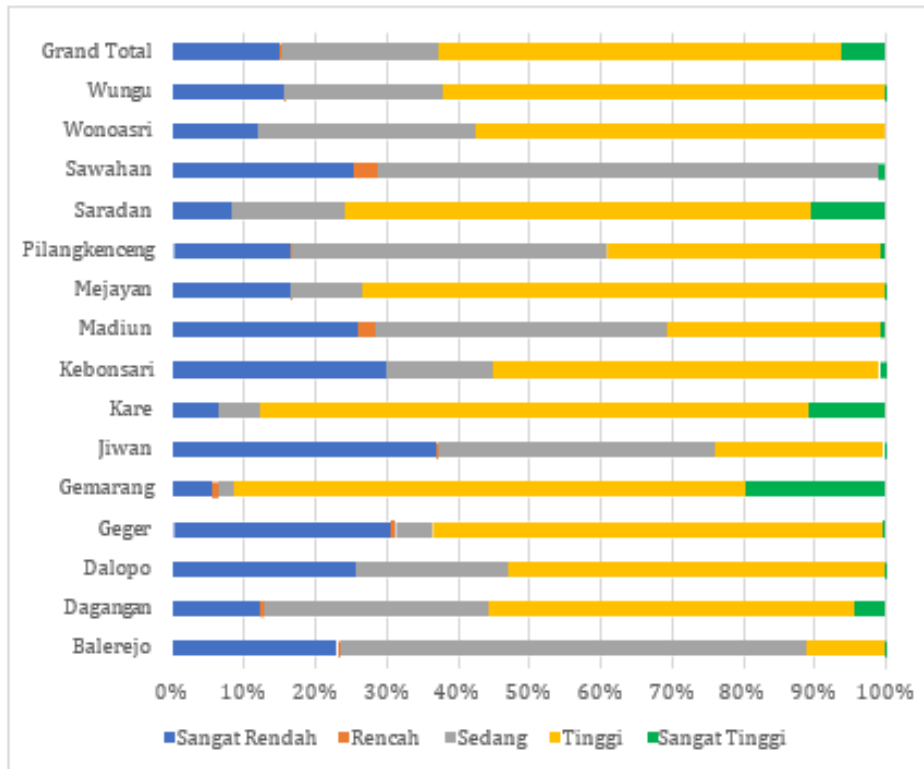
2.1.3.2.5. Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Ekosistem, didalamnya juga mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya bencana alam. Beberapa fungsi pencegahan bencana alam dari kebakaran lahan, erosi, abrasi, longsor, badai dan tsunami berhubungan erat dengan keberadaan liputan lahan dan bentuklahan.

Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh bencana erosi dan longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan bencana alam berkaitan dengan kemampuan suatu daerah melindungi dan memberikan upaya perlindungan dan melindungi sekitar dari bencana erosi, longsor, abrasi, dan tsunami. Sehingga perlu diperhatikan bahwa Gambar 2.14 yang merupakan peta jasa ekosistem pengaturan dan perlindungan bencana, bukanlah merupakan peta yang menunjukkan adanya kerawanan terhadap kejadian bencana. Namun peta yang menggambarkan kemampuan suatu ekosistem dalam mengatur pencegahan dan perlindungan terhadap suatu bencana alam. Jasa ekosistem pengaturan pengendalian dan pencegahan

bencana alam di Kabupaten Madiun memiliki klasifikasi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi.

Gambar 2.14
Distribusi Luasan Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana Alam



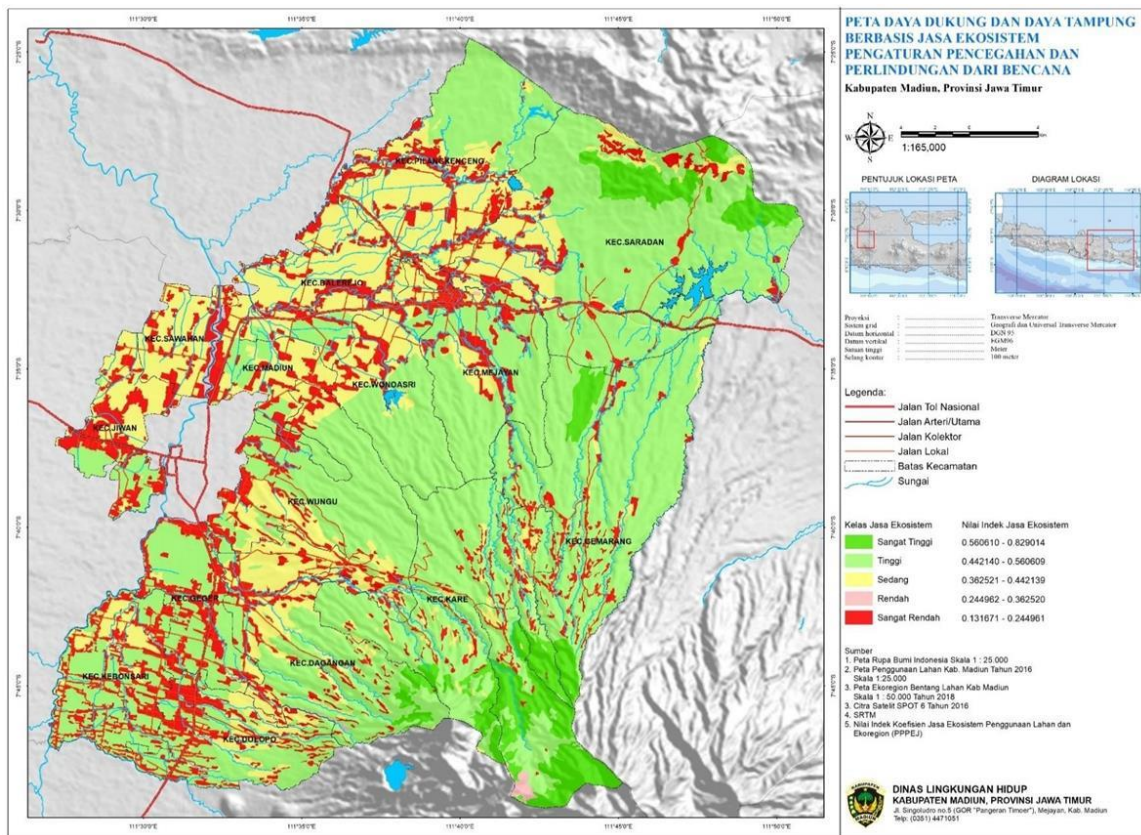
Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Secara umum, Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan pencegahan dan perlindungan bencana dalam kategori tinggi sampai sedang dengan lahan berturut-turut seluas 63.140,96 ha atau 58,48% dan 24.543,17 ha atau 21,95%. Diantara luas lahan dengan jasa ekosistem pengaturan dan pengendalian terhadap bencana yang tinggi, terdapat 15% lahan dengan fungsi jasa ekosistem yang sangat rendah atau setara dengan 16.771,47 ha. Terdapatnya fungsi jasa ekosistem kategori sangat rendah tersebut menandakan bahwa di Kabupaten Madiun masih mempunyai kerentanan bencana. Hal tersebut dikarenakan secara geologis, Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah utara Kecamatan Saradan.

Daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klangon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa guncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah

timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya – timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral). Selain itu secara hidrologi, Kabupaten Madiun juga memiliki kerentanan terhadap bencana banjir karena dilalui oleh 41 sungai sehingga memungkinkan terjadinya banjir luapan sungai terutama pada daerah-daerah yang terdapat di lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo. Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 tercatat 61 kejadian bencana Angin puting beliung.

Gambar 2.15
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlindungan Bencana



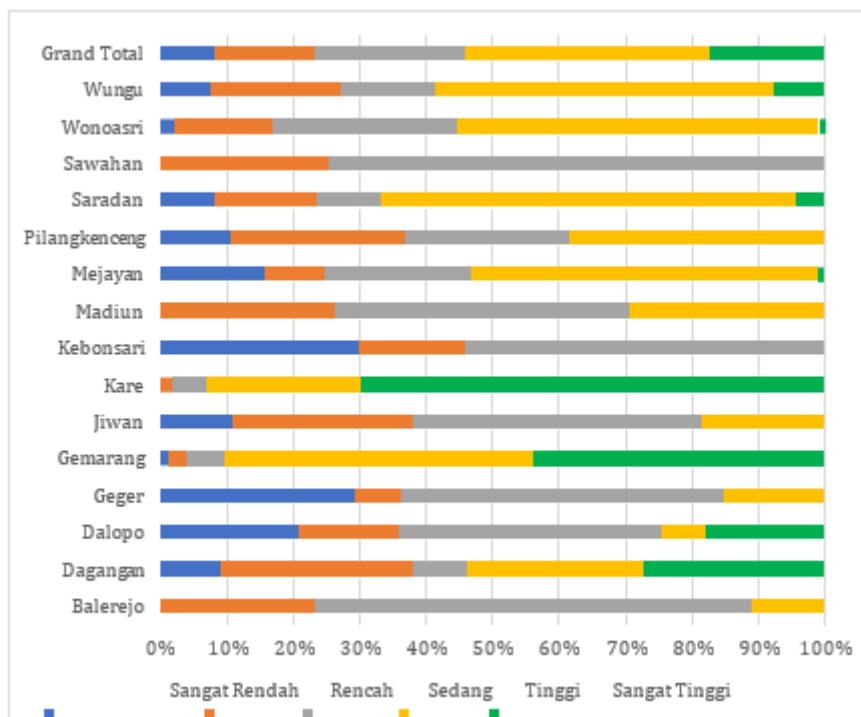
Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.3.2.6. Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara

Ekosistem memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat berupa pengaturan terhadap kualitas udara yang baik. Kualitas udara. Sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor - faktor meteorologis (angin, suhu, hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Jasa pemeliharaan kualitas udara pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi. Pada

gambar 2.16 dan gambar 2.17 dapat terlihat daerah-daerah di Kabupaten Madiun yang memiliki fungsi pengaturan terhadap kualitas udara yang terbagi kedalam lima kelas yakni Sangat Tinggi (hijau tua), Tinggi (hijau muda), sedang (kuning), rendah (merah muda) dan sangat rendah (merah tua).

Gambar 2.16
Distribusi Luas Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara



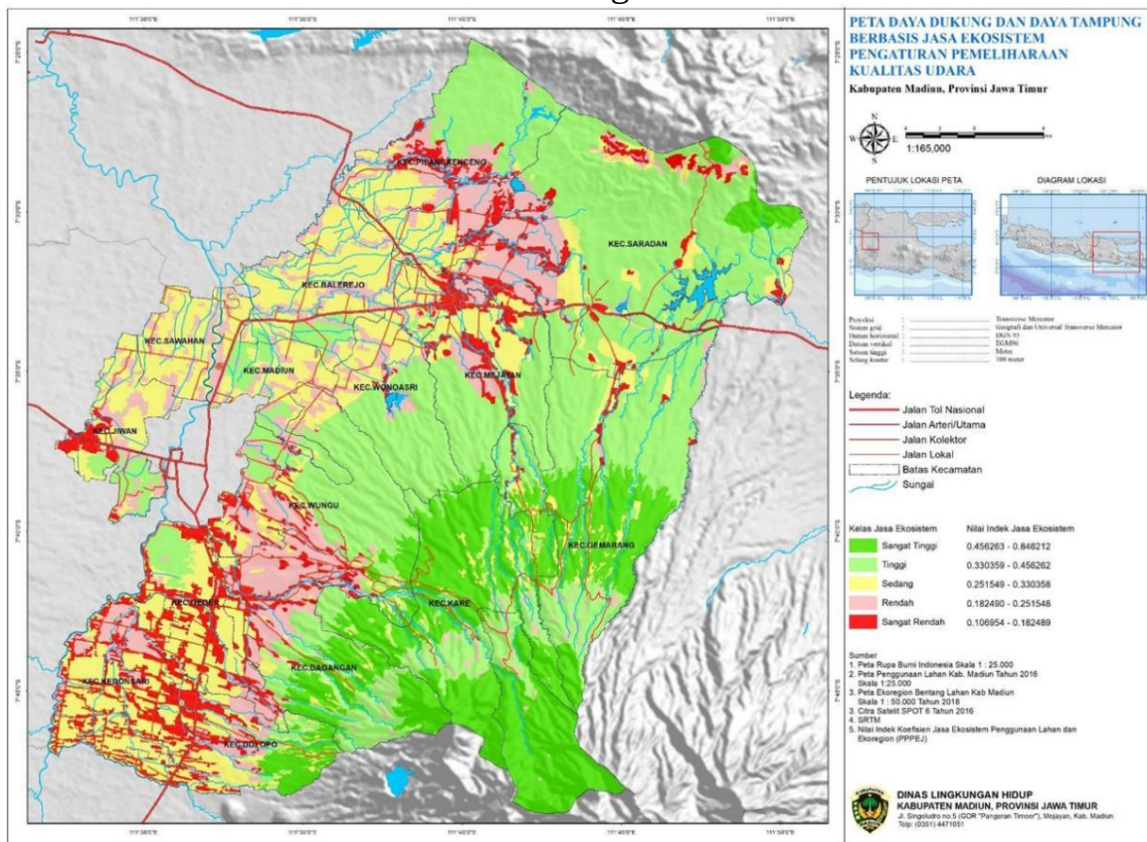
Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

Berdasarkan perhitungan dapat dilihat bahwa Kabupaten Madiun memiliki jasa ekosistem pengaturan kualitas udara yang tinggi sampai sedang. Seluas 41.134,82 ha area di Kabupaten Madiun dikategorikan sebagai kelas jasa ekosistem tinggi dan 25.255,45 ha dikategorikan sebagai kelas jasa ekosistem sedang. Luas yang paling kecil ialah kelas jasa ekosistem sangat rendah dengan luasan 9.431,06 ha. Daya dukung lingkungan pengaturan kualitas udara yang dimiliki Kabupaten Madiun berkaitan dengan tutupan vegetasi seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya.

Perbaikan jasa ekosistem pengaturan kualitas udara wilayah dengan kelas sangat rendah dapat dilakukan secara biologis dan fisik, secara biologis penanaman pohon dan vegetasi lain akan membantu proses fotosintesis yang menghasilkan udara bersih yang dapat dimanfaatkan oleh manusia juga organisme hidup lainnya dalam menjalankan kehidupan. Proses fisik sendiri dapat dilakukan dengan melakukan pemantauan dan

evaluasi terhadap aktivitas manusia yang bisa menimbulkan pencemaran terhadap udara seperti pemantauan uji emisi kendaraan.

Gambar 2.17
Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Kualitas Udara



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.3.3 Tingkat Kerentanan dan Kapasitas Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim

Iklim merupakan kondisi jangka panjang mengenai keadaan keadaan atmosfer mencakup suhu, tekanan, angin, kelembaban yang terjadi di suatu daerah selama kurun waktu yang panjang dengan penyelidikan dalam waktu yang lama minimalnya 30 tahun dan meliputi wilayah yang luas. Iklim mikro Kabupaten Madiun dapat diartikan sebagai kondisi iklim Kabupaten Madiun sebagai daerah yang lebih spesifik terhadap daerah yang lebih luas. Iklim mikro Kabupaten Madiun dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, utamanya adalah aktivitas masyarakat yang dapat menghasilkan emisi dan gas buang, seperti pabrik dan penggunaan kendaraan bermotor dalam jumlah besar.

Perubahan iklim didefinisikan sebagai perubahan rata-rata dan/atau variabilitas sifat-sifatnya terkait kondisi iklim serta berlangsung selama jangka waktu yang panjang, biasanya dalam satu dekade atau lebih. Perubahan iklim dapat terjadi karena proses internal alami atau pendorong eksternal, atau oleh perubahan antropogenik dalam komposisi atmosfer atau penggunaan lahan yang berlangsung terus menerus (IPCC 2012).

Dampak yang ditimbulkan akibat perubahan iklim berupa ancaman terjadinya bencana alam seperti banjir, kemarau, longsor, rob dan beberapa bencana lainnya. Secara jangka panjang perubahan iklim juga memiliki efek yang besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

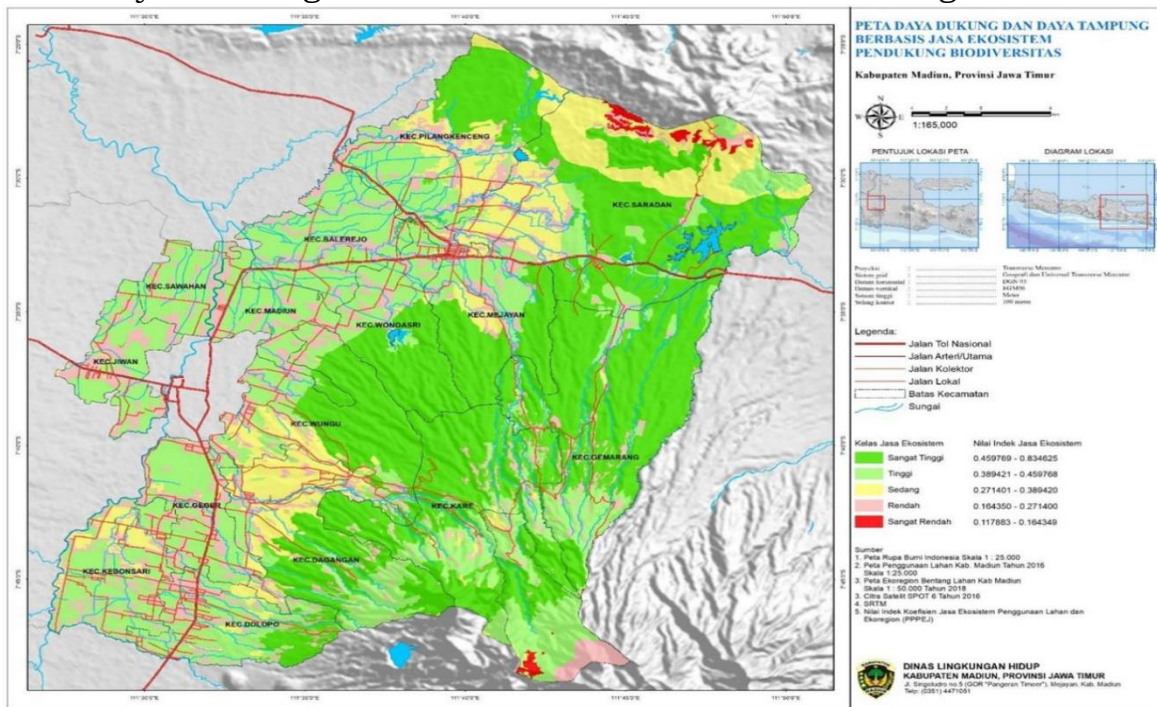
Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim dipengaruhi oleh 3 variabel yakni kemampuan adaptasi, keterpaparan dan sensitivitas. Kemampuan atau kapasitas adaptasi merupakan kemampuan untuk melakukan penyesuaian terhadap tekanan, perubahan atau gangguan akibat dari perubahan iklim dimana semakin kecil nilainya maka semakin rentan. Keterpaparan merupakan peluang terpapar terhadap guncangan atau gangguan yang diakibatkan perubahan iklim sedangkan sensitivitas adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kepekaannya terhadap gangguan akibat perubahan iklim. Kedua variable tersebut memiliki karakter semakin besar nilainya maka semakin rentan.

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua wilayah Kabupaten Madiun memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan terbangun serta perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kabupaten Madiun. Tingkat risiko perubahan iklim di Kabupaten Madiun tergolong masih rendah, namun demikian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang.

2.1.3.4 Tingkat Ketahanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar. Pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lebih luas yaitu berperan dalam pengaturan kondisi lingkungan seperti kesuburan tanah, hidrologi, suhu, kelembaban dan pengendalian pencemaran udara.

Gambar 2.18
Peta Daya Dukung Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Biodiversitas



Sumber: Laporan DDDTLH, 2019

2.1.3.5 Kondisi dan Analisis Daya Tampung Sampah

Sampah merupakan material hasil sisa terakhir dari suatu proses produksi atau pengolahan lainnya yang sudah tidak dimanfaatkan. Material sisa tersebut dapat memiliki berbagai wujud antara lain padat, cair atau gas. Pengelolaan sampah di Kabupaten Madiun menghadapi tantangan yakni semakin pesatnya aktivitas kegiatan ekonomi. Semakin pesat aktivitas di suatu daerah, maka semakin banyak pula sampah yang dihasilkan.

Umumnya pertumbuhan penduduk menjadi faktor pemicu meningkatkannya volume timbulan sampah yang dihasilkan di suatu daerah. Tabel di bawah ini menunjukkan perkiraan jumlah timbulan sampah di Kabupaten Madiun per hari ditinjau dari jumlah penduduknya. Kecamatan Geger diperkirakan memiliki potensi timbulan sampah paling besar yakni 6,58 m³/hari sedangkan Kecamatan Sawahan memiliki potensi timbulan sampah paling kecil yakni 0,26 m³/hari. Total Timbulan sampah dari kegiatan domestik di Kabupaten Madiun diperkirakan kurang lebih 40,22 m³/hari atau 14.680 m³ dalam setahun.

Tabel 2.12
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m3/hari)
1	Kebonsari	59.240	5.92
2	Geger	65.770	6.58
3	Dolopo	59.950	6.00
4	Dagangan	52.860	5.29
5	Wungu	58.150	5.82
6	Kare	33.740	3.37



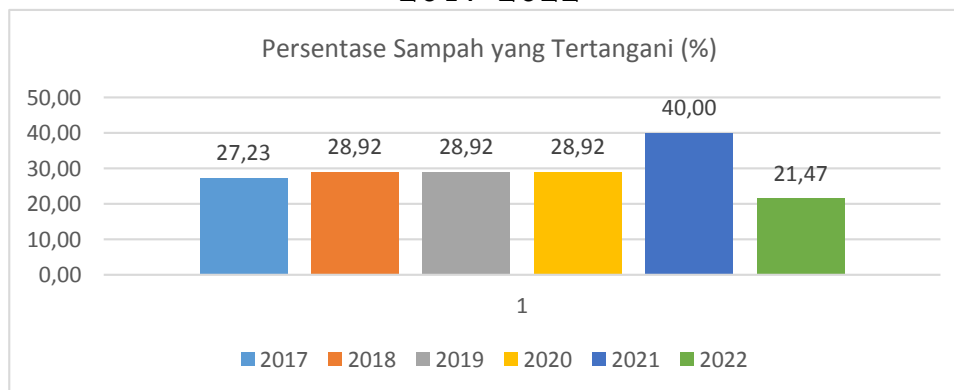
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Timbulan Sampah (m3/hari)
7	Gemarang	34.240	3.42
8	Saradan	7.109	0.71
9	Pilangkenceng	5.620	0.56
10	Mejayan	4.769	0.48
11	Wonoasri	3.606	0.36
12	Balerejo	4.594	0.46
13	Madiun	3.966	0.40
14	Sawahlan	2.636	0.26
15	Jiwan	5.905	0.59
TOTAL		745.980	40.22

Sumber: IKPLHD Kabupaten Madiun, 2020

Berdasarkan data eksisting, TPA Kaliabu seluas 6 ha diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan sampah Kabupaten Madiun sampai Tahun 2023. Pola pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sampai saat ini Kabupaten Madiun terdapat total 8 TPS3R serta 121 Bank Sampah. Sementara untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit.

Data pelayanan pengangkutan sampah menunjukkan adanya peningkatan sampah yang terlayani dari Tahun 2017 sebesar 27,23% menjadi 28,92% pada Tahun 2018 – 2020. Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 40,00%. Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 21,47%. Persentase sampah yang tertangani disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.1
 Persentase Sampah yang Tertangani di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Berdasarkan hasil prediksi dan permasalahan yang ada, maka arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi :

- Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun. Selain itu perlu juga alternatif lokasi TPA baru untuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan.
- Pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan.
- Pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep reduce-reuse-recycle (3R) di sekitar wilayah sumber sampah.
- Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak.
- Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

2.1.3.6 Dampak dan Risiko Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan yang kurang tidak dan tidak optimal akan mengakibatkan adanya dampak atau risiko terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan ada yang sifatnya positif maupun negatif yang pengaruhnya dapat dirasakan oleh manusia atau makhluk hidup lainnya. Risiko lingkungan dapat didefinisikan sebagai potensi konsekuensi terancamnya sesuatu yang berharga dan dimana hasilnya tidak pasti. Umumnya risiko dinyatakan dalam bentuk probabilitas suatu kejadian yang menimbulkan konsekuensi terhadap kerugian material, kehidupan, mata pencaharian, kesehatan, ekosistem dan spesies, aset ekonomi, sosial dan budaya, jasa (termasuk jasa lingkungan) dan infrastruktur.

Tabel 2.13
Kejadian Bencana Tahun 2018-2022 di Kabupaten Madiun

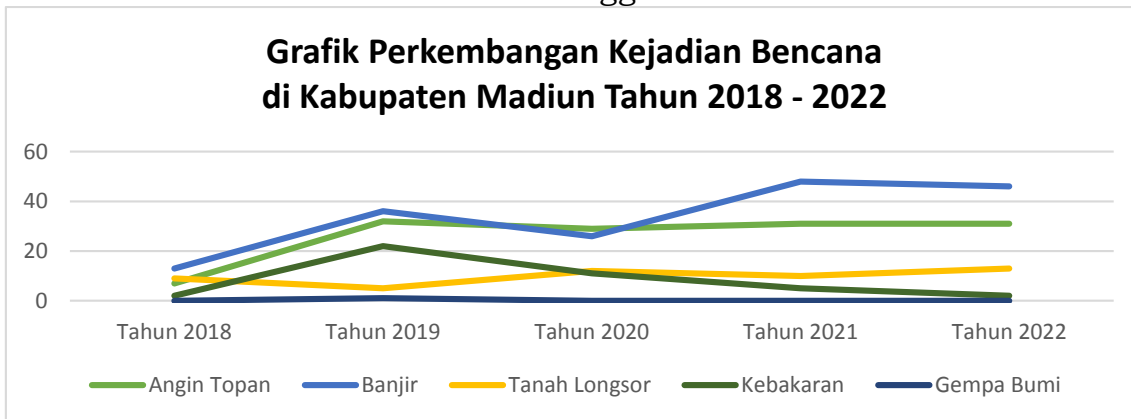
No	Jenis Bencana	2018	2019	2020	2021	2022
1	Angin Topan	7	32	29	31	31
2	Banjir	13	36	26	48	46
3	Tanah Longsor	9	5	12	10	13
4	Kebakaran	2	22	11	5	2
5	Gempa Bumi	0	1	0	0	0
		31	96	78	94	92

Sumber: BPPD Kabupaten Madiun, 2023

Bencana merupakan suatu kondisi sebagai akibat yang terjadi ketika ancaman mengenai suatu wilayah beserta penduduk yang ada di dalamnya

dan dapat menimbulkan dampak baik langsung seperti adanya korban jiwa, kerusakan rumah dan infrastruktur serta dampak tidak langsung seperti hilang atau rusaknya fasilitas industri, jaringan transportasi, pasar serta area persawahan. Secara geografis Kabupaten Madiun memiliki kerentanan terhadap beberapa jenis bencana meliputi Banjir, Tanah Longsor, Angin Topan atau Angin Kencang, Kebakaran serta Gempa Bumi. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun jenis bencana yang paling sering muncul di Kabupaten Madiun yaitu Banjir, Angin Topan / Angin Kencang dan Banjir. Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 hingga 2022 digambarkan dalam grafik berikut :

Grafik 2.2
Perkembangan kejadian bencana di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 hingga 2022



Sumber: BNPB, 2023

Bencana Banjir merupakan salah satu jenis bencana yang paling sering terjadi di Kabupaten Madiun. Intensitas kejadian banjir semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini diakibatkan selain kondisi iklim atau cuaca ekstrem dengan intensitas dan curah hujan yang tinggi, juga dipengaruhi oleh kondisi topografi Kabupaten Madiun yang bervariasi dimana pada umumnya berada pada kemiringan lereng 0 – 8% yang tersebar di seluruh kecamatan serta kemiringan lereng >45% yaitu di Kecamatan Dagangan, Wungu, Kare dan Gemarang. Kondisi iklim di wilayah Kabupaten Madiun termasuk kategori iklim sedang atau Tipe C yang merupakan daerah tidak kering dan tidak basah, serta dipengaruhi oleh iklim laut dan iklim pegunungan dengan temperatur berkisar antara 20 – 35 derajat Celcius.

Bencana Angin Topan atau Angin Kencang pada umumnya terjadi pada musim pancaroba atau peralihan musim hujan ke musim kemarau dan sebaliknya, Namun dengan kondisi cuaca ekstrem saat ini, kejadian Angin kencang dapat terjadi hamper di sepanjang tahun. Dan kondisi kejadian angin kencang menunjukkan trend peningkatan dalam 5 tahun. Kejadian

angin kencang dapat terjadi di beberapa lokasi di setiap kecamatan, dimana angin yang terjadi turun dengan cepat disertai dengan hujan lebat dan naiknya udara disertai dengan pusaran angin yang bersifat lokal dan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan rumah warga dan fasilitas umum, kerusakan tanaman maupun korban jiwa.

Bencana tanah longsor di Kabupaten Madiun juga menunjukkan trend peningkatan dalam 5 tahun. Terjadinya tanah longsor disebabkan oleh beberapa factor seperti kondisi geologi, hidrologi, topografi, jenis tanah, penggunaan dan pemanfaatan lahan, serta kondisi iklim atau perubahan cuaca. Semua faktor tersebut dapat mempengaruhi stabilitas lereng yang dapat memicu terjadinya gerakan atau perpindahan material pembentuk lereng atau yang disebut longsor. Secara umum kejadian tanah longsor di Kabupaten Madiun terjadi di wilayah dengan keiringan lereng tinggi dan disertai oleh intensitas curah hujan yang tinggi seperti di Kecamatan Dagangan, Gemarang, Kare dan Saradan.

Jenis bencana lain yang juga ditemui di Kabupaten Madiun yaitu Gempa Bumi dan Kebakaran, namun tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Kebakaran yang banyak terjadi di Kabupaten Madiun yaitu kebakaran lahan yang disebabkan faktor non alam seperti kelalaian manusia. Pada umumnya kejadian kebakaran sering terjadi pada saat musim kemarau sehingga kondisi kering dapat memicu penyebaran api lebih cepat. Secara geologi Kabupaten Madiun masih dipengaruhi oleh proses structural berupa patahan dan lipatan. Struktur geologi yang dijumpai di Kabupaten Madiun yaitu sesar dan kekar, dimana pada zona sesar merupakan daerah yang lemah sehingga umumnya pada daerah ini banyak berkembang peristiwa alam gerakan tanah. Kabupaten Madiun masuk dalam zona gempa dengan percepatan antara 0,05 – 0,15 g (gravitasi) yang setara dengan skala V – VI pada skala MMI, dan merupakan daerah berkekuatan 5 hingga 6 Skala Richter dan termasuk dalam kelas kerawanan sedang. Kejadian Gempa Bumi di Kabupaten Madiun pernah terjadi pada Tahun 2019 yaitu di Desa Klangon, Kecamatan Saradan.

Kondisi risiko bencana yang dimiliki oleh Kabupaten Madiun menunjukkan penurunan dimana nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 113,4 dengan kategori sedang dari tahun sebelumnya yang memiliki nilai mencapai 162 atau kategori tinggi. Upaya upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menurunkan tingkat risiko

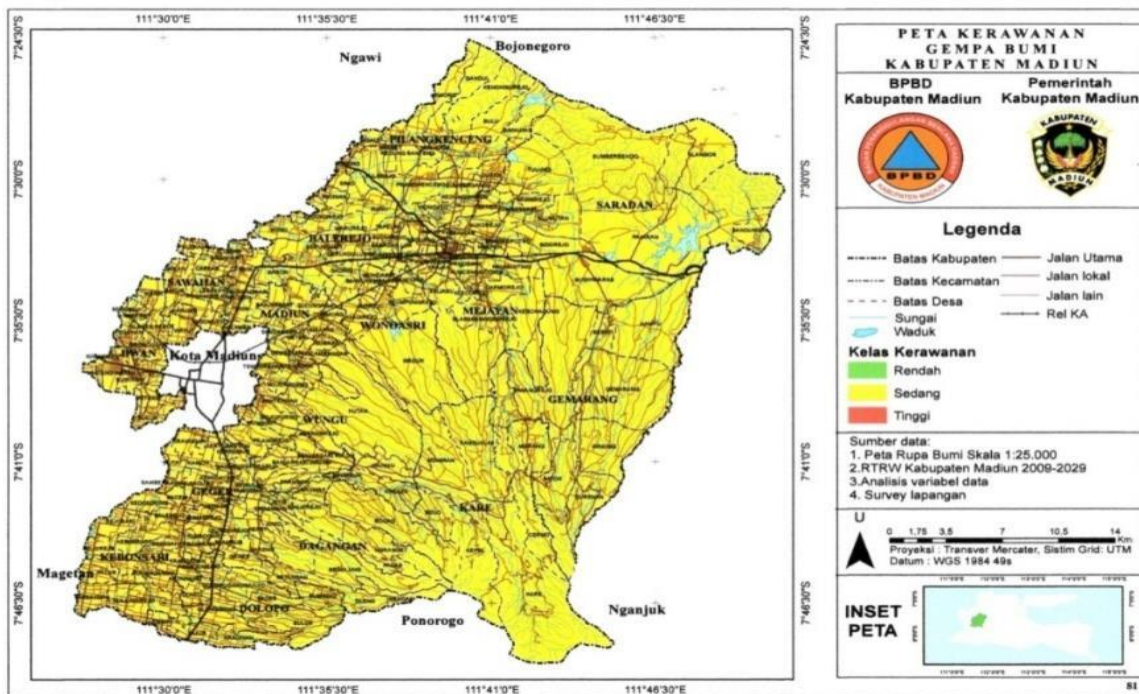
bencana dapat dilakukan mulai dari tahapan pra bencana, saat darurat bencana maupun pasca bencana. Upaya mitigasi bencana dapat ditingkatkan dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan maupun pembentukan desa Tangguh bencana. Sedangkan pada kondisi darurat bencana dapat diupayakan dengan peningkatan kemampuan penanganan bencana dan koordinasi penrahelix. Serta pada saat pasca bencana dapat diupayakan dengan peningkatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga dampak bencana dapat dikurangi.

Berikut potensi kerawanan bencana di Kabupaten Madiun menurut BNPB:

a. Kerawanan Bencana Gempa Bumi

Kabupaten Madiun dilalui oleh zona patahan yaitu pada daerah bagian utara Kecamatan Saradan. Di daerah ini pernah terjadi setidaknya satu kali gempa dengan kekuatan 4.0 SR pada bulan Juni 2015 dan beberapa gempa dengan skala rendah dan terjadi dengan intensitas yang tinggi (gempa swarm) pada bulan Februari 2016. Pada bulan Juni 2015 gempa terjadi di Dusun Pohulung, Desa Klargon dengan kedalaman 5 km dan menimbulkan kerusakan bangunan rumah warga. Sedangkan gempa berikutnya pada Februari 2016 tidak begitu terasa goncangannya, karena merupakan gempa swarm. Di sebelah timur laut G. Pandan terdapat patahan aktif dengan orientasi barat daya-timur laut dan mekanisme patahan mengiri (sinistral).

Gambar 2.19
Peta Kerawanan Gempa Bumi di Kabupaten Madiun

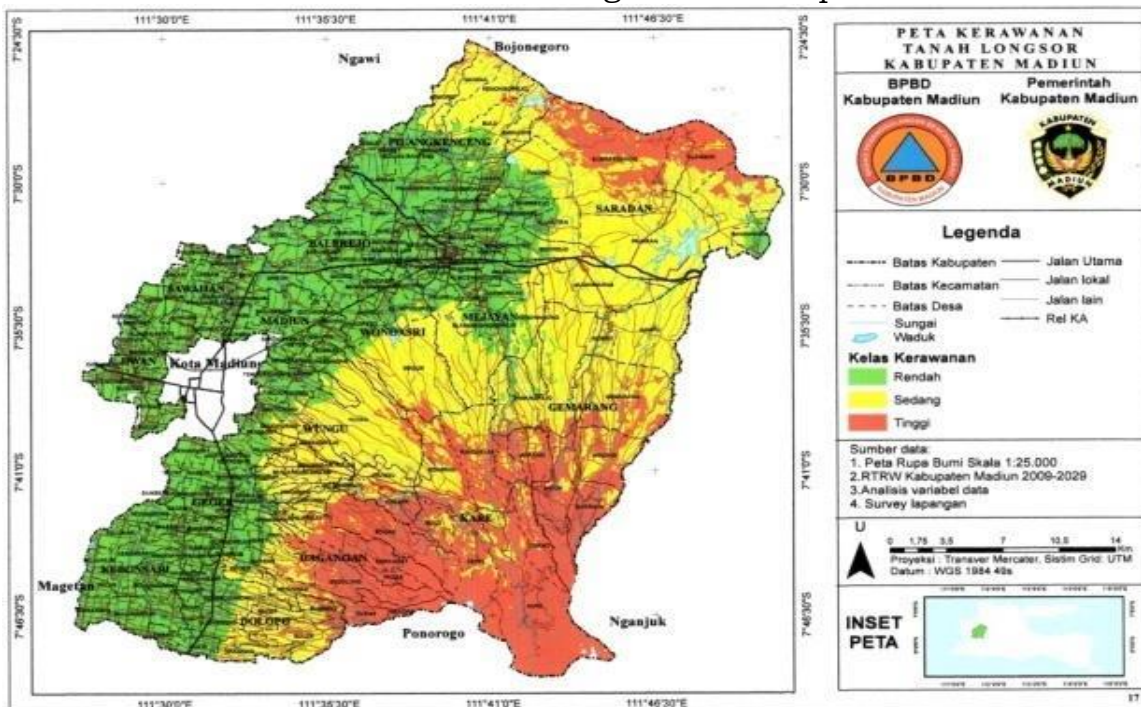


Sumber: BPPD Kabupaten Madiun, 2023

b. Kerawanan Bencana Tanah Longsor

Kabupaten Madiun pada umumnya berada pada kelerengn 0-8% dan tersebar di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Kare. Sedangkan kecamatan-kecamatan yang berada pada ketinggian 1000 sampai lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut umumnya mempunyai kelerengn wilayah di atas 25%. Kondisi lereng demikian memiliki potensi ancaman gerakan tanah (tanah longsor) cukup tinggi. Beberapa wilayah yang terdapat pada kawasan tersebut antara lain adalah Kecamatan Dolopo, Dagangan, Kare, Wungu, Gemarang, Mejayan dan Wonoasri.

Gambar 2.20
Peta Kerawanan Tanah Longsor di Kabupaten Madiun



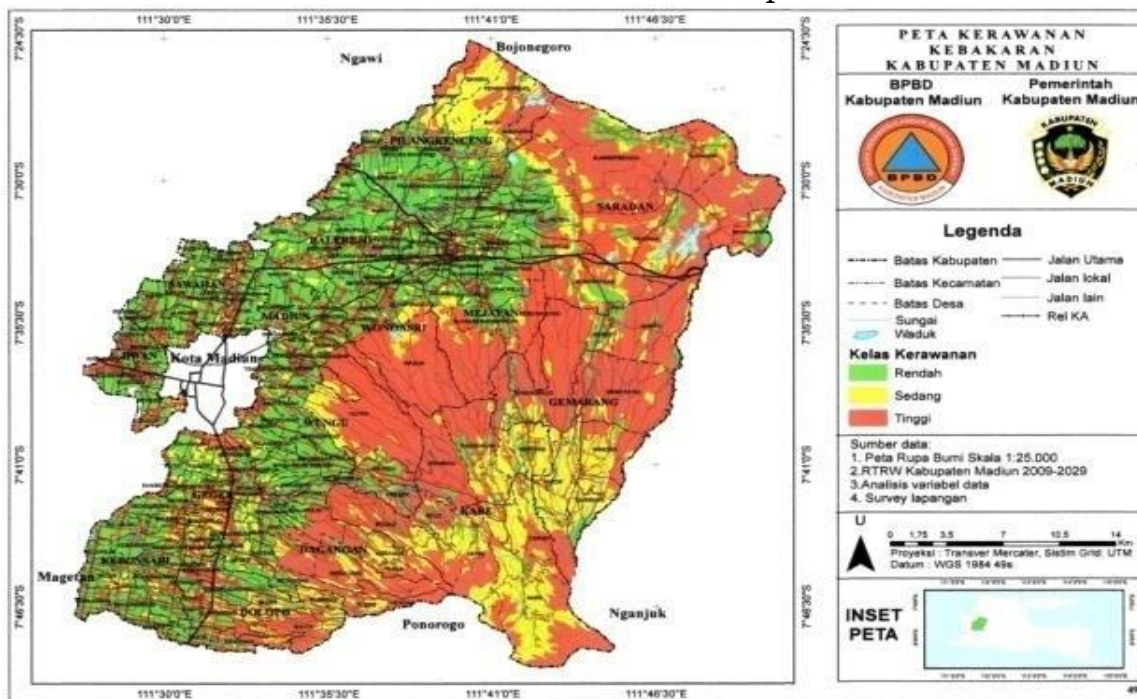
Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, 2023

c. Kerawanan Bencana Kebakaran

Bencana kebakaran tidak terlepas dari kondisi kerawanan kekeringan di Kabupaten Madiun. Sebagian dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun tergolong sebagai kawasan rawan kekeringan. Rawan kekeringan di Kabupaten Madiun dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu :

- 1) Kawasan rawan kekeringan karena wilayah tersebut memiliki potensi air tanah sangat kecil;
- 2) Kawasan rawan kekeringan terutama untuk pertanian karena berada di tepian hutan dan berada di dataran tinggi kapur seperti Kecamatan Pilangkenceng, Saradan, Geger dan Wungu.

Gambar 2.21
Peta Kawasan Kebarakan di Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, 2023

Sebagian besar dari Kabupaten Madiun merupakan daerah hutan dengan luas mencapai kurang lebih 40.631 ha yang tersebar di Kecamatan Dolopo, Dagangan, Wungu, Kare, Gemarang, Saradan, Pilangkenceng, Mejayan, Wonoasri dan Madiun. Kawasan hutan ini sebagian besar merupakan hutan jati. Pada musim kemarau pohon jati pada umumnya akan menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan. Pada saat inilah kawasan hutan jati tampak kering dan gersang sehingga dengan terik matahari yang panas maka kawasan ini sangat rawan terhadap kebakaran.

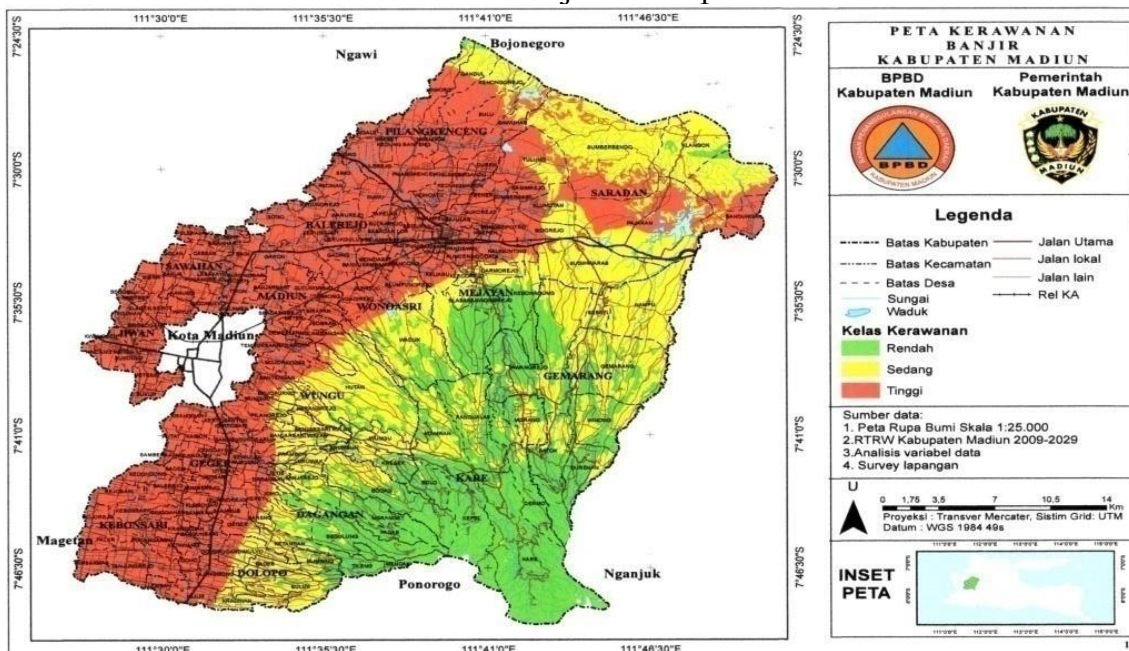
d. Kawasan Rawan Banjir

Di Kabupaten Madiun terdapat 2 (dua) kriteria genangan di daerah sekitar Kali Madiun yang sering mengalami banjir. Apabila ditinjau dari kondisi topografi Kabupaten Madiun, lokasi banjir pada umumnya merupakan lembah atau cekungan, yaitu dataran dengan elevasi lebih rendah daripada elevasi dataran di sekitarnya seperti yang sering terjadi di Kecamatan Balerejo.

Selain itu kondisi klimatologi Kabupaten Madiun juga mempengaruhi kejadian bencana banjir dan kekeringan. Rata-rata hari hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Desember hingga Maret dan hari hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli hingga Oktober.

Berdasarkan data-data kejadian bencana di Kabupaten Madiun, bencana banjir sebagian besar terjadi pada saat musim hujan di sekitar awal tahun. Beberapa daerah yang rawan akan bencana banjir seperti Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Wungu, dan Kecamatan Madiun. Banjir di Kabupaten Madiun selain diakibatkan oleh hujan lokal dengan intensitas curah hujan yang tinggi juga dapat diakibatkan oleh luapan Kali Madiun dan Kali Bengawan Solo. Genangan banjir sering terjadi di sepanjang Kali Bengawan Solo antara muara Kali Tambakrono hingga mendekati Kawasan perkotaan Mejayan. Banjir besar yang pernah terjadi pada tahun 2008 mengenai beberapa kecamatan meliputi Balerejo, Madiun, Sawahan, Jiwan, Kebonsari dan Geger.

Gambar 2.22
Peta Kawasan Banjir Kabupaten Madiun

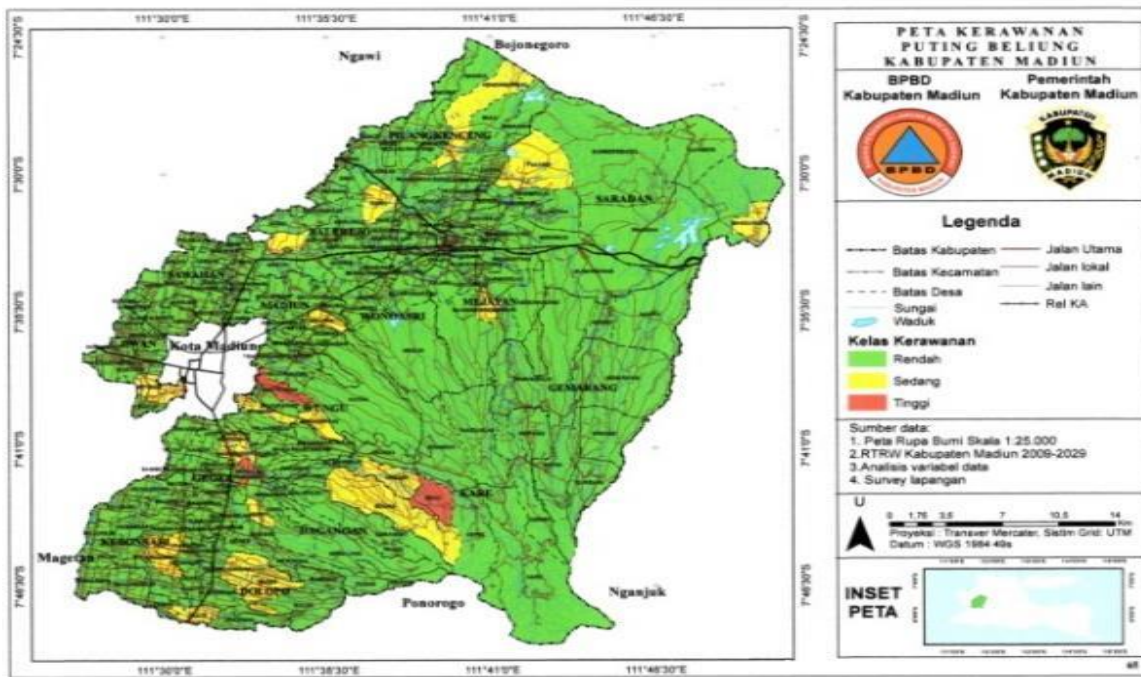


Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, 2023

e. Kawasan Rawan Puting Beliung

Bencana yang kerap terjadi di Kabupaten Madiun Juga meliputi bencana angin Topan atau angin puting beliung. Sejak Tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat 61 kejadian bencana Angin puting beliung.

Gambar 2.23
Peta Kerawanan Puting Beliung di Kabupaten Madiun



Sumber: BPBD Kabupaten Madiun, 2023

2.1.4 DEMOGRAFI

Jumlah penduduk Kabupaten Madiun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kabupaten Madiun
Tahun 2017-2022

No.	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Perubahan
		Laki-laki	Perempuan		
1	2017	365.550	365.779	731.329	5.513
2	2018	368.957	373.302	742.259	10.930
3	2019	372.047	377.019	749.066	6.807
4	2020	373.328	378.729	752.057	2.991
5	2021	374.235	380.221	754.456	2.399
6	2022	374.752	380.981	755.733	1.277

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Selanjutnya disajikan data jumlah penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin di Kabupaten Madiun pada tahun 2021 dan 2022. Pembagian penduduk berdasarkan usia sangat penting diketahui untuk memprediksikan jumlah kondisi regenerasi, angka ketergantungan (*dependency ratio*) karena bentuk struktur penduduk berdasarkan usia dapat diketahui jumlah penduduk yang paling banyak dalam kelompok usia tertentu. Kondisi penduduk berdasarkan kelompok usia yang dibedakan secara rinci antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:



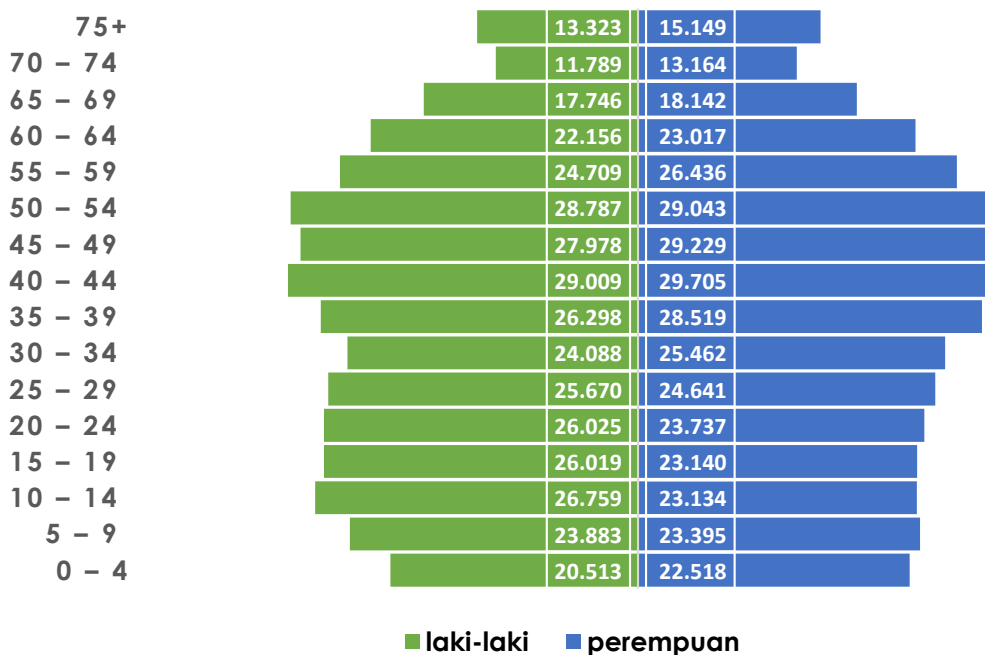
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Madiun Tahun 2021-2022

Kelompok Umur	TAHUN 2021			TAHUN 2022		
	Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Perempuan	Laki-Laki	
0 – 4	23.487	22.518	46.005	20.513	19.454	39.967
5 – 9	24.335	23.395	47.730	23.883	22.531	46.414
10 – 14	25.127	23.134	48.261	26.759	24.624	51.383
15 – 19	24.713	23.140	47.853	26.019	24.086	50.105
20 – 24	24.926	23.737	48.663	26.025	24.953	50.978
25 – 29	25.551	24.641	50.192	25.670	23.902	49.572
30 – 34	25.672	25.462	51.134	24.088	23.206	47.294
35 – 39	27.286	28.519	55.805	26.298	27.055	53.353
40 – 44	28.873	29.705	58.578	29.009	30.825	59.834
45 – 49	27.814	29.229	57.043	27.978	29.020	56.998
50 – 54	27.044	29.043	56.087	28.787	30.885	59.672
55 – 59	24.882	26.436	51.318	24.709	27.146	51.855
60 – 64	22.427	23.017	45.444	22.156	23.823	45.979
65 – 69	17.976	18.142	36.118	17.746	17.596	35.342
70 – 74	11.587	13.164	24.751	11.789	12.550	24.339
75+	10.012	15.149	25.161	13.323	19.325	32.648
JUMLAH	374.235	380.221	754.456	374.752	380.981	755.733

Sumber: Kabupaten Madiun Dalam Angka Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk seperti berikut:

Grafik 2.3
Piramida Penduduk Kabupaten Madiun Tahun 2022



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2023 diolah



Sesuai dengan tabel didukung dengan gambar piramida di atas, dapat diketahui bahwa posisi piramida lebih condong ke arah perempuan, dan mayoritas penduduk berada pada usia 40-44 tahun. Kondisi ini terjadi baik pada tahun 2021 maupun tahun 2022.

Berikut disajikan data kepadatan penduduk yang ada di Kabupaten Madiun tahun 2022.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan
Kabupaten Madiun Tahun 2022

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Luas Wilayah	Kepadatan Penduduk/ Km ²
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	KEBONSARI	29.688	30.949	60.637	47,45	1.278
2.	DOLOPO	30.558	31.317	61.875	48,85	1.267
3.	GEGER	32.853	33.669	66.522	36,61	1.817
4.	DAGANGAN	27.057	27.088	54.145	72,36	748
5.	KARE	17.328	17.404	34.732	190,85	182
6.	GEMARANG	18.158	17.846	36.004	101,97	353
7.	WUNGU	29.401	30.103	59.504	45,54	1.307
8.	MADIUN	19.136	20.044	39.180	35,93	1.090
9.	JIWAN	28.942	29.703	58.645	33,76	1.737
10.	BALEREJO	22.359	22.983	45.342	51,98	872
11.	MEJAYAN	23.815	23.898	47.713	55,22	864
12.	SARADAN	36.643	36.492	73.135	152,92	478
13.	PILANGKENCENG	27.942	28.223	56.165	81,34	690
14.	SAWAHAN	12.756	13.123	25.879	22,15	1.168
15.	WONOASRI	18.116	18.139	36.255	33,93	1.068
Jumlah		374.752	380.981	755.733	1.010,86	748

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, 2022

Kepadatan penduduk di Kabupaten Madiun mencapai angka 748 jiwa per km². Sesuai dengan tabel diatas, jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Saradan, namun angka kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Geger. Selanjutnya untuk rasio jenis kelamin atau *sex ratio* Kabupaten Madiun sebesar 98,36 artinya di Kabupaten Madiun jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk laki-laki. Semua kecamatan di Kabupaten Madiun mempunyai *sex ratio* dibawah angka 100, kecuali pada kecamatan Gemarang dan Saradan.

Tabel 2.17
Rasio Jenis Kelamin Atau Sex Ratio Kabupaten Madiun Tahun 2022

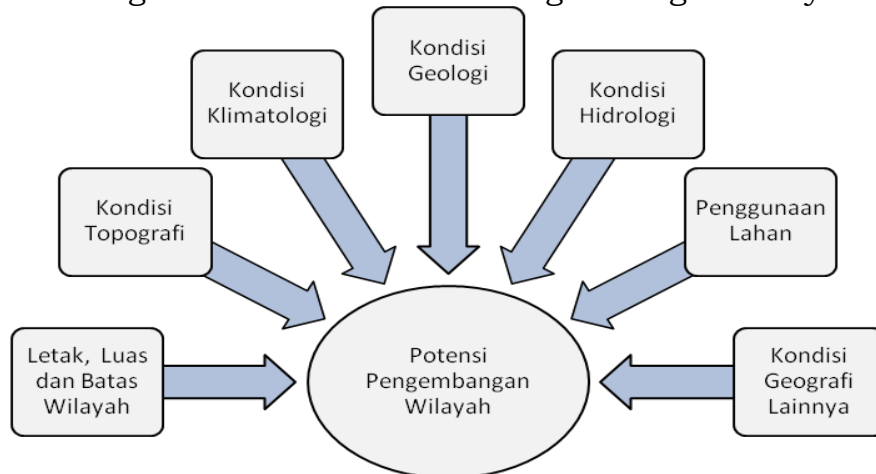
No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	KEBONSARI	29.688	30.949	60.637	97,35
2.	DOLOPO	30.558	31.317	61.875	97,57
3.	GEGER	32.853	33.669	66.522	97,57
4.	DAGANGAN	27.057	27.088	54.145	99,88
5.	KARE	17.328	17.404	34.732	99,73
6.	GEMARANG	18.158	17.846	36.004	101,74
7.	WUNGU	29.401	30.103	59.504	97,67
8.	MADIUN	19.136	20.044	39.180	95,47

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis Kelamin Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
9.	JIWAN	28.942	29.703	58.645	97,44
10.	BALEREJO	22.359	22.983	45.342	97,28
11.	MEJAYAN	23.815	23.898	47.713	99,65
12.	SARADAN	36.643	36.492	73.135	100,41
13.	PILANGKENCENG	27.942	28.223	56.165	99
14.	SAWAHAN	12.756	13.123	25.879	97,2
15.	WONOASRI	18.116	18.139	36.255	99,87
Jumlah		374.752	380.981	755.733	98,36

2.1.5 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Potensi wilayah yang akan dikembangkan disajikan melalui kerangka pemikiran sebagaimana berikut:

Gambar 2.24
Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah



Sumber : Gambar.G-C.2 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Pada Sub bab sebelumnya telah diuraikan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta jumlah penduduk yang berubah setiap waktu. Analisis potensi pengembangan wilayah dikaitkan dengan kondisi kependudukan dengan merujuk pada populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria tertentu.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, sistem perkotaan dan Pedesaan dibagi dalam 15 kecamatan, yang dijabarkan dalam Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan Di Kabupaten Madiun yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.18
Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Madiun

No.	Kecamatan	Perkotaan	Pedesaan
1	Kebonsari	Singgahan, Balerejo	Tambakmas, Tanjungrejo, Sukorejo, Pucanganom, Krandegan, Sidorejo, alur, Mojorejo, Kebonsari, Rejosari, Bacem, Kedondong
2	Geger	Kertosari, Kertobayon, Sangen, Pagotan, Uteran, Jatisari	Banaran, Klorogan, Slambur, Geger, Sareng, Purworejo, Sumberejo, Jogodayuh, Nglandung, Samberejo, Putat, Kertosari, Kertobayon, Kaibon
3	Dolopo	Bangunsari, Dolopo, Milir, Glongang	Lembah, Kradinan, Suluk, Blimbing, Bader, Candimulyo, Glonggong, Doho, Ketawang
4	Dagangan	Dagangan, Sewulan, Jetis, Banjarsari Kulon, Banjarsari Wetan	Ketandang, Tilen, Mendak, Segulung, Padas, Ngranget, Joho, Kepet, Dagangan, Prambon, Banjarejo, Mruwak, Sukosari
5	Wungu	Mugut, Wungu, Mojopurno, Karangrejo	Sidorejo, Pilangrejo, Brumbun, Kresek, Mojoyayung, Bantengan, Tempursari, Nglandung, Nglambangan, Sobrah
6	Kare	Morang	Bodak, Kepel, Bolo, Kuwiran, Randualas, Cermo, Kare
7	Gemarang	Gemarang	Batok, Durenan, Winong, Tawangrejo, Sebayi, Nampu
8	Saradan	Desa Sugihwaras, Desa Sidorejo, Desa Sukorejo, Desa Bongsoputro, Desa Banjulan dan Ngepeh	Bandungan, Pajaran, Klumutan, Sumbersari, Bener, Tulung, Samberejo, Sumberbendo, Klangon
9	Pilangkenceng	Kenongorejo, Sumbergandu, Kedungrejo, wonoayu, Purworejo	Kedungmaron, Duren, Pilangkenceng, Muneng, Pulorejo, Ngale, Kreet, Kedungbanteng, Luworo, Gandul, Ngengor, Bulu, Dawuhan
10	Mejayan	Kaligunting, Krajan, Pandean, Mejayan, Bangunsari, Ngampel	Blabakan, Wonorejo, Kebonagung, Darmarejo, Sidodadi, Kuncen, Klecorejo, Kaliabu
11	Wonoasri	Purwosari, Klitk, Buduran	Ngadirejo, Jatirejo, Banyukambang, Sidomulyo, Pumpungrejo, Wonoasri, Bacong
12	Balerejo	Balerejo, Kebonangung	Garon, Gading, Jerukgulung, Sumberbening, Bulakrejo, Tapelan, Babadan Lor, Warurejo, Kedungjati, Glongong, Sogo, Banaran, Kedungrejo, Kuwu, Pacinan, Simo
13	Madiun	Tiron, Nglames, Bagi, Gunungsari	Dempelan, Betek, Sendangrejo, Sirapan, Dimong, Tulungrejo, Sumberejo, Tanjungrejo, Banjarsari
14	Sawahan	Pucangrejo, Sidomulyo, Bakur	Kanung, Rejosari, Krokrh, Lebakayu, Golan, Canean, Sawahan, Pule, Kajang, Klumpit
15	Jiwan	Sukolilo, Kincangwetan, Jiwan, Sambirejo, Metesih, Kwangsen	Bakur, Grobogan, Wayut, Klangenserut, Teguhan, Ngetrep, Bedoho, Bibrik

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.5.1 RENCANA SISTEM PERDESAAN

Sistem pusat permukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hierarki sebagai berikut:

1. Pusat pelayanan antar desa
2. Pusat pelayanan setiap desa
3. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman.

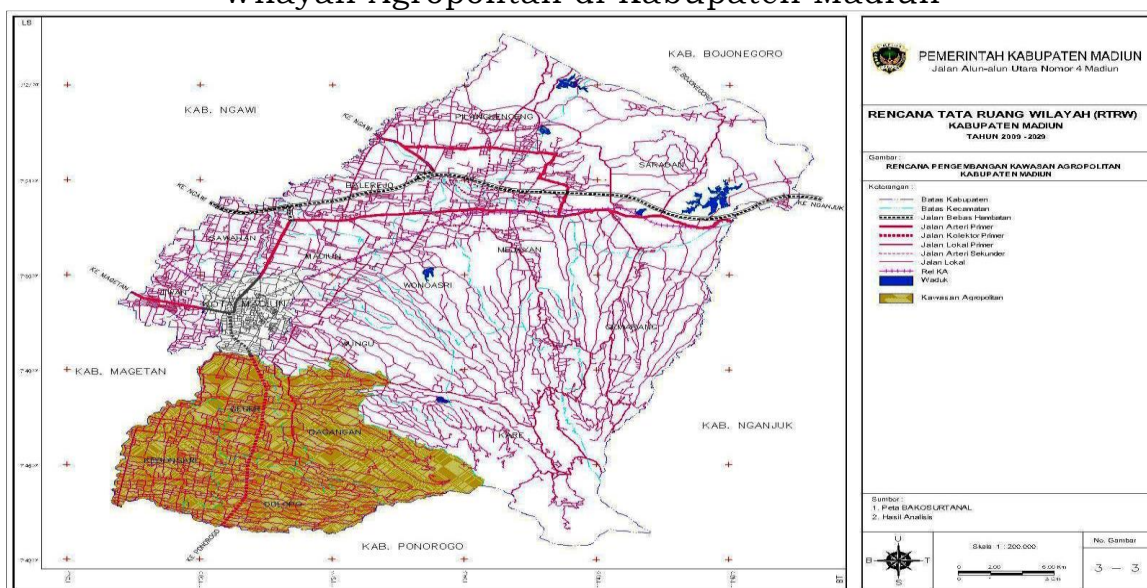
Pusat pelayanan desa tersebut secara berjenjang memiliki hubungan dengan pusat kecamatan sebagai kawasan perkotaan terdekat dengan perkotaan pusat SSWP dan dengan perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota kabupaten maupun dengan Kota Madiun sebagai Pusat

SWP di Jawa Timur bagian barat. Struktur ruang pedesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP.

Salah satu bentuk pengembangan kawasan pedesaan di Kabupaten Madiun adalah pengembangan kawasan agropolitan di Geger, Dolopo, Dagangan dan Kebonsari serta kawasan agropolitan Wilis. Kawasan agropolitan yaitu kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keuangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis yang merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan pedesaan pertanian. Kawasan agropolitan dengan ketersediaan sumberdayanya, tumbuh dan berkembang dengan mengakses, melayani, dan mendorong usaha agrobisnis di desa-desa kawasan (hinterland) dan desa-desa sekitarnya.

Sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Tanggal 24 Januari 2007 Nomor 050/41/201.2/2007 tentang Penetapan Kabupaten Madiun sebagai Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur kemudian di tindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Madiun Nomor 271 Tahun 2005 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Agropolitan Gedangsari, yaitu meliputi Kecamatan Geger, Dolopo, Dagangan, dan Kebonsari atau disebut Gedangsari. Produk unggulan yang dikembangkan di kawasan Agropolitan Gedangsari meliputi kakao, buah-buahan, tebu, sapi potong, domba dan ikan segar.

Gambar 2.25
Wilayah Agropolitan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.5.2 RENCANA SISTEM PERKOTAAN

1. Hierarki atau Besaran Perkotaan

Potensi perkembangan jumlah penduduk dan potensi perkembangan luasan kawasan perkotaan mengindikasikan pola perkembangan yang berbeda. Berdasarkan potensi perkembangan perkotaan tersebut hierarki perkotaan di Kabupaten Madiun berdasarkan tipe perkotaan diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Perkotaan Kecil (jumlah penduduk 50.000 – 100.000 jiwa) : Perkotaan Mejayan.
- b. Perkotaan Lainnya (jumlah penduduk < 25.000 jiwa) : seluruh Ibukota Kecamatan yang ada di Kabupaten Madiun.

2. Rencana Sistem dan Fungsi Perwilayahan

Setiap kawasan perkotaan akan memiliki jangkauan pelayanan tertentu sesuai dengan hierarki perkotaan masing-masing. Penentuan Sub Satuan Wilayah Pengembangan dilakukan dengan pendekatan homogenitas, pola aliran barang dan jangkauan pelayanan yang dilakukan. Untuk itu, dibuat sesuai dengan hierarki perkotaan masing-masing dan fungsi yang harus diemban bagi setiap wilayah pendukung.

Satuan wilayah pengembangan ini memiliki fungsi:

- a. Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.
- b. Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterland, sehingga diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- c. Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- d. Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Satuan wilayah pengembangan diharapkan dapat berperan secara efektif untuk:

- a. Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara berhierarki dari tingkat pelayanan lokal, regional dan nasional.
- b. Mendukung strategi kebijakan keruangan dalam pembangunan wilayah Kabupaten Madiun.
- c. Mendukung rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Madiun yang tidak terpisahkan dari struktur tata ruang wilayah Provinsi.

Kabupaten Madiun terbagi dalam 4 (empat) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang dibentuk di Kabupaten Madiun adalah :

- a. SSWP – I adalah kawasan yang dipersiapkan menjadi bagian dari ibukota kabupaten dengan fungsi utama pusat pelayanan fasilitas umum, perdagangan dan jasa, pusat pemerintahan skala kabupaten serta permukiman perkotaan. SSWP I merupakan pusat pengembangan Mejayan, meliputi : Kecamatan Mejayan, Kecamatan Wonoasri, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan dan Kecamatan Balerejo.

Fungsi wilayah SSWP I adalah :

- Pusat pemerintahan Kabupaten
- Pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten
- Pusat pelayanan umum skala kabupaten
- Kawasan pengembangan pertanian, perikanan, pariwisata, kehutanan dan industri.

- b. SSWP – II adalah kawasan-kawasan yang menjadi wilayah limpahan dari Kota Madiun dengan fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa, fasilitas umum serta permukiman, meliputi Kecamatan Jiwan, Kecamatan Sawahan, Kecamatan Madiun dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Sidorejo, Desa Munggut, Desa Pilangrejo, Desa Mojopurno, Desa Mojoyayung, Desa Bantengan, Desa Tempursari, dan Desa Nglandung).

Fungsi wilayah SSWP II adalah :

- Pertahanan dan keamanan
- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Industri kecil

- c. SSWP – III adalah kawasan-kawasan yang direncanakan menjadi kawasan agropolitan, agrowisata, ekowisata, dan agroforestri, di Kabupaten Madiun, meliputi Kecamatan Dolopo, Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan dan Kecamatan Kebonsari.

Fungsi wilayah SSWP III adalah :

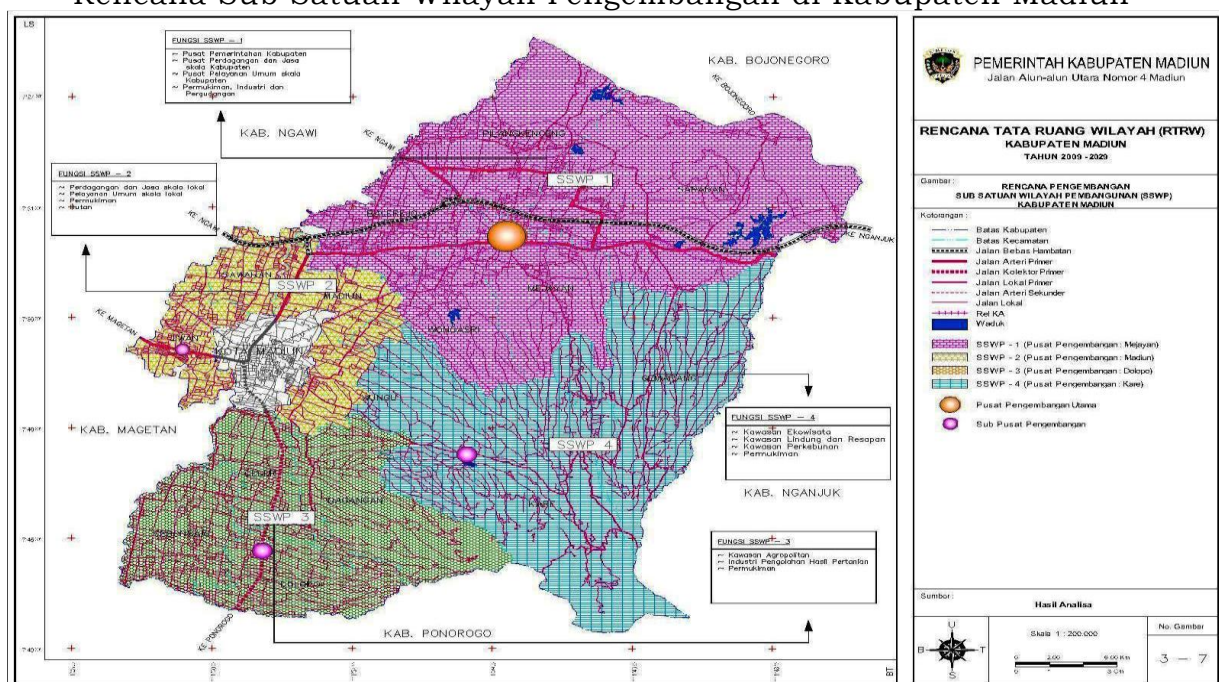
- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perikanan
- Perkebunan

- Industri kecil pengolah hasil
 - Kawasan lindung
 - Pariwisata
- d. SSWP – IV adalah kawasan-kawasan yang direncanakan untuk pengembangan ekowisata dan fungsi lindung di Kabupaten Madiun (Ecological City), meliputi Kecamatan Kare, Kecamatan Gemarang dan sebagian Kecamatan Wungu (Desa Karangrejo, Desa Brumbun, Desa Kresek, Desa Wungu, Desa Nglambangan dan Desa Sobrah).

Fungsi wilayah SSWP IV adalah :

- Perdagangan dan jasa
- Pertanian
- Peternakan
- Perkebunan
- Kawasan lindung
- Pariwisata

Gambar 2.26
Rencana Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Madiun



Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, Tahun 2021 (RTRW 2009-2029)

2.1.5.3 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA UTAMA

Jaringan Jalan Tol

Mengantisipasi permasalahan prasarana transportasi yang terjadi saat ini maupun masa yang akan datang serta upaya pengembangan wilayah secara optimal, maka pengembangan jaringan jalan di Kabupaten Madiun antara lain:



- 1) Rencana Peningkatan Jalan Menuju Interchange (Pintu Tol) Jalan Tol dan Stasiun Kereta Api.

Dengan telah dibangunnya jalan tol untuk ruas jalan di wilayah Kabupaten Madiun dan Pengembangan Stasiun serta Peningkatan Status Stasiun Kereta Api, perlu direncanakan pembangunan dan peningkatan jalan, yaitu

- a). Pada ruas-ruas jalan menuju Interchange (Pintu Tol) Madiun (Bagi/Dumpil) dan Muneng (Purworejo), baik dari Arah Kota Madiun-Dolopo, Madiun-Maospati dan Kota Caruban-Saradan.
- b). Pada ruas – ruas jalan menuju Stasiun Caruban, Saradan dan Babatan.

- 2) Jalan penghubung antara jalan nasional dengan rencana jalan selingkar willis.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo – Tengger – Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, kawasan Selingkar Wilis menjadi Kawasan prioritas pembangunannya, terutama infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten.

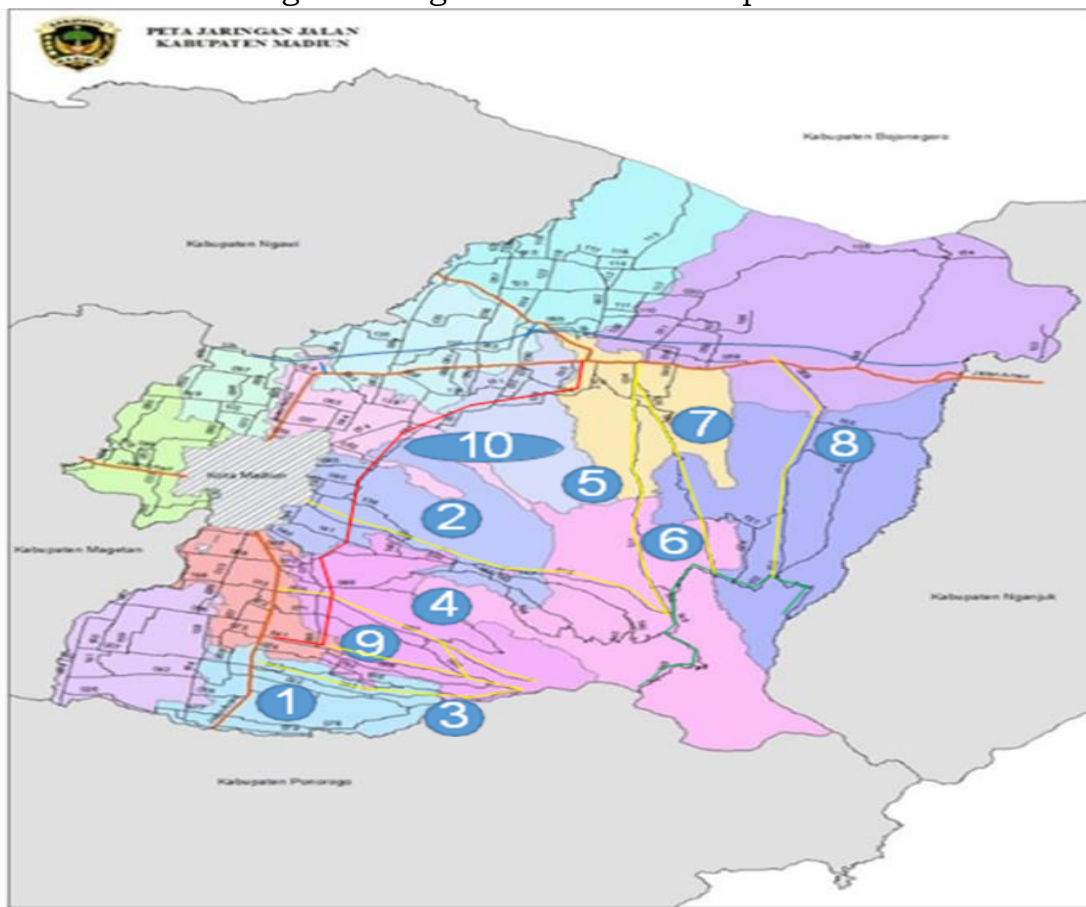
Adapun ruas jalan Kabupaten Madiun yang termasuk dalam jalur Selingkar Wilis yang menjadi prioritas pembangunannya adalah:

Tabel 2.19
Panjang Ruas Jalan Prioritas Pembangunan
Kabupaten Madiun

NO	RUAS	PANJANG (Km)
1	Jl. Mundu -Bts. Nganjuk (153)	11,18
2	Jl. Kare - Mundu (024)	14,24
3	Jl. Kare - Plosorejo (148)	4,71
4	Jl. Plosorejo - Bts. Ponorogo (149)	8,38
JUMLAH		38,51

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

Gambar 2.27
Jalur Ring 1 Selingkar Wilis di Kabupaten Madiun



Untuk rencana pembangunan jalan penghubung menuju Selingkar Wilis, sebagai berikut:

Tabel 2.20
Panjang Rencana Pembangunan Jalan Penghubung

NO	RUAS	PANJANG (Km)
1	Jl. Dolopo - Bts. Ponorogo (022)	5,67
2	Jl. Batas Kota Madiun – Dungus – Kare (016)	9,74
3	Jl. Segulung - Suluk (090)	14,96
4	Jl. Dagangan – Pesanggrahan (087)	11,5
5	Jl. Blabakan - Randualas (127)	14,52
6	Jl. Kare - Randualas (150)	3,43
7	Caruban-Morang-Kare	20,00
8	Jl. Saradan - Mundu (008)	12,11
9	Jl. Slambur –Segulung (041) Ketandan-Mendak (089) Mendukung Pembangkit Listrik Panas Bumi	16,55
10	Jalan lingkaran selatan	28,30
JUMLAH		136,78

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

3) Sistem Jaringan Jalan

Rencana pengembangan sistem jaringan jalan meliputi:

- a) Jalan nasional sebagai jalan arteri primer meliputi ruas Nganjuk – Mejayana– Ngawi.

- b) Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Mejayan–Madiun–Maospati– Ngawi.
- c) Jalan propinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Madiun–Ponorogo.
- d) Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun–Ponorogo.
- e) Jalan kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer meliputi ruas :
 - Nganjuk–Madiun–Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/ Ngadipono);
 - Sawahan (Nganjuk)–Gemarang–Saradan–Pilangkenceng –Sekar (Bojonegoro);
 - Dolopo–Krandegan–Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan);
 - Bulu–Kenongorejo–Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
 - Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi)–Cermo–Randualas–Kare–Kuwiran–Wungu–Karangrejo–Mojopurno–Sidorejo–Dagangan–Kepet–Sareng (kawasan panas bumi)–Geger–Slambur;
 - Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu–Sekar (Kabupaten Bojonegoro);
 - Demangan (Kota Madiun)–Putat–Sambirejo–Kedondong–Rejosari–Mojorejo–Tambakmas–Ponorogo.
- f) Jalan kota, meliputi : Ruas lingkar perkotaan Mejayan.

4) Jalan Tembus Potensial

Jalan potensial yang dikembangkan di Kabupaten Madiun, merupakan jalan-jalan yang menuju perbatasan, meliputi:

a) Lingkar Wilis/Ngadipono (Nganjuk–Madiun–Ponorogo)

Jalan tembus ini direncanakan untuk optimalisasi pengembangan kawasan wisata Gunung Wilis dan agrowisata sehingga diharapkan kawasan wisata Gunung Wilis dapat dikembangkan dan sekaligus mempermudah distribusi hasil kegiatan pertanian disekitarnya.

b) Sawahan (Kabupaten Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng - Sekar (Kabupaten Bojonegoro)

Jalan tembus ini dikembangkan untuk optimalisasi Waduk Kedungbrubus sebagai salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten Madiun, maupun meningkatkan aksesibilitas dari Bojonegoro ke Perkotaan Mejayan.

- c) Randualas – Kawasan Agrowisata Gunung Wilis.

Untuk lebih rinci sebagai tabel berikut ini :

Tabel 2.21
Ruas Jalan Tembus Potensial Kabupaten Madiun

NO.	Nama Ruas	Panjang (Km)
1.	Jl. Lembahbang - Bts. Bojonegoro (Klino) (048)	11,98
2.	Jl. Ngepeh-Tulung (011) - Klangon (105)	19.00
3.	Jl. Bajulan-Kengorejo (002) –Sumbergandu-Bulu (112)- Bts Bojonegoro (Sekar) (115)	14,5
4.	Jl. Balerejo-muneng	7,8
5.	Jl. Teguhan-Bibrik (093)- Sidomulyo-Kanung (102) -Tiron	6,5
6.	Jl. Uteran – Batas Magetan (006)	7,1
7.	Jembatan Tiron (melintasi Kali Madiun)	280 mtr
	Jumlah	66.88

Sumber : RTRW Kabupaten Madiun Tahun 2009-2029

2.1.5.3.1. Rencana Fungsi Jaringan Jalan

Undang-undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan membagi sistem jaringan jalan dalam dua sistem yaitu sistem primer dan sistem sekunder. Sistem jaringan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peran pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan primer ini meliputi arteri primer, kolektor primer dan lokal primer. Secara administratif sistem jaringan jalan primer merupakan kewenangan pemerintah pusat dan provinsi.

Sistem jaringan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa di dalam kawasan perkotaan. Sistem jaringan sekunder ini meliputi arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder dan jalan lingkungan. Secara administratif sistem jaringan jalan sekunder merupakan kewenangan pemerintah kota atau kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut, jaringan jalan di Kabupaten Madiun berdasarkan fungsinya sebagai berikut :

- a. Jalan nasional sebagai jalan arteri primer : Ruas Nganjuk – Mejayan– Ngawi.
- b. Jalan nasional sebagai jalan kolektor primer : Ruas Mejayan– Madiun – Maospati – Ngawi.
- c. Pengusulan ruas jalan Kabupaten menjadi Jalan Provinsi, yang merupakan ruas penghubung dengan perbatasan daerah sekitar, meliputi ruas :
 - 1) Ruas jalan Bagi – Batas Ngawi sepanjang 2,71 km;
 - 2) Ruas jalan Pule – Batas Ngawi sepanjang 1,50 km;



- 3) Ruas jalan Balerejo – Muneng sepanjang 7,80 km;
 - 4) Ruas jalan Kaligunting – Bajulan sepanjang 4,96 km;
 - 5) Ruas jalan Pattimura sepanjang 1,00 km;
 - 6) Ruas jalan Uteran – Batas Magetan sepanjang 7,11 km;
 - 7) Ruas jalan Lemahbang – Klino sepanjang 11,98 km;
 - 8) Ruas jalan Krokeh – Batas Magetan sepanjang 5,37 km;
 - 9) Ruas jalan Jiwan – Batas Magetan sepanjang 3,52 km.
- d. Jalan strategis nasional meliputi ruas Madiun – Ponorogo, ruas Caruban – Saradan, ruas Caruban – Batas Kota Madiun, ruas Madiun – Maospati serta ruas Caruban – Ngawi.
- e. Jalan Kabupaten sebagai Jalan Lokal Primer, meliputi ruas:
- 1) Nganjuk – Madiun – Ponorogo (Jalan Lingkar Wilis/Ngadipono).
 - 2) Sawahan (Nganjuk) – Gemarang – Saradan – Pilangkenceng – Sekar (Bojonegoro).
 - 3) Dolopo – Krandegan – Gorang-Gareng (Kabupaten Magetan).
 - 4) Bulu – Kenongorejo – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 5) Mejayan – Klecorejo – Wonorejo – Kebonagung – Tawangrejo – Batok (kawasan panas bumi) – Cermo – Randualas – Kare – Kuwiran – Wungu – Karangrejo – Mojopurno – Sidorejo – Dagangan – Kepet – Sareng (kawasan panas bumi) – Geger – Slambur.
 - 6) Slambur – Geger – Kepet – Dagangan – Sidorejo – Mojopurno – Nglanduk – Dimong – Kebonagung – Balerejo – Kedungjati – Pacinan – Simo – Muneng – Kreet – Kenongorejo – Bulu – Sekar (Kabupaten Bojonegoro).
 - 7) Demangan (Kota Madiun) – Putat – Sambirejo – Kedondong – Rejosari – Mojorejo – Tambakmas – Ponorogo.
- f. Jalan kota meliputi ruas lingkar perkotaan Mejayan.
- g. Jalan lingkungan meliputi ruas di lingkungan permukiman dan ruas yang menghubungkan antar permukiman di seluruh kecamatan.

2.1.5.3.2. Rencana Sistem Pelayanan Angkutan Umum

Rencana Pengembangan Terminal

Seiring dengan perkembangan Kabupaten Madiun, untuk itu perlu direncanakan pengembangan terminal baik terminal barang maupun penumpang. Pengembangan terminal tersebut dapat menunjang segala aktivitas maupun kegiatan terutama sektor perekonomian. Rencana pengembangan terminal di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Terminal Penumpang

Terminal penumpang merupakan terminal angkutan darat dimana bus antar wilayah baik antar provinsi ataupun antar kabupaten dapat melakukan transit sesuai dengan jalur tujuan. Seiring dengan perkembangan angkutan penumpang Kabupaten Madiun, maka perlu pembenahan sarana dan prasarana penunjang terminal yang sesuai dengan fungsinya/kelasnya.

Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun adalah :

- 1) Peningkatan infrastruktur pendukung dan pelayanan Terminal Mejayan di Perkotaan Mejayan sebagai terminal tipe B yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota, antar provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota dan angkutan pedesaan. Rencana pengembangan terminal di Mejayan dari tipe B menjadi Tipe A, memerlukan lahan pengembangan yang lebih luas, sehingga terminal ini perlu untuk dipindahkan pada wilayah yang strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terminal Mejayan sebagai terminal Tipe A melayani jalur antar kota atau provinsi dengan trayek Surabaya – Mejayan – Madiun – Ponorogo/Magetan dan Surabaya – Mejayan – Ngawi – Solo.
- 2) Selain terminal utama, pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Madiun meliputi pengoptimalan Sub Terminal di Perkotaan Dolopo (terminal tipe C) baik pelayanan, peningkatan sarana dan prasarana maupun pengembangan jalur angkutan.
- 3) Pengembangan kawasan parkir di koridor jalan arteri primer.

b. Terminal Agribis

Selain pengembangan terminal barang, Kabupaten Madiun memerlukan terminal induk sebagai pusat pengembangan agribis (terminal agrobis) yang direncanakan di Kecamatan Dolopo.

2.1.5.3.3. Jalur Kereta Api Umum

Rencana Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Umum

Peningkatan dan pengembangan kereta api sangat dibutuhkan untuk menunjang pergerakan penumpang dan barang. Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api umum yang perlu dilakukan antara lain :

- a. Jaringan jalur ganda (double track) kereta api umum pada jalur Nganjuk – Madiun – Ngawi, telah selesai dilaksanakan;
- b. Mengembangkan kereta api komuter ruas Madiun – Ponorogo melalui konservasi jaringan jalur kereta api umum yang mati.

Sedangkan rencana pengembangan stasiun kereta api yang perlu dilakukan antara lain :

- 1) Meningkatkan infrastruktur pendukung dan pelayanan di Stasiun Kereta Api Caruban, Saradan dan Babatan;
 - 2) Mengembangkan meningkatkan Status Stasiun Kereta Api Caruban dan Saradan menjadi stasiun pemberangkatan dan pemberhentian dengan menambah frekuensi kelas eksekutif, dan Stasiun babadan sebagai stasiun barang.
- c. Sempadan Jaringan Kereta Api

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan daerah manfaat jalan kereta api adalah jalan rel beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk konstruksi jalan rel. Daerah milik jalan kereta api yaitu daerah manfaat jalan kereta api beserta tanah di kiri dan kanannya yang dipergunakan untuk pengamanan konstruksi.

- 1) Ruang Manfaat Jalan (Rumaja) Kereta Api;
- 2) Ruang Milik Jalan (Rumija) Kereta Api;
- 3) Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) Kereta Api.

Untuk perlindungan sempadan kereta api antara lain meliputi upaya penataan kawasan dengan cara merelokasi pada penduduk yang berada di sempadan rel, pengadaan taman, jalan yang menghubungkan antar kelurahan/desa, serta penataan/perbaikan lahan sempadan.

2.1.5.4 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

1. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan

a. Rencana Pengembangan Pembangkit Tenaga Listrik

Pengembangan pembangkit tenaga listrik pada kawasan perencanaan diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan daya listrik, antara lain meliputi :

- 1) Mengoptimalkan PLTA Golang dan Giringan di Kecamatan Kare
- 2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Pembangkit listrik yang sekarang sedang dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi yang terletak di Desa Mendak Kecamatan Dagangan, dalam tahap eksplorasi.

- 3) Pengembangan energi baru dan terbarukan meliputi pengembangan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, pembangkit listrik tenaga surya, dan pembangkit listrik tenaga biogas bagi kawasan terpencil yang tidak memperoleh pasokan tenaga listrik dari PLN baik secara swadaya masyarakat, bantuan dari Pemerintah maupun bantuan dari swasta.
- b. Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Energi

Tujuan dari rencana pengembangan jaringan prasarana energi adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana dan sarana jaringan energi yang berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengembangan/pembangunan daerah, terdiri dari:

 - 1) Pengembangan Jaringan Minyak dan Gas Bumi
 - 2) Pengembangan Jaringan Transmisi Tenaga Listrik dan Gardu Induk Distribusi Listrik
2. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi

Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya. Dalam hal ini, penyediaan tower BTS (Base Transceiver Station) sangat penting untuk mendukung kebutuhan telekomunikasi masyarakat, sehingga BTS dapat menjangkau ke pelosok perdesaan. Dalam pemanfaatannya BTS direncanakan menjadi BTS terpadu, hal ini dilakukan untuk menghindari terciptanya hutan tower.
3. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Sumberdaya Air Lintas Kabupaten/ Kota.

Kabupaten Madiun memiliki sumberdaya air cukup besar baik dari beberapa sungai yang melintasi Kabupaten Madiun maupun dari sumber-sumber air yang berada di waduk/embung. Dari 41 sungai yang melalui Kabupaten Madiun terdapat tiga sungai yang berada pada perbatasan Wilayah Kabupaten Madiun dengan wilayah lainnya. Sungai-sungai tersebut adalah: 1) Kali Madiun yang melalui Kota Madiun dan menjadi wilayah perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Magetan, serta perbatasan antara Kabupaten Madiun dan Kota Madiun, 2) Kali Asin yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten

Ponorogo, serta 3) Kali Widias yang menjadi batas wilayah antara Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk. Kali Madiun dan Kali Asin dimanfaatkan untuk penyediaan air irigasi di kabupaten/kota tersebut, sehingga dalam pengelolaannya perlu melibatkan kerja sama antara kabupaten/kota tersebut.

b. Rencana Pengembangan Wilayah Sungai Kabupaten Termasuk Waduk, Situ dan Embung

- 1) Usaha menambah penampungan air pada musim hujan (retarding) untuk dimanfaatkan pada musim kemarau/kering, dengan menambah waduk-waduk atau embung dengan memanfaatkan cekungan-cekungan yang ada.
- 2) Rekayasa daerah tangkapan air untuk memperoleh resapan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya, dengan tujuan untuk mempengaruhi siklus hidrologi air tanah. Salah satunya dengan memanfaatkan sumur dangkal yang sudah tidak berfungsi menjadi sumur resapan air.
- 3) Menetapkan sempadan sungai yang didukung oleh penegakan hukum.
- 4) Melakukan penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasinya.

c. Pengembangan Jaringan Irigasi

Rencana pengembangan prasarana pengairan lebih ditekankan pada upaya-upaya perbaikan saluran yang sebagian besar dalam kondisi rusak. Pengembangan akan dilakukan untuk setiap wilayah pelayanan pengairan di wilayah Kabupaten Madiun antara lain perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air; dan perluasan daerah tangkapan air.

Sedangkan upaya pengembangan pelayanan pengairan dilakukan dengan cara :

- 1) Melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
- 2) Melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air, baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai;
- 3) Mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
- 4) Pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.

d. Pengembangan Jaringan Air Baku untuk Air Bersih

Arahan pengembangan dan pengelolaan jaringan air baku untuk air bersih adalah sebagai berikut:

- 1) Air di badan-badan sungai yang berada di luar kawasan lindung dan merupakan sumber utama dengan debit yang besar dan kualitas air yang sedang sampai baik, dapat dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, perikanan, dan air baku bagi penyediaan air bersih perkotaan/perdesaan;
- 2) Air di badan-badan sungai yang termasuk kawasan lindung tidak boleh dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, kecuali untuk kondisi khusus atau telah mendapat ijin dari instansi yang berwenang;
- 3) Air di sejumlah mata air di kawasan perbukitan yang kondisi tutupan lahannya terpelihara dengan baik, dapat dimanfaatkan dengan tetap mempertimbangkan debit yang aman bagi kelestarian mata air dan bagi kawasan di bawahnya;
- 4) Air tanah dangkal di kawasan permukiman dapat dimanfaatkan terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih domestik pada skala penggunaan individu (unit rumah tangga) yang relatif kecil;
- 5) Air tanah dalam, jika potensinya mencukupi maka dapat dimanfaatkan dengan perijinan dan pengawasan oleh instansi yang berwenang.

4. Pengembangan Jaringan Air Bersih ke Kelompok Pengguna

Penyediaan dan pengelolaan air bersih di Kabupaten Madiun terbagi dalam 2 (dua) sistem, yaitu sistem jaringan perpipaan yang dikelola oleh PDAM dan sistem air bersih yang diusahakan secara mandiri oleh masyarakat (HIPAM/swakelola).

5. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir

Banjir merupakan momok bagi kawasan rawan banjir, terutama pada kawasan dengan ketinggian yang lebih rendah dari muka air sungai/air laut, kawasan pertemuan sungai dengan sungai, kawasan dengan drainase yang buruk, dan kawasan yang mempunyai tingkat porositas tanah yang rendah. Pengendalian banjir dapat dilakukan dengan pendekatan secara struktur dan non struktur.

2.1.5.5 RENCANA PENGEMBANGAN SISTEM PRASARANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Rencana Sistem Persampahan

Capaian tingkat pelayanan persampahan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.22
Capaian Pelayanan Persampahan Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2022

NO	KOMPONEN	CAPAIAN (%)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pencapaian pengurangan kuantitas sampah dari sumbernya	3,93	4,74	3,93	4,97	10,66
2	Pencapaian layanan pengelolaan sampah	36,44	42,02	36,44	43,20	45

Sumber : Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/kota, Tahun 2023

a. Jumlah Timbunan Sampah

Pola pembuangan sampah yang ada di Kabupaten Madiun dilaksanakan dengan sistem individual dan komunal yang sudah dilayani oleh sistem pengelolaan sampah umum, mulai dari pengumpulan hingga pembuangan akhir yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Sampai saat ini Kabupaten Madiun terdapat total 8 TPS3R serta 121 Bank Sampah. Sementara untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit.

b. Daerah Pelayanan

Daerah pelayanan meliputi seluruh desa di Kabupaten Madiun. Dengan sistem manajemen pengelolaan sampah, terutama untuk pengangkutan dari TPS menuju TPA yang dilakukan secara terintegrasi oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c. Kebutuhan Peralatan Persampahan

Berdasarkan prediksi jumlah timbulan sampah Kabupaten Madiun, maka dapat ditentukan jumlah kebutuhan peralatan persampahan yang harus dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun khususnya untuk pelayanan Kabupaten Madiun.

1) Umur TPA

Berdasarkan data eksisting, TPA Kaliabu seluas 6 ha diperkirakan masih mampu menampung kebutuhan sampah Kabupaten Madiun sampai Tahun 2023.

2) Arahana Pengembangan

Berdasarkan hasil prediksi dan permasalahan yang ada, maka arahan pengembangan prasarana persampahan meliputi :

- a) Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun. Selain itu perlu juga alternatif lokasi TPA baru untuk wilayah Kabupaten Madiun bagian selatan.
- b) Pemilihan lokasi baru untuk tempat pembuangan akhir harus sesuai dengan persyaratan teknis dan daya dukung lingkungan.
- c) Pengurangan masukan sampah ke TPA dengan konsep *reduce-reuse-recycle* (3R) di sekitar wilayah sumber sampah.
- d) Pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis.
- e) Rehabilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana persampahan, bergerak dan tidak bergerak.
- f) Mengembangkan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan kabupaten sekitarnya yang berkaitan untuk pengelolaan sampah dan penyediaan TPA.

2. Rencana Sistem Sanitasi Lingkungan

Tujuan rencana sistem sanitasi lingkungan adalah memenuhi kebutuhan akan sistem prasarana yang berfungsi mengalirkan air limbah domestik (air limbah rumah tangga) yang berasal dari perumahan dan permukiman, dalam mencapai ruang hidup yang sehat dan produktif. Arahan pengembangan pengelolaan sistem pembuangan air limbah di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Limbah Rumah Tangga
- b. Untuk Limbah Cair Rumah Sakit/Puskesmas
- c. Untuk Limbah Cair Industri

3. Rencana Sistem Pengembangan Jaringan Drainase

Tujuan dari rencana sistem pengembangan saluran drainase di Kabupaten Madiun adalah mengalirkan air permukaan ke badan air penerima atau bendungan resapan buatan, dalam mencapai ruang

hidup yang sehat dan produktif. Sistem drainase di Kabupaten Madiun masih menggunakan sistem drainase gabungan yang mempunyai jaringan saluran pembuangan yang sama baik untuk air permukaan maupun air limbah yang diolah. Penanganan pada sistem drainase di Kabupaten Madiun adalah:

- a. Saluran primer : melalui program kali bersih, normalisasi dan perawatan lainnya.
- b. Saluran sekunder, saluran tersier dengan berbagai dimensi yang mengikuti sistem jaringan jalan.

2.1.5.6 RENCANA PENGEMBANGAN PRASARANA PENDUKUNG

1. Fasilitas Pendidikan

Arahan pembangunan fasilitas pendidikan di kabupaten Madiun sebagai berikut :

- a. Pembangunan fasilitas pendidikan ditekankan pada upaya peningkatan kualitas pendidikan melalui pembenahan prasarana dan sarana yang telah ada maupun pembangunan fasilitas baru mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai SLTP.
- b. Pembangunan fasilitas-fasilitas pendidikan baru tingkat dasar sampai SLTP dilakukan secara tersebar pada lokasi-lokasi fasilitas umum disekitar kawasan permukiman yang sesuai dengan tingkat dan lingkup pelayanannya.

2. Fasilitas Kesehatan

Pembangunan fasilitas kesehatan diarahkan sebagai berikut :

- a. Pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan yang ada maupun pembangunan fasilitas kesehatan baru.
- b. Pembangunan fasilitas kesehatan baru dilakukan tersebar pada lokasi-lokasi yang strategis, dekat dengan lingkungan permukiman dan mudah dijangkau.

3. Fasilitas Peribadatan

Pembangunan fasilitas peribadatan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta untuk memenuhi kebutuhan tempat beribadah sesuai dengan agama yang dianut dan skala pelayanannya.

4. Fasilitas Perdagangan

Kebutuhan fasilitas utama perdagangan adalah pasar. Selain fasilitas tersebut pada kawasan Perkotaan Mejayana dibutuhkan juga hotel,



restoran, showroom, aktivitas perbankan dan kegiatan perdagangan dan jasa lainnya.

5. Fasilitas Pemerintahan

Pembangunan gedung-gedung pemerintahan terus dikembangkan di pusat pemerintahan di Perkotaan Caruban, Mejayan.

6. Taman dan Fasilitas Olah Raga

Pengembangan fasilitas olah raga di Kabupaten Madiun dimaksudkan agar dapat memenuhi kebutuhan olah raga baik pada skala kabupaten maupun kecamatan. Kabupaten Madiun membutuhkan fasilitas olah raga berupa :

- a. Lapangan olah raga skala kecamatan yang dialokasikan di setiap kecamatan.
- b. Lapangan olah raga skala kabupaten yang dialokasikan di Perkotaan Mejayan.
- c. Jumlah Sarana Prasarana OLah Raga

Data sarana prasarana Olahraga yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.23
Sarana Prasarana Olah Raga

No	Nama Barang	Jumlah	Satuan	Tahun Pengadaan
1	Matras Bulu Tangkis	2	SET	2017
2	Matras Voli	1	SET	2017
3	Matras Voli	1	SET	2019
4	Matras Voli	1	SET	2020
5	Matras Voli	1	SET	2020
6	Matras Silat	1	UNIT	2022
7	Matras Voli	3	SET	2022
8	Matras Badminton	2	SET	2022

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun Tahun 2023

7. Fasilitas Seni dan Budaya

Telah dibangunnya Gedung Kampung Pesilat di Perkotaan Mejayan diharapkan akan mampu menambah nilai tambah di sektor seni dan budaya di Kabupaten Madiun.

Pengembangan fasilitas seni dan budaya di Kabupaten Madiun berupa ruang serbaguna, gedung pertemuan serta fasilitas kesenian dan budaya. Pembangunan fasilitas seni dan budaya dilakukan dengan pengembangan fasilitas yang sudah ada maupun pembangunan fasilitas baru. Kebutuhan fasilitas baru membutuhkan penambahan:

- a. 1 (satu) unit gedung pertemuan dialokasikan di Perkotaan Mejayan;

b. 1 (satu) unit balai budaya dialokasikan di Perkotaan Mejayan.

8. Fasilitas Pemakaman

Pembangunan tempat pemakaman umum dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan tempat pemakaman umum di daerah.

9. Ruang Terbuka Hijau

Pembagian RTH kawasan perkotaan terdiri dari RTH publik dan RTH privat. RTH publik merupakan RTH yang dimiliki oleh kota/kawasan perkotaan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai adalah RTH terbuka. Sedangkan yang termasuk RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Proporsi RTH kawasan perkotaan di wilayah Kabupaten Madiun adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Pembagian RTH ini terdiri dari RTH publik paling sedikit 20% dan RTH privat 10%. Distribusi RTH kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan umum merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama periode tertentu terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga.

2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

2.2.1.1 PERTUMBUHAN PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan



menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan



Tabel 2.24

Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2017-2022 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.492.699,270	3.413.896,410	3.489.565,930	3.529.158,620	3.586.512,700	3.441.314,600
B	Pertambangan dan Penggalan	121.489,840	124.515,210	125.121,780	117.176,830	117.136,200	119.308,200
C	Industri Pengolahan	1.231.189,270	1.351.346,640	1.448.367,990	1.427.885,130	1.534.977,400	1.977.630,300
D	Pengadaan Listrik dan Gas	11.496,370	12.583,600	13.433,870	13.233,190	13.851,000	14.757,900
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20.284,280	21.431,830	23.003,200	23.810,510	25.666,400	27.520,300
F	Konstruksi	1.396.635,650	1.535.716,030	1.626.630,420	1.526.666,400	1.538.194,100	1.655.748,600
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.962.849,990	2.129.366,300	2.304.013,040	2.171.576,890	2.294.309,500	2.426.476,800
H	Transportasi dan Pergudangan	194.410,640	211.184,470	230.613,880	218.561,230	239.164,100	279.576,100
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	288.979,930	313.605,270	336.092,190	309.100,680	327.316,800	360.098,300
J	Informasi dan Komunikasi	963.749,640	1.040.985,960	1.115.302,780	1.196.824,220	1.261.805,900	1.321.222,900
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	342.134,850	370.963,050	384.197,380	380.010,980	383.465,400	401.247,900
L	Real Estate	216.238,730	232.646,680	246.753,620	255.848,000	262.860,200	277.339,000
M,N	Jasa Perusahaan	40.497,240	43.638,200	46.526,910	43.092,760	43.674,700	45.300,500
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	668.956,880	682.624,460	708.587,050	692.971,990	705.029,700	704.236.100
P	Jasa Pendidikan	525.804,070	560.188,960	594.679,300	603.620,360	606.662,600	628.972,100
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	104.394,940	112.549,190	120.729,960	131.928,770	124.321,900	128.705,400
R,S,T,U	Jasa lainnya	297.525,010	327.765,430	348.220,940	298.117,320	307.381,400	360.167,700
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		11.879.336,610	12.485.007,710	13.161.840,220	12.939.583,860	13.372.329,800	14.169.622,600

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan struktur perekonomian suatu wilayah dari tahun ke tahun, yang mana jika dilihat dari data PDRB pada diatas, 3 sektor terbesar pembentuk PDRB Kabupaten Madiun Tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar Rp. 3.441.314.600.000-. Terbesar kedua adalah Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 2.426.476.800.000-. dan terbesar ketiga sektor industri pengolahan sebesar Rp. 1.977.630.300.000-.

Tabel 2.25
Pendapatan Regional Domestik Bruto (PDRB) atas dasar harga Berlaku tahun 2017-2022 (dalam juta)

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.193.231,160	5.238.173,450	5.462.368,540	5.584.019,160	5.614.613,800	5.799.021,700
B	Pertambangan dan Penggalian	168.427,780	178.352,010	181.271,300	171.624,030	175.489,200	184.481,200
C	Industri Pengolahan	1.670.199,360	1.879.372,630	2.054.893,700	2.080.044,450	2.336.552,600	3.048.730,400
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15.257,820	17.316,580	18.781,350	18.694,950	20.013,900	21.709,600
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	25.066,750	26.667,860	28.290,290	29.358,120	31.915,000	35.224,800
F	Konstruksi	2.121.269,000	2.354.269,370	2.506.518,830	2.358.085,420	2.402.935,000	2.734.590,800
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.597.440,250	2.936.344,160	3.254.290,390	3.176.178,140	3.450.453,800	3.844.156,300
H	Transportasi dan Pergudangan	273.538,590	302.493,650	338.142,300	327.372,460	358.645,500	441.254,200
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	385.858,160	423.765,150	459.827,910	427.623,290	472.824,000	536.232,800
J	Informasi dan Komunikasi	1.064.849,200	1.150.789,690	1.248.415,840	1.344.341,370	1.420.460,700	1.508.489,500
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	444.342,780	494.350,550	516.855,250	518.329,580	543.369,100	621.252,000
L	Real Estate	272.176,450	303.331,890	330.169,100	350.005,250	362.643,200	385.814,700
M,N	Jasa Perusahaan	55.851,110	62.689,550	68.594,090	65.135,350	67.239,100	70.803,600
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	932.518,210	996.364,560	1.089.978,350	1.112.746,530	1.130.455,400	1.140.985,200
P	Jasa Pendidikan	664.239,230	720.324,540	777.423,670	799.763,510	801.217,800	837.144,800



Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	128.472,150	139.069,510	153.036,970	170.051,630	163.983,900	176.209,700
R,S,T,U	Jasa lainnya	362.103,480	412.421,540	442.692,890	383.781,700	407.201,000	493.279,100
PRODUK REGIONAL BRUTO	DOMESTIK	16.374.841,490	17.636.096,670	18.931.550,750	18.917.154,930	19.760.012,900	21.879.380,200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

Sebagaimana PDRB atas dasar harga konstan, 3 sektor terbesar PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Madiun tahun 2022 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan nilai Rp. 5.799.021.700.000,-. sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor senilai Rp. 3.844.156.300.000,-. Sektor konstruksi sebesar Rp. 2.734.590,800.000, -

2.2.1.2 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu daerah, seperti penambahan jumlah industri, penambahan produksi sektor-sektor ekonomi, penambahan jumlah fasilitas infrastruktur (sekolah, jalan, rumah sakit dan fasilitas umum), penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah ada dan perkembangan-perkembangan lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB atas dasar harga konstan merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat sektoralnya, artinya apabila sebuah sektor mempunyai peranan paling penting dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini dapat mengakibatkan terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sebuah sektor mempunyai peranan penting dan pertumbuhannya tinggi, maka sektor tersebut dapat menjadi lokomotif yang menarik pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga total pertumbuhan ekonomi menjadi besar. Dengan kata lain, gejala sekecil apapun pada sektor yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perekonomian Kabupaten Madiun berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 21.879.380,2 juta rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar 14.169.622,6 juta rupiah. Ekonomi Madiun tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,32 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 17,71 persen; lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan yaitu sebesar 16,90 persen. Struktur ekonomi Madiun pada tahun 2022 masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

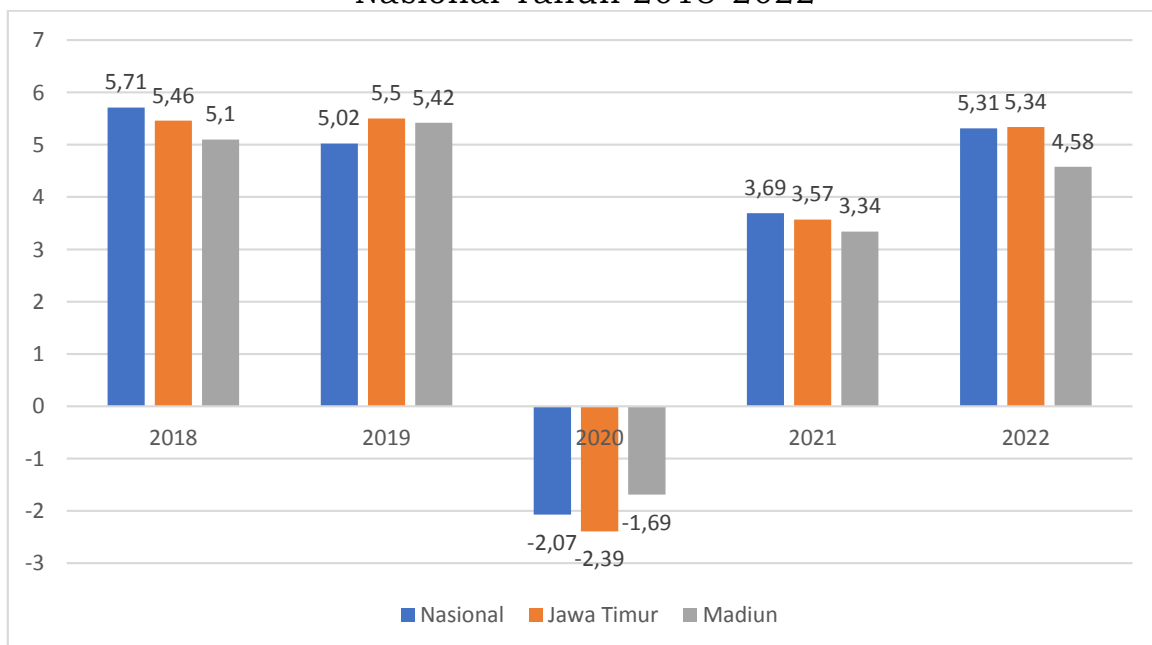
dengan kontribusi sebesar 26,50 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran didominasi oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 72,71 persen.

Tabel 2.26
Pertumbuhan Ekonomi per Sektor Kabupaten Madiun
Tahun 2017 - 2022

Kategori	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,13	-2,26	2,22	1,13	1,63	-4,05
B	Pertambangan dan Penggalian	5,35	2,49	0,49	-6,35	-0,03	1,85
C	Industri Pengolahan	8,13	9,76	7,18	-1,41	7,5	13,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,1	9,46	6,76	-1,49	4,67	6,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,86	5,66	7,33	3,51	7,79	7,22
F	Konstruksi	10,19	9,96	5,92	-6,15	0,76	7,64
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,29	8,48	8,2	-5,75	5,65	5,76
H	Transportasi dan Pergudangan	7,64	8,63	9,2	-5,23	9,43	16,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,76	8,52	7,17	-8,03	5,89	10,02
J	Informasi dan Komunikasi	7,31	8,01	7,14	7,31	5,43	4,71
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7	8,43	3,57	-1,09	0,91	4,64
L	Real Estate	7,21	7,59	6,06	3,69	2,74	5,51
M,N	Jasa Perusahaan	5,76	7,76	6,62	-7,38	1,35	3,72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,23	2,04	3,8	-2,2	1,74	-0,11
P	Jasa Pendidikan	6,04	6,54	6,16	1,5	0,5	3,68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,33	7,81	7,27	9,28	-5,77	3,53
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,05	10,16	6,24	-14,39	3,11	17,17
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		5,42	5,1	5,42	-1,69	3,34	4,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

Grafik 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Madiun Berbanding Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

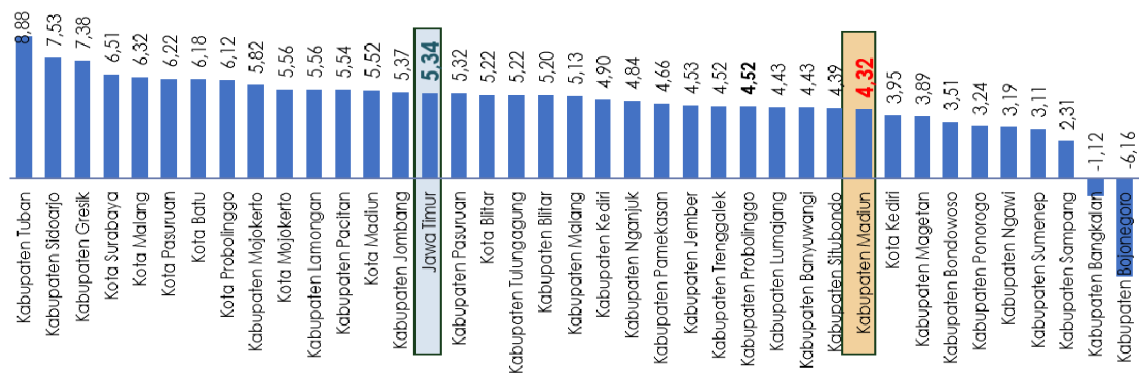
*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun secara umum mengalami fluktuatif. Pada tahun 2019 mengalami pertumbuhan dibandingkan tahun

2018, dari 5,1 tumbuh menjadi 5,42. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mulai berkontraksi karena adanya pandemi covid-19 menjadi minus (-) 1,69. Pada tahun 2021 tumbuh menjadi 3,34 dan kembali meningkat pada tahun 2022 menjadi 4,58.

Grafik 2.5
Pertumbuhan dan Distribusi Per Sektor Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

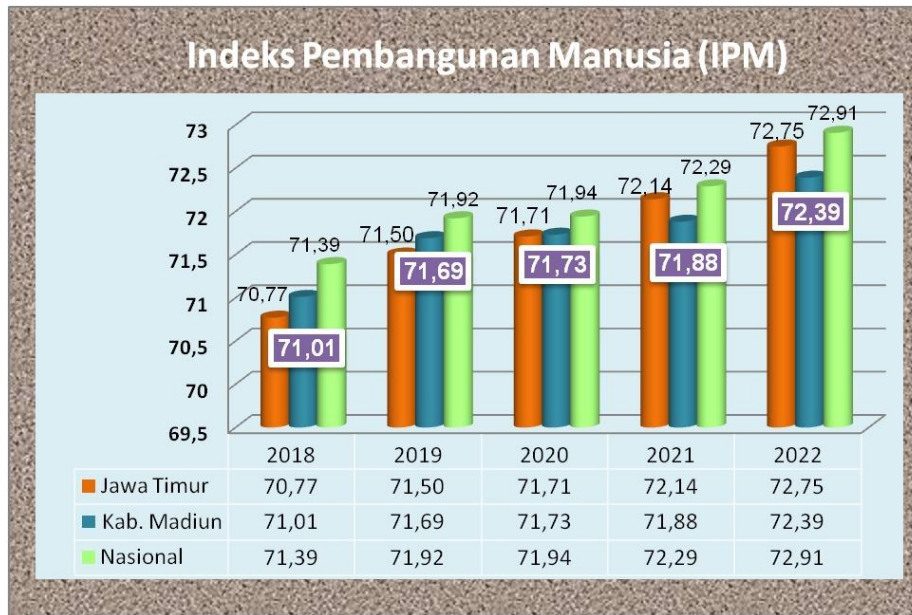
Grafik diatas menunjukkan posisi pertumbuhan ekonomi kabupaten Madiun diantara kabupaten/Kota lain di Jawa Timur. Kabupaten Madiun berada di posisi 22 pertumbuhan ekonomi dan masih berada di bawah Jawa Timur.

2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL

2.2.2.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

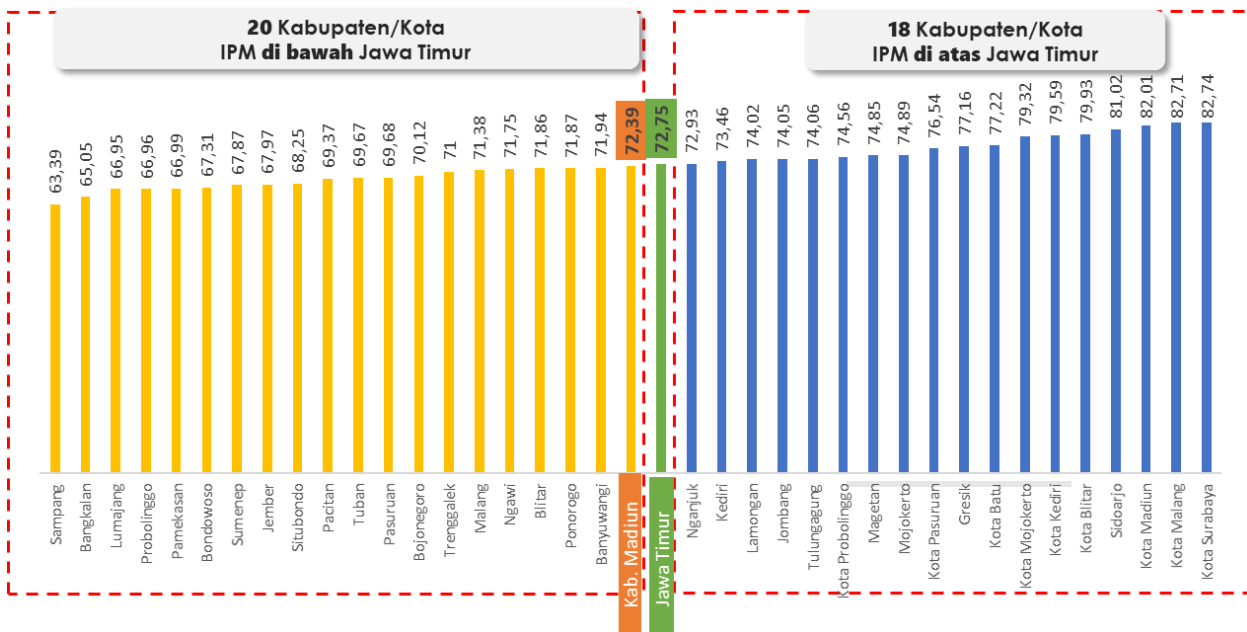
Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah salah satu hal yang perlu diperhatikan. Peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini di dasari bahwa manusia adalah subyek dan obyek dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia memiliki fungsi untuk mengukur seberapa baik pembangunan sumber daya manusia melalui beberapa dimensi, diantaranya adalah harapan hidup, pengetahuan dan standar kehidupan yang layak. Selain itu IPM juga berfungsi sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan atau sebagai ukuran kinerja pemerintah. Berikut adalah Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten Madiun:

Grafik 2.6
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Madiun Berbanding Provinsi dan nasional



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, diolah

Grafik 2.7
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023, diolah

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa nilai IPM di Kabupaten Madiun mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2018 adalah sebesar 71,01 kemudian pada tahun 2022 menjadi 72,39. Adapun nilai IPM bila dilihat berdasarkan kategori nilai IPM yaitu:

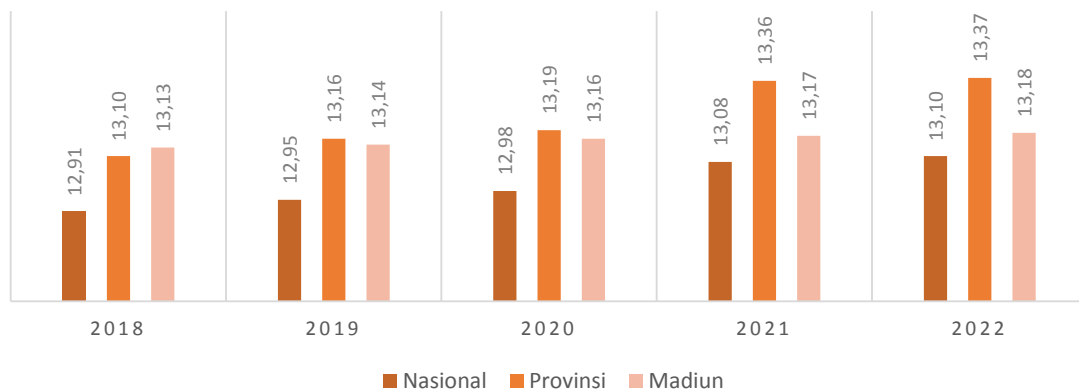
1. Kategori "sangat tinggi" : IPM ≥ 80
2. Kategori "tinggi" : 70 ≤ IPM < 80
3. Kategori "sedang" : 60 ≤ IPM < 70
4. Kategori "rendah" : IPM < 60

Berdasarkan kategori dari nilai IPM tersebut diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga tahun 2022 **berada pada kategori Tinggi**. Adapun nilai IPM Kabupaten Madiun bila dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Jawa Timur nilai IPM Kabupaten Madiun berada di bawah nilai IPM Provinsi Jawa Timur dan berada di peringkat 19 IPM tertinggi di Jawa Timur.

2.2.2.1.1. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) atau Expected Years of Schooling (EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

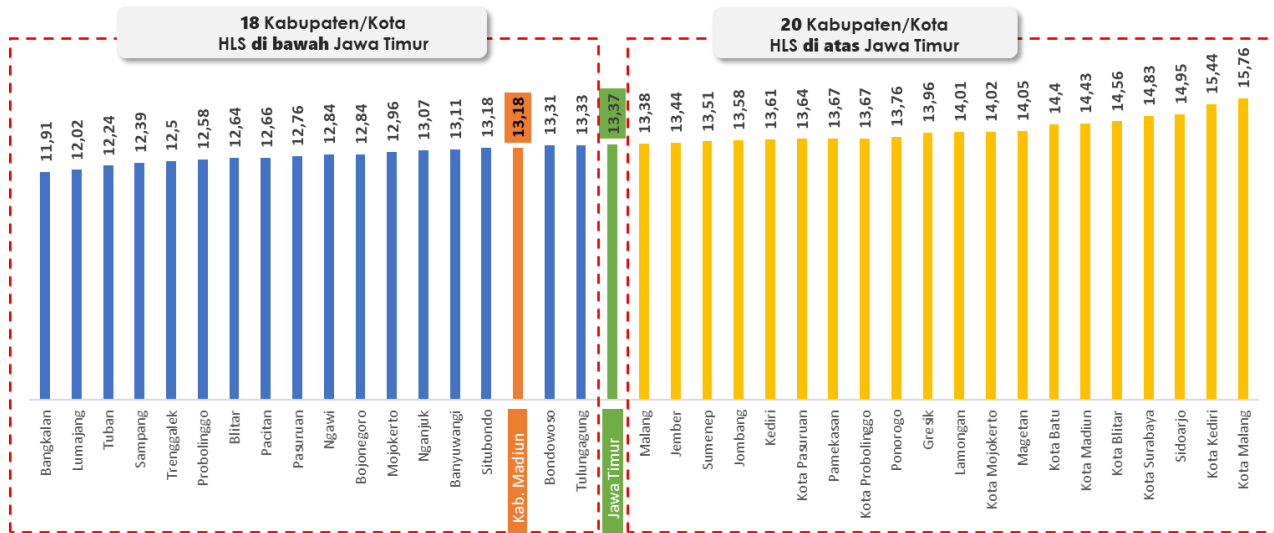
Grafik 2.8
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018–2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

Harapan Lama Sekolah Kabupaten Madiun dari tahun 2018–2022 cenderung mengalami peningkatan. Meningkatnya angka harapan lama sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin tinggi peluang masyarakat untuk bersekolah. Data menunjukkan tahun 2022 peluang masyarakat Kabupaten Madiun untuk mengenyam pendidikan hingga usia tertentu 13,18 atau setara Diploma. Pertumbuhan yang positif ini juga merupakan modal penting untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Madiun. Artinya kualitas sumber daya manusia dari sisi pendidikan yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan. Harapan Lama Sekolah Kabupaten Madiun menempati peringkat 23 tertinggi di Jawa Timur, dengan posisi berada dibawah angka rata-rata Jawa Timur.

Grafik 2.9
Harapan Lama Sekolah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

2.2.2.1.2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Angka Rata-rata Lama Sekolah siswa atau *Means Years of Schooling (MYS)* dapat dipahami dan dijelaskan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Madiun tahun 2022 mencapai 7,94 tahun menunjukkan bahwa secara umum rata-rata penduduk Jawa Timur usia 25 tahun ke atas sebagian besar telah mengenyam pendidikan setara kelas VIII (SMP kelas II).

Grafik 2.10
Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022

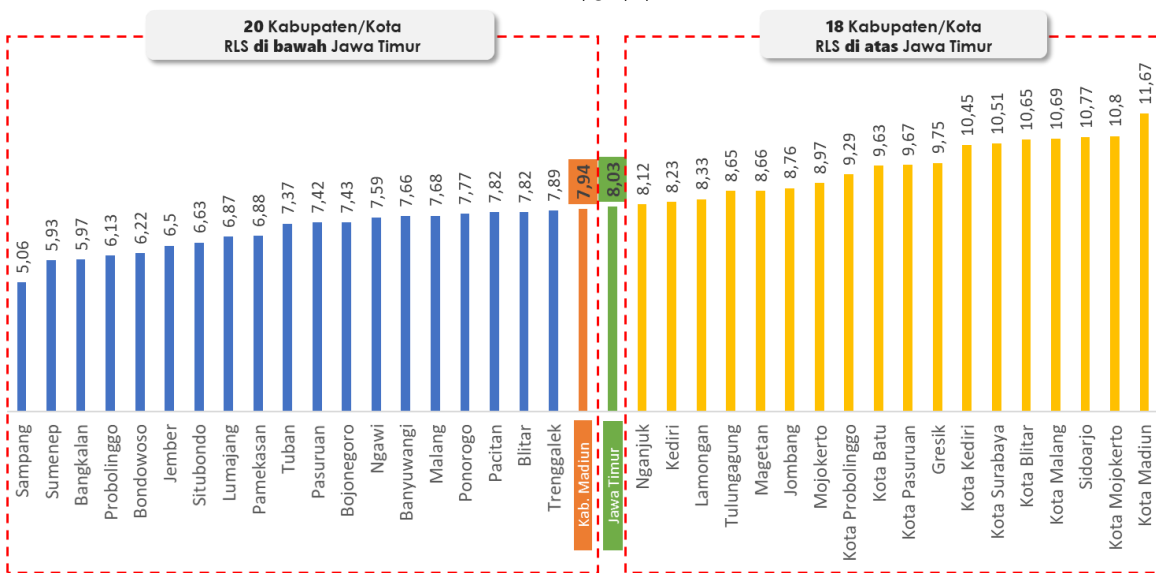


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Madiun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 memiliki tren capaian yang positif, namun demikian

capaian angka rata-rata lama sekolah ini masih belum menyentuh angka wajib belajar 9 tahun. Secara umum Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Madiun berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Madiun berada di peringkat 19 tertinggi di Jawa Timur pada tahun 2022 yaitu pada nilai 7,94, posisi ini berada tepat di bawah rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur yaitu 8,03.

Grafik 2.11
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

2.2.2.1.3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Selain itu AHH merupakan instrumen yang dapat mencerminkan hasil dari upaya pemerintah Kabupaten Madiun dalam rangka menyediakan layanan kesehatan pada masyarakat secara umum. Indeks Kesehatan dapat dilihat dari Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Madiun.

Grafik 2.12
Perbandingan Usia Harapan Hidup Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Madiun terus meningkat, hal ini menggambarkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Madiun terus membaik. Peningkatan usia harapan hidup yang mencapai 71,90 tahun menjadi indikasi bahwa peningkatan layanan kesehatan telah memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat Madiun. Angka 71,9 Tahun diartikan bahwa rata-rata bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bertahan hidup sampai dengan usia 71,90 Tahun. Angka Harapan Hidup pada tahun 2021-2022 meningkat sebesar 0,4 Tahun, ini berarti termasuk dalam kondisi kategori baik mengingat adanya upaya pemulihan pasca pandemi. Posisi Angka Harapan Hidup Kabupaten Madiun tahun 2022 berada pada peringkat ke 26 diantara kota/kabupaten di provinsi Jawa Timur. Posisi ini juga masih berada diatas Jawa Timur, namun demikian meskipun berada di atas Jawa Timur, berbagai upaya perbaikan perlu mendapat perhatian.

Grafik 2.13
Angka Harapan Hidup Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

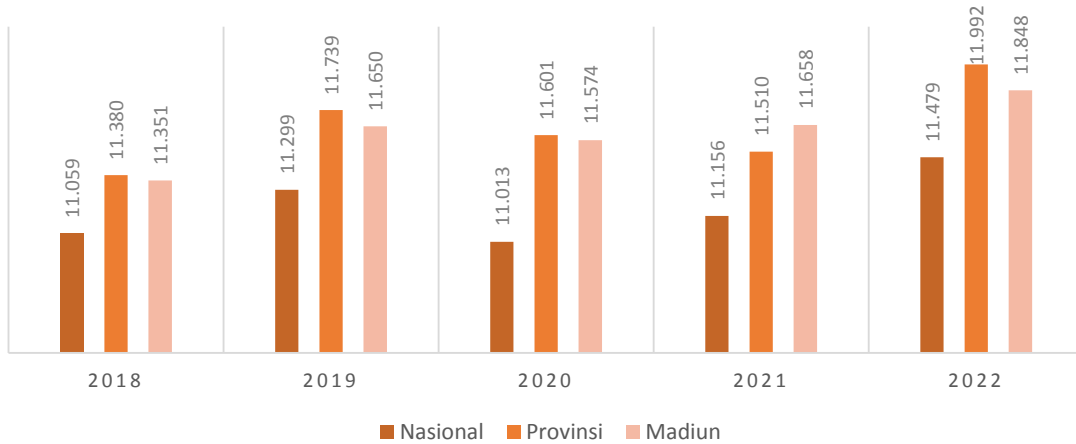


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

2.2.2.1.4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Penghitungan paritas daya beli mengacu pada Kota Jakarta Selatan, sementara tahun rujukan adalah 2012.

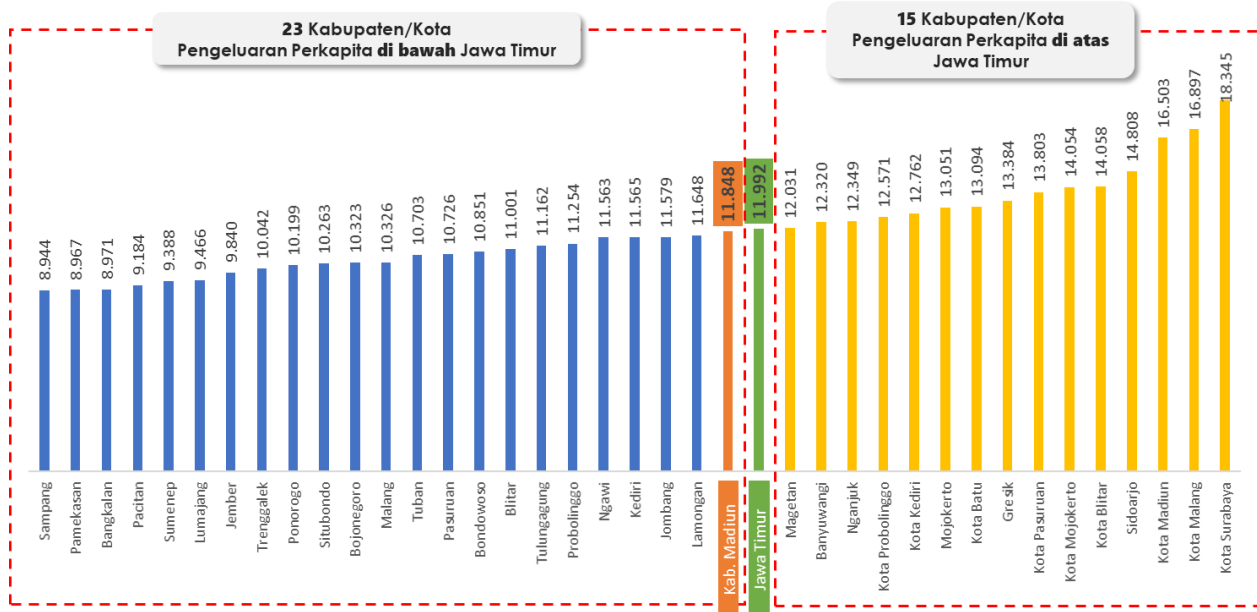
Grafik 2.14
Perbandingan Pengeluaran perkapita Disesuaikan Kabupaten Madiun,
Provinsi Jawa Timur dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023, diolah

Semakin tinggi pengeluaran per kapita menggambarkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk. Dalam lima tahun terakhir pengeluaran perkapita Kabupaten Madiun terus mengalami peningkatan. Namun tahun 2019 sempat mengalami penurunan dan tahun 2020 kembali meningkat. Kebijakan WFH pada masa pandemi merupakan cara yang paling efektif untuk pemulihan kondisi, namun demikian ada konsekuensinya yaitu perekonomian masyarakat menurun. Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Madiun tahun 2022 diantara kabupaten Kota di Jawa Timur berada pada posisi 16 tertinggi dengan capaian sebesar 11,848, namun masih dibawah Jawa Timur.

Grafik 2.15
Pengeluaran perkapita Disesuaikan Kabupaten / Kota Provinsi Jawa
Timur Tahun 2022

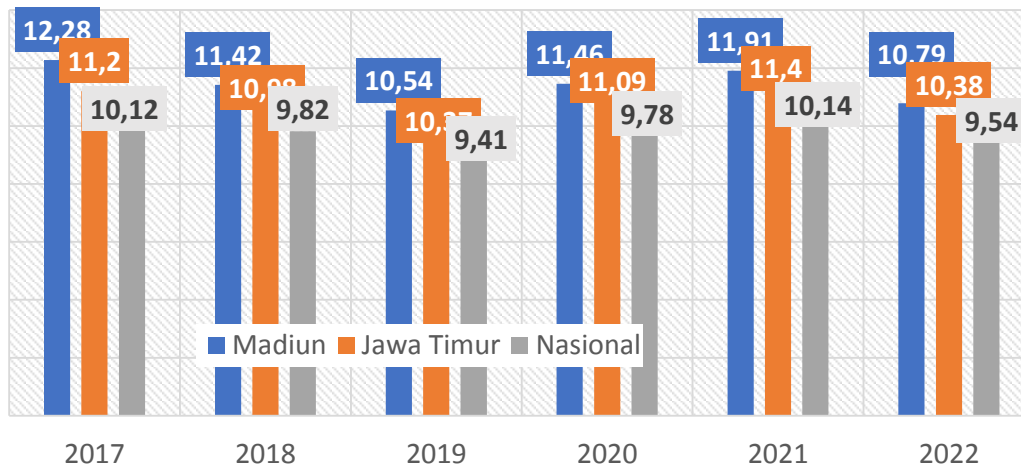


Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2023

2.2.2.2 KEMISKINAN

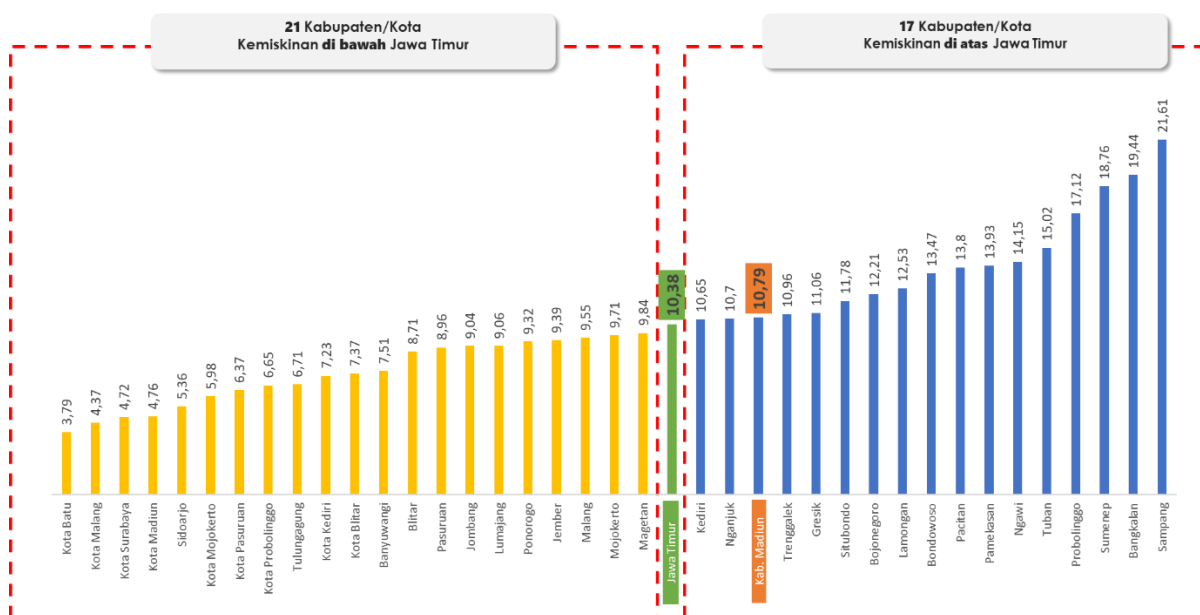
Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Sedangkan Penduduk miskin ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Berikut adalah persentase kemiskinan di Kabupaten Madiun:

Grafik 2.16 Persentase Kemiskinan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2017-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Grafik 2.17 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, diketahui bahwa persentase kemiskinan di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami fluktuatif. Angka terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,54. Pada tahun 2022 mengalami penurunan dari 11,91 tahun 2021 menjadi 10,79 pada tahun 2022 atau turun sebesar 1,12 persen dari tahun 2021. Persentase kemiskinan di

Kabupaten Madiun bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional di Kabupaten Madiun persentasenya lebih besar dari angka Nasional maupun dengan Provinsi Jawa Timur. Namun bila dibandingkan dengan capaian persentase kemiskinan Kabupaten/Kota se Jawa Timur, Kabupaten Madiun menempati urutan ke 24 terendah.

2.2.2.3 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Gender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan gender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak menjadi masalah bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan gender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara perlu diwujudkan secara bertahap dan berkesinambungan. Berikut data Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kabupaten Madiun:

Tabel 2.27

Indeks Pembangunan Gender kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

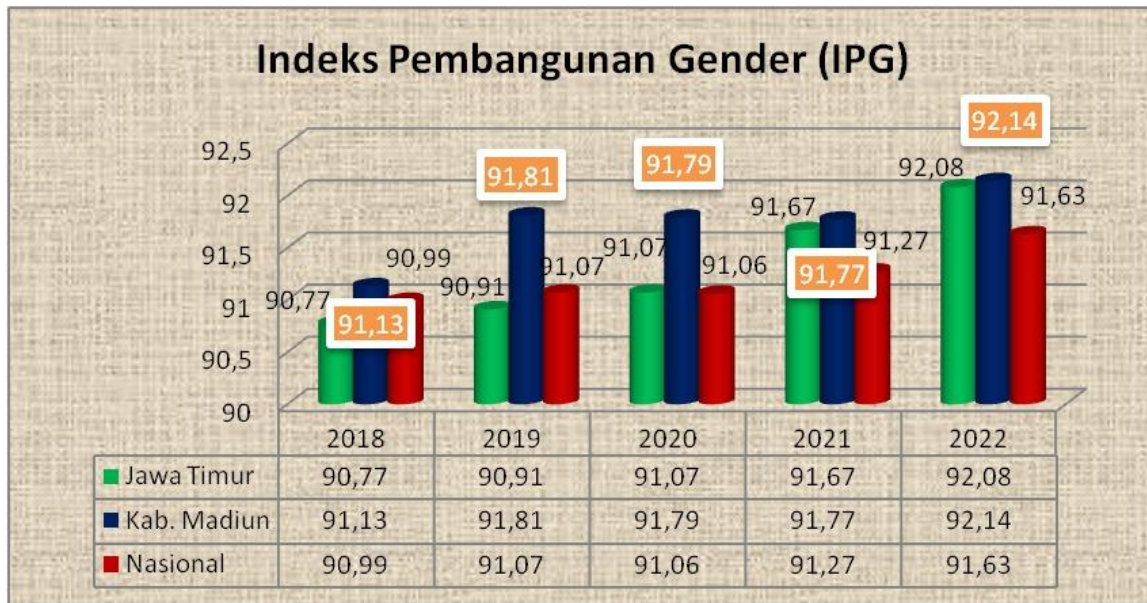
Indikator	2018	2019	2020	2021	2022
Indeks pembangunan gender	91,13	91,81	91,79	91,77	92,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

IPG adalah ukuran pembangunan manusia yang merupakan komposit dari empat indikator, yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. Diharapkan dari angka IPG ini mampu memberikan sebagian penjelasan mengenai program-program pembangunan yang sudah mengakomodasi kesetaraan dan keadilan gender. Pembangunan Manusia secara kuantitatif dapat digambarkan dari angka IPM. Namun demikian, angka IPM ini belum mampu menjelaskan perbedaan capaian kualitas hidup antara laki-laki dan perempuan. Melalui angka IPG, kesenjangan atau gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan mampu dijelaskan dengan melihat rasio antara IPG dengan IPM. Semakin tinggi rasionya maka semakin rendah gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan, sebaliknya semakin rendah rasio maka semakin tinggi gap kemampuan dasar antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa pada 5 tahun terakhir diketahui bahwa adanya peningkatan pada nilai IPG yaitu pada tahun 2017 adalah sebesar 91,61 dan kemudian pada

tahun 2021 meningkat menjadi 91,77. Perbandingan IPG Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur dan Nasional dari Tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat disajikan pada grafik dibawah ini.

Grafik 2.18
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber : BPS Tahun 2023

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR

2.3.1.1 KESEHATAN

2.3.1.1.1 Angka Kematian Bayi

Angka Kematian bayi di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.19
Angka Kematian bayi Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terjadi peningkatan Angka Kematian Bayi pada setiap tahunnya. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan yang sangat signifikan. Angka Kematian Bayi paling tinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 8,25 per 1000 kelahiran hidup dan pada tahun 2022 turun menjadi 0,62 per 1000 kelahiran hidup.

2.3.1.1.2 Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.20
 Angka Kematian Ibu di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Peningkatan Angka Kematian Ibu yang sangat tinggi khususnya pada tahun 2019 hingga tahun 2021 dimana pada tahun 2021 angka kematian ibu sudah menyentuh angka 400 lebih. Peningkatan angka kematian ibu tersebut dikarenakan kecukupan bidan yang belum ideal sehingga kurangnya penanganan bagi ibu melahirkan dan penanganan kasus komplikasi kebidanan. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan dalam penanganan kelahiran atau persalinan melalui penanganan persalinan pada fasilitas kesehatan yang ada. Namun pada tahun 2022 angka kematian ibu turun secara signifikan menjadi 77,19.

2.3.1.1.3 Angka Kematian Balita

Angka Kematian balita di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.21
 Angka Kematian Balita di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

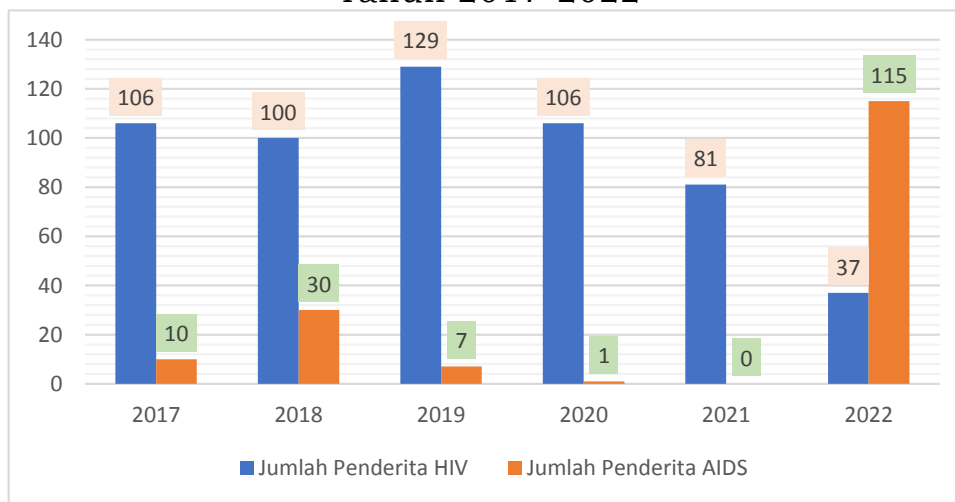


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Peningkatan angka kematian balita pada tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan yang fluktuatif dimana angka tertinggi terjadi pada 2021 yaitu sebesar 1,37 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan angka kematian balita antara lain juga di dorong adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap kesehatan bagi masyarakat sehingga perhatian masyarakat terhadap kesehatan balita masih kurang. Akan tetapi pada tahun 2022 angka kematian balita mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 0,90 seiring meredanya pandemi covid-19 dan meningkatnya kinerja bidang kesehatan.

2.3.1.1.4 Penderita HIV dan AIDS

Grafik 2.22
Jumlah Penderita HIV dan AIDS di Kabupaten Madiun
Tahun 2017-2022

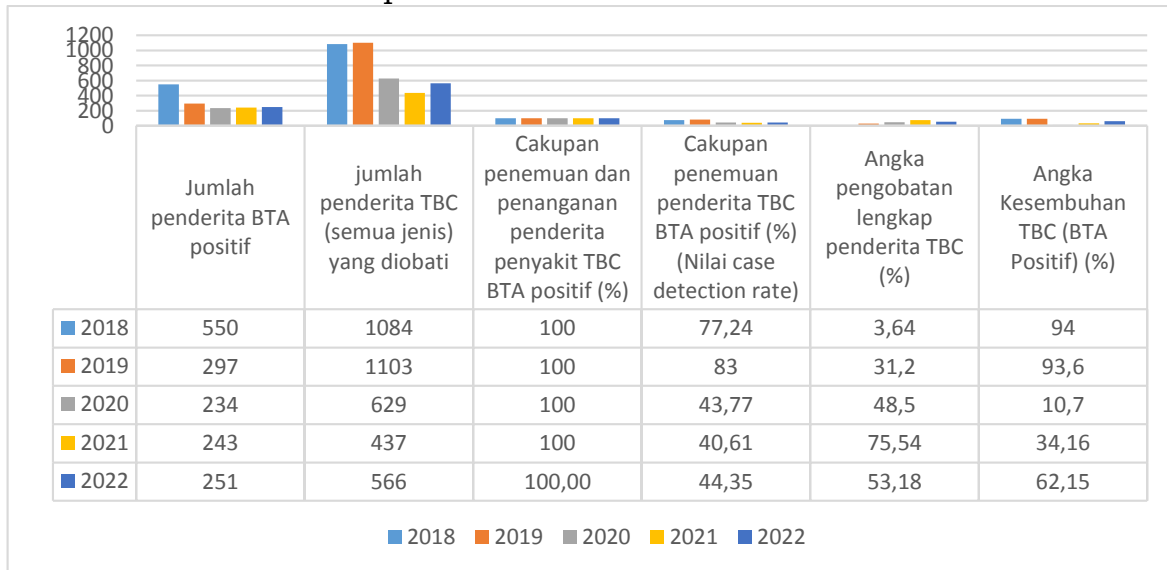


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Meskipun Jumlah Penderita HIV/AIDS pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami kecenderungan penurunan yang signifikan, tetapi bila dilihat jumlah penderita HIV/AIDS pada tahun 2022 masih termasuk banyak karena diatas 20 penderita HIV/AIDS.

2.3.1.1.5 Kasus TBC dan BTA Positif

Grafik 2.23
Kasus dan Jumlah Penderita TBC dan BTA Positif di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

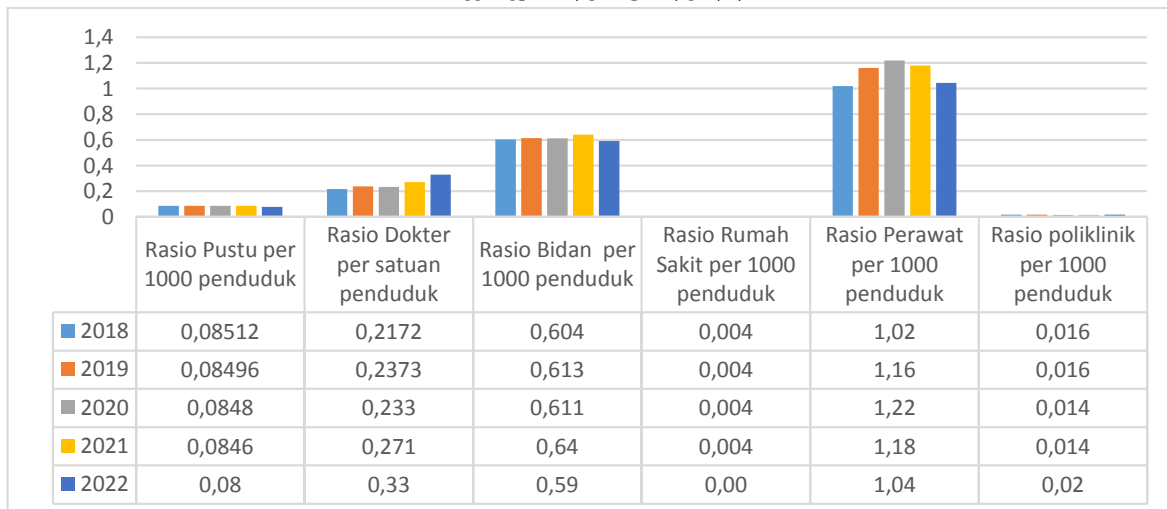


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pada penderita TBC BTA positif di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 hingga 2022 mengalami penurunan dan penanganan pada penderita pada tahun 2018 mengalami penurunan yang drastis hingga 2022 mengalami kenaikan yang signifikan dimana pada tahun 2022 penanganan penderita TBC BTA sudah diatas 50%. Meskipun angka penderita TBC BTA mengalami penurunan dan penanganan terhadap penderita TBS BTA mengalami kenaikan, tetapi Angka Kesembuhan penderita TBC BTA mengalami kenaikan dari tahun 2021 dan 2022 dimana kesembuhan penderita TBC BTA diatas 50%.

2.3.1.1.6 Sarana Prasarana Kesehatan

Grafik 2.24
Rasio Sarana dan Prasarana Kesehatan di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Rasio jumlah poliklinik terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Madiun masih dibawah angka 1 sehingga jumlah poliklinik yang ada saat ini masih belum terpenuhi. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio poliklinik terhadap 1000 penduduk mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tidak dibarengi dengan jumlah poliklinik yang ada.

Rasio jumlah pustu terhadap 1000 penduduk masih dibawah angka 1 sehingga jumlah pustu yang ada saat ini masih belum terpenuhi. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio pustu terhadap 1000 penduduk mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tidak dibarengi dengan jumlah pustu yang ada.

Rasio jumlah Rumah Sakit terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Madiun masih dibawah angka 1 sehingga jumlah Rumah Sakit yang ada saat ini masih belum terpenuhi. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio Rumah Sakit terhadap 1000 penduduk mengalami penurunan sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tidak dibarengi dengan jumlah Rumah Sakit yang ada.

Rasio jumlah Dokter ideal adalah setiap 1 dokter mampu menangani 1.000 penduduk, rasio dokter terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Madiun masih dibawah angka 1 sehingga jumlah Dokter yang ada saat ini masih belum terpenuhi. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio Dokter terhadap 1000 penduduk mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun dibarengi dengan peningkatan jumlah Dokter yang ada meskipun peningkatan jumlah dokter masih sedikit.

Rasio jumlah Perawat ideal adalah setiap 1 Perawat mampu menangani 1.000 penduduk, rasio Perawat terhadap 1000 penduduk di Kabupaten Madiun sudah di atas angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah Perawat yang ada saat ini memenuhi ideal jumlah perawat per 1.000 penduduk. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio Perawat terhadap 1000 penduduk mengalami fluktuatif hal tersebut dikarenakan jumlah penduduk dan perawat terkadang mengalami penurunan dan peningkatan meskipun tidak signifikan.

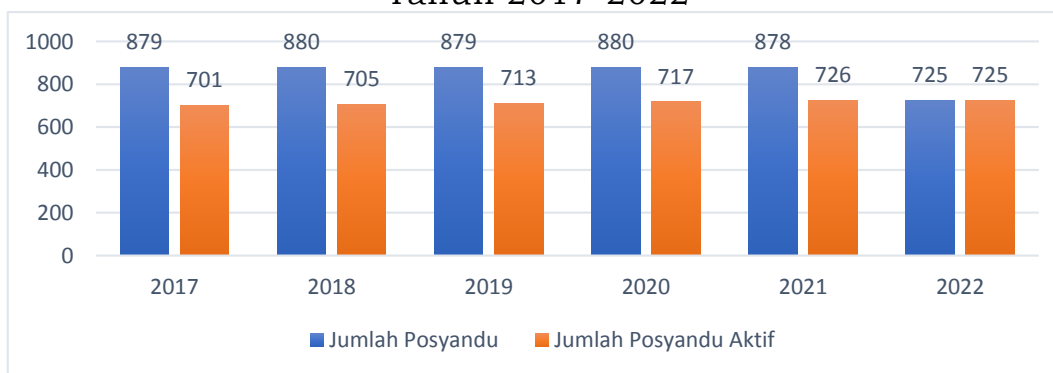
Rasio jumlah Bidan ideal adalah setiap 1 Bidan mampu menangani 1.000 penduduk, rasio Bidan terhadap 1.000 penduduk di Kabupaten Madiun masih dibawah angka 1 sehingga jumlah Bidan yang ada saat ini masih belum terpenuhi. Selain itu pada tahun 2018 hingga 2022 rasio Bidan terhadap 1000 penduduk mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan sehingga dapat

disimpulkan bahwa peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun dibarengi dengan peningkatan jumlah Bidan yang ada meskipun peningkatan jumlah Bidan masih sedikit.

Cakupan Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah jumlah kunjungan pada Pustu oleh masyarakat. Jumlah kunjungan pustu di Kabupaten Madiun sudah cukup ideal karena sudah di atas 90% sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah pustu yang ada sudah menjangkau seluruh masyarakat.

2.3.1.1.7 Ketersediaan Posyandu

Grafik 2.25
Jumlah Posyandu dan Jumlah Posyandu Aktif di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



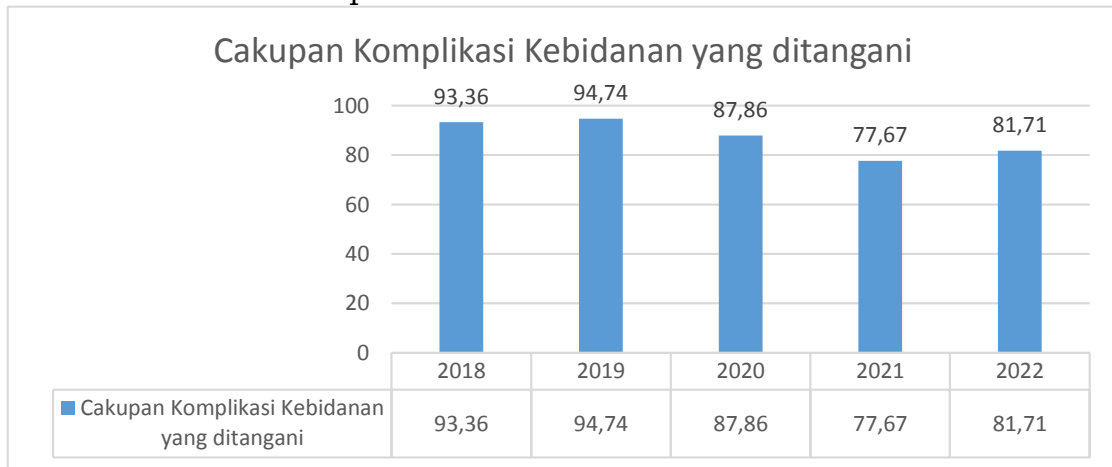
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Adanya posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. (UKBM). Posyandu bertujuan dalam peningkatan pelayanan dan pemantauan kesehatan bayi dan balita. Keberadaan Posyandu aktif di Kabupaten Madiun dari tahun 2017-2022 terus mengalami peningkatan meskipun jumlah posyandu pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 sebanyak 726 menjadi 725 posyandu. Hal ini disebabkan karena jumlah sasaran balita yang dilayani di posyandu di bawah 10 balita, sesuai kesepakatan dari desa bersama dengan Pokja posyandu desa kegiatan posyandu digabung dengan posyandu terdekat. Dengan demikian diharapkan pelayanan di posyandu bisa lebih optimal. Pada kondisi normal, umumnya tiap posyandu melayani 50 - 100 sasaran balita.

Berbagai sarana dan prasarana yang tersedia untuk pelayanan kesehatan bertujuan meningkatkan layanan kepada penduduk. Terkait dengan hal tersebut berikut adalah capaian urusan kesehatan tahun 2017-2021.

1. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani (%)

Grafik 2.26
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

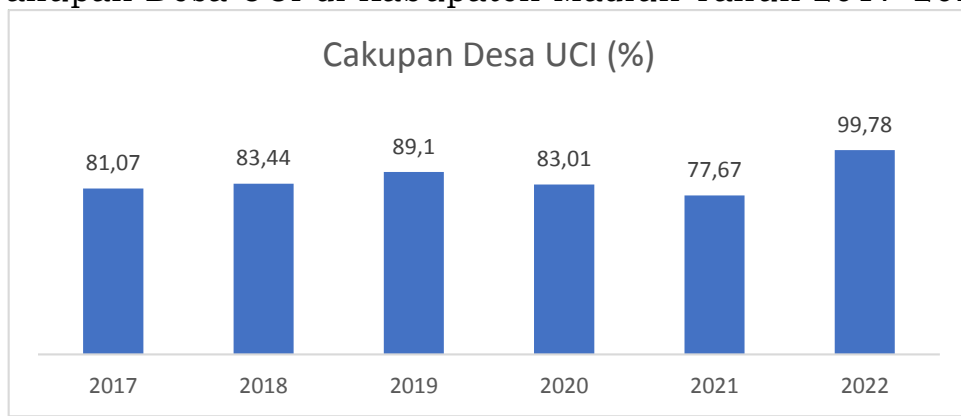


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Penanganan kasus yang berkaitan penanganan komplikasi kebidanan mengalami penurunan pada tahun 2018 hingga 2021 dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan, hal tersebut dikarenakan rasio bidan terhadap jumlah penduduk masih belum ideal sehingga jika terdapat kasus komplikasi kebidanan tidak dapat ditangani dengan baik. selain itu juga perlunya peningkatan kompetensi Bidan yang ada serta peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat khususnya penanganan kasus kebidanan.

2. Cakupan Desa UCI (%)

Grafik 2.27
Cakupan Desa UCI di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Jumlah desa yang seluruh bayi pada desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan yang signifikan, hal tersebut dikarenakan dampak pandemi covid-19 sehingga adanya penurunan kemauan masyarakat untuk melakukan imunisasi pada bayi mereka karena kekhawatiran tertular virus pada saat melakukan kegiatan

berada diluar rumah, peningkatan ada di tahun 2022 setelah Covid-19 reda.

3. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)

Grafik 2.28
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penyakit DBD di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

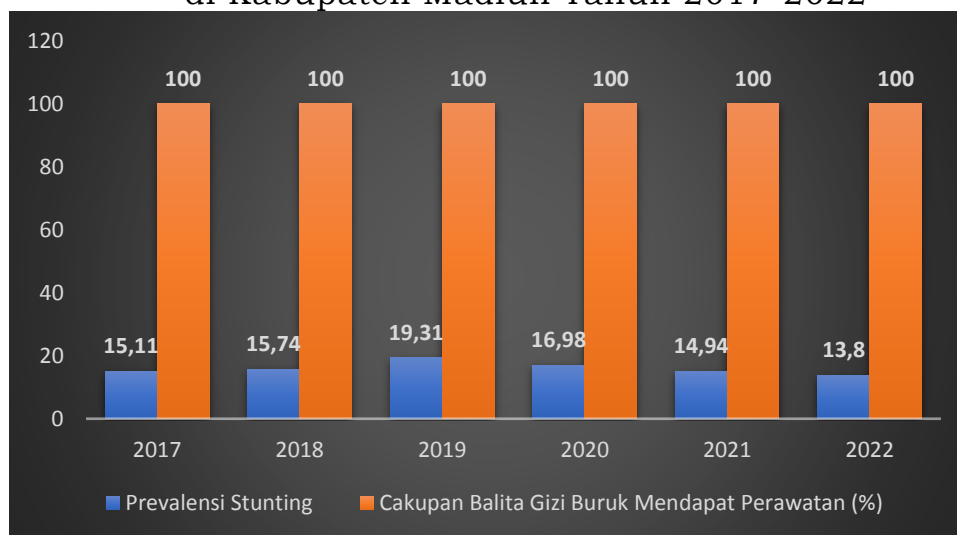


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pada kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di kabupaten Madiun dapat di tracking/ditemukan seluruhnya dan seluruh kasus DBD dapat tertangani. Hal tersebut dapat dilihat pada data cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD pada tahun 2017 hingga 2022 sebesar 100%.

4. Pravelensi Balita Stunting dan Gizi Buruk yang mendapatkan perawatan

Grafik 2.29
Prevalensi Balita Stunting dan Gizi Buruk di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

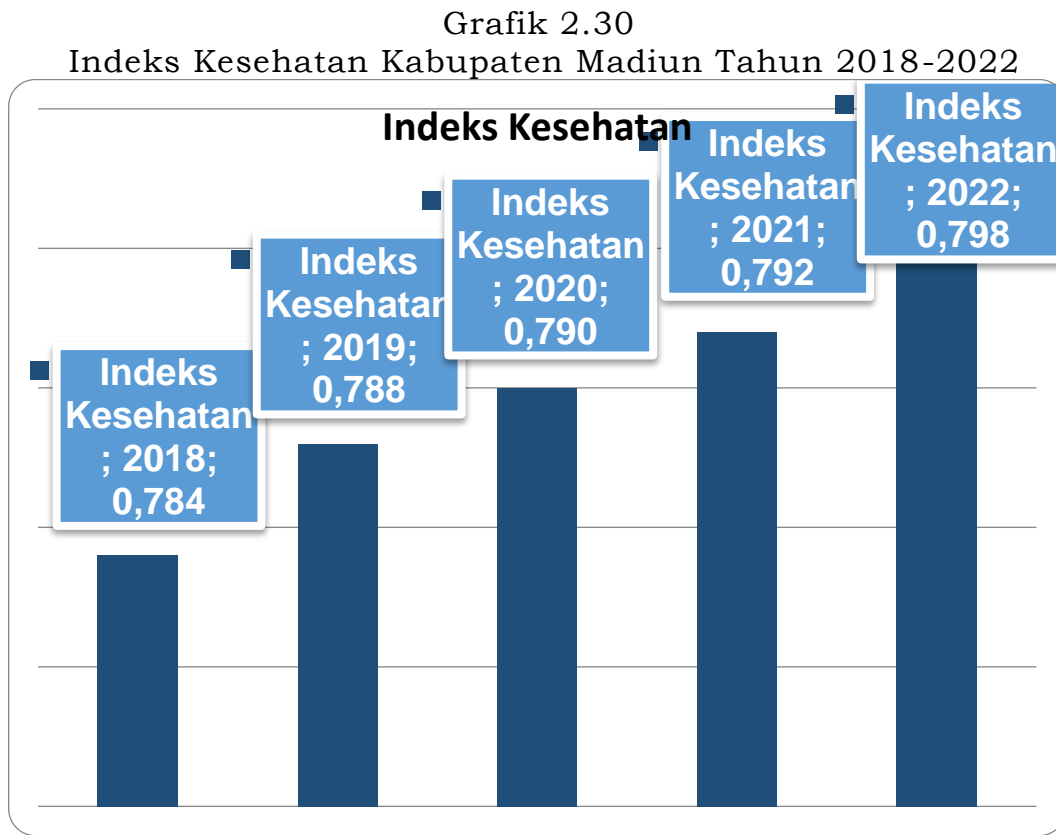


Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pada Pravalensi stunting adalah jumlah balita yang mengalami stunting dibandingkan dengan seluruh jumlah balita yang ada. Jumlah balita stunting di Kabupaten Madiun termasuk tinggi dimana masih di atas 10% meskipun pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kecenderungan penurunan. Penanganan Balita gizi buruk di Kabupaten Madiun dapat tertangani secara baik dimana pada data diatas, diketahui bahwa cakupan

Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan pada tahun 2017 hingga 2022 sebesar 100% setiap tahunnya.

2.3.1.1.8 Indeks Kesehatan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Kinerja Indeks Kesehatan di Kabupaten Madiun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 selalu mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dengan rata-rata kenaikan 0,0034 pada lima tahun terakhir. Hal ini tidak dipengaruhi adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022.

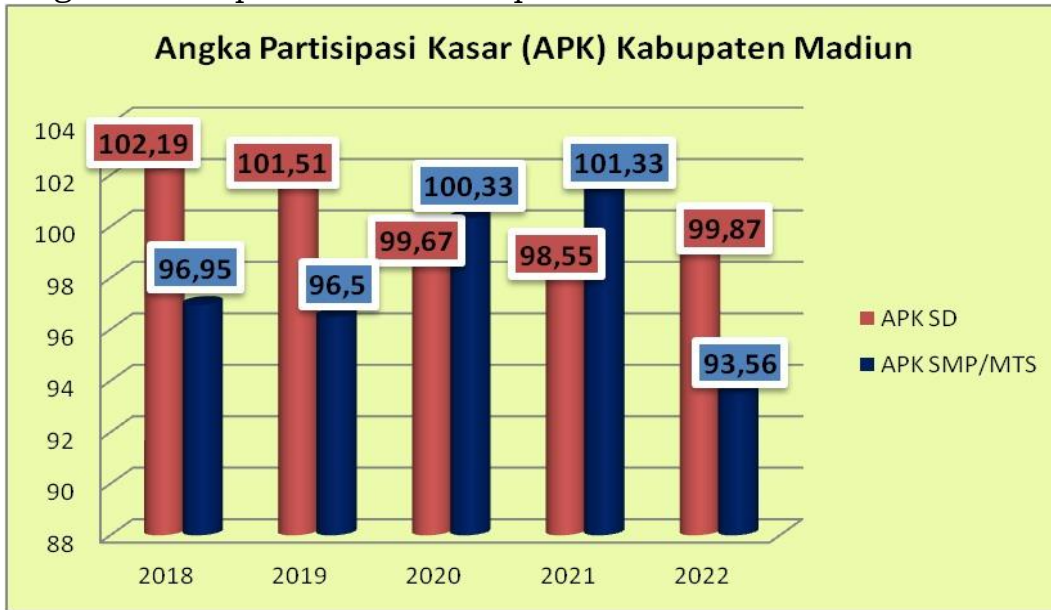
2.3.1.2 PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan salah satu indikator dari tingkat kesejahteraan suatu Negara. Pendidikan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu unsur dalam pembangunan negara. Pendidikan memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, oleh karena itu upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berikut merupakan data-data pendidikan Kabupaten Madiun.

2.3.1.2.1 Angka Partisipasi Kasar

Pembangunan bidang pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang diharapkan yakni mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing - masing jenjang pendidikan.

Grafik 2.31
 Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2022

APK merupakan indikator yang menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. APK yang tinggi menunjukkan semakin tinggi jumlah usia sekolah yang menempuh pendidikan di suatu daerah. tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. APK SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun masih fluktuatif mulai tahun 2018 hingga tahun 2022, bahkan untuk APK SMP/MTs ditahun 2022 cenderung menurun. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam

menempuh Pendidikan SMP/MTs perlu mendapatkan perhatian. Sedangkan Nilai APK bisa lebih dari 100%, disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sehingga jika dilihat pada grafik, masih cukup banyak siswa yang terlambat dalam menempuh Pendidikan.

mengalami Penurunan mulai tahun 2017 hingga tahun 2021. Hal ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam menempuh Pendidikan SD/MI harus mendapatkan perhatian. Nilai APK bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Sehingga jika dilihat pada grafik, masih cukup banyak siswa yang terlambat dalam menempuh Pendidikan. APK SMP/MTs menunjukkan peningkatan dari tahun 2018 hingga 2021, yaitu dari 9,95 menajai 101,3. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi penduduk dalam menempuh Pendidikan SMP/MTS sudah cukup baik.

2.3.1.2.2 Angka Melek Huruf

Definisi Angka Melek Huruf adalah Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang di baca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka melek huruf dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk. Semakin tinggi angka melek huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM. Penduduk yang bisa baca tulis diasumsikan memiliki kemampuan dan keterampilan karena dapat menyerap informasi baik itu lisan maupun tulisan.

Grafik 2.32
Angka Melek Huruf di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



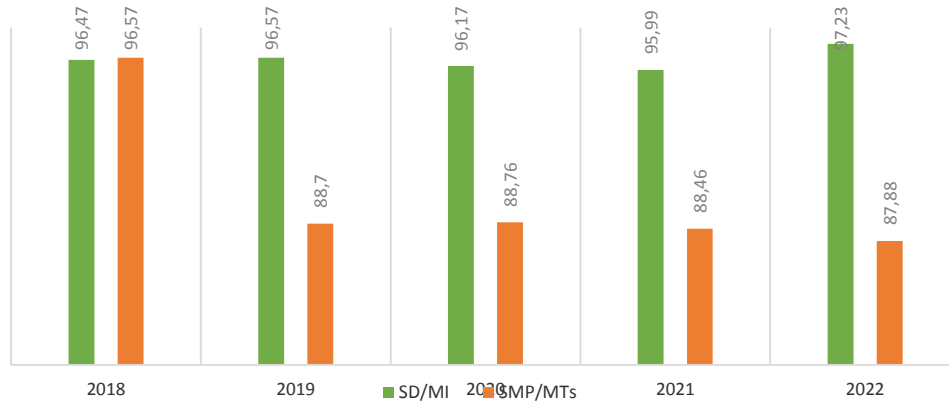
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2022

Angka melek huruf di Kabupaten Madiun masih fluktuatif dengan capaian pada angka 92,53 di tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Angka melek huruf di Kabupaten Madiun masih perlu ditingkatkan sehingga kemampuan membaca dan menulis penduduk yang memasuki usia 15 tahun dapat optimal.

2.3.1.2.3 Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Grafik 2.33
Angka Partisipasi Murni Kab. Madiun Tahun 2018-2022

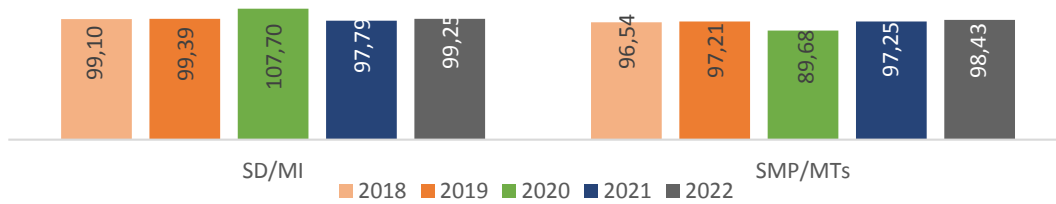


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa angka partisipasi murni pada jejang SMP/MTs lebih rendah dibandingkan dengan APM Jenjang SD/MI, sehingga kondisi ini menunjukkan kualitas Pendidikan harus ditingkatkan untuk menekan adanya siswa yang tertinggal tingkat sekolah. Adanya ketertinggalan tingkat Pendidikan dapat disebabkan oleh kualitas pengajaran yang masih belum optimal, rasio sekolah yang masih rendah dan kesadaran penduduk dalam menempuh Pendidikan yang masih rendah. APM untuk jenjang pendidikan SD/MI pada tahun 2022 sebesar 97,23 sengan APM SMP/MTs sebesar 87,88.

2.3.1.2.4 Angka Partisipasi Sekolah

Grafik 2.34
Angka Partisipasi Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Kabupaten Madiun tahun 2018-2022



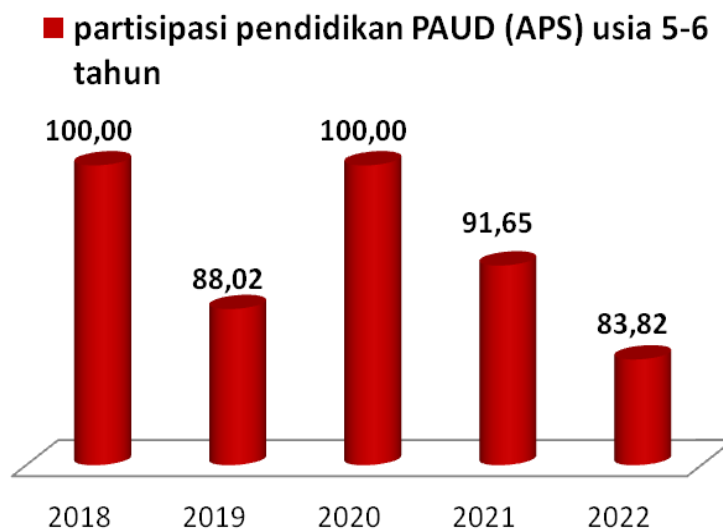
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Angka Partisipasi Sekolah adalah Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuh) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. APS digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses

pendidikan secara umum. Pada kelompok kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. APS Madiun Tahun 2022 untuk jenjang SD/MI sebesar 99,25 dan APS Tahun 2022 untuk jenjang SMP/MTs sebesar 98,43 yang artinya 99,25% penduduk usia 7-12 tahun sedang bersekolah dan 98,43% penduduk usia 13-15 sedang bersekolah.

2.3.1.2.5 Partisipasi pendidikan PAUD (APS) usia 5-6 tahun

Grafik 2.35
Partisipasi Pendidikan PAUD

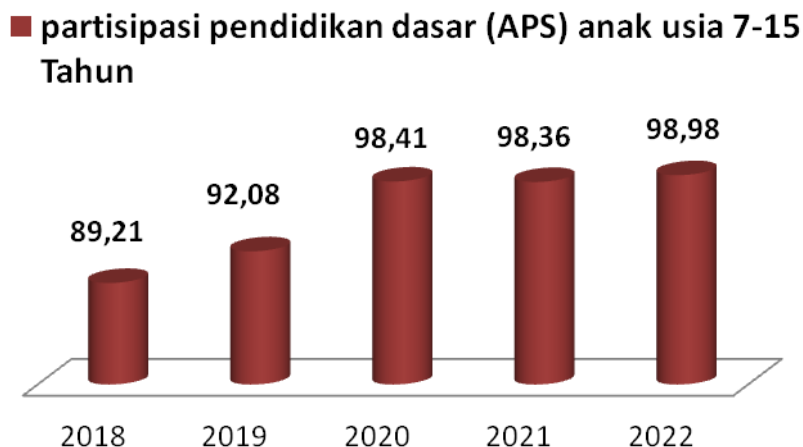


Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Partisipasi PAUD anak usia 5-6 tahun dalam pendidikan masih cenderung menurun di tiga tahun terakhir, hal ini dikarenakan anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Madiun tidak seluruhnya ada pada jenjang PAUD (Taman Penitipan Anak/TPA, Kelompok Bermain/KB, Taman Kanak-Kanak/TK), namun masih terdapat anak yang sudah menduduki jenjang pendidikan Dasar.

2.3.1.2.6 Partisipasi pendidikan dasar (APS) anak usia 7-15 Tahun

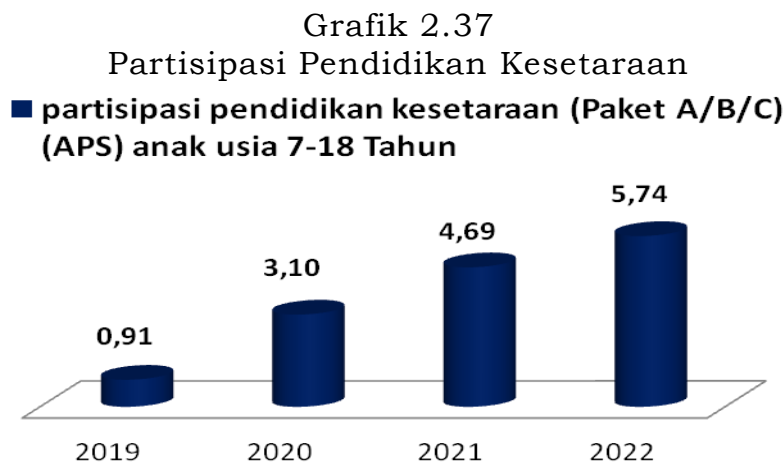
Grafik 2.36
Partisipasi Pendidikan Dasar



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Partisipasi Pendidikan Dasar di Kabupaten Madiun masih meningkat meskipun tidak terlalu besar peningkatannya. Dengan perkembangan layanan akses dan fasilitas pendidikan memberikan kemudahan jangkauan untuk memperoleh pendidikan, meskipun terjadi sedikit menurun di tahun 2021 sebesar 0,05% namun pada tahun 2022 naik 0,62%.

2.3.1.2.7 Partisipasi pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) (APS) anak usia 7-18 Tahun



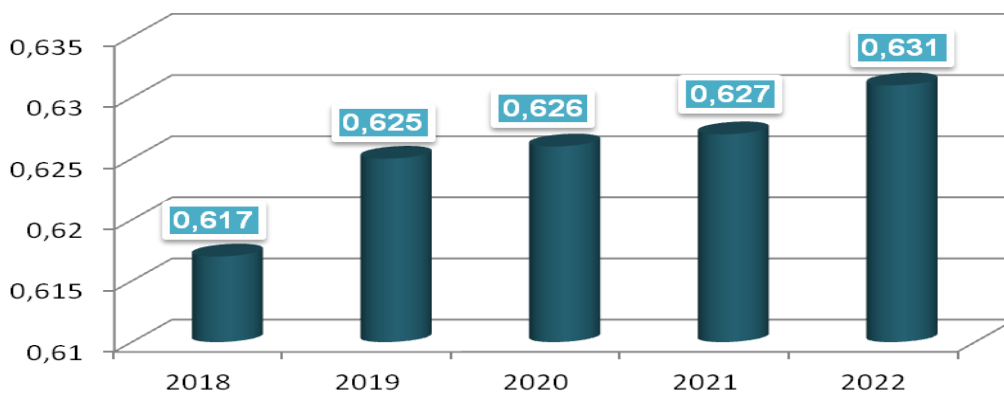
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi pada pendidikan kesetaraan (Paket A/B/C) selalu meningkat, hal ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan hak pendidikan untuk menuntaskan pendidikan Dasar 9 tahun bagi seluruh masyarakat, tidak terbatas pada usia 7-18 tahun saja, yaitu dengan mengoptimalkan 9 Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dan dengan jumlah siswa belajar sampai dengan Desember 2022 sebanyak 2.091 siswa tersebar di Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C.

2.3.1.2.8 Indeks Pendidikan

Grafik 2.38
Indeks Pendidikan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

Indeks Pendidikan



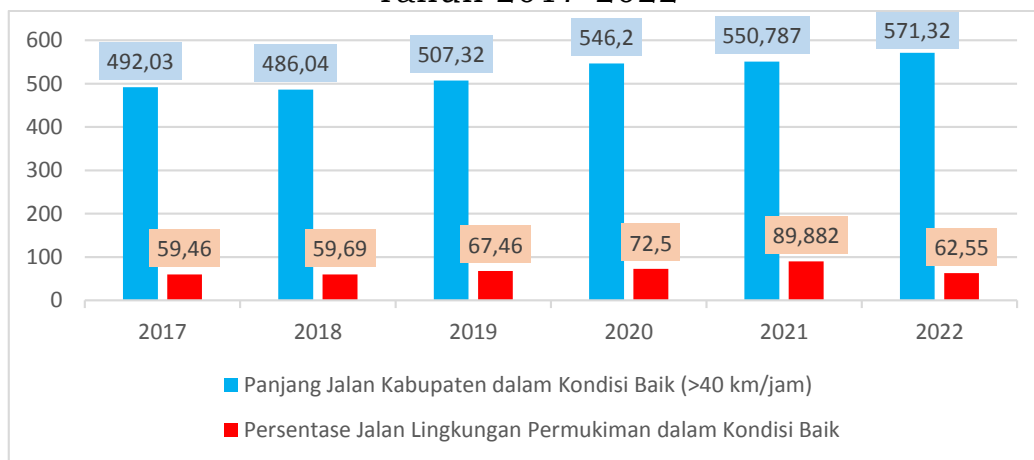
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun

Secara umum capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Madiun sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan tren kenaikan pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Meskipun pada tahun 2020 dan tahun 2021 hanya mengalami sedikit kenaikan pada digit ketiga atau naik 0,001. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembelajaran dilakukan secara online sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19. Namun seiring dengan pemberlakuan pembelajaran tatapmuka, sehingga pada akhir tahun 2022 sudah mulai kembali naik sebesar 0,004.

2.3.1.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2.3.1.3.1. Panjang jalan

Grafik 2.39 Panjang Jalan dalam Kondisi Baik di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber Dinas PUPR Kabupaten Madiun, tahun 2023

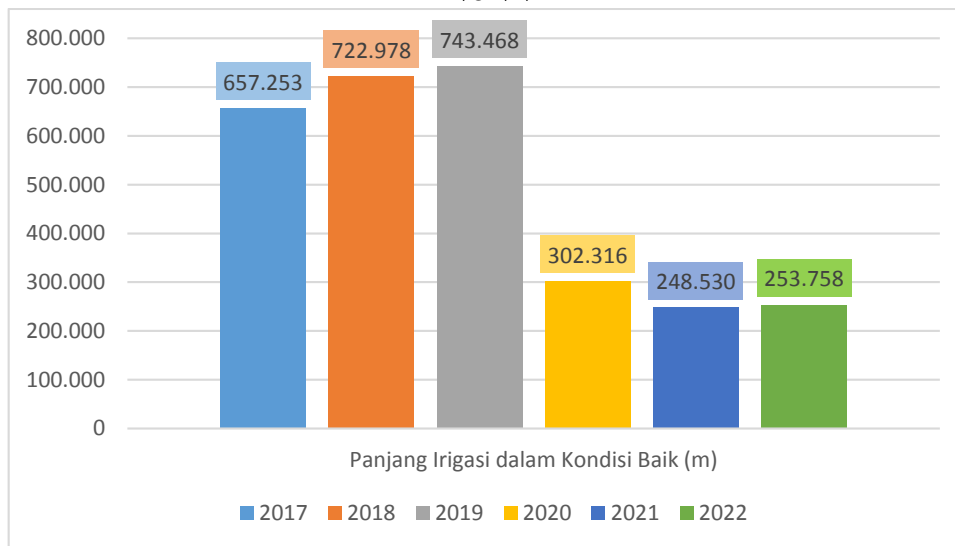
Kondisi jalan kabupaten dalam kondisi baik dari tahun 2017-2022 fluktuatif. Tahun 2018 panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami penurunan dari tahun 2017. Tahun 2019-2021 mengindikasikan pertumbuhan efektif yang kontinu, yaitu dari 507,32 terus mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2022 menjadi sebesar 571,32.

Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik pada tahun 2017 hingga 2021 setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam Kondisi Baik menurun menjadi 62,55%.

2.3.1.3.2. Pemenuhan Irigasi

Grafik 2.40

Panjang Irigasi dalam Kondisi Baik di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



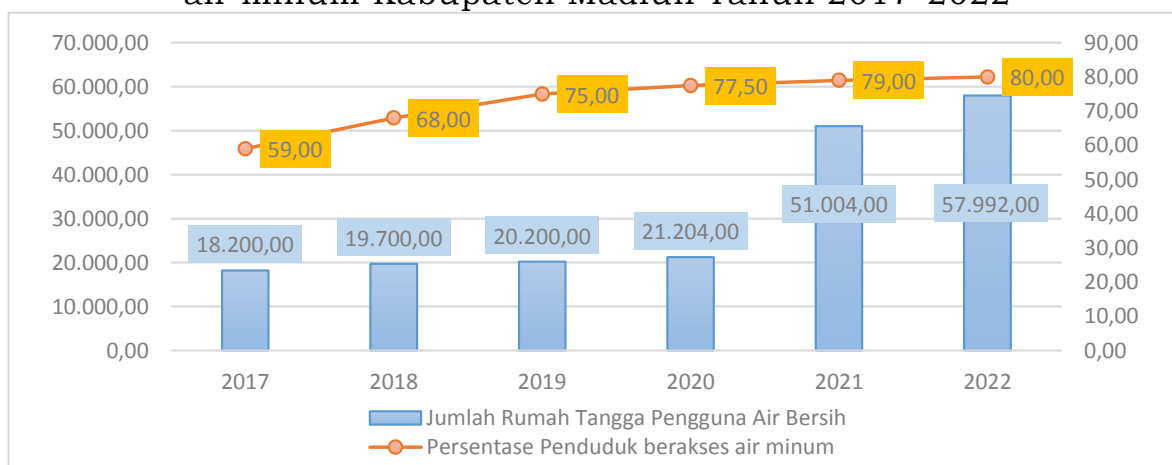
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, tahun 2023

Panjang irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 terus mengalami kenaikan. Mulai tahun 2020 mengalami perubahan kewenangan penanganan jaringan irigasi dan adanya penurunan anggaran yang diakibatkan refocusing.

2.3.1.3.3. Air Bersih dan Air Minum

Grafik 2.41

Rumah Tangga Pengguna Air Bersih dan Persentase Penduduk berakses air minum Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, tahun 2023

Berdasarkan data di atas, jumlah rumah tangga yang mengakses air bersih di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan. Sedangkan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum masih belum optimal karena masih dibawah 90% meskipun pada tahun 2017 hingga tahun 2022 mengalami peningkatan.

Untuk Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.28
Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Madiun Tahun 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	11,60	27,92	30,47
Persentase Pemenuhan Pelayanan SPALD-S	0,13	0,24	0,59

Sumber Dinas PUPR Kabupaten Madiun, tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari yang menjadi salah satu SPM urusan PUPR adalah air minum yang dilaksanakan melalui jaringan perpipaan, bukan terbuka seperti sumur, waduk, dll.

2.3.1.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Data hasil capaian urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Madiun pada tahun 2017-2022 dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.29
capaian urusan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Madiun pada tahun 2017-2022

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah RTLH	0	9.719	6.445	11.998	45.615	39.388
Persentase Rumah tidak layak huni	0	18,99	27,29	15,95	18,29	15,76
Jumlah Rumah Layak Huni (RLH)	181.44	171.721	174.995	176.909	196.432	210.599
Persentase Rumah Layak Huni (RLH)	98,52	93,24	95,02	96,06	78	84,24
Persentase Lingkungan Pemukiman Kumuh	0	0	0	0,1	0,01	1,19

Sumber Dinas Perkim Kabupaten Madiun, tahun 2023

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Madiun mengalami kecenderungan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dimana meningkat menjadi 45.615. Jumlah RTLH di Kabupaten Madiun termasuk sangat tinggi dimana bila dilihat persentase RTLH diatas 5% yaitu sebanyak 18,29%. Jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan tetapi bila dilihat secara persentase rumah layak huni pada tahun 2021 mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2020 adalah 96,06% turun drastis menjadi 78%. Berdasarkan jumlah dan persentase RTLH serta berdasarkan jumlah dan persentase RLH dapat disimpulkan bahwa jumlah pembangunan rumah di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2022 mengalami peningkatan khususnya pada tahun 2022.

Untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

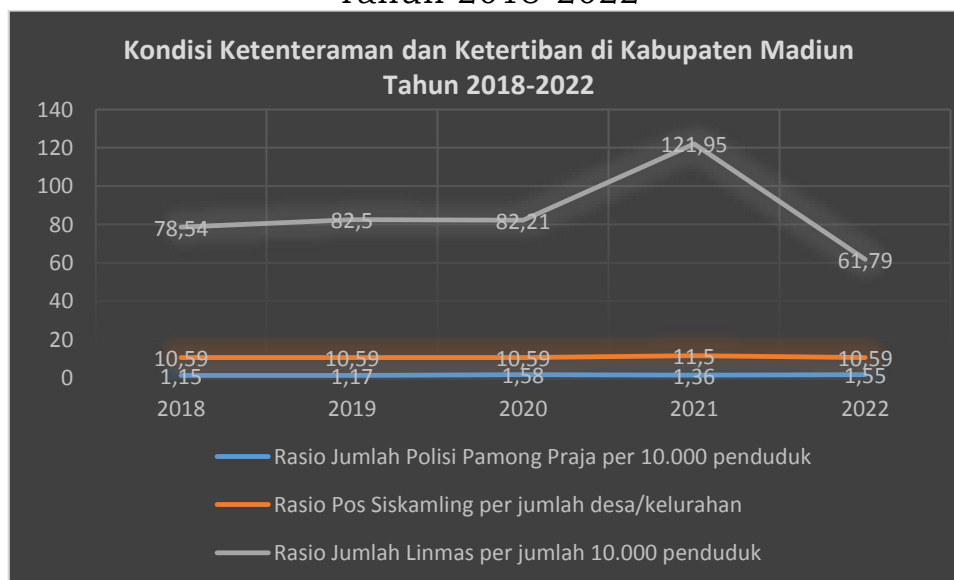
Uraian	2020	2021	2022
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam	0	0	0
Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Relokasi Program Pemerintah	0	0	0

Sumber Dinas Perkim Kabupaten Madiun, tahun 2023

Untuk pelaksanaan SPM pada urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan penganggaran setiap tahunnya. Akan tetapi, untuk pelaksanaan penanganan Rumah Tidak Layak Huni bagi Korban Bencana selama ini dilaksanakan oleh BPBD, dan belum ada relokasi rumah karena adanya program pemerintah.

2.3.1.5 KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Grafik 2.42
Gambaran Kondisi Ketenteraman dan Ketertiban di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

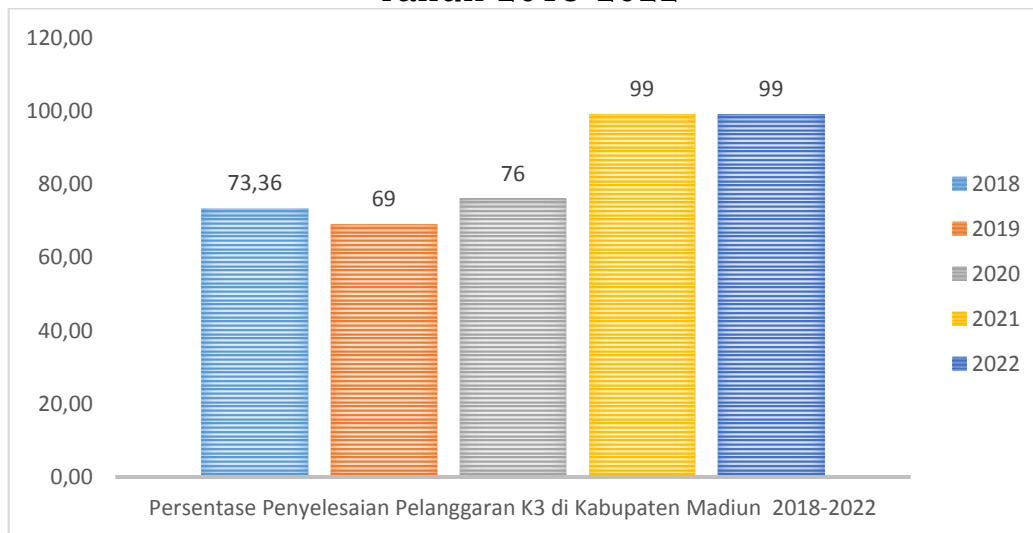


Sumber : SatpolPP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat kondisi rasio satuan pengamanan dengan jumlah penduduk di Kabupaten Madiun tahun 2018-2022. Rasio Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari Tahun 2018-2020, kemudian terjadi penurunan di Tahun 2021 dan 2022 tetapi tidak signifikan. Secara umum rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan stagnan dari Tahun 2018 sampai dengan 2020 yaitu sebesar 10,59. Kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2021 akan tetapi menurun di Tahun 2022 yaitu sebesar 10,59. Sedangkan untuk jumlah Polisi

Pamong Praja per 10.000 penduduk terjadi peningkatan dari Tahun 2018-2020, kemudian menurun di Tahun 2021, dan Kembali meningkat di Tahun 2022 yaitu sebesar 1,55. Hal tersebut menunjukkan adanya kinerja yang baik dalam rangka tindakan preventif jika terjadi kondisi yang mengganggu keamanan dan ketenteraman akan dapat dengan cepat ditangani.

Grafik 2.43
 Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 di Kabupaten Madiun
 Tahun 2018-2022



Sumber : Satpol PP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Madiun menunjukkan kinerja yang baik, dibuktikan dengan tren kenaikan penyelesaian pelanggaran K3 pada dua tahun terakhir dengan capaian 99%.

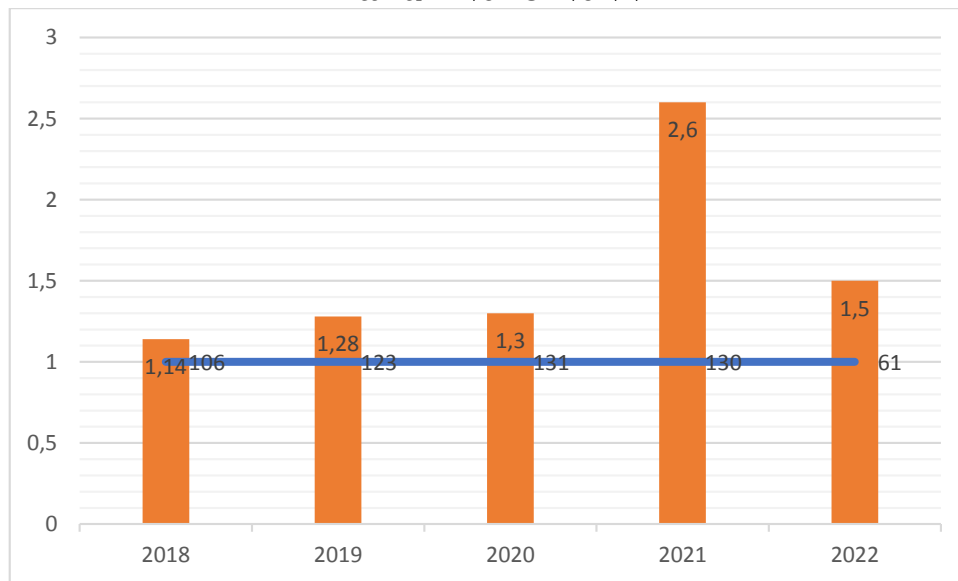
Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Madiun

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	25%	25%	25%	25%	30%
2	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	0,13%	0,2%	0,44%	0,88%	1,32%
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1,57%	1,32%	1,30%	1,27%	1,26%
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	14,28%	58,22%	64,55%	64,86%	70,27%

Sumber : BPBD Kabupaten Madiun Tahun 2023

2.3.1.6 SOSIAL

Grafik 2.44
Gambaran Penanganan PMKS di Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2022



Keterangan Warna ■ persentase penanganan penyandang masalah
— Persentase PMKS Mendapat Bantuan Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu indikator utama dalam urusan sosial adalah persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan persentase penanganan PMKS. PMKS merupakan obyek utama dalam penyelesaian masalah sosial, PMKS tersebut meliputi kelompok rentan (manula, janda, anak-anak terlantar), pengemis, difabel, dan lain sebagainya.

Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan grafik di atas memiliki kinerja yang baik, yaitu sebesar 61% pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan kinerja yang telah melampaui target. Selain itu persentase penanganan PMKS di Kabupaten Madiun juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tren kenaikan persentase penanganan PMKS selama lima tahun terakhir.

2.3.2 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR

2.3.2.1 TENAGA KERJA

Pembangunan Bidang Ketenagakerjaan di Kabupaten Madiun bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia (**skill capacity**), pengembangan informasi dan bursa kerja, peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam memperluas kesempatan kerja, peningkatan daya saing, standar mutu tenaga kerja, serta adanya peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam penciptaan keserasian

hubungan kerja. Capaian kinerja ketenagakerjaan Kabupaten Madiun disajikan dalam Tabel berikut dibawah ini:

Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Madiun

No	Uraian	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) / Angka Partisipasi Angkatan Kerja	76,2	69,52	70,73	79,9	67,77	72,72
2	Penyelesaian Sengketa Perusahaan dengan Pekerja (%)	1,02	1,5	100	80	80	80
3	Persentase pencari Kerja yang Ditempatkan (%)	74,84	66,50	89,64	42,15	75,00	77,00
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,72	3,71	3,52	4,80	4,99	5,84
5	Rasio Penduduk Yang Bekerja (%)	97,10	96,19	96,35	70,34	70,40	68,50
6	Rasio Pekerja Lulusan S1/S2/S3 (%)	16,31	6,61	7,90	7,03	7,40	4,41
7	Persentase Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah (%)	8	5	15	20	25	14
8	Jumlah perusahaan yang menerapkan K3	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi
9	Persentase keselamatan dan perlindungan	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi	Kewenangan Provinsi

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Madiun juga meningkat setelah Pandemi di Tahun 2021 sebesar 67,77 % menjadi 72,22 % di Tahun 2022. Kenaikan TPAK memberikan indikasi adanya kenaikan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja yang disebabkan oleh kenaikan jumlah absolut pekerja yang terserap di sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Perdagangan (Besar dan Eceran), Jasa Pendidikan dan sektor pendukung lainnya.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan yang signifikan akibat pandemi covid-19 sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022 yaitu sebesar 4,80 % di tahun 2020, naik menjadi 4,99 % di tahun 2021 dan 5,84 % di Tahun 2022. Oleh karenanya masih diperlukan intervensi khusus dalam hal mengatasi tingginya angka pengangguran di Kabupaten Madiun dengan berbagai upaya, termasuk mendorong peningkatan investasi dan peningkatan kualitas Daya Saing Sumber Daya Manusia di Kabupaten Madiun.

2.3.2.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

Urusan pembedayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib non pelayanan dasar yang mengamanatkan perempuan harus

berdaya secara sosial dan ekonomi. Selain itu aspek perlindungan anak merupakan aspek penting yang harus dilaksanakan dalam pembangunan daerah. Tabel di bawah ini merangkum capaian kinerja Kabupaten Madiun terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Tabel 2.33 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	7,19	9,63	9,46	9,32	10,98
2.	Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta	92,81	90,37	90,54	90,68	89,02
3.	Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	51,66	50,69	49,65	49,76	49,47
5.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Pada Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Tahun 2022 terdapat peningkatan persentase perempuan di lembaga pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa kualitas perempuan dan kesetaraan gender telah meningkat sehingga kesempatan perempuan untuk berpartisipasi di lembaga pemerintah juga meningkat.

Dalam meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu meningkatkan jumlah perempuan dalam kegiatan ekonomi atau bidang ketenagakerjaan, meningkatkan jumlah perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan, menargetkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pemilu legislatif, menerapkan wajib belajar 12 tahun, meningkatkan angka melek huruf melalui program pemberantasan buta huruf atau pendidikan keaksaraan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap ibu dan anak,

2. Persentase Partisipasi Perempuan Di Lembaga Swasta

Tahun 2022 terjadi penurunan partisipasi perempuan pada lembaga swasta. Hal ini merupakan efek dari pandemic covid-19 sehingga banyak pekerja perempuan yang terkena PHK.

Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah memberikan fasilitasi pada perempuan yang ingin mempunyai usaha secara mandiri dengan pihak perbankan maupun lembaga pelatihan.

Meskipun persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta menurun, tetapi perempuan yang berwiraswata meningkat.

3. Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selalu mencapai target, hal ini dikarenakan semua kasus kekerasan yang dilaporkan akan selalu ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kasusnya.

Dalam penyelesaian kasusnya, Dinas PPKB, PPPA beserta tim selalu mendampingi korban kekerasan dalam menyelesaikan kasusnya.

4. Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

Partisipasi angkatan kerja perempuan dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah perempuan yang bekerja dengan jumlah penduduk perempuan usia produktif/angkatan kerja (15-64 tahun)

Tahun 2022 terdapat penurunan jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta sebagai efek panjang dari pandemi covid-19

5. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Target penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan selalu memenuhi target. Semua kasus kekerasan yang dilaporkan/diadukan akan selalu ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan kasusnya.

2.3.2.3 PANGAN

Pembangunan ketahanan pangan memiliki aspek yang luas menyangkut bagaimana pangan berproduksi secara berkelanjutan dalam jumlah yang cukup, bermutu, bergizi, aman, merata dan harga terjangkau oleh masyarakat. Ketersediaan pangan dipengaruhi oleh produksi, distribusi dan pola konsumsi bahan pangan. Ketersediaan bahan pangan utama di Kabupaten Madiun yaitu beras lebih banyak daripada kebutuhan konsumsi pangan penduduk atau terjadi surplus beras, begitu pula dengan ketersediaan jagung. Kabupaten Madiun merupakan salah satu penyangga pangan provinsi Jawa Timur. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di kabupaten lainnya.



Tabel 2.34 Capaian Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Regulasi ketahanan pangan (regulasi)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Ketersediaan pangan utama (%)	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data	Belum ada data
3.	Ketersediaan pangan utama (ton)	344.858,41	385.532,45	347.181,06	29.471	26.286

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.3.2.4 PERTANAHAN

Urusan pertanahan dalam pembangunan daerah memiliki fungsi ekonomi dan sosial. Dengan adanya fungsi ekonomi dan sosial maka kepemilikan tanah perlu dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan status yang jelas, bentuk kepemilikan tanah yang mempunyai kekuatan hukum antara lain sertifikat tanah dengan status hak milik (HM), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai (HP).

Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Persentase luas lahan bersertifikat	KEWENANGAN BPN					
2.	Penyelesaian kasus tanah Negara (%)	30	50	70	70	75	75
3.	Penyelesaian izin lokasi (%)	100	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.3.2.5 LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pembangunan sektor industri telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menggembirakan. Tetapi pembangunan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai kerusakan dan pencemaran lingkungan. Untuk itu dalam segala sektor pembangunan harus diikuti dan di dukung oleh pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan



perundangan lingkungan hidup sehingga tercipta pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sesuai kondisi geografisnya, Kabupaten Madiun mempunyai potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang beraneka ragam sebagai pendukung pembangunan. Sumber Daya Alam tersebut meliputi SDA yang dapat diperbaharui seperti hutan, tumbuhan, dan lain-lain, serta SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, air, dan tanah. Beberapa potensi SDA yang sudah dimanfaatkan seperti sumber daya lahan dan hutan.

Dengan adanya Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan, Kabupaten Madiun mendukung percepatan pembangunan melalui pengembangan Kawasan Industri Mejayan dan meningkatkan konektifitas wilayah selingkar wilis dengan pembangunan jalan tembus Nganjuk-Madiun-Ponorogo.

Tabel 2.36 Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	78,37	77,91	75,98	76,55	66,69	70,45
2.	Indeks Kualitas Air	56,09	56,96	48,71	50,00	50	60,67
3.	Indeks Kualitas Udara	84,87	82,39	84,07	84,66	84,99	84,61
4.	Indeks Tutupan Lahan/Indeks Tutupan Hutan	90,22	90,26	90,38	90,38	61,49	61,09
5.	Pencemaran pemantauan status mutu air	51,61	44,04	51,61	51,61	100	100
6.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	-
7.	Persentase penanganan sampah (persentase sampah yang terangkut)	27,23	28,92	28,92	28,92	40	21,47
8.	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani (%)	-	-	-	-	40	21,47
9.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	7,14	7,09	7,07	7,09	7,09	7,09
10.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan dokumen (amdal, UKL-ULP) (%)	100	100	100	100	100	100
11.	Rasio tempat penampungan sampah per satuan penduduk	9,07	9,07	9,07	9,07	9,07	1,35
12.	Persentase Penegakan hukum lingkungan	100	100	100	100	100	100
13.	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12

Sumber : DLH Kabupaten Madiun Tahun 2023



Dari Tabel diatas, terdapat penurunan angka IKLH pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya perubahan perhitungan rumusan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan target IKLH nasional.

Pengelolaan sampah pada tahun 2021-2022 terdapat penurunan, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian target yang ada pada JAKSTRADA maupun target pada aplikasi SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup.

2.3.2.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan di Kabupaten Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berikut merupakan gambaran perkembangan pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No.	Uraian	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	n/a	83	84	84	95,51	84
2.	Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran	n/a	45,71	43,55	44,52	97,47	97,88
3.	Rasio pasangan berakta nikah	19,63	66,25	70,69	51	0,74	80
4.	Persentase Kepemilikan KTP	94	82,69	83,52	84,63	95,51	84,77
5.	Rasio kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	882	457	326.204	340.504	462,77	97
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	ada	ada	ada	ada	Ada
7.	penerapan KTP nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
8.	Rasio penduduk yang ber-KK	n/a	92,29	93,17	93,71	95,48	98
9.	cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	12.516	72.898	90.424	105.970	96,078

Sumber : Dispendukcapil Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.3.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya merupakan upaya penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga masyarakat dapat menentukan pilihannya. Dinas



Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun telah melaksanakan program-program pembangunan antara lain Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri pedesaan, mandiri perkotaan, Alokasi Dana Desa (ADD), program yang pro rakyat yaitu melalui program Usaha Ekonomi Desa (UED-SP) yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pelatihan keterampilan pemanfaatan teknologi tepat guna, pemberian tambahan modal usaha, program ketrampilan manajemen pengelolaan BUMDes, untuk mengetahui tingkat perkembangan desa/kelurahan.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No.	Uraian	Realisasi					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	65,3	65,3	-	-	-	-
2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah LSM	76	77	-	-	-	-
4.	LPM Berprestasi (unit)	9,7	12,1	-	-	-	-
5.	PKK aktif (unit)	222	222	222	222	222	222
6.	Posyandu aktif (unit)	657	705	713	717	726	776
7.	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa (%)	12,6%	15,0%	14,6%	13,6%	15,0%	16,5 %

Sumber : Dinas PMD Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.3.2.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Pembangunan kependudukan dan catatan sipil dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna meningkatkan tertib administrasi kependudukan. Adapun penyelenggaraan administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006. Sedangkan di Kabupaten Madiun telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berikut gambaran capaian pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Madiun.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Madiun

No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (%)	77,19	76,29	77,11	77,74	71,27
2.	Laju pertumbuhan penduduk	0,22	0,19	1,14	0,58	1,00



No.	Uraian	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
3.	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (TFR)	2,19	2,23	2,17	2,31	2,05

Sumber : Dinas KBPPPA Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Madiun dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Cakupan sasaran pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

Realisasi Persentase Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif pada tahun 2022 menurun. Tidak tercapainya kinerja dari indikator tersebut dikarenakan :

- Petugas Lini Lapangan dan Kader IMP kurang memanfaatkan data sasaran PUS Unmeetneed.
- Adanya aplikasi baru dalam pencatatan pelaporan pelayanan KB melalui NEW SIGA dari BKKBN yang mana servernya masih belum stabil.

2. Laju pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk (LPP) merupakan gambaran untuk melihat perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Apabila dilihat dari data LPP yang bersumber dari Survey Demografis dan Kesehatan Indonesia (SDKI) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. LPP Kabupaten Madiun termasuk pada kategori LPP yang rendah apabila dibandingkan dengan LPP nasional sebesar 1,17 pada tahun 2022.

Setiap tahun LPP hanya dihitung secara proyeksi/perkiraan dengan berdasar data dari Sensus Penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali.

3. Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan selama masa reproduksi (TFR)

Tahun 2022 TFR menurun sebesar 0,26 point. Ada beberapa hal yang menyebabkan rata-rata kelahiran ini menurun yaitu :

- Masyarakat sudah faham bahwa semakin banyak anak yang dilahirkan akan semakin kecil peluang untuk memberikan kehidupan yang layak dan menjadikan anak berkualitas. Selain itu juga jumlah kelahiran sangat berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi dan penampilan secara estetika bagi perempuan.
- Menurut data dari BKKBN bahwa saat ini perempuan Indonesia cenderung menikah di usia yang lebih tua sehingga jangka waktu untuk melahirkan bagi perempuan juga berkurang.



2.3.2.9 KOMINFO

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun adalah Meningkatnya kualitas layanan publik berbasis elektronik dengan jumlah website/blog resmi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun yang dikelola oleh Dinas Kominfo sejumlah 53 website aktif sampai sekarang.

Tabel 2.40 Indikator Layanan Umum Kominfo Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Website / blog resmi OPD yang aktif	53	53	53	53	53

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun, Tahun 2023

2.3.2.10 KEBUDAYAAN

Pembangunan di bidang Kebudayaan sebagai amanat pemajuan kebudayaan sangat penting dilakukan untuk membangun kemandirian, harkat martabat, budi pekerti luhur bangsa dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Berikut dapat dilihat Kinerja urusan Kebudayaan di Kabupaten Madiun dalam rangka pelestarian kebudayaan.

Tabel 2.41 Kinerja urusan Kebudayaan Kab. Madiun Tahun 2018-2022

DATA KEBUDAYAAN	2018	2019	2020	2021	2022
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	32	34	34	52	144
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (unit)	207	212	216	458	464
Penyelenggaraan festival seni dan budaya (event)	409	260	315	96	150

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Upaya pelestarian kebudayaan mengalami peningkatan yaitu pada jumlah sarana penyelenggaraan seni budaya, dan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya. Sedangkan pada penyelenggaran festival seni dan budaya cenderung menurun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai dampak Pandemi Covid-19. Namun pada tahun 2022 sudah mulai pulih dengan kenaikan jumlah event penyelenggaraan festival seni dan budaya.

2.3.2.11 PERPUSTAKAAN

Gambaran layanan perpustakaan di Kabupaten Madiun dapat dilihat dari jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung dan jumlah koleksi buku pada data berikut :

Tabel 2.42 Layanan perpustakaan di Kab. Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Perpustakaan (Unit)	57	616	616	616	616
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (pengunjung)	31.001	35.169	14.415	10.247	11.174
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku)	32.600	34.353	34.444	34.367	35,451

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun tahun 2023

Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Madiun telah dilakukan pendataan ulang mulai tahun 2019 meliputi Perpustakaan Daerah, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Desa, sehingga jumlahnya meningkat dari tahun 2018 yang hanya mencakup Perpustakaan Daerah dan Perpustakaan Desa.

Layanan Perpustakaan yang dilihat dari jumlah pengunjung mengalami penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 yang memberlakukan pembatasan kunjungan, meskipun jumlah koleksi buku yang disediakan selalu meningkat. Namun pada tahun 2022 jumlah kunjungan mulai meningkat dari tahun sebelumnya

2.3.2.12 KEARSIPAN

Gambaran kinerja layanan kearsipan dapat dilihat dari pengelolaan arsip secara baku dan jumlah SDM pengelola kearsipan sebagai berikut :

Tabel 2.43
Layanan Kearsipan Kab. Madiun Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pengelolaan arsip secara baku (%)	4	11	14,8	28	-
2	Jumlah SDM pengelolaan kearsipan	80	80	80	80	106

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pengelolaan arsip secara baku memberikan kinerja yang selalu meningkat disetiap tahunnya, meskipun jumlah SDM pengelola kearsipan stagnan. Khusus tahun 2022, indikator pengelolaan arsip secara baku sudah tidak dipakai lagi.

2.3.2.13 KOPERASI DAN UMKM

Upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat juga telah dilakukan melalui pemberdayaan usaha ekonomi rakyat dan perkoperasian. Pengembangan usaha koperasi di Kabupaten Madiun masih belum beraneka ragam dikarenakan banyaknya koperasi yang masih mempertahankan jenis usaha lamanya (simpan pinjam) dan enggan untuk mengembangkan jenis usaha baru lainnya. Gambaran umum kondisi

Kabupaten Madiun terkait dengan urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kabupaten Madiun

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah koperasi	792	792	792	792	792
2	Koperasi aktif	685	685	685	381	391
3	Koperasi tidak aktif	107	107	107	411	401
4	Jumlah anggota	145.877	155.851	188.963	179.109	173.621
5	Jumlah simpanan (milyar)/ (Rp.000.000)	309.426,497	354.878,097	365.037,620	165.531,493	223.212,608
6	Volume usaha (milyar)/ (Rp.000.000)	604.980,716	635.608,647	664.895,420	431.947,828	435.168,979
7	SHU (milyar)/ (Rp.000.000)	46.427,472	47.121,078	48.005,709	12.349,103	15.369,497
8	Pengurus Koperasi (orang)	2.376	2.376	2.376	1.143	1.173
9	Karyawan	1.241	1.214	1.143	508	678
10	Modal sendiri (milyar)/ (Rp.000.000)	309.426,497	354.878,097	365.037,624	165.531,493	223.212,608
11	Modal luar (milyar)/ (Rp.000.000)	555.503,327	498.147,911	505.345,552	161.080,406	335.949,993
12	Aset (milyar)/ (Rp.000.000)	864.929,824	853.026,009	870.383,176	325.722,12	559.162,601

Sumber : Dinas Perdagkop & UM Kabupaten Madiun Tahun 2023

UMKM memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi karena berdampak pada peningkatan tenaga kerja dan berpengaruh pada meningkatnya PDRB atau pendapatan perkapita. Karakteristik utama yang dimiliki oleh UMKM salah satunya merupakan usaha padat karya yang menyerap tenaga kerja dimana peningkatan tenaga kerja. Langkah-langkah optimalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam peningkatan UMKM tersebut adalah meliputi:

- a. Inventarisasi data perkembangan UMKM dan peningkatan kualitas lembaga UMKM meliputi Manajemen, SDM dan Sarana Prasarana.
- b. Fasilitasi UMKM dengan Lembaga Keuangan dan Non Keuangan dalam segi permodalan.
- c. Fasilitasi promosi dan jaringan pemasaran. Fasilitasi kerjasama dengan berbagai pihak swasta dalam bentuk CSR, Masyarakat dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2.45
Jumlah UMKM dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	UMKM (Unit)	128.090	128.114	128,143	128.169	128.243
2	Tenaga Kerja (Orang)	207.748	207.788	207.856	207.912	208.120
3	Usaha Mikro	12.860	13.012	13.166	13.516	15.810
4	Usaha Mikro Yang di Bina	240	230	297	1.175	1.405
5	Usaha Mikro Yang Naik Kelas	6	32	89	170	92

Sumber : Dinas Perdagkop & UM Kabupaten Madiun Tahun 2023

Pemerintah Kabupaten Madiun berkomitmen terhadap penumbuhan dan pengembangan perekonomian di sector bawah yaitu Usaha Mikro, yang mendominasi kondisi perekonomian khususnya di Kabupaten Madiun dengan melakukan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Manusia (SDM) secara berkelanjutan menjadi Usaha Mikro yang naik kelas yang mampu bertahan, berkembang dan bersaing di era digital saat ini.

2.3.4 FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

2.3.4.1 Perencanaan Pembangunan

Bappeda Kabupaten Madiun merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Penunjang Perencanaan di Kabupaten Madiun, dengan indikator sebagai berikut:

Tabel 2.46 Indikator Perencanaan Pembangunan Kabupaten Madiun
Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen Perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen Perencanaan RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan (buah)	10	7	6	6	7
5	Jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah	-	6	6	10	5
6	Persentase keterisian SIPD	80	100	100	100	100

Sumber : Bappeda Kabupaten Madiun, 2023

Indikator Urusan Penunjang Perencanaan, yaitu terealisasinya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan perda, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan PERDA, tersedianya dokumen

perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA, jumlah dokumen perencanaan pembangunan, jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah, dan persentase keterisian SIPD. Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang sudah disahkan dalam status “Ada”.

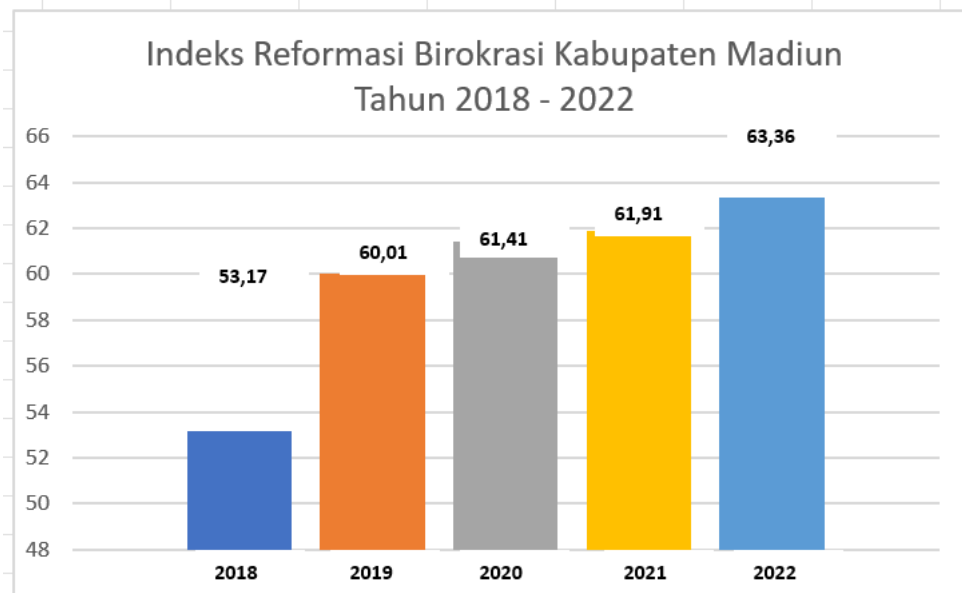
Jumlah dokumen perencanaan pembangunan di tahun 2018 terdapat 10 buah, namun turun menjadi 7 buah di tahun 2018, lalu di tahun 2019 hanya tersedia 6 buah hingga di tahun 2021, kemudian di tahun 2022 bertambah menjadi 8 buah. Selanjutnya untuk jumlah MoU kerjasama antar pemerintah daerah mengalami peningkatan, tahun 2018 tidak ada MoU kerjasama, lalu di tahun 2019-2020 terdapat 6 MoU dan meningkat menjadi 10 MoU kerjasama pada tahun 2021 dan turun pada tahun 2022 menjadi 5 MoU. Untuk persentase keterisian SIPD mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 tercapai sebesar 80%, kemudian meningkat menjadi 100% dari tahun 2019 dan bertahan hingga di tahun 2022.

2.3.4.2 Pemerintahan Umum

2.3.4.2.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Kinerja penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari indeks reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi merupakan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dari proses sampai dengan hasil. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif & efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu nilai indeks reformasi birokrasi suatu daerah dapat mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut. Capaian indeks reformasi birokrasi Kabupaten Madiun di tahun 2017 hingga tahun 2021 adalah:

Grafik 2.45
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Madiun, Tahun 2023

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami peningkatan. Di tahun 2018 tercapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 53,17. Kemudian nilai tersebut naik menjadi 60,01 di tahun 2018. Bertambah kembali di tahun 2020 hingga mencapai 61,41. Selanjutnya di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 61,91 dan meningkat lagi di Tahun 2022 dengan capaian sebesar 63,36. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal setiap tahun.

2.3.4.2.2 Nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD)

Sementara itu, nilai laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2018 juga mengalami peningkatan. Secara rinci hasil nilai LPPD Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47 Nilai LPPD Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Nilai Laporan Penyelenggaraa n Pemerintah Daerah (LPPD)	3,2240 (Sangat Tinggi)	3,3308 (Sangat Tinggi)	Mulai Tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarka n Nilai LPPD	Mulai Tahun 2020, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarka n Nilai LPPD	Mulai Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarka n Nilai LPPD	Mulai Tahun 2021, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarka n Nilai LPPD



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2	Peringkat Nasional Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	Peringkat 24 Nasional	Mulai Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarkan Peringkat	Mulai Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarkan Peringkat	Mulai Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarkan Peringkat	Mulai Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarkan Peringkat	Mulai Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri Tidak Mengeluarkan Peringkat

Sumber : Setda Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Pada Tahun 2018 Nilai LPPD Kabupaten Madiun mencapai 3,3308 dengan kategori Sangat Tinggi. Namun mulai di tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri tidak lagi mengeluarkan nilai LPPD hingga di tahun 2022. Selanjutnya untuk capaian peringkat LPPD, sama halnya dengan nilai LPPD, mulai di tahun 2018 hingga 2022 Kementerian Dalam Negeri tidak lagi mengeluarkan peringkat untuk LPPD.

2.3.4.3 Keuangan

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari hasil pemeriksaan laporan keuangan daerah. Penilaian atas laporan keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kinerja pengelolaan keuangan daerah diukur menggunakan indikator opini pemeriksaan BPK. Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan dengan prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara menyeluruh.

Opini pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun mulai Tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah WTP. Laporan keuangan daerah sudah dinyatakan wajar tanpa pengecualian, namun disisi lain masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki baik dalam pengelolaan keuangan daerah maupun manajemen aset daerah. Hasil capaian pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Madiun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.48 Hasil Capaian Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Realisasi PAD (Milyar)	219,04	229,206	258,211	333,154	377,425
3.	Realisasi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (%)	11,97	11,77	14,01	16,84	18,80

Sumber : BPKAD, Bapenda Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jika opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dari tahun 2018 hingga tahun 2022 adalah WTP. Kemudian untuk realisasi PAD (milyar) mengalami peningkatan, dimana tahun 2018 sebesar 219,04, naik menjadi 229,206 pada tahun 2019, bertambah menjadi 258,211 pada tahun 2020, lalu di tahun 2021 mengalami peningkatan kembali mencapai 333,154 dan menjadi 377,425 di tahun 2022. Selanjutnya untuk realisasi PAD terhadap seluruh pendapatan dalam APBD (%) juga cenderung meningkat. Diketahui jika di tahun 2018 terealisasi sebesar 11,97% lalu turun menjadi 11,77% pada tahun 2019, menjadi 11,77% di tahun 2020, bertambah menjadi 16,84% di tahun 2021 dan di tahun 2022 kembali bertambah mencapai 18,80%.

2.3.4.4 Inspektorat

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Wujud dari urusan pengawasan dimanifestasikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan perangkat penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Penyusunan SAKIP yang nantinya berwujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) akan dievaluasi dan dinilai, menentukan memuaskan atau tidaknya kinerja suatu instansi pemerintah.

Tabel 2.49 Capaian SAKIP Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

Tahun	Nilai SAKIP
2017	60,89 (B)
2018	70,01 (B)
2019	71,00 (B)
2020	72,28 (BB)
2021	73,06 (BB)
2022	76,03 (BB)

Sumber : Inspektorat Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Dalam penilaian predikat SAKIP terdapat beberapa kriteria yang harus dipastikan terlaksana di pemerintah daerah dengan baik. Kriteria yang dimaksud adalah perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. 5 kriteria tersebut dibentuk oleh KEMENPAN-RB sebagai wujud menciptakan pemerintah yang terarah dan

terstruktur. Kabupaten Madiun sendiri selama 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 berhasil mempertahankan nilai sakiip dengan kategori BB.

2.3.4.5 Sekretariat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 29 mengamanatkan bahwa Sekretariat Daerah kabupaten/Kota merupakan unsur staf dipimpin oleh sekretaris Daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota. Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Tugas dan kewajiban sekretariat daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
- b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- c. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun indikator dari Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50 Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah unit pelayanan yang melaksanakan survei IKM	18	15	15	26	41 PD dan 28 UPP
2	ISO (SKPD)	1	2	-	-	-
3	Jumlah SPM yang telah dilaksanakan (bidang)	6	6	6	5	6
4	Penilaian predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	B	BB	BB	BB	BB
5	Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP	95	80,7	61,5	75,5	81,39
6	Jumlah produk hukum yang diterbitkan	794	1093	1038	1024	970
7	Jumlah pelaksanaan penyuluhan hukum	6	0	0	4	3
8	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah	158	215	91	303	339
9	Jumlah pelaksanaan kegiatan kedinasan wakil kepala daerah	135	119	26	89	200

Sumber : *Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Madiun, Tahun 2023*

Berdasarkan data yang tersaji di atas, dapat diketahui bahwa jumlah unit pelayanan yang melakukan survei IKM mengalami peningkatan di tahun terakhir menjadi 41 perangkat daerah dan 28 UPP. Kemudian untuk ISO (SKPD) dilaksanakan hanya sampai Tahun 2019. Jumlah SPM yang telah dilaksanakan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 6 bidang, yang mana di Tahun sebelumnya 5 Bidang. Selanjutnya berkaitan dengan penilaian predikat Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, berturut-turut dalam 3 tahun terakhir mendapat predikat BB. Persentase SKPD yang sudah memiliki SOP juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dengan capaian 81,39%. Sementara untuk jumlah produk hukum yang diterbitkan mengalami penurunan selama 2 tahun terakhir. Begitu juga dengan pelaksanaan penyuluhan hukum tidak dilaksanakan pada Tahun 2019-2020 dikarena terjadinya Pandemi Covid-19. Namun kegiatan penyuluhan dilaksanakan kembali pada Tahun 2021 sebanyak 4 dan 3 kali di Tahun 2022 dilaksanakan Kembali di Pelaksanaan kegiatan kedinasan kepala daerah maupun wakil kepala daerah juga mengalami peningkatan di tahun terakhir.

2.3.4.6 Kepegawaian

Pemerintah Kabupaten Madiun melakukan pengadaan pegawai melalui Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPK) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia pada bidang-bidang tertentu. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, secara kualitas ASN Kabupaten Madiun sudah cukup memadai untuk mengatasi beban kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Madiun. Namun penempatan ASN tersebut belum sesuai dengan kompetensi dan belum berdasarkan hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan dan evaluasi jabatan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2016 tentang manajemen pegawai. Sehingga banyak pekerjaan yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Guna menunjang pencapaian kinerja yang optimal perlu dilakukan pelatihan/ peningkatan kompetensi pegawai negeri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaannya.

Tabel 2.51 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pejabat yang sudah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (%)	77.7	70.8	68.7	79.03	71.05
2	Persentase jabatan struktural yang telah terisi	76.7	100	91,5	96,22	83.50

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan sajian tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase pejabat Kabupaten Madiun yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dalam 5 tahun terakhir dalam kondisi yang fluktuatif. Di tahun 2018 tercapai sebanyak 77,7%, kemudian turun pada tahun 2019 samapai dengan 2020 dikarenakan kondisi pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 capaian ini mulai kembali meningkat menjadi 79,03%, Namun peningkatan ini belum berlanjut pada tahun 2022 menurun kembali menjadi 71,50%. Berikutnya untuk indikator persentase jabatan struktural yang telah terisi juga cenderung fluktuatif dari tahun 2018-2022, dengan capaian tertinggi di tahun 2019 sebesar 100%, sedangkan pada tahun 2022 menurun pada capaian 83,50%.

Untuk Capaian Indeks profesionalitas ASN pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Pada tahun 2020 indeks profesionalitas ASN 80,48 sedangkan tahun 2021 turun drastis menjadi 48,77. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi BKN yang dulu penghitungan di lakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah sejak Oktober 2021 penilaian dilakukan oleh BKN pusat.. Sedangkan dalam penilaian BKN pusat terlihat nilai kompetensi sangat kurang. Dan pada tahun 2022 berdasarkan hasil penilaian BKN Pusat meningkat menjadi 64,79. Untuk meningkatkan nilai kompetensi perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: peningkatan kompetensi ASN melalui diklat Workshop, sosialisasi dan bimbingan teknis.

2.3.4.7 Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pasal 117 ayat (1) bahwa ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana pada urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta perlindungan Masyarakat diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana. Kemudian diperjelas pada ayat (2) bahwa pada Peraturan daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Adapun indikator Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana Kabupaten Madiun, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52 Indikator Urusan Pemerintahan Bidang Bencana Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio relawan bencana kabupaten (orang)	60	60	60	60	61	55
2	Rasio desa tanggap bencana yang terlatih (desa)	7	9	19	49	56	64

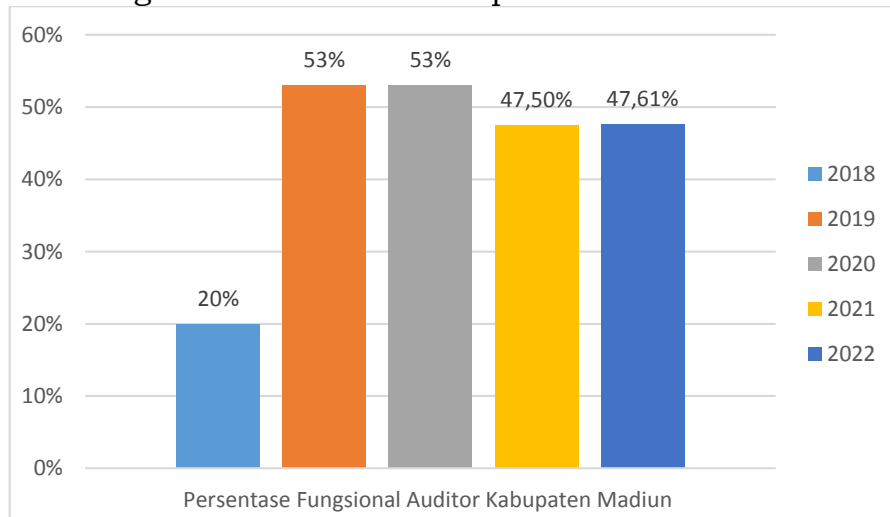
Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Madiun, Tahun 2023

Indikator yang terdapat dalam urusan Urusan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat sub urusan Bencana Kabupaten Madiun yaitu rasio relawan bencana kabupaten dan rasio desa tanggap bencana yang terlatih. Rasio relawan bencana dari tahun 2017-2020 memiliki nilai tetap yaitu 60. Kemudian rasio indikator ini bertambah menjadi 61 pada tahun 2021, dan menurun pada Tahun 2022 yaitu sebesar 55 orang. Berikutnya untuk rasio desa tanggap bencana yang terlatih cenderung meningkat. Rasio desa tanggap bencana yang terlatih pada tahun 2017 sebesar 7, meningkat menjadi 9 di tahun 2018, kemudian bertambah menjadi 19 di tahun 2019, lalu melonjak hingga mencapai 49 pada tahun 2020, tahun 2021 tercapai sebanyak 56, dan pada meningkat Kembali di Tahun 2022 dengan capaian sebanyak 64.

2.3.4.8 Pembinaan dan Pengawasan

Peran pengawasan dalam pembangunan di Kabupaten Madiun sangat penting, karena fungsi ini sangat diperlukan dalam upaya menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kaidah yang ada. Capaian dalam urusan ini adalah persentase fungsional auditor.

Grafik 2.46
 Persentase Fungsional Auditor Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Inspektorat Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai gambar diatas, dapat diketahui bahwa Persentase Fungsional Auditor Kabupaten Madiun pada tahun 2018 adalah sebesar 20%. Kemudian di tahun 2019 mengalami lonjakan hingga mencapai 53% dan bertahan hingga tahun 2021. Namun di tahun 2021 mengalami sedikit penurunan menjadi 47,50%. Kemudian di Tahun 2022 terjadi meningkat lagi tetapi tidak signifikan yaitu sebesar 47,60%. Hal ini mengartikan bahwa perlunya pemerintah mempertahankan capaian persentase fungsional auditor dalam setiap tahunnya. Guna membantu pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa demi mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah dapat dilihat dari aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

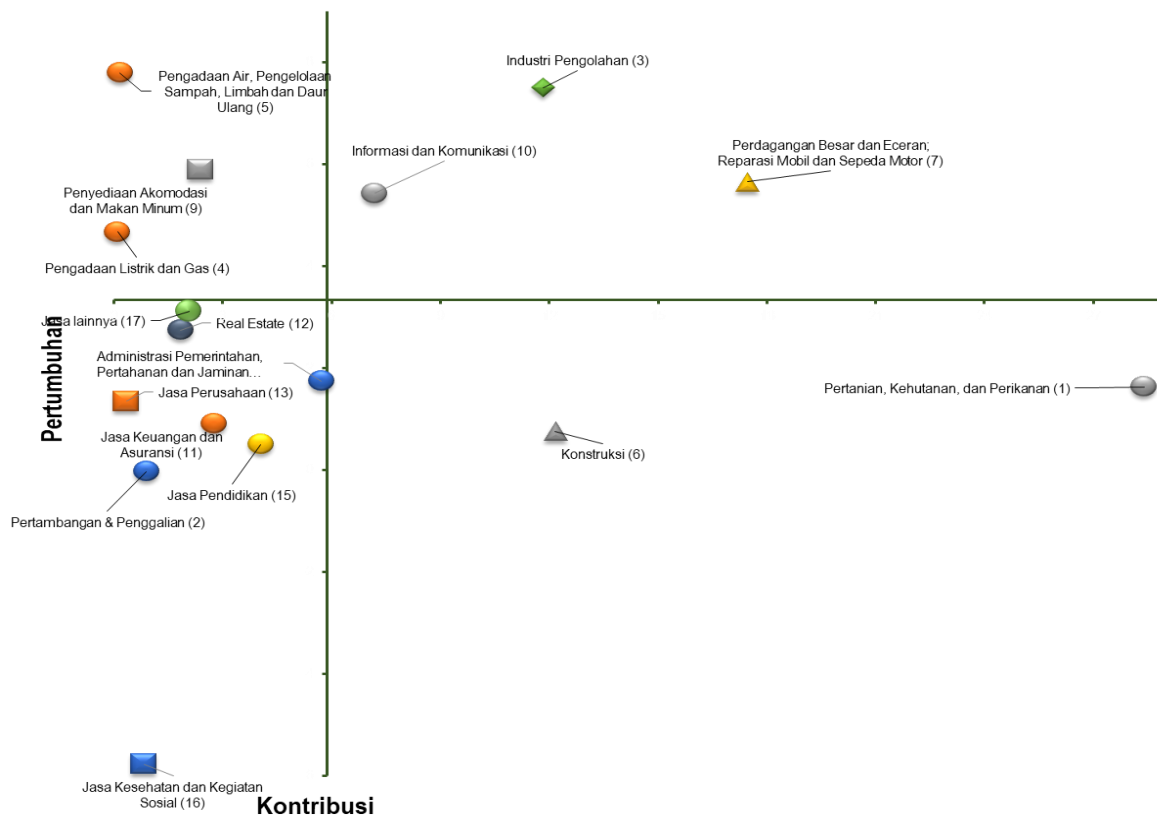
Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah Kabupaten Madiun, dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, pengeluaran konsumsi non pangan per kapita, dan nilai tukar petani. Berikut rincian yang menunjukkan kinerja Kabupaten Madiun pada indikator-indikator tersebut:

2.4.1.1 Analisis Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Madiun berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2022 sebesar 21.879.380,2 juta rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 sebesar

14.169.622,6 juta rupiah. Ekonomi Madiun tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 4,32 persen dibandingkan tahun 2021. Dari sisi Lapangan Usaha, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yaitu sebesar 17,71 persen; lapangan usaha Transportasi dan Perdagangan yaitu sebesar 16,90 persen. Struktur ekonomi Madiun pada tahun 2022 masih didominasi oleh Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 26,50 persen. Sementara, dari sisi pengeluaran didominasi oleh pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 72,71 persen

Grafik 2.47
Analisis Klassen Pertumbuhan dan Kontribusi Tahun 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2021, diolah

Grafik analisis pertumbuhan dan kontribusi perekonomian diatas menunjukkan adanya sektor-sektor yang timpang. Analisis klassen menunjukkan sektor-sektor mana yang prima, potensial, berkembang dan terbelakang. Dimana hasil menunjukkan **Kuadran I** merupakan Sektor Prima yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perekonomian Daerah. sektor ini antara lain sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, Sektor Informasi dan Komunikasi. **Kuadran II** merupakan Sektor Potensial yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan tinggi, namun memiliki kontribusi yang rendah. Sektor potensial antara lain Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan dan Sektor Pengadaan

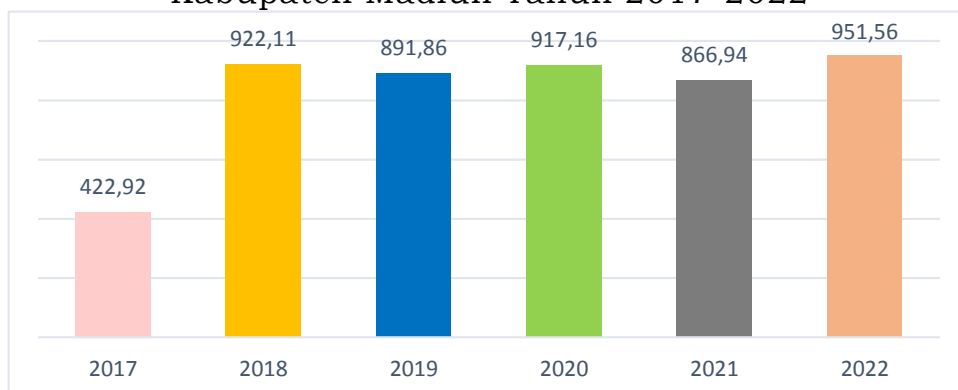
Listrik dan Gas. **Kuadran III** merupakan Sektor Berkembang yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan rendah, namun memiliki kontribusi yang tinggi. Sektor berkembang antara lain Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dan Sektor Konstruksi. **Kuadran IV** merupakan Sektor Terbelakang yaitu sektor yang memiliki pertumbuhan rendah dan memiliki kontribusi yang rendah. Sektor terbelakang Kabupaten Madiun antara lain Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Real Estat, Sektor Jasa Perusahaan, Sektor Jasa Pendidikan, Sektor Jasa Lainnya, Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

2.4.1.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran per kapita dapat mengungkap terkait dengan pola konsumsi rumah tangga secara umum dengan menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik kondisi tingkat kesejahteraan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula pengeluaran bukan makanan.

Berikut pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Grafik 2.48
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita
Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

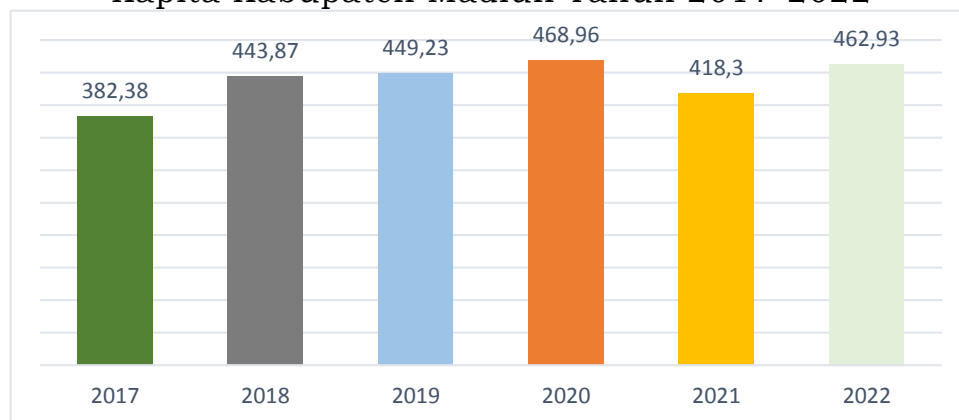
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita di Kabupaten Madiun selama

tahun 2017 hingga tahun 2022 dalam kondisi fluktuatif. Diketahui pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita sebesar 422,92, kemudian bertambah menjadi 922,11 pada tahun 2018. Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 891,86, dan kembali bertambah menjadi 917,16 pada tahun 2020, tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 866,94 dan naik kembali pada tahun 2022 menjadi 951,56.

2.4.1.3 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Per kapita

Indikator ini untuk mengukur persentase total pengeluaran rumah tangga non pangan terhadap total pengeluaran. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, jika semakin tinggi persentase pengeluaran untuk non pangan terhadap total pengeluaran, berarti semakin membaik tingkat perekonomian penduduk. Berikut pergerakan indikator pengeluaran konsumsi non pangan per kapita Kabupaten Madiun dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021:

Grafik 2.49 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Pangan Per Kapita Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Madiun Tahun 2023

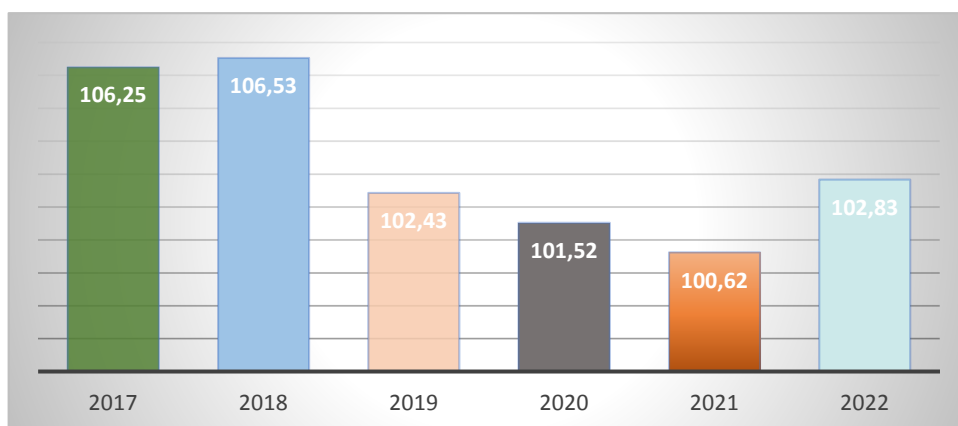
Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa pergerakan indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita di Kabupaten Madiun selama tahun 2017 hingga tahun 2022 dalam kondisi fluktuatif. Diketahui pada tahun 2017 pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita sebesar 382,38, kemudian bertambah menjadi 443,87 pada tahun 2018. Tahun 2019 meningkat menjadi 449,23, dan kembali bertambah menjadi 468,96 pada tahun 2020. Tahun 2021 menurun menjadi 418,30. Pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 462,93.

2.4.1.4 Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator yang dapat berguna untuk melihat kondisi tingkat kesejahteraan para petani. Nilai tukar petani dihitung berdasarkan pada rasio harga yang diterima oleh para petani, terhadap

harga yang harus dibayar para petani. Kesejahteraan petani yang diindikasikan melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun 2017–2021 cenderung mengalami percepatan, walaupun di tahun 2017 mengalami perlambatan. Perlambatan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah daripada kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani. Penurunan kondisi kesejahteraan petani di Kabupaten Madiun disebabkan oleh beberapa faktor seperti meningkatnya biaya produksi (harga pupuk, sewa tanah) dan faktor cuaca yang ekstrem.

Grafik 2.50 Nilai Tukar Petani Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan grafik diatas bahwa nilai tukar petani di Kabupaten Madiun selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Pada mulanya di tahun 2017 tercapai sebesar 106,25 yang kemudian bertambah menjadi 106,53 di tahun 2018. Capaian ini kemudian mengalami penurunan menjadi 102,43 pada tahun 2019, lalu menjadi 101,52 pada tahun 2020, dan semakin turun di tahun 2021 hingga mencapai 100,62. Hal ini mengartikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, indeks harga yang dibayar oleh petani lebih tinggi secara terus menerus daripada indeks harga yang diterima oleh para petani di Kabupaten Madiun.

2.4.1.5 Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berperan dalam perekonomian suatu bangsa terutama dalam menghasilkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan hasil ekspor, meningkatkan teknologi, menambah kekayaan intelektual, dan peran sosial lainnya. Ekonomi kreatif adalah era ekonomi baru yang berfokus pada kreativitas dan informasi. Modal utama dalam ekonomi kreatif yang diperlukan adalah wawasan luas dan ide yang dimiliki Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua faktor tersebut menjadi modal utama yang digunakan manusia dalam menghadapi era ekonomi kreatif saat ini.



Ekonomi Kreatif agar mampu mempunyai daya saing mempunyai aspek strategi antara lain :

- Peningkatan daya tarik ukm melalui inovasi bermuatan lokal dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan komparatif. Pembentukan teknologi pendukung guna meningkatkan kapasitas kemampuan penguasaan teknologi dalam terciptanya iklim usaha yang kondusif untuk merangsang investasi teknologi dan infratraktur.
- Meningkatkan kualitas SDM kreatif dengan harapan dapat membantu pemanfaatan bahan baku yang terbarukan.
- Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan menciptakan apresiasi budaya daerah dengan penghargaan-penghargaan produk bermuatan lokal sehingga terciptanya masyarakat kreatif yang menghargai Hak Kekayaan Intelektual demi kuatnya UKM ekonomi kreatif.

Tabel 2.53
Data Pelaku Ekonomi Kreatif Kabupaten Madiun Tahun 2022

NO	SUB SEKTOR	JUMLAH
1	KRIYA (Kerajinan dan Anyaman)	35
2	Desain Interior	1
3	Desain Produk	2
4	Fashion	23
5	Fotografi	4
6	Desain Komunikasi Visual	4
7	Periklanan	1
8	Seni Pertunjukan	9
	JUMLAH	79

Sumber : DISPARPORA Kabupaten Madiun Tahun 2023

2.4.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

2.4.2.1 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Indikator ini menunjukkan berkaitan dengan kemampuan/ kapasitas jalan dalam menampung sejumlah kendaraan. Berikut perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan yang ada di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.54 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,00238	0,00259	0,00251	0,00256	0,00270	0,00292

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2023

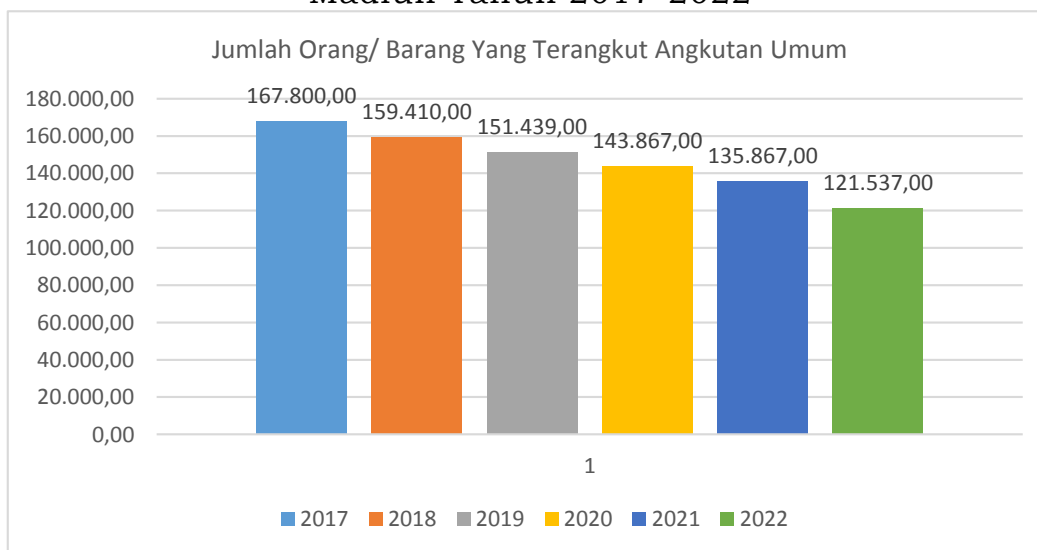
Sesuai dengan data capaian diatas, diketahui bahwa di tahun 2017-2018 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan mengalami peningkatan dari sebesar 0,00238 menjadi 0,00259. Kemudian di tahun 2019 menurun menjadi 0,00251

namun tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami peningkatan dari 0,00256 menjadi 0,00292 pada tahun 2022. Dapat diketahui jika di 3 tahun terakhir, capaian untuk rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Madiun ini mengalami peningkatan.

2.4.2.2 Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan volume barang yang terfasilitasi dengan layanan angkutan umum. Berikut perkembangan jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum yang ada di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2022:

Grafik 2.51
 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Dapat diketahui bahwa jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum di Kabupaten Madiun mengalami penurunan yang signifikan dalam 5 tahun terakhir. Tahun 2017 tercapai sebanyak 167,800, lalu turun menjadi 159,410 pada tahun 2018, di tahun 2019 tercapai sebanyak 151,439, kemudian di tahun 2020 sebanyak 143,867, di tahun 2021 mencapai angka 135,867 dan di tahun 2022 menjadi 121,537. Maka dapat diketahui jika semakin berkurang atau jarang masyarakat Kabupaten Madiun yang menggunakan angkutan umum untuk menunjang kehidupan sehari-harinya.

2.4.2.3 Jumlah Orang/ Barang Melalui Terminal

Indikator ini menunjukkan jumlah penumpang dan barang yang masuk dan keluar terminal. Berikut perkembangan jumlah orang/ barang melalui terminal di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Grafik 2.52 Jumlah Orang/Barang Melalui Terminal di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



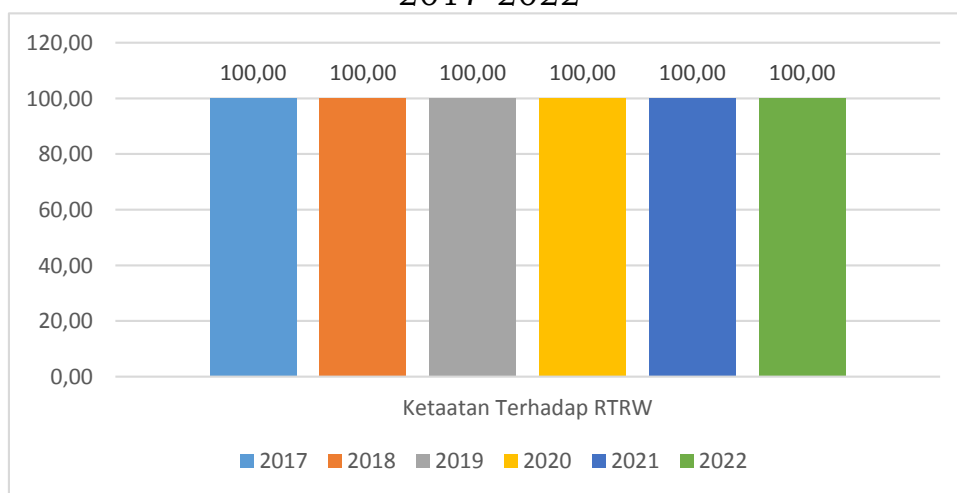
Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sama halnya dengan indikator jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum, indikator jumlah orang/ barang yang melalui terminal di Kabupaten Madiun juga mengalami penurunan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini mengartikan bahwa semakin berkurangnya masyarakat Kabupaten Madiun yang datang ke terminal untuk memanfaatkan sarana transportasi publik yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Diketahui pada tahun 2017 tercapai sebanyak 8,735, lalu di tahun 2018 menjadi 7,956, kemudian di tahun 2019 tercapai sebanyak 7,558, selanjutnya menjadi 7,180 di tahun 2020, di tahun 2021 mencapai 6,500 dan tahun 2022 menjadi 4,315.

2.4.2.4 Ketaatan Terhadap RTRW

Indikator ini berkaitan dengan seberapa taat pemerintah daerah terhadap RTRW yang telah ditetapkan dan disahkan sebelumnya selama memanfaatkan wilayah-wilayah yang ada di lingkup pemerintahannya.

Grafik 2.53 Ketaatan Terhadap RTRW di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

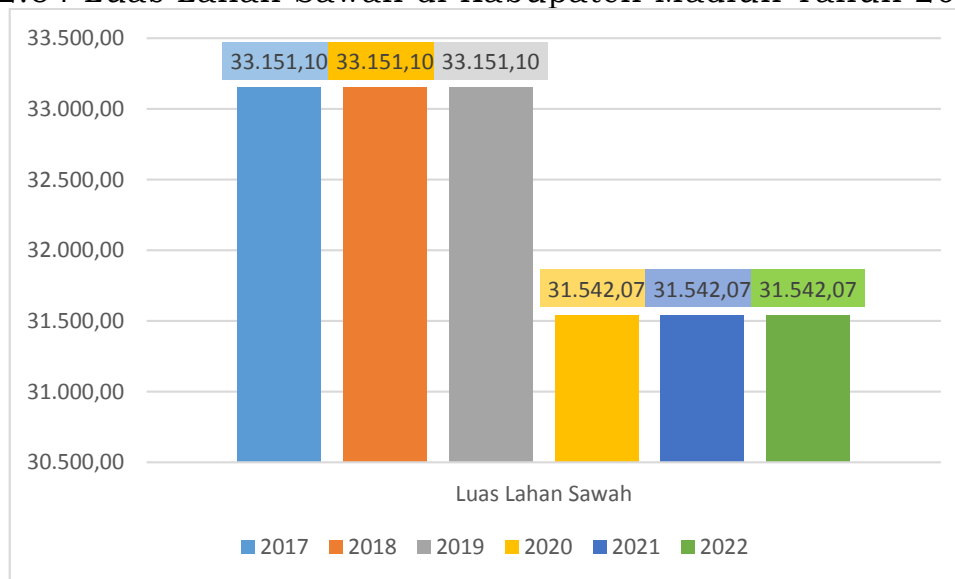
Sesuai dengan capaian dalam grafik tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah menaati RTRW yang telah ditetapkan dalam tiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dengan capaian ketaatan terhadap

RTRW dari tahun 2017-2022 mencapai 100% di setiap tahunnya. Sehingga perlu dipertahankan untuk capaian ketaatan terhadap RTRW ini.

2.4.2.5 Luas Lahan Sawah

Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/ menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi tanpa memandang di mana diperoleh/ status lahan tersebut. Lahan tersebut termasuk lahan yang terdaftar di Pajak Bumi & Bangunan (PBB), Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan bekas tanaman tahunan yang telah dijadikan sawah, baik yang ditanami padi maupun palawija.

Grafik 2.54 Luas Lahan Sawah di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



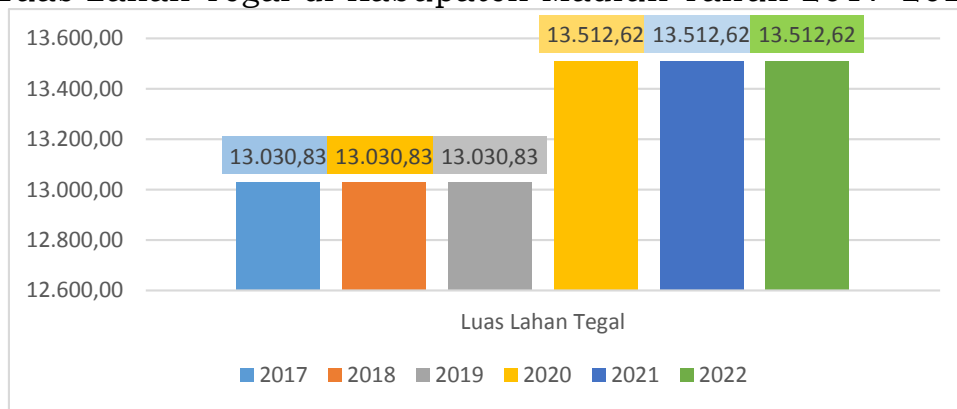
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Berdasarkan capaian diatas dapat diketahui bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mencapai 33.151,10 Ha. Kemudian di tahun 2020 hingga tahun 2022, capaian tersebut menjadi 31.542,07 Ha. Hal ini mengartikan bahwa luas lahan sawah di Kabupaten Madiun semakin berkurang, bisa diartikan jika lahan sawah dialih fungsikan menjadi lahan lain yang bermanfaat untuk kepentingan publik.

2.4.2.6 Luas Lahan Tegal

Tegal/ kebun adalah lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah.

Grafik 2.55
Luas Lahan Tegal di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan data capaian diatas, diketahui capaian luas lahan tegal di Kabupaten Madiun berbanding terbalik dengan luas lahan sawah. Jika luas lahan sawah seperti yang telah disebutkan sebelumnya mengalami penurunan, luas lahan tegal ini justru mengalami peningkatan. Tahun 2017 hingga tahun 2019 tercapai seluas 13.030,83 Ha, kemudian meningkat mencapai 13.512,62 Ha di tahun 2020 hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan jika luas lahan tegal di Kabupaten Madiun semakin bertambah luas dalam 3 tahun terakhir.

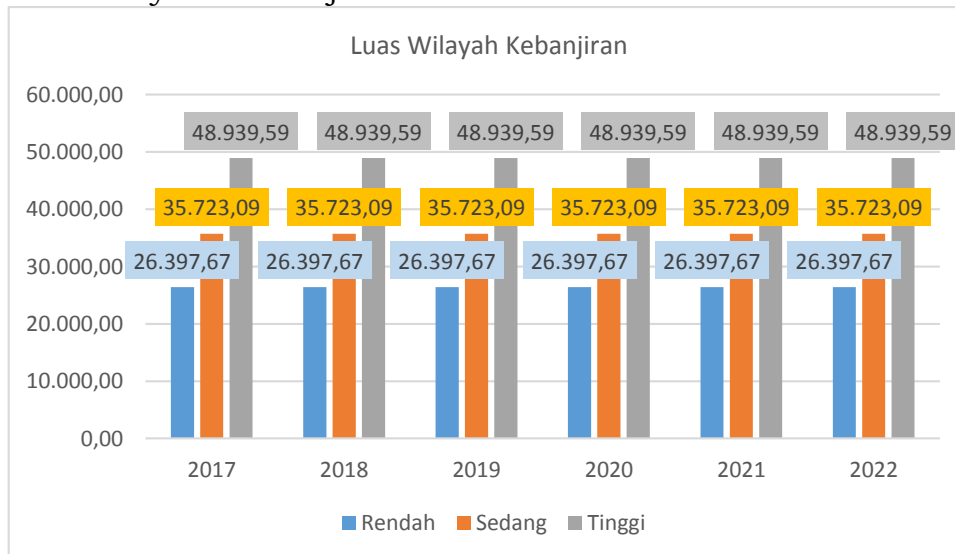
2.4.2.7 Luas Wilayah Industri

Wilayah industri merupakan wilayah yang digunakan untuk mendukung iklim investasi yang lebih baik. Capaian luas wilayah industri di Kabupaten Madiun di tahun 2019 sebesar 308,04 Ha yang bertahan hingga di tahun 2020. Sehingga menunjukkan bahwa luas wilayah industri di Kabupaten Madiun tidak berubah atau dalam kondisi yang sama untuk penentuan penggunaannya.

2.4.2.8 Luas Wilayah Kebanjiran

Luas wilayah banjir adalah persentase luas wilayah yang terkena banjir terhadap luas rencana kawasan yang telah diatur sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Banjir merupakan keadaan sungai, yang mana aliran sungai tidak tertampung oleh palung sungai, sehingga terjadi limpahan atau genangan pada lahan yang semestinya kering. Berikut pertumbuhan luas wilayah banjir di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Grafik 2.56
Luas Wilayah Kebanjiran di Kab. Madiun Tahun 2017-2022



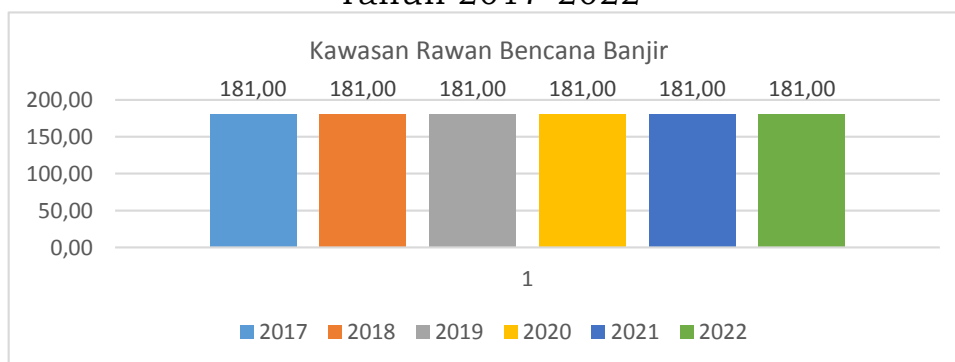
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai capaian dalam grafik diatas, diketahui bahwa luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Madiun selalu dalam luasan tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan hal yang positif, karena mengartikan bahwa luas wilayah kebanjiran tidak semakin meluas ke daerah lainnya. Diketahui jika luas wilayah kebanjiran di Kabupaten Madiun diklasifikasikan menjadi 3, yaitu wilayah kebanjiran rendah dengan luas 26.397,67 Ha dari tahun 2017 hingga tahun 2022; kemudian wilayah kebanjiran sedang dengan luas 35.723,09 Ha di tahun 2017 hingga 2021; serta wilayah kebanjiran tinggi yang mencapai luas 48.939,59 Ha selama tahun 2017 hingga tahun 2022.

2.4.2.9 Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir dapat diartikan sebagai suatu wilayah atau daerah yang sering dilanda bencana banjir, utamanya pada musim penghujan. Seperti di beberapa desa yang ada di Kabupaten Madiun menjadi kawasan rawan bencana banjir.

Grafik 2.57 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



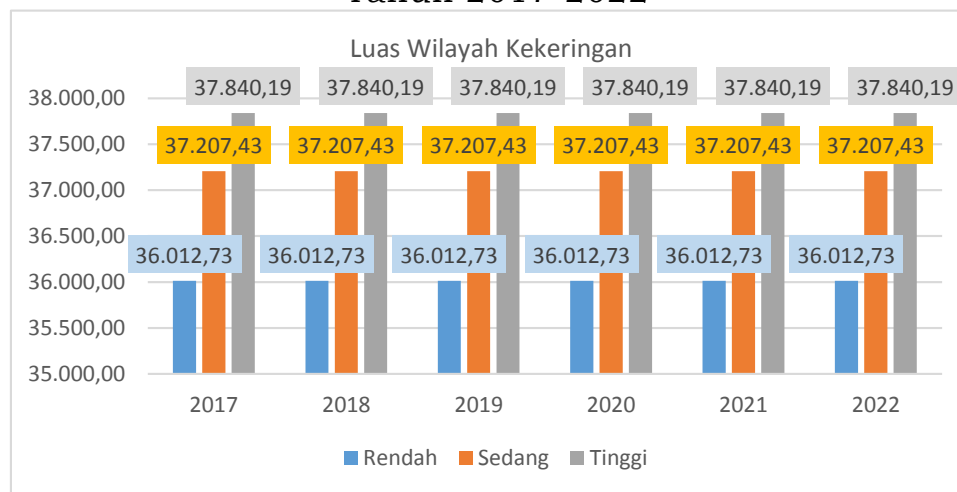
Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Dapat diketahui bahwa jumlah kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Madiun dalam jumlah yang sama setiap tahunnya, yaitu sebanyak 181 desa. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengupayakan untuk menekan adanya kenaikan kawasan rawan bencana banjir agar tidak memperburuk kondisi lingkungan di Kabupaten Madiun.

2.4.2.10 Luas Wilayah Kekeringan

Kekeringan merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi perbincangan yang tidak ada habisnya dan memerlukan adanya koordinasi bersama untuk upaya pencegahan dan penanganannya, begitu juga yang terjadi di Kabupaten Madiun. Berikut pertumbuhan luas wilayah kekeringan di Kabupaten Madiun dari tahun 2017 hingga tahun 2021:

Grafik 2.58 Luas Wilayah Kekeringan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai capaian dalam grafik diatas, diketahui bahwa luas wilayah kekeringan di Kabupaten Madiun selalu dalam luasan tetap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan hal yang positif, karena mengartikan bahwa luas wilayah kekeringan tidak semakin meluas ke daerah lainnya. Diketahui jika luas wilayah kekeringan di Kabupaten Madiun diklasifikasikan menjadi 3, yaitu wilayah kekeringan rendah dengan luas 36.012,73 Ha dari tahun 2017 hingga tahun 2022; kemudian wilayah kekeringan sedang dengan luas 37.207,43 Ha di tahun 2017 hingga 2021; serta wilayah kekeringan tinggi yang mencapai luas 37.840,19 Ha selama tahun 2017 hingga tahun 2022.

2.4.2.11 Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Grafik 2.59 Luas Wilayah Perkotaan di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai capaian diatas, dapat diketahui bahwa luas wilayah perkotaan yang ada di Kabupaten Madiun dalam jumlah yang tetap setiap tahunnya, yaitu 182 Ha. Hal ini menunjukkan jika pemerintah Kabupaten Madiun tidak menambah ataupun mengurangi kapasitas dari peruntukan lahan untuk wilayah perkotaan.

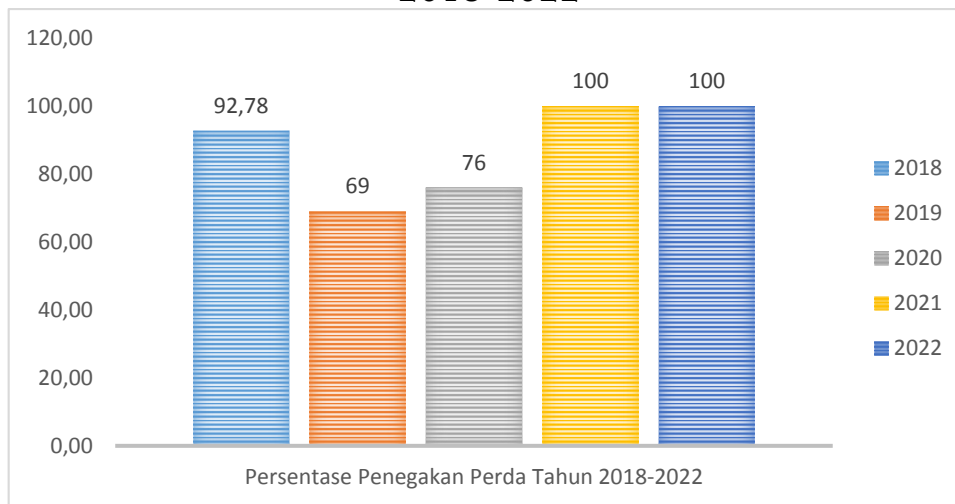
2.4.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

Iklm investasi yang kondusif dalam perekonomian merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Hal ini karena, investasi menjadi salah satu hal yang membantu kondisi perekonomian suatu daerah untuk melakukan pembangunan dan memberikan layanan kepada masyarakatnya. Iklm investasi di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya: persentase penegakan perda, jumlah demo, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah, angka kriminalitas, serta jumlah perda yang mendukung iklim usaha. Berikut uraiannya:

2.4.3.1 Persentase Penegakan Perda

Penegakan Perda merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat guna pematuhan Peraturan Daerah oleh masyarakat setempat. Begitu halnya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Madiun untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan.

Grafik 2.60 Persentase Penegakan Perda di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



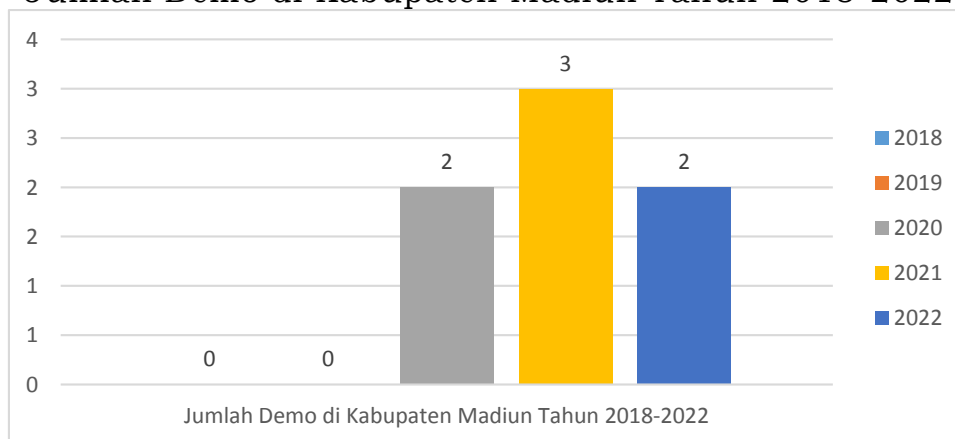
Sumber : SatpolPP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Dari capaian diatas dapat diketahui bahwa, persentase penegakan Perda di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan di 2 tahun terakhir. Tahun 2018 mencapai 92,78% di tahun 2018, di tahun 2019 mengalami penurunan dengan capaian sebesar 69,00%, kemudian terjadi peningkatan di tahun 2020. Sedangkan di tahun 2021 hingga 2022 mencapai 100%. Maka dapat diartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah berupaya untuk menegakkan Perda sesuai aturan dalam tiap tahunnya untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat.

2.4.3.2 Jumlah Demo

Jumlah demo menjadi salah satu cerminan kondusifitas iklim investasi di suatu daerah. Karena semakin banyak jumlah demo yang terjadi di suatu daerah, maka para investor akan merasa takut dan tidak nyaman untuk melakukan kegiatan investasi di daerah terkait. Berikut disajikan dalam bentuk grafik untuk jumlah demo yang terjadi di Kabupaten Madiun selama tahun 2017 hingga 2021:

Grafik 2.61 Jumlah Demo di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



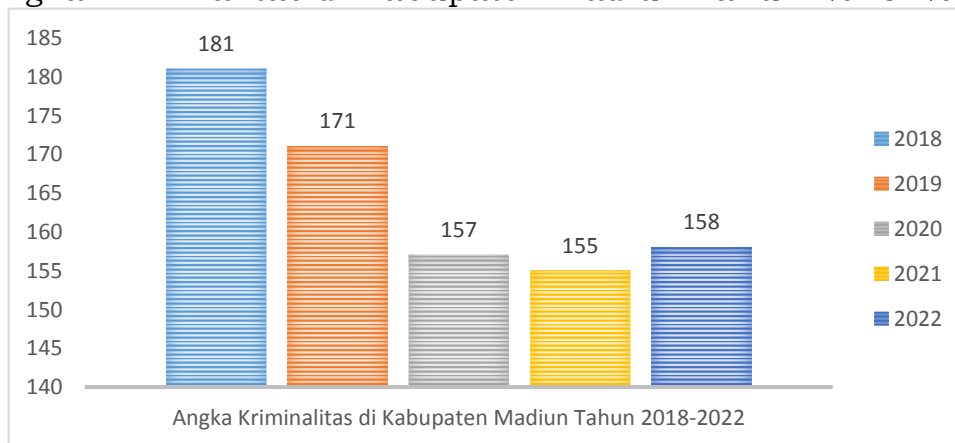
Sumber : Satpol PP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Diketahui bahwa pada tahun 2018 hingga Tahun 2019 tidak terjadi kasus demo di Kabupaten Madiun. Sedangkan di tahun 2020 terdapat 2 kasus demo, dan meningkat di Tahun 2021 sebanyak 3 kasus demo. Kemudian di Tahun 2022 terjadi 2 kasus demo. Hal ini mengartikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menekan kembali angka jumlah demo dan meminimalisir penyebab dari terjadinya demo di lingkungan pemerintahannya.

2.4.3.3 Angka Kriminalitas

Kondisi yang aman dan tertib merupakan salah satu prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Madiun menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Madiun. Kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kabupaten Madiun dipresentasikan dengan jumlah kriminalitas yang ada. Angka kriminalitas merupakan salah satu indikator dalam mempengaruhi iklim investasi di suatu daerah. Tinggi rendahnya capaian angka kriminalitas yang terjadi di suatu daerah, dapat membuat para investor untuk mempertimbangkan investasi yang akan dilakukannya.

Grafik 2.62
 Angka Kriminalitas di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



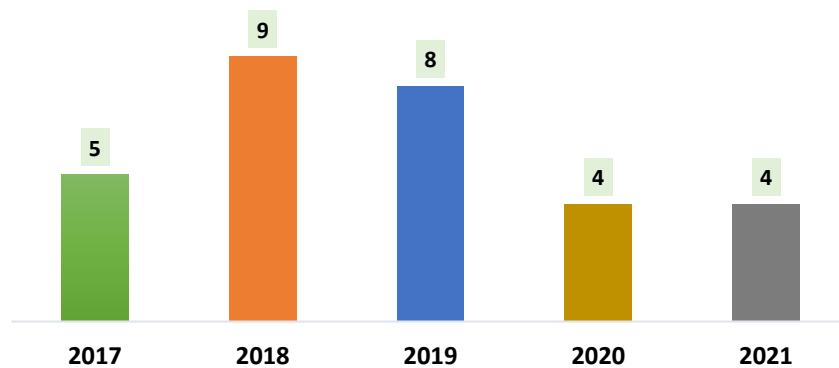
Sumber : SatpolPP Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Berdasarkan data capaian diatas, dapat diketahui jika angka kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini menjadi bentuk pencapaian yang positif, karena meningkatkan keamanan dan ketertiban lingkungan. Pada Tahun 2018 terdapat sebanyak 181 kasus, kemudian 171 kasus di tahun 2019. Berikutnya di tahun 2020 mencapai 157 kasus, dan di tahun 2021 terjadi sebanyak 155 kasus, dan 158 kasus pada Tahun 2022.

2.4.3.4 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Perda yang mendukung iklim usaha ini dimaksudkan sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah guna menjadi pedoman atau acuan selama melakukan usaha di wilayahnya. Jumlah Perda/ Perbup di Kabupaten Madiun yang mendukung kaitannya dengan iklim usaha selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021 seperti berikut:

Grafik 2.63 Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai data yang ada, diketahui bahwa pada tahun 2017 terdapat sebanyak 5 Perda di Kabupaten Madiun yang mendukung iklim usaha. Kemudian di tahun 2018 terdapat sebanyak 9 Perda, lalu di tahun 2019 terdapat 8 Perda, berikutnya tahun 2020 terdapat 4 Perda hingga di tahun 2021. Untuk tahun 2022, pemerintah Kabupaten Madiun baru menyusun Rancangan Peraturan Daerah Insentif Kemudahan Berusaha terkait kemudahan berusaha. Hal ini mengartikan bahwa pada tahun 2021 Kabupaten Madiun memiliki 4 Perda yang mendukung iklim usaha di daerahnya sebagai bentuk pedoman dalam menjalankan usaha, mendirikan maupun mengelolanya.

2.4.3.5 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

SPBE adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE. Kabupaten Madiun secara bertahap telah melaksanakan SPBE dan dilakukan pengukuran indeks SPBE pada tahun 2022. Nilai indeks merepresentasikan tingkat penyelenggaraan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan penjumlahan dari setiap nilai indikator yang dihitung dengan mengalikan antara nilai tingkat kematangan dan bobot dari indikator tersebut.

Nilai Indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

No.	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Hasil pengukuran indeks SPBE Kabupaten Madiun pada tahun 2022 sebesar 3,21 termasuk predikat 3 kategori baik.

2.4.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan penting dari setiap kegiatan manusia agar kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik. Sumber daya manusia menyangkut dimensi

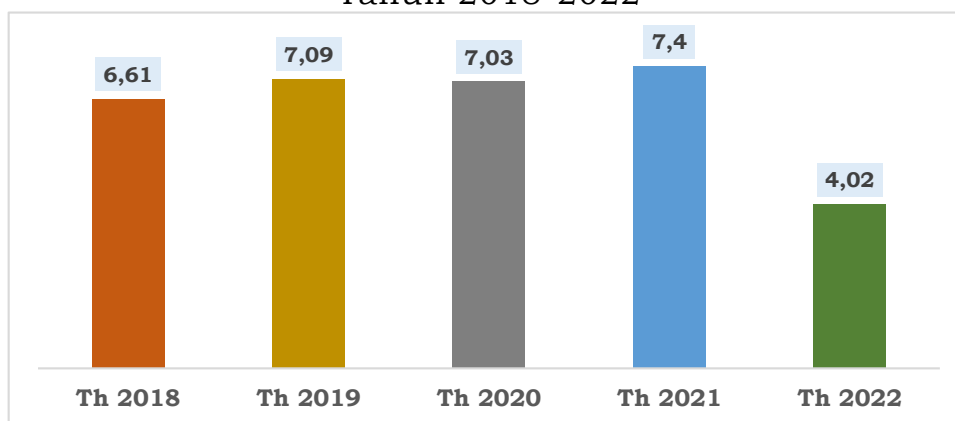
jumlah karakteristik (kualitas) dan persebaran penduduk. Maka pengembangan sumber daya manusia perlu dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi, penurunan fertilitas, peningkatan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi. Peningkatan untuk kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Pengembangan kualitas sumber daya manusia dapat meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

Indikator dari kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah Kabupaten Madiun dapat dianalisis dengan melihat persentase lulusan S1/S2/S3 dan juga persentase ketergantungan penduduk untuk melihat beban ketergantungan penduduk.

2.4.4.1 Persentase Lulusan S1/S2/S3

Kualitas Sumber Daya Manusia dalam hal ini sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah, maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan jenjang S1, S2, dan S3. Berikut pergerakan indikator persentase lulusan S1, S2, dan S3 di Kabupaten Madiun:

Grafik 2.64 Persentase Lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Dapat diketahui berdasarkan capaian dalam grafik diatas, di tahun 2018 persentase lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Madiun mencapai angka 6,61%, kemudian bertambah menjadi 7,09% di tahun 2019, lalu di tahun 2020 mencapai 7,03%, berikutnya di tahun 2021 mencapai angka 7,40% dan di tahun 2022 hanya mencapai angka 4,02%. Maka dapat dikatakan bahwa

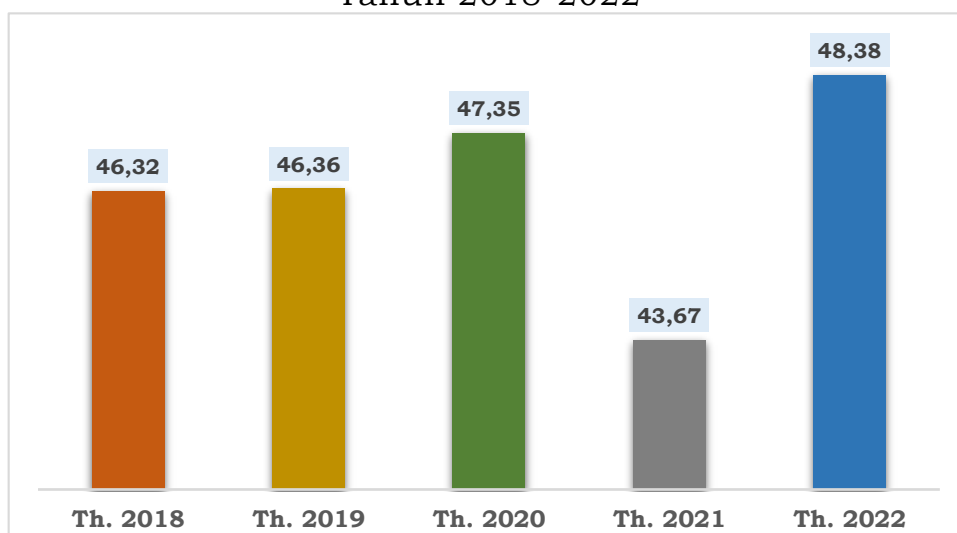
lulusan S1/S2/S3 yang ada di Kabupaten Madiun mengalami penurunan pada tahun 2022.

2.4.4.2 Persentase Rasio Ketergantungan/ Dependency Ratio

Persentase rasio ketergantungan (*dependency ratio*) digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan menjelaskan bahwa semakin tingginya persentase *dependency ratio*, menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Yang termasuk penduduk usia produktif adalah penduduk yang berusia 15-64 tahun, sedangkan yang dikategorikan sebagai penduduk usia non produktif adalah penduduk berusia dibawah 15 tahun (karena secara ekonomis masih bergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya) dan penduduk berusia diatas 65 tahun (karena umunya sudah melewati masa pensiun). Berikut pertumbuhan indikator rasio ketergantungan Kabupaten Madiun dari tahun 2018 sampai tahun 2022:

Grafik 2.65 Persentase Rasio Ketergantungan di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Berdasarkan grafik diatas, diketahui bahwa pada dasarnya capaian persentase rasio ketergantungan di Kabupaten Madiun berada diatas angka

40%. Di tahun 2018 tercapai 46,32%, lalu di tahun 2019 sebesar 46,36%, kemudian di tahun 2020 mencapai 47,35%, dan berikutnya di tahun 2021 tercapai sebesar 43,67%. Sedangkan di tahun 2022 mencapai sebesar 48,38%.

2.4.5 FOKUS URUSAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan iklim investasi, maka Pemerintah Kabupaten Madiun telah menetapkan satu kebijakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perijinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, begitu halnya yang terkait dengan perijinan usaha. Proses perijinan, khususnya perijinan usaha secara langsung berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon investor untuk menanamkan modalnya. Indeks Kepuasan Masyarakat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Pada tahun 2022, Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPSTP tercapai dengan skor 86,53 dimana angka ini telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu senilai 86. Di tahun 2022, Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan tiap semester menggunakan jasa konsultan dan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur (SuKMa-e Jatim). Jumlah total responden yang mengikuti survey adalah sebanyak 1.427 responden.

Realisasi investasi di Kabupaten Madiun terus konsisten mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Di tahun 2022, nilai realisasi investasi mencapai Rp 1.823.088.069.145 (1,8 Triliun) atau tercapai 182,31% dari target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra DPMPSTP Kabupaten Madiun. Nilai realisasi ini diperoleh dari pelaporan LKPM oleh pelaku usaha Non UMK (per triwulan) dan UMK (per semester). Berikut data rincian pelaporan LKPM di tahun 2022.

Usaha Mikro Kecil mendominasi pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Madiun yaitu sebesar 58,80%. Sektor Usaha Mikro Kecil penyumbang realisasi investasi terbesar adalah sektor perdagangan, konstruksi dan industri kecil. Untuk itu, sejalan dengan pemerintah, pemerintah daerah juga harus turut mendukung dan mengembangkan sektor UMK, karena telah terbukti menjadi salah satu tonggak utama dalam pemulihan ekonomi setelah diterpa oleh pandemi COVID 19.

Sedangkan usaha Non UMK hanya berkontribusi sebesar 41,20% yang didominasi oleh sektor industri, perdagangan dan perumahan. Meskipun kontribusi terhadap realisasi investasi lebih rendah, tetapi usaha Non UMK khususnya sektor industri mampu menyerap banyak tenaga kerja. Hal ini akan berdampak pada penurunan jumlah pengangguran dan berkontribusi meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun.

2.4.6 FOKUS URUSAN PERDAGANGAN

Perdagangan di wilayah Kabupaten Madiun mayoritas didominasi oleh perdagangan dalam wilayah daerah. Perdagangan ini hanya memiliki pangsa pasar di wilayah Kabupaten Madiun. Indikator Kinerja keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perdagangan, dapat diukur melalui indikator (i) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB; (ii) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%); (iii) Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (PKL). Perdagangan di wilayah kabupaten Madiun didominasi oleh para pedagang dengan modal kecil. Modal merupakan salah satu indikator untuk menentukan pertumbuhan sektor perdagangan. Perdagangan di Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir mengalami trend kenaikan yang kurang signifikan. Kenaikan yang kurang signifikan ini juga dipengaruhi dari berbagai macam faktor diantaranya adalah faktor dari pola pikir masyarakat di wilayah Kabupaten Madiun yang sudah cukup puas dengan apa yang dihasilkan saat ini, tanpa berpikir untuk menambah nilai tambah dari komoditas yang diperdagangkan.

Perkembangan kinerja urusan perdagangan sebagaimana berikut dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.55 Indikator Urusan Perdagangan Tahun 2017–2022

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan pada PDRB (%)	15,86	16,65	17,19	16,79	16,85	17,57
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%)	32,70	28,67	28,78	tidak dihitung lagi	tidak dihitung lagi	tidak dihitung lagi
3	Jumlah pedagang kaki lima yang telah dibina (Unit)	447	600	450	680	744	744

Sumber : Dinas PERDAGKOP & UM Kabupaten Madiun Tahun 2023

2.4.7 FOKUS URUSAN PERINDUSTRIAN

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB di Kabupaten Madiun mengalami kenaikan sebesar 0,15 persen dari Tahun 2019 sebesar 10,85 persen menjadi 11,00 persen di Tahun 2020. Kenaikan kontribusi tersebut banyak dipengaruhi oleh semakin tertariknya investor untuk berinvestasi di Kabupaten Madiun. Sedangkan Pertumbuhan Industri di Kabupaten Madiun



mengalami kenaikan sebesar 1,97 persen dari Tahun 2019 sebesar 66,38 persen menjadi 68,35 persen di Tahun 2020. Kenaikan pertumbuhan industri tersebut dipengaruhi oleh banyaknya pembangunan infrastruktur skala nasional seperti Jalan Tol Trans Jawa dan Rel Kereta Api Ganda (*double track*).

Adapun kinerja Perindustrian di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut seperti dalam table di bawah ini :

Tabel 2.56 Indikator Urusan Perindustrian Tahun 2018–2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kontribusi sektor Industri pengolahan terhadap PDRB (%)	10,66	10,85	11,00	11,82	13,31
2	Pertumbuhan Industri	62,24	66,38	68,35	4,60	15,70
3	Cakupan bina kelompok pengrajin	22	23	24	24	22,20
4	Jumlah sentra industri yang telah berkembang	108	113	135	157	179

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Madiun Tahun 2023

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik sehingga mampu menyajikannya secara transparan, efektif, dan efisien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah terhadap masyarakatnya. Gambaran pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 5 (lima) tahun mendatang. Landasan yuridis terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Madiun mengacu pada batasan Pengelolaan Keuangan Daerah yang tercantum dalam :

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kerangka Pengelolaan keuangan daerah secara garis besar terdiri atas perencanaan anggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Kapasitas fiskal Kabupaten Madiun untuk 3 tahun mendatang (2024 - 2026) perlu dianalisis melalui capaian keuangan 5 tahun lalu pada periode RPJMD tahun 2018 - 2023 dengan memperhatikan capaian tren serta kinerja pengelolaan keuangan pada RPJMD sebelumnya maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun perlu mencermati kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun selama periode tahun 2017 hingga tahun 2021. Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis terhadap kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangannya. Selain itu, kondisi keuangan masa lalu dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proyeksi yang tepat, sehingga diketahui seberapa besar kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pembahasan terkait dengan kinerja pelaksanaan APBD dalam dokumen ini dipisahkan berdasarkan masing-masing komponen APBD yang meliputi : Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut.

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

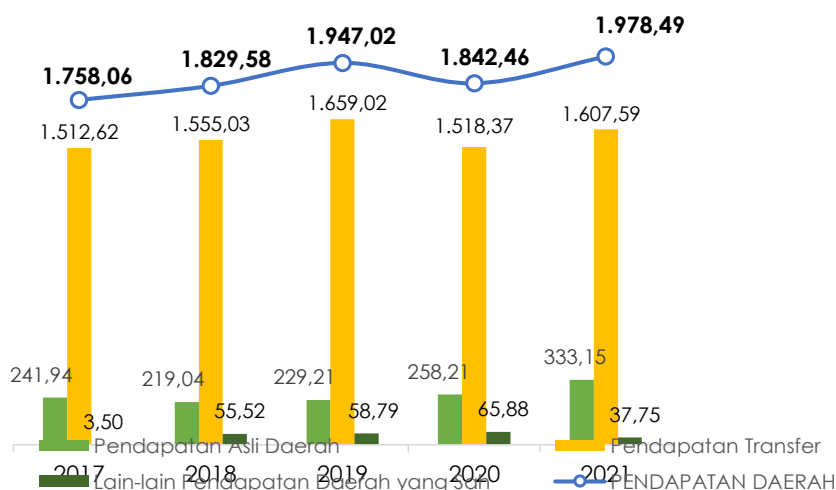
Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan



hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun saat ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer yang meliputi transfer dari pemerintah pusat maupun transfer dari provinsi dan daerah lain, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Nilai realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp. 1.978.493.284.512,37 yang merupakan pendapatan tertinggi selama 4 tahun terakhir (2017 - 2021).

Berikut merupakan perkembangan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 (Dalam Milyar Rupiah) berdasarkan masing-masing komponen utamanya.

Grafik 0.1 Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 (dalam milyar Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Pendapatan Daerah terus diupayakan peningkatannya, dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Melalui gambar tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun memiliki *trend* perkembangan yang positif selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Meskipun sempat menurun sebesar -5,37% pada tahun 2020 akan tetapi pada tahun berikutnya Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun mampu meningkat secara signifikan hingga menyentuh angka Rp. 1.978,49 Milyar pada tahun 2021. Secara keseluruhan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah meningkat dari Rp. 1.758.060.590.949,13 pada tahun 2017 menjadi Rp. 1.978.493.284.512,37 pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,13%.



Penurunan realisasi Pendapatan Daerah sebesar -5,37% yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan oleh adanya penurunan Pendapatan Transfer sebesar -8,48%, khususnya pada komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) yang menurun sebesar -13,95%. Kemudian terdapat penurunan pada komponen lainnya, seperti Dana Alokasi Umum sebesar -9,44%, Dana Bagi Hasil sebesar -1,49%, dan Dana Desa sebesar -1,06%. Adapun komponen pendapatan lainnya yang mengalami peningkatan adalah Lain-lain Pendapatan yang sah dengan peningkatan yang cukup tinggi yakni sebesar 12,06%. Selanjutnya, terjadinya peningkatan jumlah pendapatan tertinggi pada tahun 2021 didukung oleh adanya peningkatan pada masing-masing komponen. Setiap komponen Pendapatan Daerah mengalami tren positif pada tahun 2021, yakni dengan sumbangsih terbesar berasal dari PAD yang tumbuh sebesar 29,02%.

Melihat pada realisasi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, komponen PAD dan Pendapatan Transfer menunjukkan adanya kecenderungan tren meningkat, akan tetapi masih terdapat 1 tahun anggaran dimana nilainya menurun. PAD menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2018 dan Pendapatan Transfer menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2020. Sedangkan pada komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2021. Secara lebih rinci pertumbuhan pada masing-masing komponen Pendapatan Daerah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 - 2021

No	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	4,07%	6,42%	-5,37%	7,38%	3,13%
1.1	Pendapatan Asli Daerah	-9,47%	4,64%	12,65%	29,02%	9,21%
1.2	Pendapatan Transfer	2,80%	6,69%	-8,48%	5,88%	1,72%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	3,40%	5,30%	-7,53%	4,04%	1,30%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	-3,93%	23,63%	-18,37%	27,60%	7,23%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	1.487,06%	5,89%	12,06%	-42,69%	365,58%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (Diolah)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui beberapa sumber, diantaranya adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

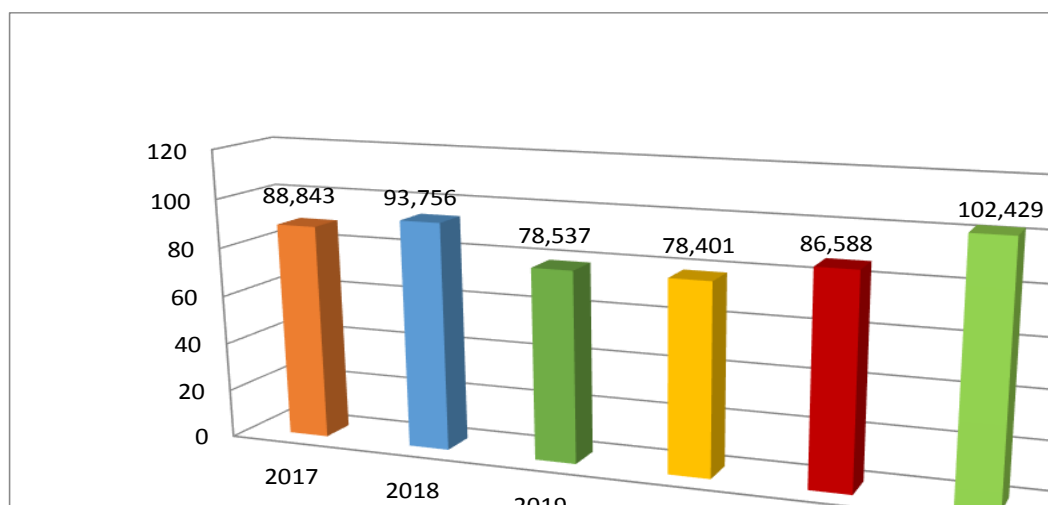
Keuangan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Nilai PAD Kabupaten Madiun pada tahun 2017 sebesar Rp. 241,94 Milyar, kemudian mengalami penurunan sebesar -9,47% menjadi Rp. 219,04 Milyar pada tahun 2018. Akan tetapi pada tahun 2019 nilainya meningkat sebesar 4,64%, menjadi Rp. 229,20 Milyar. Nilai PAD Kabupaten Madiun dapat kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi Rp. 258,21 Milyar dan terus meningkat cukup tinggi pada tahun 2021 sebesar 29,02% sehingga menjadi Rp. 333,15 Milyar. Secara keseluruhan PAD Kabupaten Madiun memiliki tren yang positif yakni dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,21%.

Jika dilihat dari komponennya, maka dapat diketahui bahwa Sebagian besar komponen PAD menunjukkan rata-rata pertumbuhan dengan nilai positif. Rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah pada Lain-lain PAD yang sah sebesar 14,95%, selanjutnya Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan sebesar 8,65%, dan Pajak Daerah sebesar 8,55%, sedangkan Retribusi Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan negative sebesar -22,76%. Meskipun Sebagian besar komponen PAD memiliki rata-rata pertumbuhan yang positif, akan tetapi realisasi anggaran pada setiap tahunnya menunjukkan tren yang fluktuatif. Fluktuasi paling tajam terjadi pada Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 38,71%, setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan pada tahun 2020 sebesar 19,18%. Sehingga dengan peningkatan realisasi Lain-lain PAD yang sah yang cukup tinggi dari tahun 2020 telah mendorong peningkatan nilai PAD serta Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2021.

3.1.1.2 Jumlah Dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu faktor determinan dalam masuknya investor di suatu daerah. Kabupaten Madiun memiliki jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah selama tahun 2017 hingga tahun 2021 dalam kondisi yang fluktuatif.

Grafik 3.2 Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2017-2022



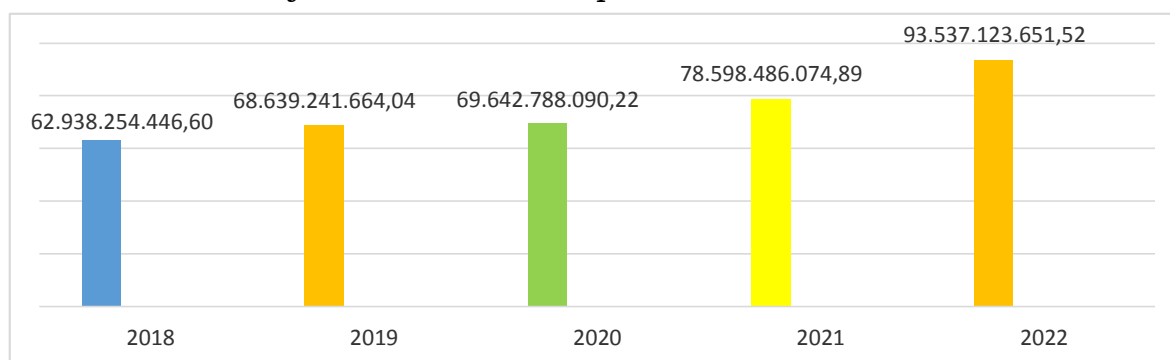
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan data diatas, di tahun 2017 terdapat sebanyak 88.843 pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Madiun. Kemudian bertambah menjadi 93.756 di tahun 2018, lalu di tahun 2019 sebanyak 78.537, pada tahun 2020 mencapai 78.401 dan di tahun 2021 mencapai sebanyak 86.588. semakin banyak pajak dan retribusi daerah yang diterapkan, maka semakin banyak anggaran yang akan dikeluarkan oleh masyarakat ataupun para investor untuk membayar pajak dan retribusi tersebut.

3.1.1.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berikut jumlah pajak daerah yang ada di Kabupaten Madiun:

Grafik 3.3 Pajak Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan data capaian diatas, diketahui bahwa pada tahun 2018 terdapat sebanyak Rp 1.829.589.602.042 pajak daerah di Kabupaten Madiun.

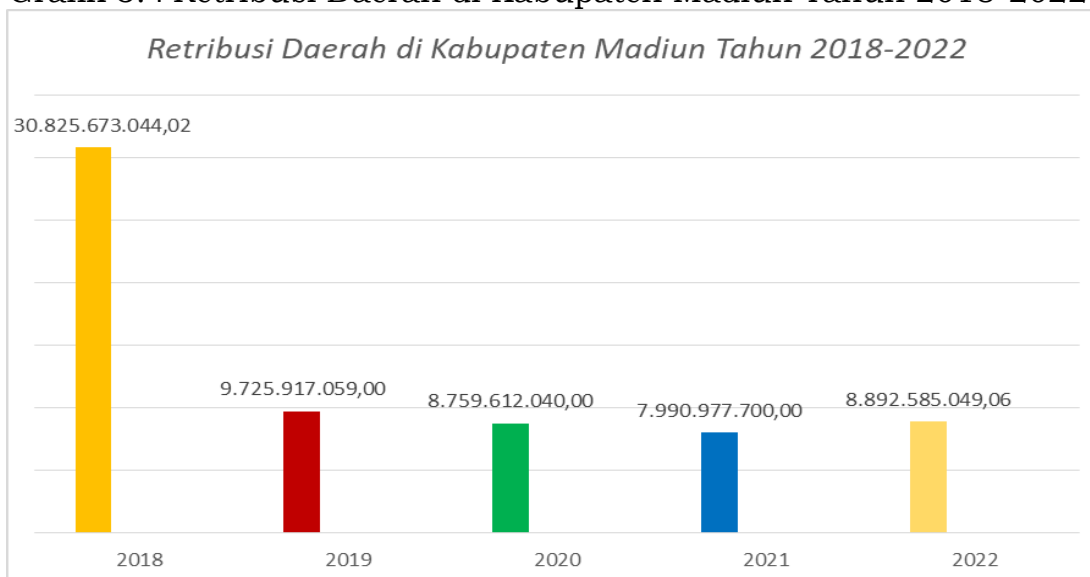


Kemudian di tahun 2018 tercapai sebanyak Rp 1.829.589.602.042 lalu menjadi Rp 1.947.016.775.096 di tahun 2019, berikutnya tahun 2020 mencapai Rp 1.842.457.400.838, dan di tahun 2021 sebanyak Rp 1.978.493.284.512. Dan pada tahun 2022 mencapai kenaikan sebesar Rp 2.007.057.294.594 Hal ini mengartikan bahwa dari tahun ke tahun, jenis atau jumlah dari pajak yang ditetapkan oleh pemerintah kepada masyarakat semakin bertambah. Sehingga pendapatan pemerintah bisa meningkat seiring banyaknya wajib pajak yang taat dalam membayar kewajibannya.

3.1.1.4 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Berikut jumlah retribusi daerah Kabupaten Madiun dari tahun 2018 hingga tahun 2022:

Grafik 3.4 Retribusi Daerah di Kabupaten Madiun Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, Tahun 2023

Sesuai dengan data, maka dapat diketahui bahwa jumlah retribusi daerah di Kabupaten Madiun pada tahun 2018 sebanyak Rp 30.825.673.044 Kemudian di tahun 2019 mencapai Rp 9.725.917.059, lalu menjadi Rp 8.759.612.040 pada tahun 2020, tahun 2021 sebanyak 7.990.977.700, dan di tahun 2022 mencapai sebanyak 8.892.585.049. Dengan berkurangnya jumlah retribusi daerah yang ditetapkan di Kabupaten Madiun ini, dapat membantu menarik minat para investor yang ingin berinvestasi atau membangun usaha yang dapat membantu meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat dan juga pemerintah Kabupaten Madiun.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Pendapatan Transfer. Pendapatan Transfer bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Di mana Transfer Pemerintah Pusat pada Kabupaten Madiun bersumber dari Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU, DAK Fisik dan DAK Non Fisik), Dana Insentif Daerah serta Dana Desa. Sedangkan Transfer Antar Daerah Kabupaten Madiun bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2017 hingga 2021 memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 1,30% atau lebih rendah dari Transfer Antar Daerah, yakni sebesar 7,23%. Kedua komponen Pendapatan Transfer memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan nilai tertinggi pada kedua komponen tersebut berada pada tahun 2021. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 1.390.290.219.337,00 dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat hingga mencapai Rp. 1.456.250.985.632,00 pada tahun 2021. Sedangkan Transfer Antar Daerah menunjukkan nilai realisasi sebesar Rp. 122.328.208.832,00 pada tahun 2017 dan mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pula hingga mencapai Rp. 151.334.233.916,00 pada tahun 2021. Jika dilihat secara keseluruhan, fluktuasi terjadi pada komponen-komponennya, sehingga tren yang muncul pada Pendapatan Transfer juga mengalami fluktuatif.

Komponen Pendapatan Daerah selanjutnya adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah, dimana realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 bersumber dari Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta tidak terdapat realisasi pada Dana Darurat. Dana hibah menunjukkan nilai yang fluktuatif dari tahun 2017 hingga 2021 yakni dari Rp. 3.498.000.000,00 di tahun 2017 menjadi Rp. 37.753.496.505,00 pada tahun 2021. Sehingga secara keseluruhan Dana Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 365,58%. Sedangkan pada Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah diantara seluruh komponen Pendapatan Daerah yakni dengan nilai -25,00%. Hal ini terjadi karena realisasinya hanya terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp. 107.805.053,00.

Secara keseluruhan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 tersaji pada tabel berikut :



Tabel 3.2 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	PENDAPATAN	1.758.060.590.949,13	1.829.582.126.042,71	1.947.016.775.096,37	1.842.457.400.838,08	1.978.493.284.512,37	3,13%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	241.944.162.780,13	219.041.431.266,71	229.206.394.170,37	258.211.505.535,08	333.154.568.459,37	9,21%
1.1.1.	Pajak daerah	56.785.731.847,00	62.938.254.446,60	68.639.241.664,04	69.642.788.090,22	78.598.486.074,89	8,55%
1.1.2.	Retribusi daerah	32.058.656.057,50	30.818.197.044,02	9.725.917.059,00	8.759.612.040,00	7.990.977.700,00	-22,76%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	5.499.956.457,48	5.769.704.455,70	6.290.894.932,17	7.537.159.212,28	7.602.655.088,65	8,65%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	147.599.818.418,15	119.515.275.320,39	144.550.340.515,16	172.271.946.192,58	238.962.449.595,83	14,95%
1.2	Pendapatan Transfer	1.512.618.428.169,00	1.555.025.294.776,00	1.659.023.813.099,00	1.518.370.856.713,00	1.607.585.219.548,00	1,72%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.390.290.219.337,00	1.437.503.129.945,00	1.513.725.553.072,00	1.399.769.145.263,00	1.456.250.985.632,00	1,30%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.180.876.436.337,00	1.286.346.821.945,00	1.305.223.591.072,00	1.174.980.529.263,00	1.256.826.955.632,00	1,85%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	53.219.134.475,00	104.646.553.666,00	88.702.981.984,00	87.376.932.705,00	121.492.372.806,00	29,74%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	877.868.685.000,00	877.862.289.224,00	904.957.172.000,00	819.494.603.000,00	808.127.553.000,00	-1,94%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	249.788.616.862,00	303.837.979.055,00	311.563.437.088,00	268.108.993.558,00	327.207.029.826,00	8,07%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	51.217.257.000,00	9.000.000.000,00	46.331.464.000,00	64.337.347.000,00	35.650.863.000,00	81,66%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	158.196.526.000,00	142.156.308.000,00	162.170.498.000,00	160.451.269.000,00	163.773.167.000,00	1,24%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	122.328.208.832,00	117.522.164.831,00	145.298.260.027,00	118.601.711.450,00	151.334.233.916,00	7,23%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	112.562.228.832,00	113.217.184.831,00	140.759.651.027,00	99.239.758.450,00	146.966.138.416,00	10,88%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	9.765.980.000,00	4.304.980.000,00	4.538.609.000,00	19.361.953.000,00	4.368.095.500,00	49,67%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	3.498.000.000,00	55.515.400.000,00	58.786.567.827,00	65.875.038.590,00	37.753.496.505,00	365,58%
1.3.1	Hibah	3.498.000.000,00	55.515.400.000,00	58.678.762.774,00	65.875.038.590,00	37.753.496.505,00	365,58%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	107.805.053,00	-	-	-25,00%

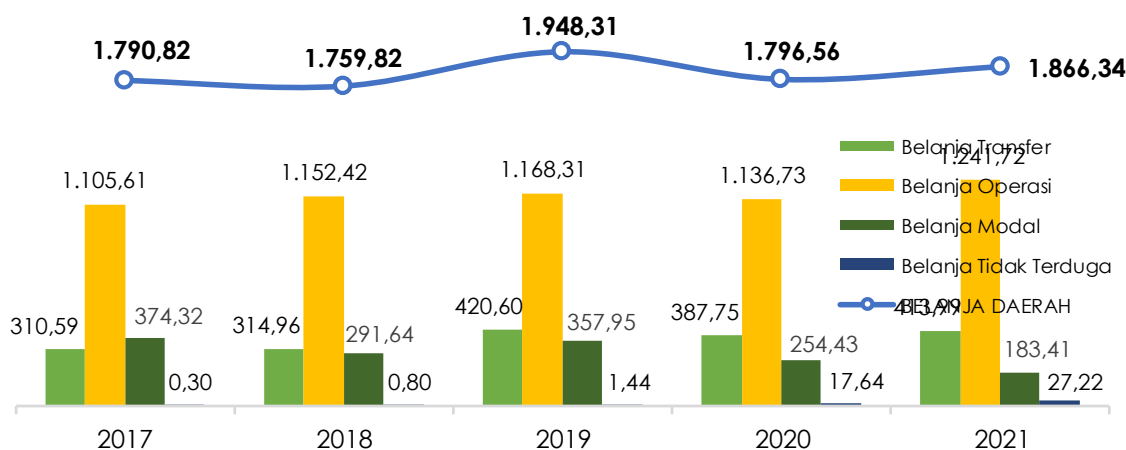
Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022



3.1.1.5 Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang keuangan daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang dimaksud adalah urusan pemerintahan yang telah diamanatkan oleh Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan non wajib pelayanan dasar dan urusan penunjang pemerintahan. Prioritas pendanaan dalam Belanja Daerah dipergunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendanaan Belanja Daerah yang dipergunakan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*) yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Belanja Daerah terdiri atas 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer. Realisasi belanja Daerah Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) mengalami kondisi fluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,27%. Adapun perkembangan realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun (dalam Milyar Rupiah) adalah sebagai berikut :

Grafik 3.5 Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021 (dalam Milyar Rupiah)



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Kondisi Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.790,81 Milyar yang kemudian mengalami fluktuasi hingga pada tahun 2021 menjadi Rp. 1.866,33 Milyar. Meskipun tren fluktuasi terjadi selama 5 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan senilai 1,27%. Peningkatan belanja daerah pada setiap tahun paling banyak disebabkan oleh adanya peningkatan Belanja Tidak Terduga dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 356,09%. Nilai rata-rata pertumbuhan tersebut juga merupakan nilai rata-rata pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan keseluruhan jenis belanja. Ketiga jenis belanja lainnya seperti Belanja Operasi memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 3,04%, Belanja Modal minus sebesar -14,05% serta Belanja Transfer memiliki nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 8,48%. Nilai minus yang muncul pada Belanja Modal disebabkan oleh terjadinya penurunan pada 3 tahun yakni pada tahun 2018, 2020, dan 2021, serta adanya penurunan yang cukup tinggi pada tahun 2020 yakni sebesar -28,92% yang memiliki realisasi cukup besar, karena pada tahun 2020 terdapat kebijakan *refocusing* anggaran oleh pemerintah pusat untuk penanganan Pandemi Covid-19. Berikut disajikan rincian persentase pertumbuhan dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dalam beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.3 Pertumbuhan dan Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Pertumbuhan				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
2	BELANJA	-1,73%	10,71%	-7,79%	3,88%	1,27%
2.1	Belanja Operasi	4,23%	1,38%	-2,70%	9,24%	3,04%
2.2	Belanja Modal	-22,09%	22,74%	-28,92%	-27,91%	-14,05%
2.3	Belanja Tidak Terduga	167,67%	79,69%	1122,75%	54,27%	356,09%
2.4	Belanja Transfer	1,41%	33,54%	-7,81%	6,77%	8,48%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (Diolah)

Belanja Operasi Kabupaten Madiun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,04% memiliki tren realisasi yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2017 nilai Belanja Operasi sebesar Rp. 1.790,81 Milyar yang kemudian meningkat pada 2 tahun berikutnya yaitu tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi Rp. 1168,31 Milyar. Akan tetapi pada tahun berikutnya yaitu di tahun 2020 Belanja Operasi menunjukkan adanya penurunan sebesar -2,70%, menjadi Rp. 1136,72 Milyar dan kembali menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 menjadi Rp. 1241,71 Milyar.

Terdapat 6 jenis belanja pada Belanja Operasi di Kabupaten Madiun, yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga yang tidak terealisasi, Belanja Hibah, Belanja Subsidi serta Belanja Bantuan Sosial. Tidak terdapat realisasi Belanja Bunga pada Belanja Daerah Kabupaten Madiun.

Dari keenam jenis belanja di Kabupaten Madiun nilai rata-rata pertumbuhan paling tinggi berada pada Belanja Subsidi sebesar 100,90%. Akan tetapi jika melihat pada nilai realisasinya maka Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa memiliki nilai yang paling besar.

Sedangkan pada Belanja Modal terdapat realisasi pada masing-masing jenis belanja di setiap tahunnya. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan jenis Belanja Modal dengan rata-rata pertumbuhan paling tinggi yaitu 448,18%, kemudian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 10,97%, Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 34,07%, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 6,43%. Pada belanja modal terdapat beberapa jenis belanja yang memiliki nilai minus, seperti Belanja Modal Tanah sebesar -22,43%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar -2,36%, serta Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar -27,22%. Belanja Modal pada tahun 2017 menunjukkan angka realisasi sebesar Rp. 374,31 Milyar dan kemudian dalam perkembangannya cenderung menurun menjadi Rp. 183,41 Milyar pada tahun 2021. Realisasi pada Belanja Tak Terduga tercatat menunjukkan adanya peningkatan nilai realisasi dalam setiap tahunnya. Pada tahun 2017 realisasi Belanja Tak Terduga tercatat sebesar Rp. 802.998.320,00, kemudian realisasi belanja tertinggi terjadi pada tahun 2021 dengan nilai sebesar Rp. 27.217.883.918,00. Sehingga rata-rata pertumbuhan realisasi Belanja Tak Terduga selama 5 tahun terakhir tercatat mencapai 359,09%.

Belanja Transfer merupakan jenis Belanja Daerah yang bersumber dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 8,48%. Di mana Belanja Bagi Hasil memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 39,44%, sedangkan Belanja Bantuan Keuangan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,22%. Tidak berbeda dengan jenis belanja lainnya, realisasi pada masing-masing komponen Belanja Transfer juga menunjukkan tren fluktuatif. Pada realisasi Belanja Transfer terlihat adanya peningkatan dalam 3 tahun pertama yakni tahun 2017 hingga 2019, sedangkan pada tahun 2020 nilai realisasinya mengalami penurunan, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2021.

Secara keseluruhan nilai realisasi dan rata-rata pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada masing-masing komponennya selama tahun 2017 hingga 2021 tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2	BELANJA	1.790.817.628.207,72	1.759.824.310.394,63	1.948.311.491.127,57	1.796.557.950.336,91	1.866.339.659.267,87	1,27%
2.1	Belanja Operasi	1.105.613.900.165,90	1.152.423.872.722,83	1.168.314.205.370,90	1.136.729.845.289,80	1.241.716.368.749,17	3,04%
2.1.1	Belanja Pegawai	704.715.055.376,00	697.028.024.765,00	702.639.387.723,00	715.160.168.516,00	696.782.827.224,00	-0,27%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	353.186.335.529,90	373.593.267.845,83	415.424.491.501,90	374.546.617.144,80	498.458.561.983,17	10,05%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	457.283.500,00	549.370.000,00	475.315.000,00	291.847.000,00	1.562.940.000,00	100,90%
2.1.5	Belanja Hibah	44.690.309.510,00	72.895.360.112,00	37.887.072.396,00	35.642.112.629,00	37.076.064.642,00	3,30%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.564.916.250,00	8.357.850.000,00	11.887.938.750,00	11.089.100.000,00	7.835.974.900,00	58,01%
2.2	Belanja Modal	374.316.928.089,82	291.642.038.611,80	357.952.659.653,67	254.429.829.266,14	183.413.874.591,70	-14,05%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	10.028.102.000,00	7.279.009.600,00	6.311.184.000,00	6.560.084.000,00	3.085.600.000,00	-22,43%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	75.056.242.803,82	59.547.832.306,91	70.058.452.835,92	82.054.730.567,96	91.594.147.420,70	6,43%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	106.610.978.381,00	69.938.404.464,89	131.372.263.208,31	44.804.351.907,34	46.148.549.540,00	-2,36%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	180.677.004.205,00	142.449.623.310,00	125.706.448.091,92	114.852.625.739,84	37.499.542.486,00	-27,22%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	612.851.500,00	11.580.541.865,00	20.947.178.015,00	4.928.796.151,00	4.864.568.145,00	448,18%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	1.331.749.200,00	846.627.065,00	3.557.133.502,52	1.229.240.900,00	221.467.000,00	34,07%
2.3	Belanja Tidak Terduga	300.000.000,00	802.998.320,00	1.442.922.500,00	17.643.313.484,00	27.217.883.918,00	356,09%
2.4	Belanja Transfer	310.586.799.952,00	314.955.400.740,00	420.601.703.603,00	387.754.962.296,97	413.991.532.009,00	8,48%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.411.684.400,00	5.361.073.900,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	9.968.066.500,00	39,44%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	306.175.115.552,00	309.594.326.840,00	414.779.982.003,00	383.956.440.596,97	404.023.465.509,00	8,22%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

3.1.1.6 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah timbul karena adanya jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA);
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah timbul karena ada surplus/ kelebihan anggaran, lebih lanjut APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pengeluaran pembiayaan diperuntukkan bagi :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan modal daerah;
- c. Pembentukan dana cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/ atau
- e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis yang dilakukan pada pembiayaan daerah memberikan gambaran mengenai selisih antara pendapatan yang diterima daerah secara agregat, dengan belanja yang merepresentasikan upaya perencanaan di daerah. Asumsi yang digunakan dalam melakukan analisis pembiayaan adalah bahwa pembiayaan tidak memiliki kepastian untuk naik atau turun dengan maksud pembiayaan dapat mencapai angka *equilibrium* yakni Rp. 0,-. Nilai Penerimaan Pembiayaan di Kabupaten Madiun mengalami fluktuasi pada 3 tahun pertama (2017 - 2019) dengan paling tinggi pada tahun 2019 mencapai Rp. 172,03 Milyar, pada tahun 2020 Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami penurunan sehingga nilainya mencapai Rp. 165,73 Milyar dan meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi Rp. 207,13 Milyar. Penyertaan Modal Daerah diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 (APBD) sebesar Rp. 11,75 Milyar untuk Umbul Square Rp. 2



Milyar, PDAM Rp. 6 Milyar, dan BPR Rp. 3,75 Milyar, pada tahun 2024 Rp. 12,75 Milyar,- untuk Umbul Square Rp. 2 Milyar, PDAM Rp. 6 Milyar, dan BPR Rp. 4,75 Milyar, dan pada tahun 2025 Rp. 14,5 Milyar,- untuk Umbul Square Rp. 2 Milyar, PDAM Rp. 6 Milyar, dan BPR Rp. 6,5 Milyar. Penyertaan modal dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja BUMD milik Pemerintah Kabupaten Madiun, yaitu BPR, PDAM, dan Umbul. Pengeluaran Pembiayaan dalam rangka pembentukan dana cadangan untuk pilkada Tahun 2024 sebesar Rp. 40 Milyar telah dianggarkan sejak tahun 2021 sebesar Rp. 10 Milyar, Tahun 2022 sebesar Rp. 15 Milyar, dan Tahun 2023 sebesar Rp. 15 Milyar.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 tersaji pada tabel berikut:



Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 – 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
3	PEMBIAYAAN						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	120.521.529.297,36	114.184.891.727,18	172.034.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,23	16,68%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	120.464.879.752,36	81.719.453.049,77	172.032.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,23	24,92%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	32.437.909.652,41	-	-	-	-25,00%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	56.649.545,00	27.529.025,00	2.000.000,00	-	-	-61,03%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.045.038.989,00	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	21.024.224.000,00	99,08%
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	6.045.038.989,00	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	11.024.224.000,00	43,53%
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	10.000.000.000,00	0,00%
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	0,00%
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	-	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022



3.1.2 Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar, serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Apabila suatu entitas memiliki aset/ barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan non lancar dalam neraca maka akan memberikan informasi mengenai aset/ barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset non lancar). Neraca Daerah mempunyai fungsi sebagai alat manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah.

Kondisi aset Pemerintah Kabupaten Madiun dalam setiap tahunnya (2017 - 2021) mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,50%. Pada tahun 2017 jumlah aset Pemerintah Kabupaten Madiun tercatat sebesar Rp. 3.896.172.139.680,99, sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 4.637.395.032.456,17. Terjadinya peningkatan aset dalam setiap tahun lebih banyak ditunjang oleh adanya peningkatan pada aset lancar dengan rata-rata mencapai 35,15%, investasi jangka panjang dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 21,61%, dan aset tetap dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,18%. Sedangkan untuk dana cadangan hanya terdapat pada tahun-tahun tertentu, seperti pada tahun 2017 dan 2021. Dana cadangan disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran yang keberadaannya ditentukan oleh adanya regulasi melalui Peraturan Daerah. Keberadaan dana cadangan pada tahun 2021 akan digunakan untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024. Untuk aset lainnya keberadaannya mengalami fluktuasi, dimana rata-rata pertumbuhannya mencapai -19,04%. Komposisi aset daerah Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 sebagian besar berupa aset tetap yang memiliki proporsi rata-rata dalam setiap tahunnya mencapai sebesar 88,84%, sedangkan pada urutan kedua adalah aset lancar dengan rata-rata proporsi dalam setiap tahunnya mencapai 6,63%.



Pada sisi kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2019 hingga 2021 cenderung mengalami peningkatan, dimana rata-rata pertumbuhan nilai kewajiban pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai 37,49%. Pada tahun 2017 nilai kewajiban Pemerintah Kabupaten Madiun tercatat sebesar Rp. 9.941.592.517,11. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan menjadi Rp. 15.026.793.486,39. Pada tahun 2019 nilai kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun sedikit mengalami penurunan sebesar -3,09%, sehingga menjadi Rp. 14.561.884.109,53. Sedangkan pada tahun 2020 nilai kewajibannya kembali mengalami peningkatan sehingga pada tahun 2021 mencapai Rp. 30.231.056.950,72. Kewajiban yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun sepanjang tahun dalam bentuk Kewajiban Jangka Pendek yang mayoritas berupa utang beban dengan rata-rata proporsi mencapai 95,57%. Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 belum pernah memiliki kewajiban jangka panjang, baik dalam bentuk utang dalam negeri maupun utang jangka panjang lainnya.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah, dimana perkembangan nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Madiun dalam setiap tahun mengalami pertumbuhan dengan rata-rata pada tahun 2017 hingga 2021 mencapai sebesar 4,39%. Pada tahun 2017 nilai ekuitas Pemerintah Kabupaten Madiun tercatat sebesar Rp. 3.886.230.547.163,88, sedangkan pada tahun 2021 meningkat sehingga tercatat menjadi Rp. 4.607.163.975.505,45.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan perkembangan aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 tersaji dalam tabel berikut:



Tabel 3.6 Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	ASET						
1.1.	ASET LANCAR	145.290.234.804,19	243.451.735.930,07	273.200.432.608,56	299.551.747.419,53	452.788.501.983,40	35,15
1.1.1.	Kas	81.843.268.324,77	173.422.943.250,70	166.290.560.581,49	207.394.837.570,23	298.350.434.303,73	44,09
1.1.2.	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Piutang Pendapatan	37.695.351.262,46	47.354.907.694,93	86.034.340.563,61	61.555.292.735,94	124.976.238.584,06	45,47
1.1.4.	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Piutang Lainnya	50.784.156,00	541.282.464,30	1.157.478.335,77	422.900.422,00	0,00	229,06
1.1.6.	Penyisihan Piutang	-1.256.598.685,26	-1.516.610.710,30	-1.768.336.142,53	-1.957.588.191,64	-1.863.032.228,64	10,79
1.1.7.	Beban Dibayar Dimuka	245.178.819,00	325.699.317,00	313.136.965,68	251.054.519,83	190.976.079,23	-3,69
1.1.8.	Persediaan	26.712.250.927,22	23.323.513.913,44	21.173.252.304,54	31.885.250.363,17	31.133.885.245,02	6,58
1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	78.969.287.941,46	96.128.792.262,75	147.988.605.919,22	153.771.727.174,99	164.302.813.707,87	21,61
1.2.1.	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	369.888.736,87	362.308.154,37	361.233.466,87	361.233.466,87	361.233.466,87	-0,59
1.2.2.	Investasi Jangka Panjang Permanen	78.599.399.204,59	95.766.484.108,38	147.627.372.452,35	153.410.493.708,12	163.941.580.241,00	21,69
1.3.	ASET TETAP	3.534.891.882.326,06	3.584.852.601.748,70	3.733.523.367.151,26	3.762.110.127.398,03	4.002.687.009.625,28	3,18
1.3.1.	Tanah	393.386.762.472,00	391.095.503.472,00	410.773.952.797,00	420.021.939.872,00	439.529.435.050,00	2,84
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	433.296.754.786,22	489.920.725.060,93	565.367.970.410,59	665.457.401.878,61	753.495.063.748,09	14,85
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	888.453.951.034,36	948.279.509.908,65	1.070.941.535.381,88	1.106.088.995.142,75	1.153.469.673.477,93	6,81
1.3.4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	4.677.540.485.296,61	4.712.499.407.039,31	4.839.499.951.981,10	4.947.677.600.112,10	5.407.180.295.518,42	3,74
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	12.632.131.795,94	13.793.259.795,94	22.382.340.796,60	22.435.654.745,60	22.476.363.695,60	17,97
1.3.6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.886.585.500,00	6.576.257.142,60	3.712.751.497,18	10.890.924.195,18	4.704.021.775,18	26,18
1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	-2.876.304.788.559,07	-2.977.312.060.670,73	-3.179.155.135.713,09	-3.410.462.388.548,21	-3.778.167.843.639,94	7,09



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.4.	DANA CADANGAN	32.431.821.971,46	0,00	0,00	0,00	10.001.933.698,62	-25,00
1.4.1.	Dana Cadangan	32.431.821.971,46	0,00	0,00	0,00	10.001.933.698,62	-25,00
1.5.	ASET LAINNYA	104.588.912.637,82	129.997.205.370,79	8.153.050.062,09	7.874.830.264,00	7.614.773.441,00	-19,04
1.5.1.	Tagihan Jangka Panjang	1.945.678.767,42	1.785.300.756,19	1.587.374.701,29	1.545.747.550,00	1.566.247.550,00	-5,16
1.5.2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Aset Tidak Berwujud	13.656.832.314,00	17.379.565.879,00	6.554.686.360,80	23.977.004.189,00	26.710.703.379,00	60,54
1.5.4.	Aset Lain-lain	99.817.302.125,00	123.506.848.499,00	0,00	0,00	0,00	-43,96
1.5.5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	-10.830.900.568,60	-12.674.509.763,40	0,00	-17.663.315.475,00	-20.662.177.488,00	-16,50
1.5.6.	Aset Yang Tidak Layak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.7.	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	10.989.000,00	15.394.000,00	0,00	-14,98
	JUMLAH ASET	3.896.172.139.680,99	4.054.430.335.312,31	4.162.865.455.741,13	4.223.308.432.256,55	4.637.395.032.456,17	4,50
2	KEWAJIBAN						
2.1.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	9.941.592.517,11	15.026.793.486,39	14.561.884.109,53	15.427.143.015,42	30.231.056.950,72	37,49
2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	711.658.726,32	548.448.161,00	25.003.309,00	176.352.329,00	121,74
2.1.2.	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	228.283.823,11	249.986.785,07	276.926.961,40	219.709.991,50	359.446.823,21	15,81
2.1.5.	Utang Beban	9.713.308.694,00	13.639.789.021,00	13.736.508.987,13	14.936.032.614,92	29.695.257.798,51	37,17
2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	425.358.954,00	0,00	246.397.100,00	0,00	-50,00
2.2.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021	Rata-rata Pertumbuhan (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.2.	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	9.941.592.517,11	15.026.793.486,39	14.561.884.109,53	15.427.143.015,42	30.231.056.950,72	37,49
3	EKUITAS						
3.1.	EKUITAS	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	4.207.881.289.241,13	4.607.163.975.505,45	4,39
3.1.1.	Ekuitas	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	4.207.881.289.241,13	4.607.163.975.505,45	4,39
	JUMLAH EKUITAS	3.886.230.547.163,88	4.039.403.541.825,92	4.148.303.571.631,60	4.207.881.289.241,13	4.607.163.975.505,45	4,39
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	3.896.172.139.680,99	4.054.430.335.312,31	4.162.865.455.741,13	4.223.308.432.256,55	4.637.395.032.456,17	4,50

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022



Berdasarkan data kondisi neraca daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana yang telah disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya dilakukan analisis neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, serta rasio aktivitas.

Rasio likuiditas yang digunakan adalah rasio lancar dan rasio *quick*. Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendek yang dimilikinya. Rumus yang digunakan adalah dengan membagi aset lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek. Kemudian *quick* rasio diperoleh dengan jalan mengurangi aset lancar dengan persediaan kemudian dibagi dengan kewajiban jangka pendek.

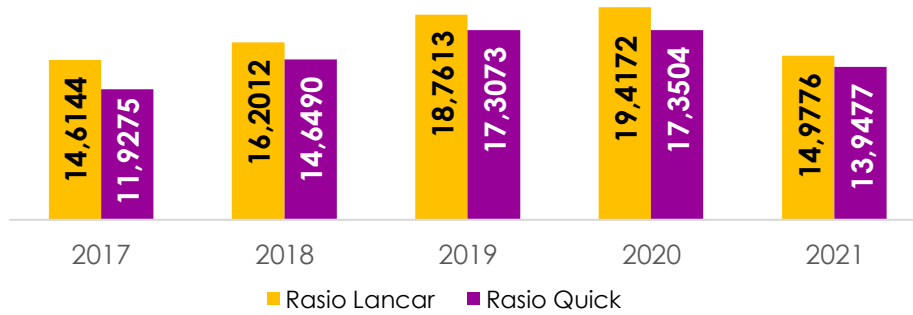
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas juga merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang ditanggung Pemerintah Daerah dibandingkan dengan aset yang dimiliki atau untuk mengukur sejauh mana aset Pemerintah Daerah dibiayai dari hutang. Bentuk rasio solvabilitas yang digunakan untuk Pemerintah Daerah adalah Rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio hutang terhadap modal (ekuitas).

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan Pemerintah Daerah. Rasio aktivitas yang digunakan adalah Rata-Rata Umur Piutang dan Rata-Rata Umur Persediaan, dimana Rata-rata umur piutang, yaitu rasio untuk melihat berapa lama hari yang diperlukan untuk melunasi piutang (merubah piutang menjadi kas). Sedangkan Rata-rata umur persediaan, yaitu rasio untuk melihat berapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik).

Hasil perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun pada Tahun 2017 hingga 2021 berdasarkan formulasi adalah sebagai berikut :

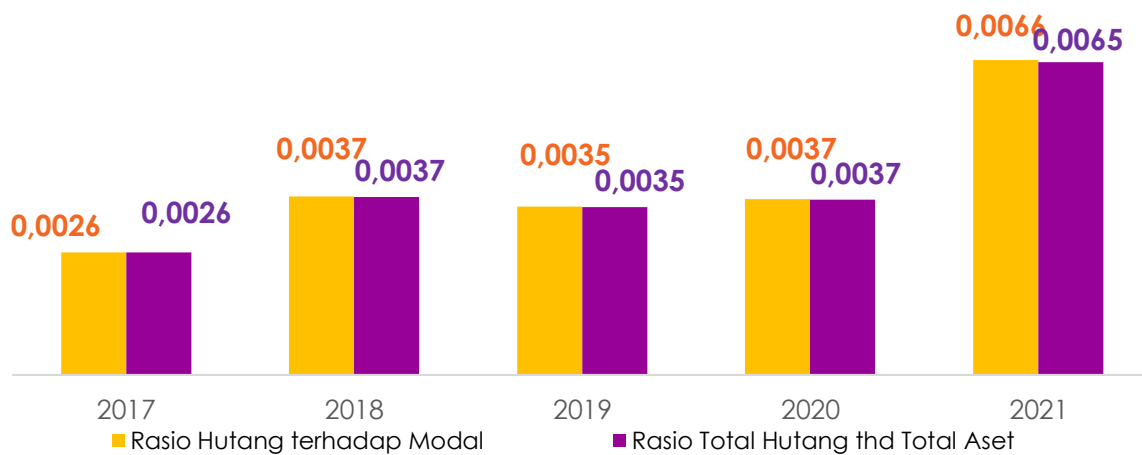


Grafik 3.6 Rasio Likuiditas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



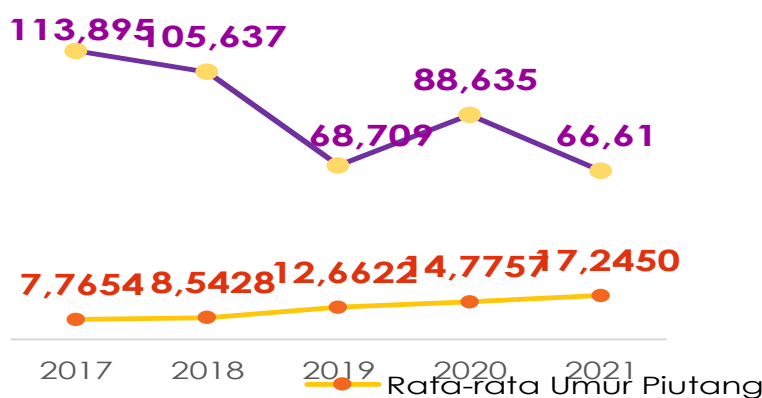
Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Grafik 3.7 Rasio Solvabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Grafik 3.8 Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Dari hasil perhitungan sebagaimana yang disajikan pada gambar di atas secara ringkas dapat dilakukan analisis atas kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun sebagai berikut :



1. Rasio Likuiditas

- a. Rasio Lancar (*Current Ratio*) selalu meningkat dari tahun 2017 sebesar 14,61 menjadi 19,41 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 seiring dengan meningkatnya kewajiban Pemerintah Daerah, maka rasio lancar pada tahun tersebut mengalami penurunan menjadi 14,97, artinya kemampuan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam membayar kewajiban jangka pendek yang dimiliki dengan menggunakan aset lancarnya masih sebesar 14,97 kali atau mengalami penurunan dari 19,41 kali pada tahun 2020 menjadi 14,97 kali pada tahun 2021. Nilai Rasio Lancar yang masih berada di atas angka 1 (satu) mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam membayar kewajiban jangka pendeknya menggunakan seluruh aset lancar dalam setiap tahunnya masih cukup baik. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menerapkan kebijakan pinjaman daerah dilakukan dengan sangat hati-hati;
- b. Rasio Cair (*Quick Ratio*) selama tahun 2017 hingga 2020 tahun mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,92 menjadi sebesar 17,35 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 13,94, artinya kemampuannya pada tahun 2021 mengalami penurunan dari 17,35 kali pada 2020 menjadi 13,94 kali. Walaupun mengalami penurunan, nilai Rasio Quick masih berada di atas angka 1 (satu). Hal ini menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar/ likuid (aktiva lancar - persediaan) masih dalam kondisi baik (tidak mengalami kesulitan). Idealnya, rasio lancar berada pada angka 1 : 1 atau minimal 0,8 : 1 karena apabila kurang dari itu, pemerintah daerah dianggap memiliki masalah keuangan.

2. Rasio Solvabilitas

- a. Rasio Hutang terhadap Aset (*Debt Ratio*) Pemerintah Kabupaten Madiun cenderung masih rendah sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu sebesar 0,0026 pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 0,0065 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa solvabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam keadaan yang sehat, yaitu persentase jumlah dana yang berasal dari kreditor/ donatur/ pihak ketiga dalam membiayai pembangunan masih rendah atau berada di bawah 2%, walaupun pada tahun 2021 nilainya meningkat menjadi 0,65%.



b. Rasio Hutang terhadap Modal Pemerintah Kabupaten Madiun cenderung rendah sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, yaitu sebesar 0,0026 pada tahun 2017 dan naik menjadi 0,0065 pada tahun 2021. Hal tersebut berarti bahwa jumlah dana yang disediakan dalam membiayai pembangunan sebagian besar bersumber dari kemampuan keuangan sendiri, bukan berasal dari pinjaman kreditor/ donatur/ pihak ketiga. Nilai total hutang yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun hingga saat ini masih berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki (Tidak Bergantung pada Hutang), walaupun nilainya meningkat pada tahun 2021 menjadi 0,0066.

3. Rasio Aktivitas

- a. Nilai Rata-rata Umur Piutang secara keseluruhan menunjukkan kondisi yang cukup baik, walaupun nilainya cenderung meningkat dari 7,765 Hari pada tahun 2017 menjadi 17,245 Hari pada tahun 2021, sehingga dengan demikian umur piutangnya masih termasuk dalam kategori pendek. Semakin pendek jangka waktu pelunasannya, semakin kecil pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang. Semakin lama jangka waktu pelunasannya, semakin besar pula resiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang.
- b. Nilai Rata-rata Umur Persediaan secara keseluruhan menunjukkan angka yang masih baik (di atas 1 bulan), namun memiliki tren yang cenderung menurun dari 113,895 Hari pada tahun 2017 menjadi 66,61 Hari pada tahun 2021, sehingga perputaran persediaan semakin pendek. Sehingga pengendalian atas persediaan perlu dilakukan agar pengelolaannya dapat lebih efisien. Perputaran persediaan yang tinggi menandakan semakin tingginya persediaan berputar dalam satu tahun. Hal ini menandakan efektivitas manajemen persediaan. Sebaliknya, jika perputaran persediaan rendah menunjukkan pengendalian atas persediaan kurang efektif.

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan mengingat pada perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sebagaimana sebelumnya diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, timbul hak dan kewajiban

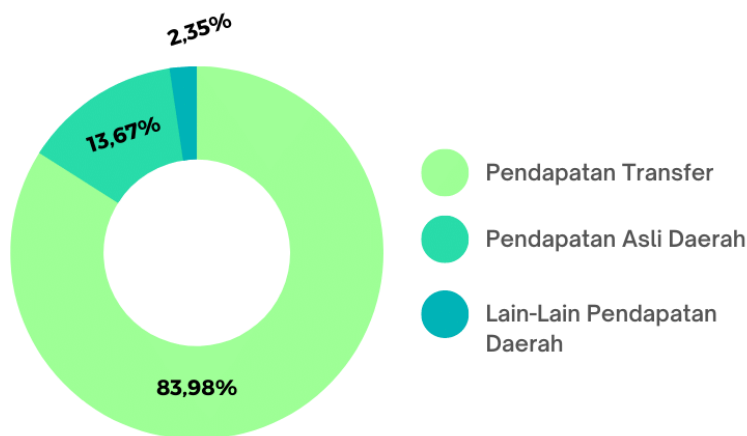
daerah yang dapat dinilai dengan uang, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub-sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut bertumpu pada upaya peningkatan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan publik baik dari sisi pendapatan maupun belanja. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah masa lalu dapat dilihat dari proporsi penggunaan anggaran, baik Pendapatan Daerah maupun Belanja Daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.2.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun paling banyak disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan rata-rata proporsi sebesar 83,98%. Dengan kata lain bahwa tiga seperempat Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berasal dari Pendapatan Transfer. Sedangkan sisanya sebesar 13,67% berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebesar 2,35% Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perbandingan proporsi secara lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut:

Grafik 3.9 Rata-rata Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : Bapenda Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Secara lebih rinci proporsi masing-masing komponen pembentuk PAD, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah tersaji dalam tabel berikut :



Tabel 3.7 Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Proporsi					Rata-rata Proporsi
		2017	2018	2019	2020	2021	
1	PENDAPATAN	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	13,76%	11,97%	11,77%	14,01%	16,84%	13,67%
1.1.1.	Pajak daerah	3,23%	3,44%	3,53%	3,78%	3,97%	3,59%
1.1.2.	Retribusi daerah	1,82%	1,68%	0,50%	0,48%	0,40%	0,98%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	0,31%	0,32%	0,32%	0,41%	0,38%	0,35%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	8,40%	6,53%	7,42%	9,35%	12,08%	8,76%
1.2	Pendapatan Transfer	86,04%	84,99%	85,21%	82,41%	81,25%	83,98%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	79,08%	78,57%	77,75%	75,97%	73,60%	76,99%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	67,17%	70,31%	67,04%	63,77%	63,52%	66,36%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	3,03%	5,72%	4,56%	4,74%	6,14%	4,84%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	49,93%	47,98%	46,48%	44,48%	40,85%	45,94%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	14,21%	16,61%	16,00%	14,55%	16,54%	15,58%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	2,91%	0,49%	2,38%	3,49%	1,80%	2,22%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	9,00%	7,77%	8,33%	8,71%	8,28%	8,42%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	6,96%	6,42%	7,46%	6,44%	7,65%	6,99%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	6,40%	6,19%	7,23%	5,39%	7,43%	6,53%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,56%	0,24%	0,23%	1,05%	0,22%	0,46%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,20%	3,03%	3,02%	3,58%	1,91%	2,35%
1.3.1	Hibah	0,20%	3,03%	3,01%	3,58%	1,91%	2,35%
1.3.2	Dana Darurat	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD, Bapenda Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Melihat lebih rinci pada proporsi komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun maka dapat diketahui bahwa Dana Alokasi Umum merupakan komponen pendapatan dengan proporsi paling besar terhadap Pendapatan secara keseluruhan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2017 - 2021) Pendapatan Transfer memiliki kontribusi terhadap Pendapatan Daerah sebesar 83,98%, dimana Kabupaten Madiun memperoleh pendapatan dari transfer pemerintah pusat sebesar 76,99% yang digunakan dalam rangka menunjang pendanaan urusan pemerintahan daerah serta meningkatkan pelayanan publik. Namun, jika melihat tren proporsi Transfer Pemerintah Pusat yang cenderung tinggi berada pada Dana Perimbangan dengan nilai rata-rata proporsi sebesar 66,36%. Meski begitu, proporsi Dana Perimbangan hanya mengalami peningkatan pada tahun 2018 senilai 70,31%. Lalu pada tahun 2019 hingga 2021, Dana Perimbangan mengalami penurunan proporsi setiap tahunnya akibat dampak dari adanya pandemi Covid-19, sehingga pada tahun 2021 mencapai 63,52%. Selain pendapatan transfer, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Madiun merupakan penyumbang Pendapatan Daerah dengan proporsi terbesar kedua, yaitu dengan rata-rata selama tahun



2017 hingga 2021 sebesar 13,67%, dengan tren proporsi yang mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang mencapai 11,77% menjadi 16,84% pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah semakin baik, sehingga dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah mampu menurunkan proporsi dari pendapatan transfer yang diterima.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam setiap tahun memiliki proporsi yang berfluktuatif, dimana selama tahun 2017 hingga 2021 rata-rata proporsinya tercatat sebesar 2,35%, dimana nilai tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 3,58%, sedangkan nilai terendah terjadi pada tahun 2017 yang mencapai sebesar 0,20%.

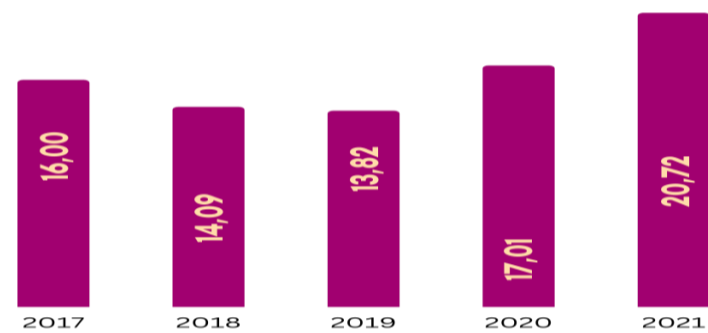
Pada sisi pendapatan daerah, analisis kesehatan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun dilakukan dengan melihat beberapa hal, yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah. Adapun analisis terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah pada era pelaksanaan otonomi dapat dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Tingkat kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan penerimaan pajak daerah sebagai sumbernya tanpa bergantung kepada dana yang diberikan pemerintah pusat. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman. Berikut disajikan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2017 - 2021) beserta kriteria dari rasio tersebut.



Grafik 3.10 Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Kategorisasi Kemandirian Keuangan Daerah :

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 - 50	Konsultatif
Sedang	50 - 75	Partisipatif
Tinggi	75 -100	Delegatif

Berdasarkan grafik di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga tahun 2021 berada pada range angka 13,82% - 20,72%. Jika angka tersebut disandingkan dengan tabel pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah maka menunjukkan kemampuan keuangan Kabupaten Madiun dalam membiayai rumah tangganya selama 5 tahun (2017 - 2021) masih sangat rendah serta memiliki pola hubungan yang instruktif karena berada pada *range* persentase kemandirian < 25% (peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah/ daerah belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial). Hal ini menggambarkan kemampuan Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 masih sangat rendah dalam membiayai urusan pemerintahan, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Madiun masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dalam hal keuangan melalui Transfer Dana Pemerintah Pusat. Hal ini sesuai dengan tingginya proporsi Pendapatan Transfer yang mendominasi besaran sumber pendapatan Madiun yakni dengan rata-rata proporsi sebesar 76,99%. Melihat tren nilai Kemandirian Daerah Madiun yang menunjukkan adanya penurunan pada 2017 - 2019, dan mengalami peningkatan mulai tahun 2020 - 2021. Maka hal ini mengindikasikan terus berkurangnya ketergantungan Pemerintah Kabupaten Madiun pada Pendapatan Transfer

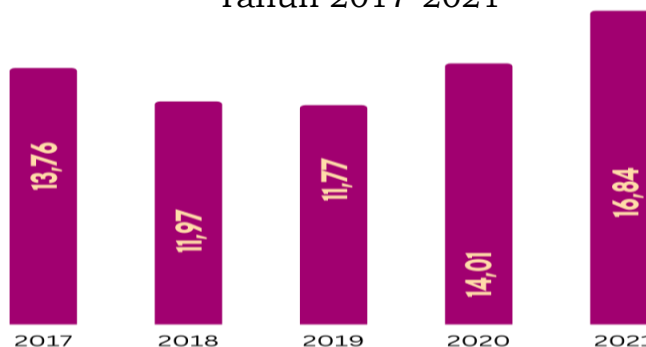


dalam hal pengelolaan keuangan daerah, serta mengindikasikan adanya upaya peningkatan PAD di daerah. Hal ini sesuai dengan tren yang muncul pada realisasi PAD Madiun, di mana terdapat tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,21%, dengan pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2021 sebesar 29,02%.

2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tingkat Desentralisasi Fiskal merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam keuangan daerah menunjukkan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD terhadap total penerimaan daerah, maka semakin tinggi kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya. Berikut tersaji data Rasio derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya:

Grafik 3.11 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal :

Presentase PAD terhadap Total Pendapatan Daerah	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sejalan dengan nilai yang muncul pada Rasio Kemandirian Daerah, nilai yang muncul pada Rasio Desentralisasi Fiskal Kabupaten Madiun pada 5 tahun terakhir berada pada range 11,77% - 16,84% yang menunjukkan

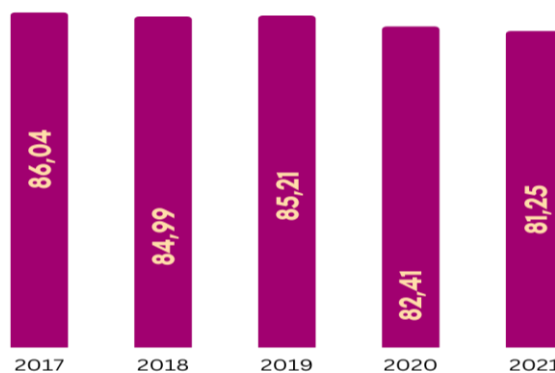


tingkat desentralisasi fiskal yang masih kurang, karena berada pada range persentase PAD terhadap Pendapatan sebesar 10,01% - 20,00%. Pada tahun 2017 hingga 2021 kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun dalam memaksimalkan PAD terhadap total penerimaan daerah untuk membiayai urusan pembangunan, pelayanan, dan pemerintahannya masih kurang. Kedepannya diperlukan konsistensi usaha peningkatan PAD secara lebih optimal sehingga dapat meningkatkan kontribusinya dalam menjalankan fungsi desentralisasi yang lebih baik dalam sisi keuangan daerah.

3. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan/ atau pemerintah provinsi. Berikut tersaji data Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir beserta kriterianya.

Grafik 3.12 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017-2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Kriteria Penilaian Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah :

Persentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Secara garis besar nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun menunjukkan tren yang positif dengan adanya penurunan pada

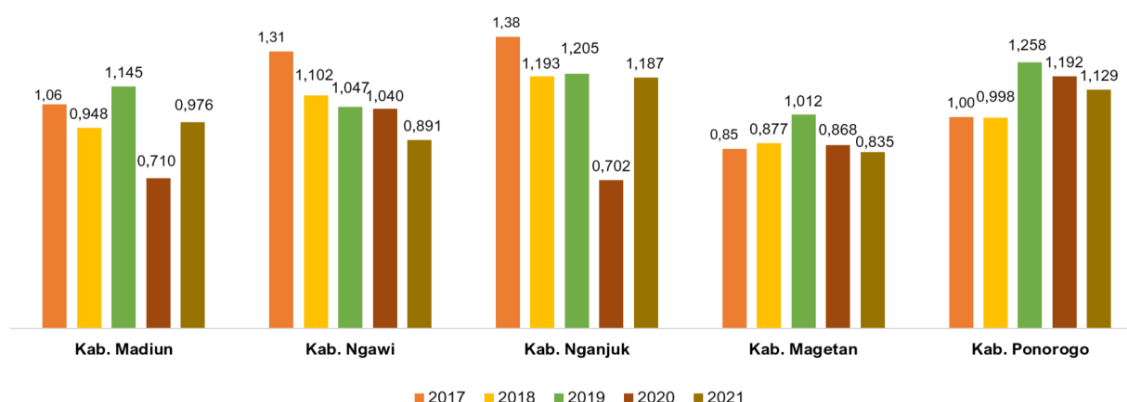
setiap tahunnya (terkecuali tahun 2019). Yakni dengan kondisi pada tahun pertama sebesar 86,04% kemudian dapat menurun menjadi 84,99%, meski sempat meningkat menjadi 85,21% pada tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2020 nilai ketergantungan daerah dapat kembali menurun pada angka 82,41% serta terus menurun menjadi 81,25% pada tahun 2021. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Madiun telah berusaha mengurangi ketergantungannya pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah nilai Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun yang muncul pada range antara 86,04% - 81,25% dan masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi karena berada pada persentase lebih dari 50% (> 50%). Sehingga diperlukan konsistensi optimalisasi PAD serta usaha pengurangan ketergantungan dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi agar kedepannya rasio ketergantungan Pemerintah Kabupaten Madiun dapat perlahan berubah menjadi “tinggi” ataupun “cukup”. Dimulai dengan munculnya penurunan nilai ketergantungan keuangan pada tahun 2021 sebesar 81,25% telah menunjukkan perkembangan yang progresif serta mendekati kategori ketergantungan yang “tinggi”. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan PAD serta penurunan Pendapatan Transfer pada tahun 2021.

4. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah merupakan gambaran dari kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja pegawai. Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping, jika diprasyaratkan, dan/ atau hal lain yang diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut tersaji data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Madiun dan daerah sekitarnya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Grafik 3.13 Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Madiun dan Kabupaten Sekitar Tahun 2017-2021



Sumber : Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2017 – 2021

Kriteria Penilaian Indeks Kapasitas Fiskal Daerah :
(Berdasarkan PMK Nomor 116/PMK.07/2021)

Nilai IKFD	Kriteria
IKFD \geq 1,838	Sangat Tinggi
1,053 \leq IKFD < 1,838	Tinggi
0,727 \leq IKFD < 1,053	Sedang
0,530 \leq IKFD < 0,727	Rendah
IKFD < 0,530	Sangat Rendah

Berdasarkan data Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) Kabupaten Madiun serta 4 daerah sekitarnya yang tertera dalam grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2020, Kabupaten Madiun memiliki nilai IKFD yang terendah nomor dua setelah Kabupaten Magetan. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai IKFD Kabupaten Madiun yang muncul sebesar 0,976 menjadi lebih rendah dari Kabupaten Magetan sebesar 0,835. Melihat pada nilai yang muncul di tahun-tahun sebelumnya, IKFD Kabupaten Madiun menunjukkan angka yang cukup bersaing dengan Kabupaten Magetan akan tetapi dengan tren pertumbuhan yang berbeda.

Nilai yang muncul pada IKFD Kabupaten Madiun tahun 2017 hingga 2020 menunjukkan tren fluktuatif, yakni dengan kondisi awal sebesar 1,06 pada tahun 2017 kemudian menurun pada tahun 2018 hingga menjadi 0,948. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi peningkatan cukup tinggi, yakni nilai yang muncul pada IKFD Kabupaten Madiun sebesar 1,145 dan merupakan nilai tertinggi pada 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 nilai IKFD kembali menurun dengan nilai terendah pada tahun-tahun sebelumnya yakni nilai IKFD senilai 0,710. Secara keseluruhan nilai yang muncul pada tahun 2017 hingga 2019 dengan memperhatikan *range* nilai IKFD memiliki kriteria sedang dan rendah. Sedangkan nilai 1,572 yang muncul pada tahun 2020 berada pada *range* nilai IKFD dengan kriteria

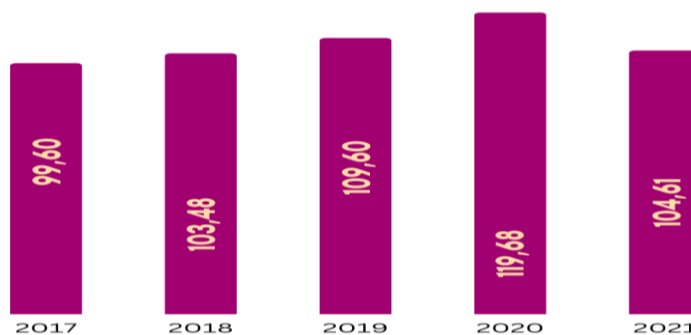


IKFD tinggi, serta nilai IKFD pada tahun 2021 yang mencapai 0,976 berada pada *range* nilai IKFD $0,727 < IKFD < 1,053$, sehingga pada tahun tersebut nilai IKFD Kabupaten Madiun kembali memiliki kriteria sedang.

5. Rasio Efektivitas

Efektivitas pelaksanaan anggaran suatu daerah dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Berikut tersaji data Rasio Efektivitas Kabupaten Madiun dalam kurun waktu 5 tahun beserta kriterianya :

Grafik 3.14 Rasio Efektivitas Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Kriteria Penilaian Rasio Efektivitas :

Persentase Kinerja Keuangan Kriteria	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Madiun mengalami peningkatan setiap tahunnya pada 4 tahun terakhir senilai 99,60% - 119,68% dan termasuk kriteria sangat efektif. Meski begitu, pada tahun 2021, efektivitas pengelolaan PAD Kabupaten Madiun mengalami penurunan menjadi 104,61% namun masih termasuk kategori sangat efektif. Sehingga pada 4 tahun terakhir dapat diartikan bahwa PAD yang dimiliki Kabupaten Madiun dapat direalisasikan dengan sangat efektif karena telah menunjukkan nilai yang berada di atas 100% (>100%). Meski sempat mengalami penurunan, namun Kabupaten Madiun menunjukkan semakin baiknya pelaksanaan realisasi PAD dalam 5 tahun terakhir.



3.2.1.2 Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Madiun yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode waktu berkenaan. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja, yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Belanja terbagi ke dalam 4 jenis belanja, yaitu: Belanja Operasi yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial; Belanja Modal yang meliputi belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya; Belanja Tidak Terduga; serta Belanja Transfer meliputi belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Masing-masing jenis belanja memiliki proporsi yang berbeda-beda tergantung pada besar kecilnya nilai realisasinya. Untuk mengetahui proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 secara lengkap disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.8 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Proporsi					Rata-rata
		2017	2018	2019	2020	2021	
2	BELANJA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1	Belanja Operasi	61,74%	65,49%	59,97%	63,27%	66,53%	63,40%
2.1.1	Belanja Pegawai	39,35%	39,61%	36,06%	39,81%	37,33%	38,43%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	19,72%	21,23%	21,32%	20,85%	26,71%	21,97%
2.1.3	Belanja Bunga	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%	0,08%	0,04%
2.1.5	Belanja Hibah	2,50%	4,14%	1,94%	1,98%	1,99%	2,51%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,14%	0,47%	0,61%	0,62%	0,42%	0,45%
2.2	Belanja Modal	20,90%	16,57%	18,37%	14,16%	9,83%	15,97%
2.2.1	Belanja Modal Tanah	0,56%	0,41%	0,32%	0,37%	0,17%	0,37%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4,19%	3,38%	3,60%	4,57%	4,91%	4,13%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,95%	3,97%	6,74%	2,49%	2,47%	4,33%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10,09%	8,09%	6,45%	6,39%	2,01%	6,61%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,03%	0,66%	1,08%	0,27%	0,26%	0,46%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	0,07%	0,05%	0,18%	0,07%	0,01%	0,08%
2.3	Belanja Tidak Terduga	0,02%	0,05%	0,07%	0,98%	1,46%	0,52%
2.4	Belanja Transfer	17,34%	17,90%	21,59%	21,58%	22,18%	20,12%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,25%	0,30%	0,30%	0,21%	0,53%	0,32%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	17,10%	17,59%	21,29%	21,37%	21,65%	19,80%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi realisasi belanja Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Proporsi realisasi Belanja Operasi Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 tercatat memiliki rata-rata diatas 60% atau sebesar 63,40%.

Komponen realisasi belanja dengan rata-rata terbesar berada pada belanja pegawai (Belanja Operasi) yang mencapai 38,43%, artinya realisasi belanja pegawai yang notabene bersifat rutin dan kurang berkaitan langsung dengan pembangunan masih lebih besar dibandingkan dengan belanja modal (secara umum) yang memiliki keterkaitan lebih dekat dengan pembangunan. Proporsi Belanja Operasi memiliki nilai rata-rata realisasi paling besar selama 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 66,53%. Sedangkan dalam rentang tahun 2017 hingga 2021, proporsi realisasi belanja operasi terkecil tercatat pada tahun 2019 yang mencapai 59,97%. Belanja Barang dan Jasa menjadi bagian dari belanja operasi yang memiliki proporsi terbesar kedua, baik secara keseluruhan maupun pada lingkup belanja operasi dengan rata-rata proporsi mencapai 21,97%.

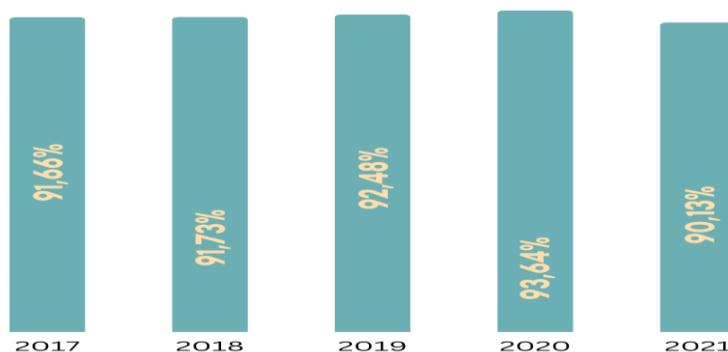
Proporsi realisasi Belanja Modal Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 tercatat memiliki nilai rata-rata 15,97%. Proporsi realisasi Belanja modal memiliki nilai paling besar berada pada tahun 2017 yang mencapai 20,90%. Sedangkan proporsi rata-rata realisasi belanja terendah berada pada tahun 2021 yang mencapai 9,83%. Untuk belanja transfer pada tahun 2017 hingga 2021 tercatat memiliki rata-rata proporsi sebesar 20,12% yang banyak dialokasikan melalui belanja bantuan keuangan. Sedangkan untuk belanja tidak terduga merupakan komponen Belanja yang memiliki rata-rata proporsi paing kecil, yaitu mencapai 0,52%.

Secara spesifik, pengelolaan belanja daerah Kabupaten Madiun pada masa lalu dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa rasio dan ukuran sebagai berikut :

1. Proporsi Realisasi Belanja terhadap Anggaran

Belanja Proporsi realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah menggambarkan mengenai ketercapaian realisasi belanja daerah berdasarkan/ terhadap anggaran yang telah ditetapkan dalam setiap tahunnya. Semakin besar nilai rasio menunjukkan bahwa besar realisasi belanja dibandingkan dengan jumlah belanja yang dianggarkan semakin tinggi, sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan dengan baik. Untuk mengetahui hasil perhitungan rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja daerah Kabupaten Madiun selama 5 tahun terakhir (2017 - 2021) secara lebih jelas adalah sebagai berikut:

Grafik 3.15 Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



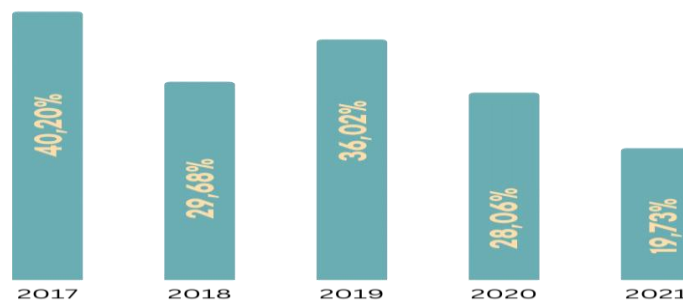
Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 nilai rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja di Kabupaten Madiun mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 93,64%. Nilai rasio pada Kabupaten Madiun cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya kecuali tahun 2021, dimana pada tahun 2017 mencapai 91,66% lalu meningkat pada tahun 2018 menjadi 91,73%, kembali meningkat pada 2019 mencapai 92,48%, dan mencapai titik tertinggi pada 2020, lalu mengalami penurunan pada 2021 senilai 90,13%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa realisasi belanja daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Madiun selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2017 - 2021) terutama dalam 4 tahun terakhir, masih cukup baik dalam pemenuhan target/ anggaran yang telah ditetapkan, namun realisasi Belanja Daerah telah belum mampu untuk memenuhi target/ anggaran yang telah ditetapkan hingga 100%.

2. Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum

Proporsi Belanja Modal merupakan gambaran seberapa besar anggaran suatu daerah digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan seperti percepatan pembangunan infrastruktur. Pengeluaran belanja modal akan memberikan manfaat yang besar dalam jangka menengah dan panjang, mengingat belanja modal yang secara umum diperuntukkan bagi pembangunan fisik terutama infrastruktur akan menjadi pengungkit (*leverage*) di berbagai sektor pembangunan lain. Infrastruktur memegang peranan penting dalam percepatan pembangunan daerah, terutama daerah Kabupaten Madiun. Adapun Proporsi Belanja Modal terhadap Dana Transfer Umum (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) digunakan untuk melihat kesesuaian belanja modal terhadap aturan yang berlaku. Adapun proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.16 Proporsi Belanja Modal Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

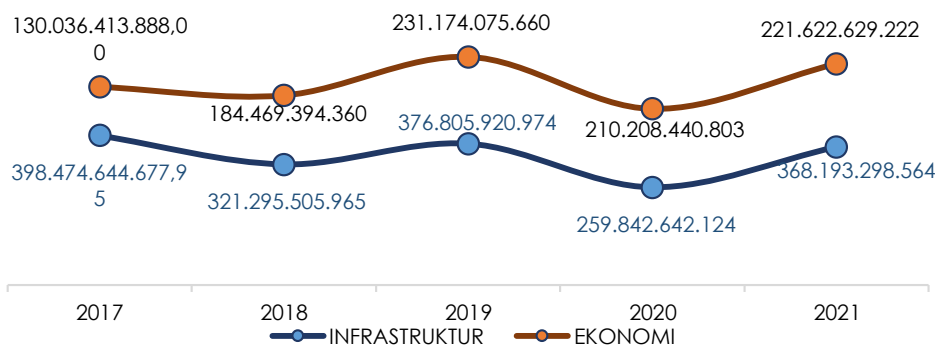
Proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 secara umum mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Madiun mengalami penurunan dari 40,20% menjadi 29,68%, namun penurunan tersebut masih di atas ambang batas rasio Belanja Infrastruktur terhadap DTU dalam aturan UU APBN yaitu sebesar 25%. Setelah mengalami penurunan di tahun 2018, pada tahun-tahun selanjutnya, proporsi belanja modal terhadap Dana Transfer Umum (DTU) Kabupaten Madiun mengalami peningkatan pada 2019 menjadi 36,02%. Kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dan 2021 menjadi 28,06% dan 19,73%. Proporsi belanja modal terhadap DTU Kabupaten Madiun pada tahun 2021 belum berhasil mencapai proporsi di atas 25%.

Dalam UU APBN Tahun Anggaran 2017, Dana Transfer Umum diarahkan $\geq 25\%$ untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, hal tersebut lebih jelas diatur dalam revisi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2020 Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) diarahkan penggunaannya paling sedikit 25% untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan percepatan penyediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah, dan mendukung pembangunan sumber daya manusia bidang Pendidikan. Bila mempertimbangkan ketentuan mengenai alokasi Dana Transfer Umum (DTU) sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dapat dilakukan penghitungan secara lebih spesifik terkait dengan realisasi belanja yang dimaksud yang dikelompokkan



menjadi 2 jenis belanja, yaitu belanja bidang infrastruktur dan ekonomi. Adapun realisasi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 adalah sebagai berikut.

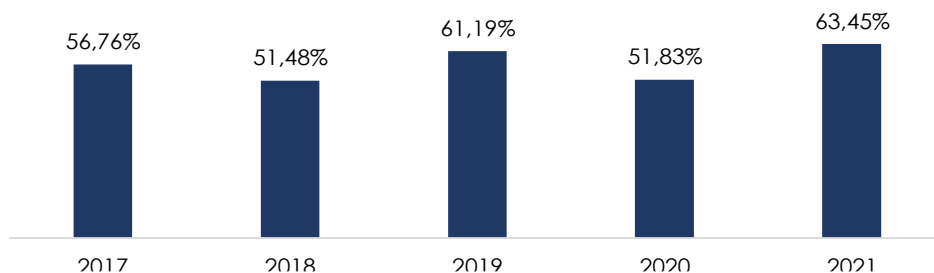
Grafik 3.17 Realisasi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Realisasi belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 seiring dengan pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah. Bila kedua jenis belanja tersebut dijumlahkan dan dibagi dengan Dana Transfer Umum (DTU) diperoleh hasil bahwa besar proporsi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi terhadap Dana Transfer Umum di Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 telah berada di atas ketentuan sebesar 25%, bahkan pada masing-masing tahun proporsinya telah berada di atas 50% dengan rata-rata proporsi sebesar 56,94%. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 63,45%. Hal tersebut menunjukkan adanya upaya yang optimal dalam pelaksanaan program pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi Covid-19.

Grafik 3.18 Proporsi Belanja Bidang Infrastruktur dan Ekonomi Terhadap Dana Transfer Umum Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

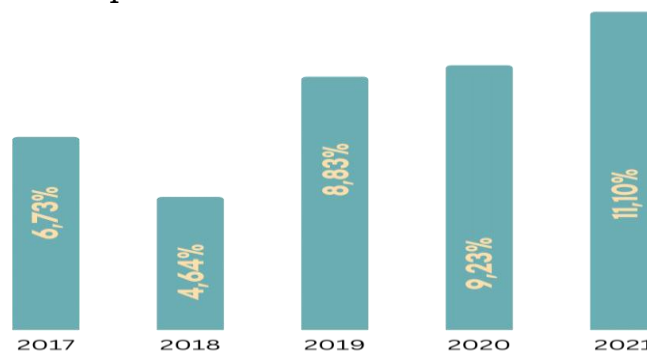


Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

3. Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah

Proporsi SiLPA terhadap belanja menunjukkan penggunaan dana yang tertunda atau tidak terserap. Artinya, semakin kecil angka proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah, maka semakin efektif penyerapan anggarannya. Proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.19 Proporsi SiLPA Tahun Sebelumnya Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



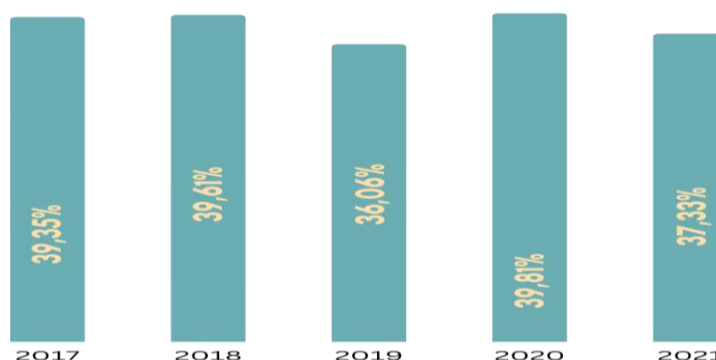
Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Berdasarkan pada grafik di atas dapat diketahui bahwa tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 proporsinya mengalami penurunan sebesar 2,09%, kemudian mengalami peningkatan sebesar 4,19% di tahun selanjutnya (2019) dan kembali mengalami peningkatan sebesar 0,4% di tahun 2020, dan pada 2021 hingga mencapai proporsi sebesar 11,10%. Fluktuasi tren proporsi SiLPA tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tersebut menggambarkan kemampuan Kabupaten Madiun dalam penyerapan SiLPA tahun sebelumnya pada tahun 2017 hingga 2021 belum cukup efektif, karena cenderung mengalami peningkatan dan penurunannya hanya terjadi pada tahun 2018. Meskipun penurunan rasio pada tahun 2018 menunjukkan upaya penyerapan SiLPA yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, terjadinya peningkatan kembali di tahun 2019 hingga 2021 menjadi kendala dalam pencapaian efektivitasnya. Semakin besar SiLPA pada dasarnya menunjukkan semakin besarnya dana publik yang belum atau tidak digunakan dalam belanja atau pengeluaran pembiayaan lain sehingga mengendap di kas daerah sebagai dana *idle*. Untuk itu pada tahun-tahun mendatang diperlukan manajemen belanja daerah yang baik, sehingga belanja yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif.

4. Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja

Proporsi Belanja Pegawai terhadap Total Belanja memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Sebaliknya, semakin kecil angka proporsi belanja pegawai maka semakin kecil pula proporsi realisasi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada grafik di bawah ini:

Grafik 3.20 Proporsi Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021



Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas maka dapat diketahui bahwa proporsi belanja pegawai terhadap total realisasi belanja Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Proporsi belanja pegawai Kabupaten Madiun pada tahun 2017 tercatat sebesar 39,35% dan mengalami kenaikan konsisten pada tahun 2018 mencapai 39,61%. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 36,06%, dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 senilai 39,81%, dan kembali mengalami penurunan pada 2021 sehingga proporsinya mencapai 37,33%. Rata-rata proporsi belanja pegawai terhadap total belanja tahun 2017 hingga 2021 masih berada di bawah 50%, namun proporsinya masih berada di atas 30% sehingga harus diturunkan hingga tidak lebih dari 30% sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana pada pasal 146 disebutkan bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud melebihi 30% (tiga

puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan, yaitu pada tahun 2027.

5. Proporsi Pemenuhan Belanja Aparatur

Analisis proporsi pemenuhan belanja aparatur memberikan gambaran mengenai rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap belanja daerah. Adapun belanja pemenuhan aparatur meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH, Belanja pemungutan Pajak Daerah, serta belanja langsung lainnya, seperti Belanja Honorarium PNS, Belanja Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan PNS, Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Belanja premi asuransi kesehatan, Belanja makanan dan minuman pegawai, Belanja pakaian dinas dan atributnya, Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu, Belanja perjalanan dinas, Belanja perjalanan pindah tugas, Belanja Pemulangan Pegawai, serta Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, peralatan dan perlengkapan dll). Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi anggaran yang dialokasikan untuk pemenuhan belanja kebutuhan aparatur. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja tersebut, maka semakin kecil pula proporsi anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan aparatur.

Berdasarkan data Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab kinerja keuangan masa lalu, proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang meliputi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan pada tahun 2017 hingga 2021 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.9 Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2021

No	Uraian	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/ (b) x 100%
1	Tahun Anggaran 2017	856.440.927.077,82	1.796.862.667.196,72	47,66%
2	Tahun Anggaran 2018	840.025.647.613,91	1.771.744.433.100,63	47,41%
3	Tahun Anggaran 2019	858.908.183.780,92	1.953.311.491.127,57	43,97%
4	Tahun Anggaran 2020	837.257.950.274,96	1.801.057.950.336,91	46,49%
5	Tahun Anggaran 2021	852.561.839.717,70	1.887.363.883.267,87	45,17%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi, di mana kondisi pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan adanya penurunan yaitu dari 47,66% pada tahun 2017 menjadi 43,97% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan sehingga menjadi 46,49%. Persentase ini kembali mengalami penurunan di tahun 2021 hingga mencapai 45,17%. Proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mencapai nilai paling rendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 43,97%. Bila melihat pada data Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Madiun di tahun 2017 sampai dengan 2021 dapat diketahui bahwa walaupun persentase proporsi pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Madiun cenderung mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir, namun masih berada di bawah 50%, hal ini menunjukkan bahwa secara umum proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Madiun masih cukup baik, namun proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur perlu untuk lebih dikendalikan dan memfokuskan pada peningkatan belanja barang dan jasa maupun belanja modal untuk mendukung kegiatan pembangunan di Kabupaten Madiun.

6. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Pengeluaran wajib dan mengikat Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 686.205.433.607,00, dan mengalami penurunan sehingga pada tahun 2018 realisasinya mencapai Rp. 670.056.935.272,00. Pada tahun 2019 pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama mengalami peningkatan sehingga realisasinya mencapai Rp. 675.156.708.111,00, sedangkan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sehingga menjadi Rp. 645.291.379.339,00. Namun pada tahun 2021 total pengeluaran belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Madiun mengalami peningkatan sehingga tercatat sebesar Rp. 654.579.560.197,00, yang disebabkan oleh adanya peningkatan pada belanja bagi hasil dan adanya pembentukan dana cadangan. Pertumbuhan



rata-rata realisasi pada tahun 2017 hingga 2021 tercatat sebesar -1,14%, dimana pengeluaran terbesar dalam struktur pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama adalah Belanja Gaji dan Tunjangan.

Untuk mengetahui perkembangan realisasi Pengeluaran wajib dan mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 3.10 Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Belanja Tidak Langsung	686.205.433.607,00	670.056.935.272,00	675.156.708.111,00	645.291.379.339,00	644.579.560.197,00
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	677.050.974.207,00	658.612.248.231,00	663.064.986.511,00	635.275.357.639,00	633.759.893.697,00
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	4.742.775.000,00	6.083.613.141,00	6.270.000.000,00	6.217.500.000,00	851.600.000,00
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	4.411.684.400,00	5.361.073.900,00	5.821.721.600,00	3.798.521.700,00	9.968.066.500,00
B	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	10.000.000.000,00
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	10.000.000.000,00
2	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-	-
	TOTAL (A+B)	686.205.433.607,00	670.056.935.272,00	675.156.708.111,00	645.291.379.339,00	654.579.560.197,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022



Memperhatikan pada data realisasi pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 sebagaimana yang telah dibahas dan disajikan pada tabel di atas, maka selanjutnya dilakukan proyeksi terhadap masing-masing komponen pengeluaran yang wajib mengikat serta prioritas utama, sehingga dapat diketahui perkiraan akumulasi pengeluaran pada tahun-tahun yang akan datang.

Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -1,40%, yang disebabkan oleh adanya fluktuasi Belanja Gaji dan Tunjangan. Nilai total Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama pada tahun 2023 diperkirakan mencapai Rp. 732.089.657.119,17, sedangkan pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp. 687.902.489.057,20, pada tahun 2025 mencapai Rp. 696.861.544.928,59, dan pada tahun 2026 diperkirakan mencapai Rp. 700.642.931.510,98. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan yang diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan pada tahun 2023 hingga 2026 sebesar -1,40%, Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH sebesar -1,40%, Belanja Bagi Hasil sebesar 28,51%, dan adanya pembentukan dana cadangan pada tahun 2023 yang besarnya mencapai Rp. 10.000.000.000,00, sehingga secara akumulasi total keseluruhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun pada tahun 2024 mengalami penurunan.

Untuk mengetahui secara lebih jelas, berikut disajikan hasil proyeksi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama Kabupaten Madiun untuk tahun 2023 hingga 2026.



Tabel 3.11 Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
				2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
A	Belanja Wajib dan Mengikat						
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	633.759.893.697,00	-1,40%	707.139.721.457,93	671.633.457.244,89	674.354.038.937,01	677.074.620.629,13
2	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/ WKDH	851.600.000,00	-1,40%	6.291.181.661,23	5.975.294.501,32	5.999.498.591,58	6.023.702.681,85
3	Belanja Bunga	-	0,00%	-	-	-	-
4	Belanja Bagi Hasil	9.968.066.500,00	28,51%	8.658.754.000	10.293.737.311	16.508.007.400	17.544.608.200
B	Pengeluaran Pembiayaan						
1	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-33,33%	10.000.000.000	-	-	-
2	Pembayaran Pokok Utang	-	0,00%	-	-	-	-
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama	654.579.560.197,00	-1,40%	732.089.657.119,17	687.902.489.057,20	696.861.544.928,59	700.642.931.510,98

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan pendanaan pembangunan daerah diluar kapasitas pendapatan daerah serta kewajiban-kewajiban yang menjadi beban pemerintah daerah. Analisis pembiayaan daerah tidak dapat terlepas dari kondisi defisit yang terjadi sehingga diperlukan pendanaan dari penerimaan pembiayaan daerah. Adapun beberapa pembahasan dalam analisis pembiayaan meliputi : Analisis Sumber Penutup Defisit Riil, Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, serta Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.

3.2.2.1 Analisis Sumber Penutup Defisit Riil

Analisis Sumber Penutup Defisit Riil memberikan gambaran mengenai kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun pada masa lalu. Defisit riil diketahui dengan menghitung Realisasi Pendapatan Daerah dikurangi dengan realisasi Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Setelah diketahui selanjutnya dilakukan penutupan oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan yang dimana keseluruhan datanya dituangkan dalam tabel Defisit Riil Anggaran. Berdasarkan tabel analisis tersebut, kemudian disusun tabel Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil.

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil perhitungan dan komposisi penutup defisit riil anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.12 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.758.060.590.949,13	1.829.582.126.042,71	1.947.016.775.096,37	1.842.457.400.838,08	1.978.493.284.512,37
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.790.817.628.207,72	1.759.824.310.394,63	1.948.311.491.127,57	1.796.557.950.336,91	1.866.339.659.267,87
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.045.038.989,00	11.920.122.706,00	5.000.000.000,00	4.500.000.000,00	21.024.224.000,00
A	Defisit riil	(38.802.076.247,59)	57.837.692.942,08	(6.294.716.031,20)	41.399.450.501,17	91.129.401.244,50
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	120.464.879.752,36	81.719.453.049,77	172.032.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,23
5	Pencairan Dana Cadangan	-	32.437.909.652,41	-	-	-
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-	-	-	-	-
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
8	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	56.649.545,00	27.529.025,00	2.000.000,00	-	-
9	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	120.521.529.297,36	114.184.891.727,18	172.034.096.691,26	165.739.380.660,06	207.138.749.161,23
A-B	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	81.719.453.049,77	172.022.584.669,26	165.739.380.660,06	207.138.831.161,23	298.268.150.405,73

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)



Berdasarkan data yang telah disajikan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 hingga 2021 Pemerintah Kabupaten Madiun lebih sering memiliki surplus riil dibandingkan dengan defisit, dimana defisit hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2019, sedangkan surplus terjadi pada tahun 2018, 2020 dan 2021. Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Madiun mengalami defisit sebesar Rp. 38.802.076.247,59, sedangkan pada tahun 2018 besar defisit riil anggaran Kabupaten Madiun sebesar Rp. 6.294.716.031,20. Dari defisit tersebut selanjutnya ditutup salah satunya dengan adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, dimana proporsi Defisit Riil terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2017 mencapai 310,46% dan pada tahun 2019 mencapai 2.732,96%, yang artinya jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya pada tahun 2017 sebanyak 310,46% dari Defisit Riil yang terjadi pada tahun tersebut, sedangkan pada tahun 2019 sebanyak 2.732,96%. Kondisi keuangan pada tahun 2018, 2020, dan 2021 mengalami surplus masing-masing sebanyak Rp. 57.837.692.942,08, Rp. 41.399.450.501,17 pada tahun 2020 dan sebanyak Rp. 91.129.401.244,50 pada tahun 2021. Dimana keberadaan surplus yang dimiliki telah meningkatkan Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan pada tahun tersebut, sehingga bila melihat pada kondisi tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Madiun masih cukup kuat untuk membiayai belanja dengan mengoptimalkan penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.

Tabel 3.13 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2017	2018	2019	2020	2021
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	-310,46%	141,29%	-2.732,96%	400,34%	227,30%
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00%	56,08%	0,00%	0,00%	0,00%
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
5	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-0,15%	0,05%	-0,03%	0,00%	0,00%
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

3.2.2.2 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran memberikan gambaran mengenai dari mana SiLPA diperoleh atau sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun, dan seberapa besar



kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sumber terhadap SiLPA yang dimiliki. Komposisi SiLPA Pemerintah Kabupaten Madiun diperoleh dari beberapa sumber, yaitu Pelampauan penerimaan PAD, Pelampauan penerimaan dana perimbangan, Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, serta Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan untuk kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan serta kegiatan lanjutan tidak terdapat realisasi.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 diperoleh dari 4 sumber sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dimana pada tahun 2017 sebagian besar SiLPA dihasilkan dari adanya kegiatan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 192,88%. Pada tahun 2018 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun diperoleh dari komponen yang sama, dimana sebagian besar SiLPA dihasilkan dari adanya kegiatan Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 91,95%. Pada tahun 2019 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun mayoritas diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya sebesar 96,81%, Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun sebagian besar diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya yang masing-masing sebesar 58,82% dan 68,54%. Pada tahun 2021 selain diperoleh dari Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya, SiLPA juga diperoleh dari Pelampauan penerimaan PAD sebesar 4,93%, Pelampauan penerimaan dana perimbangan sebesar 24,44%, dan Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 2,09%. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 berfluktuasi dengan rata-rata pertumbuhan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun sebesar 43,96%.

Berikut disajikan data terkait dengan perkembangan SiLPA dan sumber perolehan SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun selama tahun 2017 hingga 2021.



Tabel 3.14 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017		2018		2019		2020		2021		Rata-rata Pertumbuhan
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	81.719.453.049,77	100,00 %	172.022.584.669,26	100,00 %	165.739.380.660,06	100,00 %	207.138.831.161,23	100,00 %	298.268.150.405,73	100,00 %	43,96%
1	Pelampauan penerimaan PAD	(982.375.599,79)	-1,20 %	7.366.251.975,91	4,28 %	20.075.513.261,53	12,11 %	42.464.303.214,56	20,50 %	14.689.723.322,37	4,93 %	-157,80%
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	(74.919.345.860,00)	-91,68 %	8.048.424.266,00	4,68 %	(11.642.759.862,00)	-7,02 %	50.374.538.824,00	24,32 %	72.910.287.491,00	24,44 %	-210,83%
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	(2.000.000,00)	0,00 %	(1.570.029.415,00)	-0,91 %	(3.142.603.906,00)	-1,90 %	(7.541.914.277,00)	-3,64 %	6.233.111.602,00	2,09 %	19614,74%
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	157.623.174.509,56	192,88 %	158.177.937.842,35	91,95 %	160.449.231.166,53	96,81 %	121.841.903.399,67	58,82 %	204.435.027.990,36	68,54 %	11,38%
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00%
6	Kegiatan lanjutan	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	-	0,00 %	0,00%

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)

3.2.2.3 Analisis Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan memberikan gambaran mengenai sisa lebih pembiayaan anggaran secara riil yang dapat digunakan dalam penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat pada tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2017 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kabupaten Madiun mencapai Rp. 81.843.268.324,77, lalu mengalami peningkatan pada tahun 2018 sehingga menjadi Rp. 173.422.943.250,70, namun pada tahun 2019 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran mengalami penurunan sehingga mencapai Rp. 166.290.560.581,49, dan pada tahun 2020 maupun tahun 2021 kembali mengalami peningkatan secara bertahap hingga mencapai jumlah Rp. 207.394.837.570,23 dan Rp. 298.350.434.303,73 pada tahun 2021. Adapun rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017 hingga 2021 sebesar 44,09%. Untuk mengetahui hasil perhitungan dan perkembangan Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.15 Sisa Lebih Riil Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Madiun Tahun 2017 - 2021

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	81.843.268.324,77	173.422.943.250,70	166.290.560.581,49	207.394.837.570,23	298.350.434.303,73
	Dikurangi:					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0	0	0	0	0
3	Kegiatan lanjutan	0	0	0	0	0
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	81.843.268.324,77	173.422.943.250,70	166.290.560.581,49	207.394.837.570,23	298.350.434.303,73

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022

Dengan kecenderungan semakin besarnya SILPA, maka Pemerintah Kabupaten Madiun perlu memperbaiki tata kelola keuangan daerah dengan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran dari sisi penerimaan serta pengeluaran yaitu memperhatikan kondisi makro perekonomian, memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan. SiLPA yang diperoleh dari pengelolaan keuangan yang



berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik.

Pengelolaan keuangan yang semakin baik tercermin dalam hasil Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran, dimana Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran menggambarkan perkiraan kondisi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Madiun dalam beberapa tahun mendatang. Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Madiun pada tahun 2023 diperkirakan mencapai sebesar Rp. 118.122.281.038,92. Pada tahun 2024 dan tahun 2025, Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Madiun diperkirakan sebesar Rp. 154.173.880.270,86 dan Rp. 133.764.871.973,21. Sedangkan pada tahun 2026 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran diperkirakan kembali mengalami peningkatan sehingga mencapai Rp. 113.693.786.093,24. Adapun dalam setiap tahun rata-rata pertumbuhan diperkirakan mencapai 0,76%. Terjadinya penurunan Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran tersebut lebih banyak disebabkan oleh adanya penurunan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).

Untuk mengetahui secara lebih jelas terkait dengan hasil proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.16 Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026

No	Uraian	Data Tahun Dasar (Rp)	Tingkat Pertumbuhan (%)	Proyeksi			
				2023	2024	2025	2026
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Saldo Kas Neraca Daerah	298.350.434.303,73	0,76%	118.122.281.038,92	154.173.880.270,86	133.764.871.973,21	113.693.786.093,24
	Dikurangi:						
1	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-	-	-	-	-
2	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	298.350.434.303,73	0,76%	118.122.281.038,92	154.173.880.270,86	133.764.871.973,21	113.693.786.093,24

Sumber : BPKAD Kabupaten Madiun, 2022 (diolah)



3.3 KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja Pemerintah Kabupaten Madiun. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada periode 2024 - 2026, yaitu terdapat sinkronisasi dan keselarasan antara rencana pembangunan daerah yang ingin dilaksanakan dan kemampuan pemerintah untuk membiayai. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan daerah Kabupaten Madiun selama beberapa tahun ke depan (2024 - 2026). Beberapa hal yang akan diuraikan dalam sub bab ini meliputi : proyeksi pendapatan dan belanja, serta penghitungan kerangka pendanaan.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Kerangka pendanaan pemerintah daerah untuk kurun waktu beberapa tahun ke depan yaitu tahun 2024 sampai 2026 tidak dapat dipisahkan dari data historis yaitu perkembangan realisasi anggaran pemerintah daerah pada tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan hal tersebut, maka untuk melakukan analisis terhadap proyeksi pendapatan, proyeksi belanja dan proyeksi pembiayaan daerah untuk kurun waktu beberapa tahun kedepan perlu dilakukan analisis terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam 5 (lima) tahun yang lalu. Analisis ini sangat penting dalam upaya untuk mendapatkan gambaran tentang besaran anggaran belanja dan pembiayaan yang telah disediakan untuk periode dimaksud serta langkah-langkah kebijakan yang telah dirumuskan untuk mencapainya, termasuk dukungan terhadap pencapaian target sasaran prioritas nasional dan program prioritas provinsi. Salah satu metode sederhana yang digunakan untuk memperkirakan kemampuan anggaran (proyeksi) adalah fungsi *forecast*, yaitu menggunakan regresi linear untuk memperkirakan sebuah nilai berdasarkan kumpulan data historis selama 5 tahun terakhir, ditambah asumsi-asumsi yang diperkirakan akan terjadi, kebijakan terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta kondisi ekonomi makro.

Proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah memberikan informasi mengenai pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan yang diperkirakan dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Madiun pada masa Rencana Pembangunan Daerah (RPD), yaitu tahun 2024 hingga 2026, serta tingkat belanja dan pengeluaran pembiayaan yang dikelola oleh Pemerintah



Kabupaten Madiun dalam beberapa tahun mendatang. Pendapatan daerah secara umum terbagi menjadi 3 jenis, yaitu : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan pada belanja daerah secara umum terbagi menjadi 4 jenis, yaitu : Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.

Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan dapat diperoleh hasil bahwa pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,84%, untuk belanja daerah Kabupaten Madiun secara keseluruhan pada rentang waktu tersebut diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar 1,35%. Sedangkan untuk penerimaan pembiayaan Kabupaten Madiun diperkirakan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,74%, dan sebesar -42,55% untuk pengeluaran pembiayaan.

Melihat pada hasil proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan rata-rata pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan mencapai sebesar 11,58%, dimana pada tahun 2023 (berdasarkan APBD) telah ditetapkan anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 280.302.275.393,00, sedangkan hasil proyeksi pada tahun 2024 diperkirakan mencapai Rp. 292.166.258.224,23, sedangkan pada tahun 2026 mengalami pertumbuhan yang signifikan sehingga menjadi Rp. 385.444.136.631,79. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cenderung lebih besar pada tahun 2025 dan 2026 disebabkan oleh adanya kenaikan dari pemberlakuan Opsen PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Semakin meningkatnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 hingga 2026 mengandung harapan tingkat kemandirian keuangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Madiun semakin baik, hal ini tentunya menjadi konsekuensi seiring dengan meningkatnya belanja daerah dalam setiap tahun, serta sebagai antisipasi adanya kebijakan pemerintah pusat yang berdampak terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rata-rata berada di atas 5% di tahun 2024 hingga 2026 pada dasarnya didasarkan pada pertimbangan, yaitu Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari -1,69% pada tahun 2020 menjadi sebesar 3,34% yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Sehingga dengan demikian menunjukkan bahwa kondisi perekonomian di Kabupaten Madiun mulai mengalami *recovery* sehingga diharapkan pada tahun-tahun mendatang pertumbuhan ekonominya akan



kembali normal seperti sebelum terjadinya pandemi yang berada di atas 5%. Ditengah pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi pada tahun 2020, ternyata realisasi PAD masih mampu mengalami peningkatan sebesar 12,65%, dan ditengah pemulihan kondisi ekonomi pada tahun 2021 realisasi PAD yang dihasilkan kembali mengalami pertumbuhan sebesar 29,02%. Selain itu adanya perkembangan infrastruktur di Kabupaten Madiun diharapkan dapat memberikan dampak terhadap meningkatnya iklim usaha yang pada akhirnya dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

Untuk pendapatan transfer pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar -1,09%, terutama untuk Transfer Pemerintah Pusat diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar -0,40%, dimana pada sumber dana perimbangan diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar -0,74%. Rendahnya tingkat pertumbuhan antara lain disebabkan oleh adanya kerentanan terhadap pengaruh perubahan kebijakan Pemerintah Pusat yang menyesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan negara.

Melihat pada hasil proyeksi belanja daerah dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan mencapai 1,35%, dimana untuk belanja operasi rata-rata memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 0,10%, untuk belanja modal rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 7,89%. Untuk belanja tidak terduga rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,00%, dan untuk belanja transfer rata-rata memiliki pertumbuhan sebesar 0,74%. Bila melihat pada jenis belanja operasi, untuk belanja pegawai di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan memiliki pertumbuhan rata-rata sebesar -1,40%, dimana besaran pertumbuhan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan pemenuhan proporsi gaji pegawai pada tahun 2027 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang tidak boleh melebihi 30% dari APBD (total anggaran belanja). Untuk belanja barang dan jasa di Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 rata-rata diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 1,90% yang disebabkan oleh adanya pemenuhan kebutuhan peningkatan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Madiun. Belanja modal selama tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan memiliki pertumbuhan sebesar 7,89% dan memiliki proporsi yang semakin meningkat dengan rata-rata proporsi sebesar 15,52% dari total belanja daerah. Proyeksi belanja daerah dilakukan diantaranya dengan memperhatikan asumsi-asumsi seperti : Pertumbuhan realisasi belanja daerah Kabupaten Madiun tahun 2017 hingga 2021 dan analisis logis terhadap kebutuhan peningkatan kegiatan pembangunan di Kabupaten Madiun; serta



adanya penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

Pada proyeksi Pembiayaan Daerah, penerimaan pembiayaan pada tahun 2023 hingga 2026 terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) yang diperkirakan pada tahun 2023 hingga 2025 cenderung mengalami fluktuasi, sedangkan pada tahun 2026 diasumsikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dioptimalkan untuk membiayai belanja, sehingga nilai proyeksinya mengalami penurunan. Pencairan Dana Cadangan diproyeksikan terjadi pada tahun 2024 sebesar Rp. 40.000.000.000,00, dimana dana cadangan yang dicairkan pada tahun 2024 akan dipergunakan untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Madiun. Untuk pengeluaran pembiayaan pada tahun 2023 hingga 2026 diperkirakan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2023 yang dan Penyertaan Modal Daerah pada tahun 2023 hingga 2025. Diperkirakan terdapat Pembentukan Dana Cadangan pada tahun 2023 (APBD) sebesar Rp. 10.000.000.000,- untuk membiayai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PILKADA). Sedangkan pada Penyertaan Modal Daerah diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun 2023 (APBD) sebesar Rp. 11.750.000.000,00, Rp. 12.750.000.000,00,- pada tahun 2024, dan Rp. 14.500.000.000,- pada tahun 2025. Penyertaan modal dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja BUMD milik Pemerintah Kabupaten Madiun, yaitu BPR, PDAM, dan Umbul.

Sesuai dengan Inmendagri 52/2022 PDAM dapat melakukan beberapa strategi yaitu mendukung kinerja pelayanan Pemda antara lain melaksanakan pelatihan peningkatan kapasitas SDM, perbaikan billing system, dan peningkatan manajemen perusahaan; bantuan program melalui rehabilitasi/uprating IPA, pemasangan pompa, dan pemasangan meter induk; serta melakukan upaya restrukturisasi utang PDAM. Begitupun dengan BPR agar mampu meningkatkan pelayanan bisa dengan cara jenis Jaminan yang dipersyaratkan tidak sulit, mengutamakan unsur kepercayaan dengan nasabah, memiliki Sistem Pemasaran yang baik karena fokus terhadap UMKM, pencairan dana lebih Cepat dan Mudah. Taman wisata keluarga UMBUL bias melakukan strategi untuk meningkatkan pelayanan antara lain mengubah konsep lama menjadi konsep UMBUL Baru menjadi tempat wisata keluarga berwawasan lingkungan yang berorientasi pada habitat satwa di alam bebas. Strategi kedua agar UMBUL dilengkapi dengan berbagai fasilitas rekreasi dan atraksi seperti danau buatan, sepeda air, kano, kolam renang



dengan seluncur ombak, kereta api mini yang melintasi perkampungan ala Afrika, taman burung, baby zoo, kincir raksasa, gajah tunggang, komedi putar, pentas sirkus, area gocart, bom bom car, rumah setan, atraksi hewan, kesenian tradisional dan sulap di panggung terbuka (Lolly Swing, Speedway, Kincir Raksasa, Crazy Plane, Mandi Bola, Foam Ball, Space Shuttle, Angsa Terbang, Cartoon Train, Sepeda Air, Flume Ride, Bom Bom Car, Sepeda Layang dan lain sebagainya).

Untuk mengetahui hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2023 hingga 2026 secara lebih jelas dan terperinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.17 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2023 - 2026

No	Uraian	Proyeksi				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		APBD 2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)	
1	PENDAPATAN	1.988.914.964.560,00	1.945.327.921.546,93	1.984.109.675.323,86	2.037.784.000.031,12	0,84%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	280.302.275.393,00	292.166.258.224,23	364.467.114.620,64	385.444.136.631,79	11,58%
1.1.1.	Pajak daerah	87.342.700.000,00	93.300.000.000,00	154.730.074.000,00	164.401.082.000,00	26,30%
1.1.2.	Retribusi daerah	14.202.524.650,00	9.637.373.110,00	10.350.000.000,00	11.045.000.000,00	-6,01%
1.1.3.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	8.344.807.572,00	8.845.496.026,32	9.376.225.787,90	9.938.799.335,17	6,00%
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	170.412.243.171,00	180.383.389.087,91	190.010.814.832,74	200.059.255.296,62	5,49%
1.2	Pendapatan Transfer	1.702.529.882.167,00	1.647.161.663.322,70	1.613.642.560.703,22	1.646.339.863.399,32	-1,09%
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.567.280.558.000,00	1.498.750.975.459,00	1.522.649.237.489,40	1.546.625.464.760,41	-0,40%
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.376.189.282.000,00	1.303.837.873.939,00	1.323.837.873.939,00	1.343.837.873.939,00	-0,74%
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil	234.784.520.000,00	142.433.111.939,00	142.433.111.939,00	142.433.111.939,00	-13,11%
1.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	836.412.017.000,00	856.412.017.000,00	876.412.017.000,00	896.412.017.000,00	2,34%
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	304.992.745.000,00	304.992.745.000,00	304.992.745.000,00	304.992.745.000,00	0,00%
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	0,00%
1.2.1.5	Dana Desa	191.091.276.000,00	194.913.101.520,00	198.811.363.550,40	202.787.590.821,41	2,00%
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	135.249.324.167,00	148.410.687.863,70	90.993.323.213,82	99.714.398.638,91	-6,46%
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	130.704.715.167,00	143.775.186.683,70	86.265.112.010,22	94.891.623.211,24	-6,67%
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	4.544.609.000,00	4.635.501.180,00	4.728.211.203,60	4.822.775.427,67	0,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.082.807.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-0,45%
1.3.1	Hibah	6.082.807.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-0,45%
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	0,00%
1.3.3	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	0,00%
2	BELANJA	2.085.713.568.422,00	2.090.281.848.225,68	2.123.237.517.078,80	2.171.075.116.190,13	1,35%
2.1	Belanja Operasi	1.373.589.573.640,00	1.337.652.853.298,53	1.355.606.682.633,72	1.377.117.031.063,52	0,10%
2.1.1	Belanja Pegawai	760.830.349.152,00	722.628.219.391,00	725.555.365.266,00	728.482.511.141,00	-1,40%
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	524.457.949.953,00	524.699.329.247,42	537.982.820.976,02	554.814.463.129,15	1,90%
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Belanja Subsidi	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	0,00%
2.1.5	Belanja Hibah	82.858.119.535,00	83.686.700.730,35	84.523.567.737,65	85.368.803.415,03	1,00%
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.983.155.000,00	6.178.603.929,76	7.084.928.654,05	7.991.253.378,33	17,15%
2.2	Belanja Modal	288.711.948.782,00	327.581.965.616,15	336.369.535.045,08	361.660.184.926,61	7,89%



No	Uraian	Proyeksi				Rata-rata Pertumbuhan (%)
		APBD 2023	2024	2025	2026	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
2.2.1	Belanja Modal Tanah	1.850.744.850,00	-	-	-	-33,33%
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.061.904.682,00	83.443.314.048,08	85.291.254.991,04	86.523.215.619,68	11,30%
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	114.863.137.817,00	124.644.264.405,37	130.524.362.507,88	139.404.460.610,40	6,68%
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	102.407.215.305,00	113.965.441.034,70	115.024.971.418,16	130.203.562.568,54	8,47%
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.467.902.233,00	5.467.902.233,00	5.467.902.233,00	5.467.902.233,00	0,00%
2.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya	61.043.895,00	61.043.895,00	61.043.895,00	61.043.895,00	0,00%
2.3	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00%
2.4	Belanja Transfer	398.412.046.000,00	400.047.029.311,00	406.261.299.400,00	407.297.900.200,00	0,74%
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	8.658.754.000,00	10.293.737.311,00	16.508.007.400,00	17.544.608.200,00	28,51%
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	389.753.292.000,00	389.753.292.000,00	389.753.292.000,00	389.753.292.000,00	0,00%
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan	118.548.603.862,00	157.703.926.678,75	153.627.841.754,94	133.291.116.159,02	5,74%
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	118.548.603.862,00	117.703.926.678,75	153.627.841.754,94	133.291.116.159,02	5,52%
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	40.000.000.000,00	-	-	-33,33%
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	0,00%
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00%
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00%
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	0,00%
3.1.7	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-	-	-	0,00%
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	21.750.000.000,00	12.750.000.000,00	14.500.000.000,00	-	-42,55%
3.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	0,00%
3.2.2	Penyertaan Modal Daerah	11.750.000.000,00	12.750.000.000,00	14.500.000.000,00	-	-25,92%
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	-	-	-	0,00%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	0,00%
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya	-	-	-	-	0,00%

Sumber : Hasil Proyeksi, 2022

Melihat pada hasil proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagaimana yang telah terdapat pada tabel di atas, maka selanjutnya dapat dikemukakan beberapa kebijakan keuangan daerah yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun. Adapun kebijakan keuangan daerah dikelompokkan berdasarkan 3 komponen yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, antara lain meliputi :
 - a) Memperbaiki pengelolaan *database* wajib pajak dan melakukan pendataan potensi pajak yang terdapat di Kabupaten Madiun;
 - b) Melakukan review dan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) Tanah dan Bangunan mendekati Harga Pasar secara berkala khususnya di wilayah-wilayah yang secara signifikan mengalami pertumbuhan ekonomi;
 - c) Melakukan penambahan Obyek Baru Pajak Restoran kurang lebih sebanyak 50 Wajib Pajak dalam setiap tahun;
 - d) Meningkatkan target penerimaan dari komponen retribusi daerah melalui penyesuaian atas tarif pada beberapa obyek retribusi, peningkatan lingkup dan cakupan layanan pada wajib retribusi khususnya untuk retribusi jasa umum dan retribusi jasa usaha; serta peningkatan kualitas layanan perizinan khususnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan tujuan menjaring sebanyak-banyaknya kepemilikan bangunan yang belum ber-IMB, sehingga berdampak pada peningkatan perolehan retribusi daerah.
2. Optimalisasi pemanfaatan Aset Daerah sebagai sumber PAD dengan melakukan inventarisasi aset milik Pemerintah Kabupaten Madiun yang dapat dimanfaatkan untuk mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Memperkuat sistem pemungutan PAD berbasis Teknologi Informasi (IT), khususnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari komponen pajak dan retribusi daerah;
4. Mengendalikan piutang Pajak Daerah dengan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan melaksanakan sistem *reward and punishment* secara konsisten;



5. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dengan memperkuat permodalan Perusahaan Milik Daerah/ BUMD dan perbaikan kinerja Perusahaan Milik Daerah/ BUMD;
6. Optimalisasi penerimaan bagi hasil pajak melalui kerjasama dengan instansi vertikal, daerah (provinsi) dan daerah lain dalam menyerap basis pajak, termasuk PKB dan BBNKB (Respon terhadap kebijakan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang opsen dengan tarif 66%);
7. Mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional serta memperhatikan kebijakan dana transfer Pemerintah Pusat setiap tahunnya dalam penentuan proyeksi pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 adalah :

1. Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan dengan berbasis pada peningkatan kinerja;
2. Belanja daerah Kabupaten Madiun diprioritaskan untuk membiayai program-program yang bersifat strategis sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah;
3. Belanja Daerah disusun berdasarkan standar harga dan Analisis Standar Belanja;
4. Belanja pegawai dialokasikan semakin menurun hingga paling tinggi 30% dari total belanja APBD pada tahun 2027 (di luar tunjangan guru) sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022;
5. Tambahan penghasilan bagi pegawai (TPP) diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/ atau pertimbangan objektif lainnya dan berorientasi pada peningkatan produktivitas kerja dan disiplin kerja;
6. Mengoptimalkan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil;
7. Meningkatkan efektivitas penggunaan dana desa dengan mensinergikan fokus pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa;
8. Belanja Bantuan Sosial dan Hibah dialokasikan secara selektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku;



9. Penggunaan dana tidak terduga dilakukan untuk menangani hal-hal bersifat darurat dan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan terkait dengan pembiayaan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 adalah :

1. Melakukan penyertaan modal dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dalam pengelolaannya mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Penyertaan Modal;
2. Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tahun 2024;
3. Mendorong peningkatan kerjasama pembiayaan daerah dengan pihak swasta/ masyarakat/ Non-Governmental Organization melalui *Publik Private Partnership*, seperti : KPBU atau optimalisasi CSR.

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah daerah sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh. Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Madiun selama beberapa tahun ke depan sampai dengan tahun 2026. Untuk menghitung kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah menghitung seluruh penerimaan daerah, yang meliputi: Pendapatan, Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda), dan Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran. Selanjutnya dari jumlah penerimaan tersebut dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan.

Berdasarkan data hasil proyeksi yang diperoleh dapat diketahui bahwa proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 memiliki pertumbuhan sebesar 1,91%, dimana pada tahun 2024 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun diperkirakan mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 2.090.281.848.225,68, pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.123.237.517.078,80, dan pada tahun 2026 nilai kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun diperkirakan kembali mengalami peningkatan sehingga



menjadi sebesar Rp. 2.171.075.116.190,13. Terjadinya peningkatan pada tahun 2024 hingga 2026 lebih disebabkan oleh adanya peningkatan pada pendapatan daerah dalam setiap tahunnya, disamping itu pada tahun 2024 terdapat Pencairan Dana Cadangan yang telah dicadangkan pada tahun-tahun sebelumnya sebesar Rp. 40.000.000.000,00. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan diperkirakan hanya terdapat pada tahun 2024 hingga 2025 dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 12.750.000.000,00 dan Rp. 14.500.000.000,00. Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah pada tahun 2024 hingga 2026 selanjutnya dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan daerah pada masing-masing tahun.

Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 secara lebih jelas disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 3.18 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026

No	Uraian	Proyeksi		
		2024	2025	2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pendapatan	1.945.327.921.546,93	1.984.109.675.323,86	2.037.784.000.031,12
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	40.000.000.000,00	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	117.703.926.678,75	153.627.841.754,94	133.291.116.159,02
	Total Penerimaan	2.103.031.848.225,68	2.137.737.517.078,80	2.171.075.116.190,13
	Dikurangi:			
4	Belanja Operasi	1.337.652.853.298,53	1.355.606.682.633,72	1.377.117.031.063,52
5	Belanja Modal	327.581.965.616,15	336.369.535.045,08	361.660.184.926,61
6	Pengeluaran Pembiayaan	12.750.000.000,00	14.500.000.000,00	-
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	1.762.699.882.609,53	1.786.867.982.033,72	1.809.414.931.263,53

Sumber : Hasil Proyeksi, 2022

Setelah menghitung proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, hal yang perlu ditetapkan selanjutnya adalah kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam berbagai Kelompok Prioritas. Hasil proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 dilakukan pengalokasian berdasarkan tingkat prioritas. Pengalokasian dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja yang terdapat pada masing-masing tingkatan prioritas melalui rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah. Kebijakan dalam pengalokasian kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 adalah sebagai berikut :

1. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
2. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan program pembangunan; serta
3. Prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Mendasarkan pada kebijakan pengalokasian berdasarkan prioritas di atas, maka dapat diperoleh hasil bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Madiun yang dialokasikan untuk membiayai program yang masuk pada prioritas I rata-rata mencapai 69,13%, sedangkan dialokasikan pada prioritas II rata-rata mencapai 25,81%, dan dialokasikan pada prioritas III rata-rata mencapai 5,05%. Untuk mengetahui nilai secara lebih jelas terkait dengan rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2024 hingga 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3.19 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024 - 2026

Uraian	Proyeksi		
	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	2.090.281.848.225,68	2.123.237.517.078,80	2.171.075.116.190,13
Prioritas I	1.445.144.393.177,07	1.467.928.737.502,47	1.500.868.613.839,78
Prioritas II	539.560.571.864,65	548.067.357.699,90	560.415.588.092,59
Prioritas III	105.576.883.183,96	107.241.422.776,42	109.790.914.257,76

Sumber : Hasil Proyeksi, 2022



BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MADIUN

Permasalahan pembangunan merupakan permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan dan merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang secara riil dan aktual sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Permasalahan-permasalahan pembangunan tersebut diklasifikasikan berdasarkan sektor. Adapun permasalahan-permasalahan pembangunan Kabupaten Madiun yang tertuang dalam RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 yang dituangkan dan disajikan berdasarkan masing-masing urusan, yakni sebagai berikut.

1. Urusan Pendidikan

- a. Masih kurangnya partisipasi sekolah SD dan SMP
- b. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk masih pada kisaran kelas 2 SMP
- c. Jumlah anak putus sekolah dan rentan putus sekolah di Kabupaten Madiun mengalami peningkatan
- d. Jumlah kondisi ruang kelas dalam kondisi rusak ringan lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah ruang kelas dalam kondisi baik

2. Urusan Kesehatan

- a. Penderita HIV/AIDS diatas 20 penderita
- b. Angka Kesembuhan TBC-BTA berada pada 50%
- c. Angka Kematian Bayi meningkat
- d. Angka Kematian Ibu Meningkat
- e. Angka Kematian Balita Meningkat
- f. Penanganan kasus yang berkaitan penanganan komplikasi kebidanan mengalami penurunan pada tahun 2017 hingga 2021
- g. Persentase Desa yang sudah UCI pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan yang signifikan.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum masih termasuk belum optimal karena masih dibawah 90%;
- b. Persentase jalan lingkungan pemukiman dalam kondisi baik di kabupaten Madiun masih termasuk belum optimal karena masih dibawah 90% meskipun pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan;

- c. Panjang irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Madiun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan.
- d. Ketersediaan infrastruktur di Kabupaten Madiun masih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah Jalan, disisi lain kebutuhan peningkatan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan untuk memenuhi standar kemantapan jalan dan jalan yang berkeselamatan serta mendorong pertumbuhan di sektor lain. Untuk itu, salah satu solusi dari permasalahan ketersediaan Infrastruktur tersebut melalui percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Masih rendahnya Desa yang sudah memiliki kapasitas tangguh bencana;
- b. Masih banyaknya Kawasan dengan status rawan bencana;
- c. Penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Masih Belum Optimal karena masih dibawah 90%.

5. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Penanggulangan Bencana

- a. Masih rendahnya Desa yang sudah memiliki kapasitas tangguh bencana;
- b. Masih banyaknya Kawasan dengan status rawan bencana;
- c. Penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) Masih Belum Optimal karena masih dibawah 90%;
- d. Jumlah demo mengalami kenaikan dalam 2 tahun terakhir.

6. Urusan Sosial

- a. Jumlah PPKS cenderung meningkat;
- b. Dampak pasca pandemi mengakibatkan garis kemiskinan menurun sehingga jumlah angka kemiskinan meningkat.

7. Urusan Pengawasan Internal (Inspektorat)

- a. Persentase fungsional auditor mengalami penurunan di tahun terakhir.

8. Urusan Kesekretariatan Daerah (Sekretariat Daerah)

- a. Jumlah produk hukum yang diterbitkan mengalami penurunan di 2 tahun terakhir.

9. Urusan Tenaga Kerja

- a. Partisipasi angkatan kerja menurun signifikan;
- b. Kasus sengketa ketenagakerjaan meningkat signifikan;
- c. Tingkat pengangguran terbuka meningkat;



d. Ketidak sesuaian keahlian tenaga kerja dengan kebutuhan kualifikasi perusahaan (lack of skillness).

10. Urusan Pangan

a. Ketersediaan Bahan Pangan Kabupaten Madiun Cenderung Menurun 2 tahun terakhir.

11. Urusan Komunikasi dan Informatika

a. Jumlah Aplikasi e-Government bertambah namun belum tampak indikasi tingkat pemanfaatan aplikasi e-Gov.

12. Urusan Penanaman Modal

- a. Realisasi nilai PMDN Menurun;
- b. Efektivitas Perusahaan dalam menyerap tenaga kerja kurang efektif;
- c. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.

13. Urusan Perdagangan

- a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp) mengalami penurunan di tahun terakhir;
- b. Pengeluaran Konsumsi non pangan per kapita (Rp) mengalami penurunan di tahun terakhir.

14. Urusan Perindustrian

a. Pertumbuhan jumlah industri mengalami penurunan karena Penguatan Kapasitas, Kapabilitas, serta Kualitas IKM Belum Maksimal.

15. Urusan Perpustakaan

- a. Menurunnya jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan;
- b. Menurunnya skor audit ANRI pada kearsipan.

16. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

- a. Jumlah Koperasi Aktif Menurun secara signifikan pada tahun 2021;
- b. Tren Anggota Koperasi Menurun pada tahun 2021;
- c. Volume Usaha mengalami penurunan pada tahun 2021;
- e. jumlah simpanan mengalami penurunan pada tahun 2021;
- f. tidak aktifnya aktivitas koperasi menyebabkan penurunan jumlah Karyawan pada tahun 2021 sebanyak 507 karyawan;
- g. Tren Pertumbuhan UMKM naik secara lambat;
- h. Tren penyerapan tenaga kerja umkm tumbuh secara lambat.

17. Urusan Kepemudaan

a. Jumlah Organisasi kepemudaan menurun;

18. Urusan Pariwisata dan Kebudayaan

- a. Menurunnya jumlah festival seni dan budaya ;
- b. Jumlah Kunjungan Wisatawan mengalami penurunan.



19. Urusan Persandian

- a. Jumlah SDM Persandian Menurun.

20. Urusan Pertanian dan Peternakan Serta Perkebunan

- a. Pertumbuhan sektor pertanian pada PDRB mengalami penurunan;
- b. Produksi tanaman pangan (padi sawah) mengalami penurunan;
- c. Kontribusi sub sektor tanaman pangan terhadap PDRB mengalami penurunan;
- d. Pertumbuhan produktivitas tanaman perkebunan (Tembakau, Cengkeh;
- e. Kopi, Kelapa) dari potensi produksi mengalami penurunan;
- f. Nilai tukar petani mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir

21. Urusan Lingkungan Hidup

- a. Sampai saat ini Kabupaten Madiun terdapat total 8 TPS3R serta 121 Bank Sampah. Sementara untuk Tempat Pembuangan Sampah yang berupa container dan landasannya terdapat 34 unit. Jumlah tersebut bila dibandingkan dengan jumlah desa dan jumlah kecamatan masih kurang.
- b. Umur TPA Kaliabu diperkirakan sampai Tahun 2023. Perlu adanya alternatif lokasi TPA baru, mengingat lokasi TPA Kaliabu berdekatan dengan penetapan Kawasan Perkotaan Mejayan yang dipersiapkan menjadi Ibukota Kabupaten Madiun.

4.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Madiun berasal dari permasalahan pembangunan yang diprioritaskan untuk diselesaikan maupun dari dunia internasional, nasional maupun regional. Berikut ini disajikan isu strategis daerah yang memiliki pengaruh pada 5 (lima) tahun mendatang.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Ekonomi Digital

Ekonomi digital adalah suatu hal yang kompleks dan merupakan fenomena yang baru muncul terkait dengan aspek-aspek ekonomi mikro, ekonomi makro, dan teori organisasi dan administrasi. Ekonomi digital akan menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi beberapa dekade yang akan datang. Komponen ekonomi digital yang berhasil diidentifikasi pertama kalinya adalah industri TIK, aktivitas e-commerce antar perusahaan dan individu, distribusi digital barang-barang dan jasa-jasa, dukungan pada

penjualan-penjualan barang-barang terutama sistem dan jasa-jasa yang menggunakan internet. Di Indonesia transaksi digital semakin berkembang. Penggunaan E-banking dalam transaksi ekonomi semakin berkembang pesat. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia juga ikut bersaing dalam dunia ekonomi digital.

Revolusi Industri ke 4

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Salah satunya adalah kemunculan mesin uap pada abad ke-18. Revolusi ini dicatat oleh sejarah berhasil mengerek naik perekonomian secara dramatis di mana selama dua abad setelah Revolusi Industri terjadi peningkatan rata-rata pendapatan per kapita Negara-negara di dunia menjadi enam kali lipat.

Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet.

Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Hal ini ditunjukkan oleh Uber yang mengancam pemain-pemain besar pada industri transportasi di seluruh dunia atau Airbnb yang mengancam pemain-pemain utama di industri jasa pariwisata. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Oleh sebab itu, perusahaan harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sustainable Development Goals (SDG's)

Konsep *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan kelanjutan dari konsep *Millenium Development Goals (MDG's)*. SDGs adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs. SDG's adalah sasaran

jangka panjang bagi komunitas dunia dalam rangka mempertahankan keberlanjutan pencapaian kebutuhan dasar melalui keseimbangan pembangunan disektor ekonomi, sosial dan lingkungan. Dalam konsep ini, pertumbuhan, stabilitas dan efisiensi ekonomi tetap harus diimbangi dengan kesetaraan sosial, partisipasi masyarakat, serta terjaganya kelestarian lingkungan dalam jangka panjang untuk kembali menunjang pembangunan ekonomi di masa mendatang. SDG's berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan yang diharapkan mampu menjawab ketertinggalan pembangunan Negara-negara di seluruh dunia, baik negara maju dan negara berkembang.

Penandatanganan Peraturan Presiden No. 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menjadi titik baru pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya melalui Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDG meliputi manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang tetap digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.1 Tujuan Sustainable Development Goals



Tujuan dan sasaran dalam SDG's sebagai berikut:

1. Mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana.
2. Mengatasi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan.
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua pada segala usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan.



6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan atas air dan sanitasi untuk semua.
7. Menjamin akses ke energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif serta meningkatkan secara berkelanjutan pekerjaan penuh dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan menggiatkan inovasi.
10. Mengurangi ketimpangan di dalam suatu dan di antara negara-negara.
11. Membuat kota dan permukiman penduduk yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
12. Memastikan pola konsumsi dan pola produksi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumber daya samudera dan pesisir untuk pembangunan yang berkelanjutan.
15. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem darat, pengelolaan hutan secara lestari, memerangi dan menghentikan proses penggurunan, memulihkan degradasi lahan dan menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Meningkatkan ketenteraman masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, memberi akses keadilan bagi semua dan dibangun lembaga yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan revitalisasi kerja sama global untuk pembangunan berkelanjutan.

Secara garis besar, 17 (tujuh belas) tujuan SDGs di atas dapat dikelompokkan dalam empat pilar, yakni pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan hidup, dan *governance*. Pilar pembangunan manusia menjadi isu penting pemerintah daerah, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mencapai kesetaraan gender, serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

Gambar 4.2 Empat Pilar SDG's



Upaya pencapaian SDGs di pilar ekonomi yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas lapangan kerja untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, mendorong investasi, mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pengembangan industri dengan komoditas unggulan, memastikan ketahanan pangan. Sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan. Dari sisi infrastruktur akan mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni serta pengurangan kawasan kumuh. Membangun infrastruktur pada kawasan strategis dan pusat pertumbuhan.

Upaya pencapaian SDGs pada pilar pembangunan lingkungan hidup antara lain mengambil tindakan untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya, mengelola aset sumber daya alam secara berkelanjutan, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati, mengelola ekosistem yang berkelanjutan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sedangkan tujuan dalam bidang *governance*, upaya mencapai tujuan SDGs antara lain memastikan masyarakat dalam kondisi yang aman, tertib dan tenteram, dan membangun organisasi/tata kelola pemerintah daerah yang efektif dan akuntabel.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Indikator TPB / SDGs Kab. Tahun 2021

Tujuan	Target	Indikator RAD Prop. Jatim	Kabupaten Madiun			Jumlah Indikator Kab. Madiun
			tercapai	akan tercapai	usaha keras	
1	4	17	8	1	2	11
2	3	9	5	0	0	5
3	9	37	13	3	2	18
4	6	18	2	2	1	5
5	5	10	4	0	0	4
6	3	4	2	1	0	3
7	3	5	0	0	0	0
8	6	15	1	0	1	2
9	5	8	0	0	0	0
10	4	7	4	1	0	5
11	5	9	6	0	0	6



Tujuan	Target	Indikator RAD Prop. Jatim	Kabupaten Madiun			Jumlah Indikator Kab. Madiun
			tercapai	akan tercapai	usaha keras	
12	2	2	1	0	0	1
13	1	1	1	0	0	1
14	1	2	0	0	0	0
15	7	10	3	0	0	3
16	5	12	3	0	0	3
17	5	6	0	0	0	0
JUMLAH	74	172	53	8	6	67

Sumber : DLH Kabupaten Madiun

Kabupaten Madiun dalam mendukung Rencana Aksi Daerah SDG's Provinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2021 dapat mencapai 53 (lima puluh tiga) target SDG's pada 13 (tiga belas) TPB, sedangkan akan tercapai sebanyak 8 (delapan) target pada 5 (lima) TPB, dan perlu upaya pada 6 indikator di 4 TPB.

Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara baik di Benua Amerika, Eropa dan Asia. Adapun negara-negara ASEAN yang mengonfirmasi telah memiliki pasien positif tertular COVID-19 adalah Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Kamboja, dan Filipina. Sehingga kasus tersebut menjadi isu kesehatan dalam kancah global. Berdasarkan Data dari *World Health Organization* (WHO) per tanggal 4 Agustus 2020 jumlah konfirmasi positif COVID 19 di seluruh dunia sebanyak 18.100.204 orang. Sedangkan yang meninggal dunia mencapai 690.257 jiwa dan pada data terakhir yakni tanggal 20 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif adalah sebesar 94.963.847 orang dengan jumlah kematian mencapai 2.050.857 jiwa.

Data di atas, menunjukkan bahwa COVID-19 telah menjadi masalah krisis kesehatan global dan menimbulkan dampak bagi aktivitas internasional, seperti Pariwisata, pendidikan, sektor industri, ritel sektor jasa dan pelayanan publik yang serta ketenagakerjaan. Hal ini karena adanya kebijakan social distancing, karantina wilayah (lockdown) atau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang bertujuan untuk meredam penyebarannya COVID-19 yang sangat masif. Akibatnya roda perekonomian melambat bahkan nyaris terhenti sehingga pertumbuhan ekonomi dunia merosot bahkan menuju resesi. Tanpa perputaran aktivitas ekonomi, maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal sudah pasti terjadi baik disektor formal maupun informal.

International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dunia menurun sebesar 0,1-0,2% menjadi sebesar 3,3% pada tahun 2020. Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala



Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Laurence Boone, yang memperkirakan akan terjadinya perlambatan pada kinerja perekonomian dunia karena berkurangnya jumlah rantai pasokan dan turunnya permintaan atas komoditas. Secara Global Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) menyatakan bahwa jumlah PHK akibat pandemi COVID-19 diprediksi mencapai 195 juta orang di triwulan II-2020.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Pertemuan Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-negara Anggota G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Perancis, dan Kanada). Dalam rangka mengatasi krisis kesehatan dan menurunnya pertumbuhan ekonomi global, IMF dan Bank Dunia pun telah membantu Negara-negara dalam mengatasi dampak COVID-19. Bahkan Bank Dunia juga telah menyiapkan paket bantuan senilai Rp170 triliun untuk membantu Negara-negara dalam memerangi COVID-19. Bantuan tersebut dirancang untuk memperkuat sistem kesehatan, termasuk akses layanan kesehatan. Pembiayaan darurat, saran kebijakan, dan bantuan teknis, serta membangun instrumen untuk membantu Negara-negara dalam menanggapi krisis. Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penyakit dan mengurangi dampak pada ekonomi di sektor swasta.

Situasi di atas menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 telah memicu kekhawatiran yang luar biasa bagi perekonomian dunia, bahkan apa yang dikhawatirkan dapat membuat dunia masuk ke jurang resesi ekonomi pada saat ini sudah tidak bisa dihindari. Banyak negara-negara di Eropa, Amerika dan Asia yang saat ini sudah secara resmi menyatakan Resesi. Sehingga Kerja sama internasional perlu dilakukan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

Bentuk kerja sama yang dilakukan pada saat ini yakni dengan mengusahakan pengembangan vaksin. Pengembangan vaksin yang dilakukan oleh perusahaan maupun lembaga riset membutuhkan dana yang besar dan hal tersebut perlu diupayakan melalui kerja sama internasional. WHO juga terus bekerja sama dengan semua negara dan jaringan pakar untuk mengkoordinasikan respons internasional, berbagi pengetahuan dan informasi serta membantu mendistribusikan persediaan yang dibutuhkan. Kemudian WHO juga telah menerbitkan panduan terkait COVID-19 berikut pedoman teknis yang sudah diperinci sehingga masing-masing negara dapat mengembangkan rencana aksi nasionalnya. Kerja sama internasional menjadi suatu keharusan untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Kendatipun demikian Kerja sama internasional yang dibutuhkan harus melibatkan banyak

pihak. Pihak yang terlibat dalam kerja sama tidak hanya antar-pemerintah, tetapi juga antar-peneliti, antar-akademisi, bahkan antar-parlemen dalam rangka menjaga kelangsungan hidup manusia dan stabilitas ekonomi global.

Pemerintah Indonesia pertama kali mengumumkan adanya warga Negara yang konfirmasi positif COVID-19 yaitu pada tanggal 2 Maret 2020. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pada tanggal 4 Agustus 2020, jumlah konfirmasi positif COVID-19 terus mengalami peningkatan hingga mencapai 115.000 orang dengan jumlah yang meninggal dunia sebanyak 5.388 orang. Sedangkan berdasarkan data tanggal 19 Januari 2021 jumlah terkonfirmasi positif telah mencapai angka 927.380 orang dengan angka kematian 26.590 jiwa. Berbagai upaya dan langkah strategis dalam rangka mencegah dan meminimalisir penyebaran COVID-19 di seluruh wilayah Indonesia sejak awal telah dilakukan oleh pemerintah.

Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19). Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuan dibentuknya Gugus Tugas yaitu: (a) meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; (b) mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah; (c) meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19; (d) meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan (e) meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.

Penyebaran Virus COVID-19 pada bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 semakin masif, sehingga jumlah orang yang terkonfirmasi positif dan yang meninggal dunia akibat COVID-19 semakin banyak. Melalui Gugus Tugas, pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan melakukan gerakan social distancing yang bertujuan untuk meredam penyebarannya COVID-19 untuk daerah-daerah yang memiliki jumlah kasus epidemi dan penularan serta kematian tinggi. Kebijakan tersebut tentunya sangat tepat dilakukan untuk memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat, karena pemerintah juga memastikan adanya jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan miskin pada saat kebijakan tersebut dijalankan. Untuk menangani dampak krisis, pemerintah telah memutuskan untuk mengalokasikan anggaran sebesar 110 triliun rupiah untuk program-program JPS yang mencakup, antara lain, bantuan sosial, percepatan pelaksanaan Kartu Pra Kerja, dan pemotongan tagihan

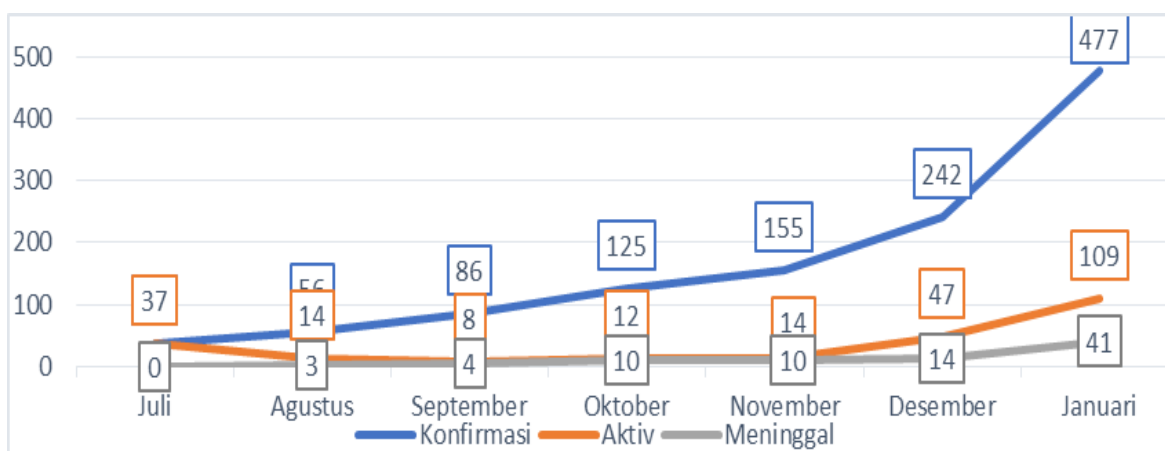


listrik. Program JPS ini diharapkan dapat menjadi stimulus ekonomi bagi kelompok 40% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah dan kelompok-kelompok lain yang paling terdampak krisis akibat pandemi COVID-19. Namun disisi lain kebijakan tersebut berdampak pada roda perekonomian yang melambat bahkan nyaris terhenti sehingga pertumbuhan ekonomi nasional merosot bahkan menuju resesi.

Pemerintah, menjelaskan bahwa selain menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar, COVID-19 juga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada delapan dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia, mulai dari Tenaga kerja hingga kinerja industri di Tanah Air. Dampak ini secara masif telah meluluh lantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia yang akhirnya juga berdampak pada menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan jumlah penduduk miskin/persentase kemiskinan. Selain itu sektor jasa khususnya Pendidikan juga terkena dampak COVID-19. Sejak adanya COVID-19 Pemerintah Indonesia mengambil keputusan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas. Aktivitas perkantoran juga banyak dilakukan pembatasan dan dilakukan secara daring.

Kabupaten Madiun sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa timur yang juga terkena dampak Pandemi Covid-19. Awal Pandemi Covid-19 terjadi di Kabupaten Madiun pada bulan Juli 2020 dan mengalami puncak kasus penularan COVID-19 pada akhir tahun 2020. Berikut data perkembangan jumlah kasus COVID-19 di Kabupaten Madiun:

Grafik 4.1 Perkembangan jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Tahun 2022

Gambar di atas menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan pada bulan Desember tahun 2020 dan Januari tahun 2021 Sehingga pada tanggal 28 Desember 2020 Kabupaten Madiun masuk ke dalam zona merah



atau zona wilayah risiko tinggi penularan Covid-19 dengan jumlah kasus konfirmasi pada bulan Januari 2021 sebanyak 477 orang, aktif 109 orang dan yang meninggal sebanyak 41 orang. Kondisi tersebut meningkat tajam dibandingkan pada bulan Juli tahun 2020 kasus konfirmasi positif berada pada angka 37 orang dengan korban meninggal 0, pada bulan Agustus jumlah kasus aktif menurun pada angka 14 orang sedangkan kasus meninggal 3 orang, pada bulan September kasus aktif mengalami penurunan menjadi 8 orang sedangkan kasus meninggal meningkat menjadi 4 orang, pada bulan Oktober kasus aktif meningkat pada angka 12 orang dan untuk kasus meninggal meningkat menjadi 10 orang, pada bulan November kasus aktif mengalami peningkatan cukup kecil menjadi 14 orang sedangkan kasus meninggal menunjukkan angka yang stagnan pada angka 10 orang. Namun pada bulan Desember angka kasus aktif mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 47 sedangkan jumlah meninggal menjadi 14 orang. Jumlah kasus yang melonjak tinggi pada bulan Desember hingga Januari dapat diasumsikan adalah akibat kurang disiplinnya masyarakat terhadap protokol Kesehatan, sehingga melakukan kontak antar individu. Selain itu juga disebabkan oleh arus mudik dan liburan tahun baru mengingat beberapa klaster persebaran merupakan kontak dari luar Kabupaten Madiun dan lembaga pendidikan non formal/ pondok pesantren.

Adanya Pandemi COVID 19 berdampak terhadap asumsi pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan pajak dan retribusi. Pendapatan Asli Daerah tahun 2020 memiliki target awal sebesar 219 miliar namun mengalami pergeseran menjadi 183 miliar. Selain itu untuk perubahan Anggaran Keuangan memiliki besaran 215 miliar. Hal ini dikarenakan banyak anggaran untuk pembangunan khususnya infrastruktur yang terkena pemotongan dan pengalihan fungsi untuk penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terkena dampak langsung dan keluarga kurang mampu. Bahkan anggaran dana desa juga tidak lagi diarahkan untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa melainkan kegunaannya diarahkan untuk jaring pengaman sosial (JPS) bagi masyarakat desa.

Dampak pada bidang pendidikan, proses belajar mengajar dilakukan secara daring, uang saku yang sebelumnya diberikan kepada anak dialokasikan untuk biaya internet. Hal ini tentu cukup menjadi beban bagi keluarga yang kurang mampu, selain itu anak usia dini yang belum mampu menggunakan gadget untuk pembelajaran serta membutuhkan dampingan dalam proses belajar mengajar mengharuskan orang tua untuk menggantikan

posisi guru, bagi keluarga yang kedua orang tuanya bekerja maka akan kesulitan terutama bagi anak yang telah kehilangan salah satu maupun kedua orang tuanya. Dampak ekonomi secara luas mengakibatkan penurunan pendapatan baik pada sektor usaha besar maupun kecil, adapun jumlah tenaga kerja yang di PHK atau dirumahkan akibat COVID-19 sebanyak 237 orang, selain itu adanya PPKM dan PSBB juga berdampak terhadap sektor pariwisata, salah satunya adalah Wisata Umbul Square yang harus ditutup sedangkan dalam pengelolaan dan pemeliharaan satwa memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga pihak pengelola membuka sumbangan atau donasi untuk kelangsungan hidup satwanya.

Aspek sosial dan keamanan mengalami kondisi yang cukup rawan di mana kondisi pandemi COVID 19, pembatasan sosial dan kegiatan masyarakat, menurunnya pendapatan dan perekonomian masyarakat, PHK, dan lain sebagainya dapat memaksa kalangan kecil untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Selain itu rasa takut terhadap adanya penularan antar warga berdampak pada menurunnya keharmonisan masyarakat. Dampak dari COVID 19 secara tidak langsung menjadi lingkaran yang dapat menjebak masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi ancaman utamanya. Oleh karenanya COVID 19 harus dapat di selesaikan dengan cepat dan tepat.

Pemerintah Kabupaten Madiun pada tahun 2020 telah melakukan refocusing anggaran sebesar 30.894.884.709 dalam upaya percepatan penanganan COVID-19, langkah ini sejalan dengan kebijakan nasional di mana refocusing anggaran dilakukan dengan menunda atau membatalkan kegiatan-kegiatan yang tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas. Realokasi dilakukan di antaranya untuk pengadaan alat kesehatan, obat-obatan, pengadaan APD, pengadaan rapid test/tes cepat COVID-19, pengadaan fasilitas penunjang dalam penanganan COVID-19 seperti halnya Alat cuci tangan, Sanitizer, Thermo Scanner, Masker, Sarung tangan dan lain sebagainya.

Langkah-langkah lain dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Madiun yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim COVID Hunter Polres Madiun, Tim ini didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan dan pengetatan protokol kesehatan dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Penanganan COVID 19 untuk melaksanakan 3T (test, tracking dan treatment);

2. Penyemprotan Rumah keluarga OTG, tidak hanya penyemprotan saja namun Pemerintah Kabupaten Madiun memberikan paket sembako, hand sanitizer dan masker untuk keluarga pasien berstatus OTG;
3. Tracing pasien positif berdasarkan kluster penyebaran, terdapat beberapa kluster yang menyumbang jumlah penyebaran COVID-19;
4. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini dilakukan menyusul kebijakan Nasional dan Provinsi yang melakukan upaya tersebut.
5. Penambahan Fasilitas Kesehatan, Beberapa rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun mengupayakan peningkatan fasilitas dan kamar untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID 19. Adapun rumah sakit rujukan COVID 19 di Kabupaten Madiun adalah RSUD Caruban. Jl. Ahmad Yani No.KM2, Caruban, Ngampel, Kecamatan Mejayan dan RSUD Dolopo. Jl. Raya Dolopo – Ngember No.117, Krajan, Dolopo, Kecamatan Dolopo.

Atas dasar di atas maka Pemerintah Kabupaten Madiun ke depan perlu melakukan penyesuaian terhadap berbagai kebijakan baik dalam aspek penganggaran maupun perencanaan pembangunan sebelumnya yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

4.2.2 Isu Strategis Regional

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA adalah salah satu bentuk kerja sama antar anggota ASEAN dalam bidang perekonomian. Polanya adalah dengan mengintegrasikan sistem ekonomi semua negara dengan menciptakan perdagangan bebas. Tujuan dari MEA adalah agar semua negara anggota memiliki tingkat perekonomian yang sama sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan. Program ini diharapkan bisa meningkatkan kemampuan negara agar lebih maju, MEA dipersiapkan untuk mewujudkan tujuan wawasan ASEAN 2020.

Ciri-ciri sistem MEA di beberapa negara ASEAN :

1. Pembangunan bidang ekonomi yang merata

Pengertian MEA memiliki tujuan agar tiap negara memiliki kesempatan yang sama dalam perdagangan. Jadi tidak hanya negara maju saja yang bisa mengembangkan ekspansinya, yang masih berkembang pun memiliki kesempatan yang sama. Ini akan menciptakan suasana yang saling melengkapi.



2. Ekonomi bersifat kompetitif

Karena fungsi dari MEA adalah mewujudkan perdagangan yang bebas, maka kompetisi yang diciptakan pun semakin pesat karena setiap negara memiliki kesempatan yang sama dan bebas mengembangkan kerja sama ekonomi. Inilah yang dinamakan integrasi yang mana industri bisa mengembangkan pasar tanpa batasan negara. Karena itulah negara harus memiliki modal yang cukup agar menginspirasi dampak dari MEA.

3. Daerah ekonomi terintegrasi

Dengan adanya program ini dijelaskan bahwa setiap anggota memiliki kebebasan cukup besar untuk mengembangkan pasar. Ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa negara berkembang untuk memperkenalkan produk terbaiknya ke berbagai negara. Dengan begitu maka pemerataan ekonomi bisa tercapai. Untuk persiapan harus dilakukan sedari dini agar di tahun 2020 sudah diketahui tindakan yang akan dilakukan.

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Perekonomian Jawa Timur

Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional, dilakukan percepatan pembangunan atas Kawasan Selingkar Wilis. Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Selingkar Wilis dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan. Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan ekonomi di kawasan Selingkar Wilis Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Selingkar Wilis merupakan rencana jangka menengah dengan jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun yaitu mulai tahun 2020 - 2024. Sedangkan untuk pembiayaan direncanakan bersumber dari beberapa skema antara lain: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; (c) Badan Usaha Milik Negara; (d) Badan Usaha Milik Daerah; (e) Skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha; (f) Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA); (g) Swasta; dan (h) Sumber pembiayaan lain yang sah.

Dalam rangka mendukung realisasi Rencana Induk Pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan ekonomi dengan memberikan fasilitas khusus pada program/ proyek yang termasuk dalam daftar program/ proyek yang terdapat pada

lampiran dokumen ini. Fasilitas yang diberikan keistimewaan dalam perizinan dan non-perizinan, pengadaan barang/jasa pemerintah, pengadaan tanah, kandungan lokal, debottlenecking, tata ruang, dan jaminan pemerintah.

Adapun program atau proyek untuk pengembangan kawasan selingkar Wilis dan selatan khususnya untuk Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

- a. Pelebaran Jalan Nasional (Ring 2) di Kawasan Selingkar Wilis
- b. Pelebaran dan Perbaikan geometri jalan Selingkar Wilis (Ring 1)
- c. Pengembangan Kakao, Sarana Pengolahan Kakao dan Kopi Arabika serta Sarana Pengolahan Kopi
- d. Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Jeroan
- e. Pembangunan Tanggul dan Normalisasi Sungai Madiun
- f. RKI Madiun
- g. Program Dewi Cemara
- h. Program Agropolitan Selingkar Wilis
- i. Program Pengembangan Minapolitan Selingkar Wilis

4.2.3 Isu Strategis Nasional

Bonus Demografi

Transisi demografi sangat menguntungkan ketika penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) mengalami jumlah terbesar dibandingkan dengan proporsi penduduk usia non-produktif. Karena pada proporsi penduduk ini, terdapat suatu keuntungan yang bisa dinikmati oleh suatu negara sebagai batu loncatan untuk memajukan negara yang bersangkutan. Di dalam ilmu demografi, kondisi ini disebut Bonus Demografi. Dan Indonesia diprediksi akan mengalami Bonus Demografi pada tahun 2020-2030 yang akan datang.

Bonus demografi ini tentu akan membawa dampak sosial-ekonomi. Salah satunya menyebabkan tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Hal ini sejalan dengan laporan PBB, yang menyatakan bahwa dibandingkan dengan negara Asia lainnya, angka ketergantungan penduduk Indonesia akan terus menurun sampai 2020.

Dengan adanya kondisi bonus demografi, tentu bisa menjadi peluang bagi Indonesia untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat apabila masyarakat usia produktif memiliki kualitas sumber daya yang dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara. Apabila suatu negara gagal dalam memanfaatkan bonus demografi ini maka,

jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan khususnya Indonesia. Maka dari itu, untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama dari seluruh lapisan masyarakat dan lembaga terkait serta pemerintah sebagai *agent of development* yang ada di suatu negara agar manfaat bonus demografi ini menjadi semakin kuat.

Inovasi Daerah

Dasar hukum secara umum tentang inovasi daerah diatur di dalam tiga bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 Tentang Penilaian Dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Dimana Pemerintah Daerah mempunyai hak dan wewenang untuk membuat inisiatif sendiri, mengelola, dan mengoptimalkan potensi sumber daya, serta mengatur arah pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi sebagai bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. Peningkatan Pelayanan Publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan Daya Saing Daerah

Bentuk inovasi daerah meliputi inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi pelayanan publik, inovasi daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kriteria inovasi daerah meliputi mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dapat direplikasi. Dalam perjalanan mewujudkan visi dan misi daerah, banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi, diantaranya:

- a. Adanya perubahan peraturan-perundangan yang begitu cepat, yang menuntut pemerintah daerah untuk segera dapat menyesuaikan perubahan dimaksud;
- b. Dinamika perubahan di masyarakat, yang menuntut pemerintah wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

c. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bencana pandemi covid-19, yang pada akhirnya berimbas pada pembiayaan secara keseluruhan, jauh dari kondisi ideal seperti pada tahun-tahun sebelumnya,

Pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia telah memberikan kita banyak pembelajaran, pandemi juga mengubah perilaku dan pola hidup kita, tidak terkecuali pula pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk perwujudan visi dan misi daerah harus tetap berjalan.

Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian ke depan, antara lain :

- a. Menekankan pentingnya kepada seluruh OPD untuk selalu berinovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimulai dengan berpola pikir kreatif dan inovatif sebagai salah satu bentuk penyelesaian berbagai permasalahan yang timbul, menggunakan prinsip-prinsip inovasi, yaitu, peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, berorientasi kepada kepentingan umum, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya serta tidak untuk kepentingan diri sendiri,
- b. Mengelola inovasi dengan baik, mendokumentasikan dan mempublikasikan inovasi, supaya diketahui oleh masyarakat umum sebagai bentuk pelayanan publik, yang akan berujung pada peningkatan daya saing daerah,
- c. Sinergi pentahelix lebih di per erat. kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta dengan tujuan pembangunan yang berkesinambungan,
- d. Aksi-aksi nyata oleh agen-agen perubahan yang dihasilkan setiap tahun melalui pendidikan pelatihan, dalam melakukan perubahan pada tata kelola pemerintahan
- e. Memaksimalkan penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi, sebagai bentuk konsistensi mulai dari perencanaan hingga pelaporan hasil,
- f. Mengambil peran dalam media sosial sebagai kekuatan baru, dalam mempublikasikan hasil-hasil pembangunan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal

atau disingkat SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintah wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintah wajib yang diselenggarakan pemerintah. Urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas :

1. Pendidikan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pendidikan kesetaraan

2. Kesehatan

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Pemenuhan kebutuhan air minum sehari – hari
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah

5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan informasi rawan bencana
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- d. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban bencana
- e. Pelayanan penyelamatan dan evaluasi korban

6. Sosial

Layanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) terdiri dari :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang – kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan /atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Telaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Merujuk terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dijelaskan bahwa kewenangan pemerintah pusat dan daerah ditafsirkan melalui otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Kebijakan desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah, untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Terlepas dari hal tersebut berjalannya pemerintahan daerah tetap dalam pengawasan dan tanggung jawab pemerintah pusat. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah juga harus tetap memperhatikan isu yang terjadi di nasional serta daerahnya sehingga harus terjadi sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik dalam hal perencanaan sampai evaluasi sehingga apa yang dijalankan bisa tepat sasaran sesuai dengan apa yang direncanakan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebutkan bahwa menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Mengacu terhadap prinsip tersebut, maka dalam penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Madiun 2018-2023 penting untuk memperhatikan RPJM Nasional.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di

berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Seperti yang kita tahu RPJM Nasional merupakan representasi dari fokus pembangunan pemerintah yang diwujudkan dalam 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua. Di dalam RPJM Nasional 2020-2024 telah ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Gambar 4.3 Visi dan Misi RPJMN 2020-2024



Sumber: Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020: Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi RPJMN Tahun 2020-2024 serta Visi 2045 maka Presiden mengeluarkan lima arahan yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Madiun dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan pembangunan sepanjang tahun 2021 hingga tahun 2023.

Adapun Kelima arahan Presiden adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan SDM. Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter.
2. Pembangunan Infrastruktur. Pembangunan yang meliputi: (1) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (2) Infrastruktur Ekonomi; (3) Infrastruktur Perkotaan; (4) Energi dan Ketenagalistrikan; dan (5) Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Digital
3. Penyederhanaan Regulasi. Strategi untuk arahan penyederhanaan regulasi dilihat dari dua pendekatan, yaitu pendekatan *Omnibus Law* dan pendekatan terhadap Regulasi yang akan disusun.
4. Penyederhanaan Birokrasi. Penyederhanaan Birokrasi dilihat dari tiga pendekatan yaitu (1) Penyederhanaan prosedur; (2) Penyelenggaraan E-Government; dan (3) Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik untuk kegiatan Ekspor/ Impor.
5. Transformasi Ekonomi. Dapat dilakukan melalui: (1) Industrialisasi; (2) Pengembangan destinasi unggulan; dan (3) Penguatan ekonomi kreatif dan digital.

Kabupaten Madiun dalam melakukan perubahan RPJMD tahun 2018-2023 selain harus memperhatikan Visi dan Misi serta lima arahan presiden juga akan mengarahkan program percepatan pembangunan yang sejalan dengan tujuh agenda pembangunan yang tertuang di dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Hal tersebut sangat penting sebagai upaya untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan provinsi Jawa Timur.

Adapun ketujuh agenda pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing.



2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan harmonisasi rencana pembangunan dan pemanfaatan ruang.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi Mental sebagai gerakan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Negara wajib hadir dalam melayani dan melindungi segenap bangsa, serta menegakkan kedaulatan negara.

Selanjutnya di dalam RPJMN 2020-2024 juga telah ditetapkan 4 (empat) Pengarusutamaan (mainstreaming) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan tiga dimensi (sosial, ekonomi dan lingkungan).

2. Gender

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta

pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

3. Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tujuh agenda pembangunan dan empat Pengarusutamaan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka di dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan arah dan karakteristik pembangunan berbasis wilayah. Kabupaten Madiun sebagai salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur maka akan dan harus menyesuaikan dengan arah pembangunan provinsi Jawa Timur yang tergabung di dalam wilayah atau Kawasan Jawa Bali. Wilayah Jawa-Bali diarahkan menjadi pusat industri dan jasa nasional, sebagai lumbung pangan nasional dan menjadi salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia. Dalam lima tahun mendatang, pembangunan wilayah Jawa yang relatif maju dan berkembang diarahkan untuk memantapkan peran sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dengan bertumpu pada industri manufaktur, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, penghasil produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan teknologi tinggi menuju industri 4.0, serta pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE. Pembangunan wilayah Jawa akan bertumpu pada peran swasta yang semakin besar dengan dukungan fasilitasi pemerintah secara terpilih untuk menjamin terciptanya iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Dalam lima tahun ke depan (2020-2024), pembangunan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Adapun target pembangunan yang ditetapkan untuk Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:



Tabel 4.2 Target Pembangunan Yang Ditetapkan Provinsi Jawa Timur

Provinsi	Indikator Pembangunan	TAHUN						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jawa Timur	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,50	5,50	5,60	5,80	6,00	6,10	6,20
	Tingkat Kemiskinan (%)	10,98	10,37	10,08	9,71	9,29	8,70	8,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,99	3,92	3,60	3,40	3,20	2,80	2,50

Sumber: RPJMD Prop Jawa Timur Tahun 2020-2024

Dalam rangka mencapai target pembangunan di atas, maka Pemerintah menetapkan program prioritas pembangunan di provinsi Jawa Timur melalui upaya:

1. Pembangunan SDM

Terdapat tiga strategi untuk mewujudkan Pembangunan SDM meliputi: (1) Layanan Dasar dan perlindungan sosial; (2) Produktivitas; dan (3) Pembangunan Karakter. Pembangunan SDM untuk wilayah provinsi Jawa Timur terfokus pada Peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan, industri dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja. Hal tersebut harus didukung dengan terhubungnya pendidikan dengan dunia kerja atau industri, oleh karenanya dalam RPJMN 2020-2024 merencanakan pengembangan perguruan tinggi yang memiliki prodi vokasi dilakukan di 275 perguruan tinggi yang mendukung sektor industri yaitu (Ekonomi Kreatif, industri, manufaktur, otomotif, tambang, perkapalan, konstruksi, pariwisata dan pertanian);

2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing

Penguatan struktur ekonomi yang produktif mandiri dan berdaya saing memiliki makna di mana sektor ekonomi dapat menghasilkan pendapatan atas dasar kemampuannya sendiri serta memiliki daya saing tinggi di hadapan kompetitor baik di dalam maupun di luar negeri hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat posisi laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur masih di angka rata-rata 5-6 dan masih di bawah beberapa daerah lain di pulau Jawa sehingga perlu ada perhatian khusus untuk mengatasi keteringgalan ini. Untuk sektor unggulan yang harus dan bisa dikembangkan serta memiliki daya saing di Provinsi Jawa Timur yaitu tebu, kopi, lada, pala, cengkeh, garam, perikanan tangkap dan budidaya.

3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan yang merata dan berkeadilan merupakan isu yang setiap tahunnya selalu menjadi topik utama dalam perencanaan pembangunan nasional mengingat letak geografis dan unsur yang lain yang menjadi

permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan yang merata sehingga dalam RPJMN 2020-2024 pemerintah pusat mencanangkan Pemberian bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran melalui Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Sehat untuk mencapai target kemiskinan tahun 2024 yaitu 8,30 persen di Jawa Timur. Pada saat ini angka kemiskinan di provinsi Jawa Timur berada pada rata-rata di angka 10, sehingga penanganan kemiskinan juga menjadi perhatian dalam pembangunan merata dan berkeadilan sehingga isu kemiskinan sejalan dengan pembangunan yang merata dan berkeadilan.

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas: (a) Borobudur disekitarnya, (b) Bromo- Tengger-Semeru, dan (c) Revitalisasi Bali;
2. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng;
3. Pembangunan Science Techno Park (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas);
4. Revitalisasi Kilang Minyak: (a) Balongan, (b) Cilacap; dan (c) Pembangunan Kilang Baru Tuban;
5. Pembangunan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di Wilayah Metropolitan: Metropolitan (a) Jakarta, (b) Bandung, (c) Semarang, dan (d) Surabaya;
6. Pembangunan Rumah Susun Perkotaan (1 Juta): (a) Provinsi DKI Jakarta, (b) Provinsi Jawa Barat, (c) Provinsi Jawa Tengah, dan (d) Provinsi Jawa Timur;
7. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusunan program prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Madiun yang tertuang di dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023 mengacu pada RPJM Nasional Tahun 2020-2024 khususnya yang berkaitan dengan arah pembangunan dan target pembangunan tahun 2020-2024 untuk provinsi Jawa Timur.

4.2.4. Isu Strategis Provinsi

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur dalam 5 tahun terakhir menunjukkan kinerja yang selalu meningkat bahkan melebihi pertumbuhan ekonomi Nasional. Gejolak perekonomian global yang terjadi mulai tahun 2014 serta pandemi Covid-19 mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional termasuk juga pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi tersebut selayaknya juga diikuti dengan kualitas pertumbuhan yang berpengaruh signifikan terhadap

penurunan kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka dan penurunan disparitas antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi selanjutnya juga diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia yang diindikasikan dari meningkatnya nilai IPM. Berdasar beberapa indikator tersebut kualitas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur berada pada kategori "memuaskan".

Telaah RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran visi, misi, dan program-program kepala dan wakil kepala daerah. Arah Pembangunan dalam RPJMD tentunya mengacu pada sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025 dan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Hal ini dikarenakan pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional. Berdasarkan arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur 2005-2025, maka Visi Misi yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong”

MISI

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi, pemerintah Provinsi Jawa Timur di dalam dokumen RPJMD menetapkan program prioritas sebagai rencana aksi yang tertuang di dalam Nawa Bakti Satya yaitu:

1. Jatim Sejahtera.

Fokus utama dari bakti ini adalah berupa Program Keluarga Harapan Plus. Berupa insentif yang lebih komprehensif dalam pengentasan penduduk miskin, penyandang disabilitas, lansia terlantar, perempuan, keluarga rentan. Mengembangkan konsep pengembangan wilayah terpadu berbasis potensi komunitas pada wilayah 3 T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Dan mengurangi beban terhadap 26 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui skema Provinsi Jawa Timur.

2. Jatim Kerja.

Fokus pada Milenial Job Center dengan cara memberikan job training, pendidikan vokasi, membantu starting-up usaha, membantu promosi bagi usahawan muda, dan membantu pembiayaan usaha pada tahap awal usaha.

3. Jatim Cerdas dan Sehat.

Pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas Tis-Tas (Gratis dan Berkualitas) dengan memperluas cakupan bantuan siswa miskin, bantuan biaya sekolah, dana insentif operasional akreditasi, tunjangan kinerja bagi guru tidak tetap. Kemudian tunjangan PLK, SMK jurusan prioritas (kelautan, teknologi pertanian, pariwisata).

4. Jatim Akses.

Jatim Akses, yang akan menjawab tantangan pengembangan wilayah di Jawa Timur. Bhakti Jatim Akses fokus kepada Sapto Karso (tujuh koridor) yaitu: 1) Koridor Maritim dan Logistik di Tuban-Gresik-Bangkalan-Sumenep (Jalur Utara); 2) Koridor Industri Agro di Tuban-Madiun-Magetan-Pacitan (Jalur Utara-Selatan sisi Barat); 3) Koridor Pariwisata dan Maritim Perikanan di Pacitan-Prigi Sendang Biru-Jember-Banyuwangi (Jalur Selatan); 4) Koridor Pengembangan Kota Menengah di Madiun-Nganjuk-Kediri-Jombang-Pasuruan-Situbondo (Jalur Tengah dan Utara Tapal Kuda); 5) Koridor Megapolitan di Surabaya-Malang; 6) Koridor Logistik Maritim dan Pariwisata di Banyuwangi-Situbondo-Sumenep (Jalur Utara-Selatan sisi Timur); dan 7) Koridor Pengembangan Kota Menengah Kompak (Smart and Compact) di Magetan-Trenggalek-Tulungagung-Malang (Dampit) – Lumajang – Jember – Banyuwangi (Kalibaru) (Jalur Tengah).



5. Jatim Berkah.

Memberi tunjangan kehormatan bagi penjaga situs budaya dan tempat peribadatan di kampung, pesisir, dan pulau terluar. Mendorong kesalehan dan tanggung jawab sosial masyarakat dan dunia usaha dengan membangun karakter masyarakat yang berbasis nilai-nilai kesalehan sosial, budi pekerti luhur. Selanjutnya mendorong tersedianya ruang publik yang ramah anak, lansia dan orang-orang berkebutuhan khusus.

6. Jatim Agro.

Komitmen pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian sebagai pilar kedaulatan pangan. Ini diwujudkan dengan menghadirkan negara dalam upaya peningkatan produktivitas dan produksi sektor pertanian serta dalam mewujudkan tata niaga yang lebih adil bagi para petani.

7. Jatim Berdaya.

Bertujuan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbasis UMKM, koperasi, dan mendorong pemberdayaan pemerintahan desa. Restorasi desa dengan mendorong semangat gotong royong melalui pemberdayaan pemerintah Desa dan BUMDesa serta insentif Inovasi Desa.

8. Jatim Amanah.

Menyelenggarakan Pemerintahan yang Bersih, anti korupsi dalam hal penggunaan uang negara baik dari segi pendapatan maupun pembelanjaan, serta dalam penentuan kebijakan termasuk perizinan, dan juga penempatan jabatan.

9. Jatim Harmoni.

Komitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, serta perwujudan kelestarian lingkungan hidup. Pada kaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati, ini terwadahi dalam suatu pendekatan pembangunan berkelanjutan (sustainable development), di mana pembangunan berbasis ruang dan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan salah satu aspek kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut. Pengembangan pariwisata budaya (tradisional dan kontemporer) dan *eco-tourism* tingkat Internasional, integrasi museum perpustakaan dan galeri seni, ruang kebhinekaan, seni tradisional, *clean industries*, *green city*, *halal tourism*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk pencapaian Visi dan Misi serta Nawa Bhakti Satya di atas, telah menetapkan arah kebijakan pembangunan Tahun 2019-2024 yang selaras dan sinergi dengan 5 (lima) Sasaran Prioritas nasional tahun 2020-2024 yaitu:

1. **Infrastruktur.** Terwujudnya konektivitas dengan kawasan produksi rakyat sehingga adanya infrastruktur di sini dapat memperlancar usaha masyarakat mulai dari produksi hingga sampai konsumsi. Terdapat enam fokus dalam program prioritas infrastruktur SDM meliputi: (a) Industri Kecil; (b) Ekonomi Khusus; (c) Pariwisata; (d) Persawahan; (e) Perkebunan; dan (f) Tambak Perikanan.
2. **Sumber Daya Manusia.** Jika disesuaikan dengan arah kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Timur tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas SDM meliputi: (a) Kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan anak usia sekolah; (b) Pendidikan vokasi (ketrampilan); dan (c) Lembaga manajemen talenta (diaspora).
3. **Investasi.** Investasi terbuka untuk membuka lapangan kerja di mana peran investasi ini akan mendorong terwujudnya modal usaha-usaha baru serta membantu mengembangkan kemampuan perusahaan untuk ke depannya dan berdampak pada terbukanya lapangan kerja jika usaha-usaha/industri mengalami kondisi yang stabil ataupun terjadi surplus. Terdapat dua fokus dalam program prioritas investasi meliputi: (a) Percepat proses perijinan; dan (b) Hilangkan semua hambatan.
4. **Reformasi Birokrasi.** upaya yang dilakukan oleh pemerintah guna memperbaiki dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga birokrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dapat profesional, berintegritas, bersih dan bebas KKN serta memberikan pelayanan prima dan berkeadilan. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas Reformasi Birokrasi meliputi: (a) Struktural, (b) Mindset dan (c) Monitoring dan Evaluasi.
5. **Penggunaan APBN.** Fokus dan tepat sasaran untuk memberi manfaat sebesar-besarnya kepada rakyat. Terdapat tiga fokus dalam program prioritas infrastruktur SDM meliputi: (a) Manfaat ekonomi; (b) Manfaat sosial; dan (c) Kesejahteraan.



Terkait perumusan kebijakan kewilayahan, pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menetapkan kebijakan atau arah pembangunan kewilayahan mendasarkan pada faktor sosial dan ekonomi kabupaten/kota, yang meliputi pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk miskin dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan kewilayahan ini merupakan keterpaduan pembangunan antar sektor guna menciptakan daya saing daerah sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Madiun di dalam proses penyusunan arah kebijakan dan program prioritas di dalam perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 juga telah menyelaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yaitu sebagai Kawasan yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Industri Agro. Hal ini sejalan dengan tiga poros pengembangan investasi dan industri yaitu: Poros Gresik – Lamongan – Tuban, Poros Jombang – Nganjuk – Madiun – Ngawi, dan Poros Probolinggo – Situbondo – Banyuwangi. Ketiga poros ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru dengan memanfaatkan infrastruktur (jalan, pelabuhan, bandara, sumber daya air dan energi), kawasan industri, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Tujuan utama dari kebijakan kewilayahan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan cakupan pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan), pengembangan peningkatan sektor unggulan (pengurangan kemiskinan) dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

Dalam rangka pengembangan wilayah, maka potensi daerah sangat berpeluang untuk dikembangkan dengan berbasis klaster kewilayahan. Klaster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan klaster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan Agenda Pembangunan Tahun 2019-2024 yang difokuskan pada pemerataan pembangunan melalui penciptaan pusat-pusat pertumbuhan dengan peningkatan dan penyediaan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan pemetaan dan pembagian klaster kewilayahan, Kabupaten Madiun tergabung dalam klaster Wilis Utara bersama Kabupaten Ngawi, Kota Madiun, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Jombang, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Kediri dan Kota Kediri. Klaster ini terbentuk karena kesamaan sektor unggulan yaitu sektor pertanian dan kehutanan. Sehingga dalam proses perencanaan dan pembangunan di Kabupaten Madiun,

telah memperhatikan dan menjalin sinergitas dengan wilayah sekitar yang berada di klaster Wilis Utara. Untuk pengembangan Klaster Wilis Utara diarahkan sebagai berikut:

1. Aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia. Diperlukan adanya pendampingan terhadap Sumber Daya Manusia ataupun pengelolaan potensi Sumber Daya Alamnya. Pendampingan tersebut haruslah berkelanjutan karena menghindari perubahan sosial budaya yang sangat cepat. Beberapa alternatif kebijakan yang diarahkan untuk pengembangan aspek Sosial dan Sumber Daya Manusia di antaranya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan fasilitas kesehatan; Peningkatan akses layanan pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil; dan Perluasan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara optimal melalui pengembangan kegiatan ekonomi wilayah berbasis komoditas unggulan;
2. Aspek Ekonomi. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor primer melalui hilirisasi produk unggulan dan pembangunan inkubator ekonomi (anjungan cerdas); Perluasan pemasaran produk dengan upaya mewujudkan keterkaitan pasar lokal dengan pasar regional; dan Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber pendanaan untuk meningkatkan akses terhadap produksi, teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan; dan
3. Aspek Infrastruktur: Peningkatan layanan prasarana transportasi dalam rangka mendukung sistem logistik; Peningkatan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan Peningkatan konektivitas ekonomi melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dan handal serta penyediaan aksesibilitas antara Bandara dengan Jalan Tol.

Secara khusus, untuk pengelolaan program pembangunan yang melingkupi keterkaitan antarsektor, antarprogram, antar wilayah berdasarkan Peraturan Presiden No 80 Tahun 2020 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Kabupaten Madiun diarahkan dan masuk ke dalam kawasan agropolitan wilis bersama daerah dari klaster wilis utara. Kawasan agropolitan dalam Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan Sumber Daya Alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan Agrobisnis. Sehingga dalam melakukan pembangunan ekonomi pemerintah Kabupaten Madiun

akan memperhatikan aspek keseimbangan dan sinergitas antar wilayah karena satu sektor ekonomi dengan yang lain saling berhubungan dan dapat menyokong keberlangsungan kegiatan ekonomi di masing-masing kabupaten/kota.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Timur.

Berdasarkan telaah tata ruang wilayah Jawa Timur diketahui bahwa pada Paragraf 1 Rencana Sistem Perkotaan Pasal 19 disebutkan bahwa Sistem perkotaan meliputi area:

1. PKN : Kawasan Perkotaan Gresik – Bangkalan – Mojokerto –Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbang kertokusila) dan Malang.
2. PKW : Probolinggo, Tuban, Kediri, Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan.
3. PKWP : Pasuruan dan Batu;
4. PKL : Jombang, Ponorogo, Ngawi, Nganjuk, Tulungagung, Lumajang, Sumenep, Magetan, Situbondo, Trenggalek, Bondowoso, Sampang, Kapanjen, Mejayan, Kraksaan, Kanigoro, dan Bangil; dan
5. Kawasan perkotaan di wilayah kabupaten yang memiliki potensi sebagai pusat kegiatan bagi beberapa kecamatan dapat diusulkan sebagai PKLP oleh kabupaten masing-masing kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Mengacu pada Arahkan Sistem perkotaan tersebut, diketahui bahwa Kabupaten Madiun merupakan bagian strategis dalam unsur Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) bersama Probolinggo, Tuban, Kediri, Kota Madiun, Banyuwangi, Jember, Blitar, Pamekasan, Bojonegoro, dan Pacitan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Jawa Timur

Isu Strategis KLHS terkait dengan pengelolaan hutan, lahan dan sumber air, permasalahan pencemaran air, tanah dan udara, permasalahan lingkungan perkotaan, permasalahan efek gas rumah kaca, masih adanya lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan Jawa Timur. Masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan Jawa Timur, belum optimalnya informasi geologi dalam rangka mitigasi bencana geologi, konservasi air tanah, pengembangan dan pemanfaatan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air. Selain itu permasalahan selanjutnya adalah terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI, efisiensi penggunaan energi listrik belum optimal, potensi energi terbarukan cukup besar pengembangan energi panas bumi masih mengalami beberapa kendala.

Permasalahan selanjutnya adalah lokasi sebagian berada di kawasan hutan, percepatan peningkatan produksi Gas Bumi untuk pasokan gas di kawasan industri Jawa Timur, terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, meningkatnya intensitas usaha tani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, perubahan teknologi dan jumlah penduduk menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru, peningkatan kesadaran masyarakat akan kaitan aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi, adanya over capacity sebagian besar prasarana dan sarana perhubungan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam tata niaga ekspor impor khususnya ekspor, negara tujuan memberlakukan green industry, green economy dan eco-labelling, daya saing efisiensi penggunaan bahan baku utama dan penolong serta penggunaan energi melalui konsep produksi bersih meningkatkan daya saing industri dalam negeri, fasilitasi dan pendampingan untuk menuju tercapainya green industry dan green productivity (ramah lingkungan) bagi industri

4.2.5. Isu Strategis Lokal

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005 -2025

Rancangan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD lima tahun ketiga dan lima tahun keempat. Secara detail arah pembangunan pada dua periodisasi RPJPD tersebut sebagaimana disampaikan dalam paparan berikut.

1. Lima Tahun Ketiga (2015-2020)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun ketiga ini mengarah kepada sasaran-sasaran demi terwujudnya pembangunan yang lebih merata menuju sejahtera dengan tetap mengandalkan potensi wilayah yakni pertanian. Namun pada Lima tahun ketiga ini penguatan sektor pertanian harus lebih berkembang tidak hanya sekedar agro bisnis tetapi menjadi agro industri Terwujudnya industri



berbasis pertanian dan manufaktur yang memiliki daya saing global diharapkan mampu memicu percepatan pembangunan ekonomi menuju tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Tingkat pembangunan juga harus semakin merata di seluruh kecamatan dan desa sehingga kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Madiun menjadi berkurang.

Pada sisi pemerataan pembangunan, yang menjadi topik utama adalah bagaimana tingkat pendapatan masyarakat menjadi berkembang dan lebih baik serta berimbang antara wilayah satu dengan wilayah lain, terpenuhinya kebutuhan secara merata di sektor pangan serta perumahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukungnya. Hal ini tentu terkait dengan pengadaan jaringan infrastruktur transportasi serta ekonomi yang handal dan terintegrasi antara daerah satu dengan yang lainnya. Dengan tersedianya infrastruktur yang merata, sejatinya akan tercipta lapangan pekerjaan yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Madiun. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kesiapan sumber daya manusia, sehingga dibutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan yang memadai sebagaimana diuraikan pada periode lima tahun pertama pembangunan Kabupaten Madiun, sehingga pada gilirannya ketersediaan tenaga kerja yang berkualitas di daerah Kabupaten Madiun lebih memadai dan diharapkan dapat terserap optimal.

2. Lima Tahun Keempat (2020-2025)

Arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Madiun pada lima tahun keempat ini mengarah kepada pemantapan peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan. Tujuan kelestarian itu baru bisa dicapai apabila terlebih dulu kebutuhan dasar masyarakat sudah dipenuhi, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Oleh karena, beberapa komponen kebutuhan dasar tersebut mesti diprioritaskan agar agenda pembangunan berkelanjutan dapat diimplementasikan. Sedangkan pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan itu dapat diwujudkan dengan cara perbaikan pengelolaan dan pendayagunaan SDA dan pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui terjaganya fungsi dan daya dukung serta kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu juga ditingkatkan kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat akan pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup untuk meningkatkan dan menjaga kualitas kehidupan. Sehingga, pemeliharaan kekayaan dan keragaman SDA sangat penting demi terciptanya nilai tambah pada sektor ekonomi dan daya saing industri berbasis agro.



Secara lebih konkret, upaya -upaya tersebut dapat dilakukan melalui dua tingkatan. Pertama, melalui aturan formal (Perda), yakni didesain seperangkat regulasi yang mengatur supaya masyarakat Kabupaten Madiun dan pihak-pihak lainnya tunduk dalam upaya menciptakan Kabupaten Madiun yang asri dan lestari. Hal ini tidak terbatas pada keasrian dan kelestarian lingkungan, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan lingkungan yang asri dan lestari sekaligus meminimalisir (bahkan menghilangkan) upaya-upaya dari sebagian pihak yang secara tidak sadar mendegradasikan kualitas lingkungan. Di sektor kehutanan, misalnya, pihak-pihak terkait harus secara tegas memberantas perilaku rente dari pelaku di lapangan, baik oknum birokrasi maupun pihak eksternal, yang memanfaatkan hasil hutan tanpa memperhatikan keberlanjutan dari kondisi hutan tersebut. Kedua, melalui aturan informal, dalam hal ini membangun budaya masyarakat Kabupaten Madiun berdasarkan kearifan lokal setempat. Masyarakat dibangun menjadi masyarakat yang sadar bahwa keasrian dan kelestarian lingkungan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi masyarakat dalam melakukan aktivitas (ekonomi) sehari-hari. Implementasinya, tokoh-tokoh masyarakat setempat diharapkan mampu mentransformasikan apa yang dipahaminya sebagai sanksi sosial, seperti pengucilan terhadap seseorang, ke warga sekitarnya. Lebih lanjut, sanksi sosial yang selama ini masih digunakan hanya untuk tindakan curang yang berpotensi mengurangi keasrian dan kelestarian lingkungan dapat diterapkan misalnya terhadap masyarakat yang merusak lingkungan sampai ke masyarakat yang menebang hutan secara liar.

Sebagaimana diuraikan pada bab-bab terdahulu yakni bahwa pembangunan harus berjalan secara berkelanjutan dalam rangka mewujudkan tata kehidupan yang lebih baik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, beradab, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia, menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyarakat yang lebih demokratis, serta maju menuju masyarakat sejahtera lahir batin dengan orientasi ke masa depan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Madiun.

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Madiun tahun 2009-2029, maka pada pasal 40 ayat 1 dijelaskan bahwa Kebijakan kawasan strategis pengembangan ekonomi, meliputi :



1. Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten;
2. Peningkatan dan pengembangan kawasan agropolitan, ekowisata, agroforestri dan agrowisata sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun; dan
3. Peningkatan dan pengembangan kawasan perbatasan sebagai kawasan strategis bagi Kabupaten Madiun.

Sedangkan pada ayat 2 dijelaskan bahwa strategi peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran perkotaan Mejayan sebagai pusat kegiatan ekonomi baru di Kabupaten Madiun dengan skala pelayanan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

1. Menyediakan sarana dan prasarana atau infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan perkotaan skala kabupaten;
2. Memaksimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (sdm); dan
4. Mendukung kebijakan melalui pemberian instrumen insentif berupa keringanan pajak/ retribusi, pengurangan atau penghapusan pajak, dan lain sebagainya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS. Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana,

dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan / program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan / atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Madiun telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut :

1. Dimensi sosial : kualitas tenaga pendidik, fasilitas belajar mengajar, kualitas pendidikan, aksesibilitas terhadap air minum, jumlah sarana dan prasarana kesehatan, kesempatan kerja, jumlah pengangguran kaum muda/terdidik, kualitas dan produktivitas SDM pencari kerja, kualitas sumber daya manusia/peningkatan kesejahteraan masyarakat (IPM), penanganan masalah kesejahteraan dan penguatan nilai – nilai agama dan nilai luhur budaya lokal
2. Dimensi Ekonomi : pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, pengembangan infrastruktur dan kemajuan desa
3. Dimensi Lingkungan : Kekeringan, Ruang Terbuka Hijau (RTH), Sampah, TPS/TPA, kualitas air, dan kuantitas air
4. Dimensi kelembagaan : pelayanan publik, pemerintahan yang bersih, transparan dan keterbatasan pembiayaan pembangunan

Isu Strategis Kabupaten Madiun

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat

dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang didapatkan berdasarkan telaah pada kondisi daerah pada Bab 2, Telaah aspek keuangan daerah pada Bab 3, telaah isu internasional, isu nasional, dan Telaah Dokumen Perencanaan Terkait.

Berikut merupakan isu strategis Kabupaten Madiun :

1. Meningkatkan Konektivitas dan aksesibilitas pendukung perekonomian
Keterkaitan pembangunan konektivitas terhadap pengungkit pertumbuhan ekonomi dapat dinyatakan memiliki korelasi yang kuat. Dengan adanya akses terhadap mobilitas kewilayahan dapat meningkatkan mobilitas maupun aktivitas ekonomi yang menyebabkan peredaran uang semakin tinggi. Konteks infrastruktur konektivitas melekat pada berbagai sektor yang menjadikan sarana penghubung atau konektivitas menjadi objek fundamental
2. Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman sesuai standar
Keterkaitan sarana prasarana permukiman erat dikaitkan dengan kondisi keasrian wilayah serta akses dasar masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan kehidupan layak terutama pada konteks papan. Kondisi empiris menunjukkan pasca pandemi menyebabkan angka kemiskinan menurun dan melakukan alih proporsi kepada kebijakan penanganan dan pencegahan pandemi sehingga proporsi anggaran perbaikan sarana permukiman menurun. Selain hunian layak adanya akses terhadap air bersih, sanitasi per limbah rumah tangga, MCK juga penting untuk diperhatikan. Sementara untuk pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak terlaksana dikarenakan belum ada penanganan RTLH korban bencana maupun penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah.
3. Keterbatasan ketersediaan pembiayaan Pembangunan infrastruktur, perlu disiapkan alternatif skema pembiayaan Pembangunan infrastruktur, salah satunya melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan / atau Skema pembiayaan Lainnya sesuai regulasi yang berlaku.
4. Akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui penguatan daya saing potensi lokal. Kabupaten Madiun dinyatakan dalam RPJPD menjadi lumbung pangan di Jawa Timur mengingat komoditas padi menjadi komoditas utama yang potensial. Pergeseran dinamika ekonomi dan teknologi menjadi pertimbangan penting yang lain dalam menegaskan kebijakan pertumbuhan



ekonomi yang sebelumnya produksi menjadi post-produksi baik barang jadi maupun barang setengah jadi. Berdasarkan analisis klassen dan kontribusi serta komoditas, Kabupaten Madiun perlu untuk mempertimbangkan potensi lokal tani dalam mendorong ekonomi dengan langkah-langkah dinamis. Didukung dengan kondisi jalan baik sepanjang 571,32 km.

5. Penyerapan tenaga kerja melalui pendidikan keahlian sesuai kebutuhan pasar. Permasalahan yang umum terjadi di kabupaten Madiun adalah berkaitan dengan akses informasi lapangan pekerjaan dan ketidaksesuaian keahlian masyarakat dengan keinginan pencari tenaga kerja. Sehingga sangat memungkinkan perusahaan di Kabupaten Madiun memilih untuk mencari tenaga kerja di luar kabupaten. Sehingga sangat penting bagi pemerintah daerah dalam memberikan informasi ketenagakerjaan secara masif, memberikan dasar pelatihan yang dibutuhkan perusahaan melalui mekanisme kerja sama dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja
6. Peningkatan daya saing SDM melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan dan kesehatan. Akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi urusan wajib dasar yang melekat terhadap semua individu. Pentingnya meningkatkan memberikan akses kesehatan dan pendidikan dapat memberikan dampak laten terhadap kualitas Sumber Daya Manusia
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis teknologi informasi.

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Berbeda dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak memiliki Visi dan Misi yang merupakan mandat politis dari Kepala Daerah terpilih yang sekaligus menjadi cita-cita pembangunan yang harus dicapai dalam kurun waktu 5 tahun perencanaan. RPD yang disusun mengadaptasi adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024 bertujuan untuk mengisi ruang kosong perencanaan jangka menengah Kabupaten Madiun dikarenakan selesainya tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2018-2023.

Meskipun tidak memiliki Visi dan Misi untuk diacu sebagai cita-cita pembangunan jangka menengah Kabupaten Madiun, namun dijelaskan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru yang mana dalam ketentuan umum penyusunan RPD disusun memperhatikan kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun. RPJPD Kabupaten Madiun dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Madiun Tahun 2005 – 2025.

Periode 20 tahun RPJPD Kabupaten Madiun dibagi menjadi 4 periode perencanaan jangka menengah. Hal penting yang menjadi perhatian dalam dokumen RPJPD Kabupaten Madiun ialah dalam dokumen tersebut tidak terdapat sasaran pokok dan arah kebijakan masing-masing periode hingga tahun 2025. Sehingga proses identifikasi terhadap prioritas dan arah pembangunan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 tidak dapat merujuk langsung.

Poin penting yang perlu diperhatikan dari gambaran periode pembangunan jangka menengah dalam RPJPD Kabupaten Madiun tahun 2005-2025 ialah, disusunnya RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 merupakan tahapan terakhir di mana pada periode tersebut merupakan titik terakhir untuk menjamin Visi dan Misi RPJPD tercapai pada tahun 2025. Langkah konkret dengan tidak dilugaskanya arah pembangunan tahun 2023-2025 ialah dengan menjadikan periode RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 sebagai periode terakhir untuk memastikan visi dan misi Kabupaten Madiun dalam RPJPD Tahun 2005-2025.



Berikut merupakan Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025.

KABUPATEN MADIUN YANG MAJU, BERBASIS AGRO MENUJU SEJAHTERA

Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 adalah:

- a. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi.
- b. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
- c. Mewujudkan Kabupaten Madiun Sehat.
- d. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana/infrastruktur wilayah
- f. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang rukun dan damai.
- g. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah
- h. Mewujudkan pelestarian lingkungan hidup.

Sebagai upaya untuk mengawal pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 maka dalam dokumen RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dituangkan dalam tujuan dan sasaran sebagai representasi tertinggi keberhasilan kinerja pembangunan Kabupaten Madiun. Tujuan pembangunan Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 disusun dengan memperhatikan Misi RPJPD Kabupaten Madiun tahun 2005-2025 sebagai jaminan bahwa tujuan RPJPD Kabupaten Madiun dalam RPD tahun 2024-2026 terintegrasi dan sekaligus menjamin ketercapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Madiun. Berikut merupakan gambaran keterkaitan misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dengan RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

5.1. TUJUAN I “MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN MENGEMBANGKAN SEKTOR POTENSIAL DAN MENDORONG MASUKNYA INVESTASI”.

Tujuan 1 RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 merupakan mandat dari misi I dan Misi VIII RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Tujuan pertama RPD Kabupaten Madiun fokus terhadap pertumbuhan ekonomi dari pengembangan sektor potensial dan ekonomi kreatif yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berikut adalah gambaran keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025 terhadap Tujuan I RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Tabel 5.1 Kesesuaian Tujuan I RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025

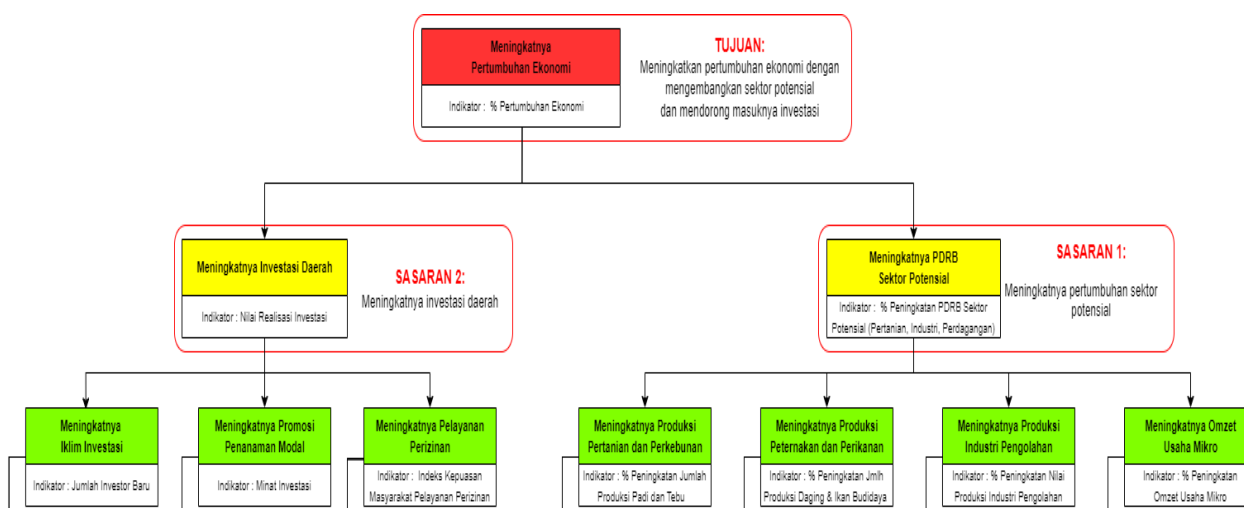
Misi RPJPD		Tujuan RPD
Misi I	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi
Misi VIII	Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup	

Sebagai upaya mencapai Tujuan I Kabupaten Madiun maka tujuan tersebut diturunkan menjadi dua sasaran yaitu:

- a. Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial
- b. Meningkatnya investasi daerah

Untuk dapat melihat perspektif logis secara utuh pada tujuan 1 tersebut, berikut akan disajikan cascading kinerja (pohon kinerja) Tujuan 1 RPD Kabupaten Madiun 2024-2026.

Gambar 5.1 *Cascading* Kinerja (pohon kinerja) Tujuan I



Berdasarkan gambar tersebut, diketahui pada *ultimate outcome* tujuan 1 adalah meningkatnya pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi. *Ultimate outcome* tersebut dicapai melalui dua *critical success factor* yaitu pertama dengan meningkatkan pertumbuhan sektor potensial dan yang kedua meningkatkan investasi daerah. Kedua *critical success factor* tersebut juga di jabarkan ke dalam level selanjutnya (*intermediate outcome*), yaitu pada CSF pertama dicapai melalui empat kondisi *outcome* yaitu meningkatnya produksi pertanian dan perkebunan, meningkatnya produksi peternakan dan perikanan, meningkatnya produksi industri pengolahan, dan meningkatnya omzet usaha mikro.

Selanjutnya pada sasaran yang kedua dicapai melalui terciptanya tiga kondisi *outcome* yaitu meningkatnya iklim investasi, meningkatnya promosi penanaman modal, dan meningkatnya pelayanan perizinan.

Berikut akan dijabarkan melalui desain *logical framework* terkait dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada tujuan I sebagai berikut:



Gambar 5.2. Logical Framework Tujuan I RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

TUJUAN	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi	
INDIKATOR TUJUAN	PERTUMBUHAN EKONOMI	
SASARAN	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial	Meningkatnya investasi daerah
INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE PENINGKATAN : 1. PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN, 2. PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN, 3. PDRB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR	NILAI REALISASI INVESTASI

Berdasarkan gambar tersebut, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Kabupaten Madiun ditempuh melalui peningkatan pertumbuhan sektor potensial dan peningkatan investasi daerah. Peningkatan PDRB sektor potensial di Kabupaten Madiun adalah sektor pertanian dan perkebunan, sektor perdagangan, sektor industri pengolahan.

5.2 TUJUAN II “MENURUNKAN KEMISKINAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR MASYARAKAT”.

Tujuan II RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan mandat dari Misi IV RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama pada RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026, pengentasan kemiskinan tersebut melalui meringankan pengeluaran masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurunkan pengeluaran masyarakat ditempuh melalui mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan dasar dan perlindungan sosial.

Berikut merupakan gambaran keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dengan Tujuan II RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Tabel 5.2 Kesesuaian antara Tujuan RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025

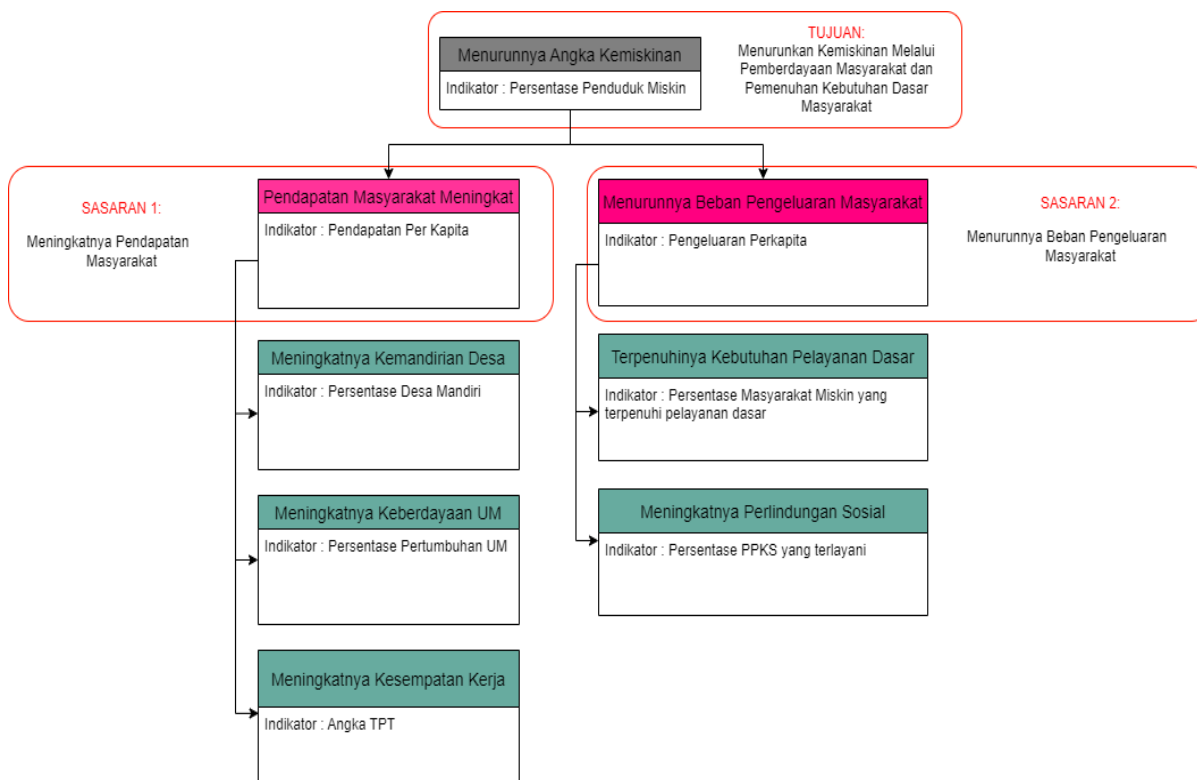
Misi RPJPD		Tujuan RPD
Misi IV	Mewujudkan Pemerataan Pembangunan	Menurunkan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

Sebagai upaya mencapai Tujuan II, Kabupaten Madiun menurunkan Tujuan II tersebut ke dalam dua sasaran daerah yang terdiri dari:

- a. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
- b. Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat

Untuk dapat mengetahui perspektif logis dari penjabaran tujuan 2 RPD Kabupaten Madiun 2024-2026, berikut akan dijabarkan cascading kinerja dari tujuan 2 tersebut.

Gambar 5.3 *Cascading* Kinerja (Pohon Kinerja) Tujuan 2



Ultimate outcome dari tujuan 2 yaitu menurunnya angka kemiskinan dengan indikator persentase penduduk miskin. Untuk mencapai *ultimate outcome* tersebut, ditempuh melalui terciptanya kondisi dua *critical success factor* (CSF), yaitu pendapatan masyarakat meningkat dengan indikator kinerja pendapatan per kapita, dan menurunnya beban pengeluaran masyarakat dengan indikator kinerja pengeluaran perkapita. Kedua *critical success factor* tersebut kemudian menjadi sasaran pertama dan sasaran kedua pada tujuan 2 tersebut. Selanjutnya untuk dapat mencapai terwujudnya kedua CSF tersebut terdapat beberapa *intermediate outcome* yang harus tercapai. Pada CSF pertama, yang berpengaruh adalah meningkatnya kemandirian desa, meningkatnya keberdayaan Usaha Mikro, dan meningkatnya kesempatan kerja. Sedangkan pada CSF kedua, kondisi yang berpengaruh adalah terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar dan meningkatnya perlindungan sosial.

Berikut akan dijabarkan melalui desain logical framework terkait dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada tujuan II sebagai berikut:



Gambar 5.4 *Logical Framework* Tujuan II RPD Kabupaten Madiun, Tahun 2024-2026

TUJUAN	Menurunkan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	
INDIKATOR TUJUAN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN	
SASARAN	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat
INDIKATOR SASARAN	PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU	PENGELUARAN PERKAPITA

5.3 TUJUAN III “MENINGKATKAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA”

Tujuan III RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Misi II, Misi III, dan Misi VI RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Fokus pembangunan pada Tujuan III RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 adalah meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja di Kabupaten Madiun. Keterkaitan Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 terhadap Tujuan III RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3 Kesesuaian antara Tujuan III RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025

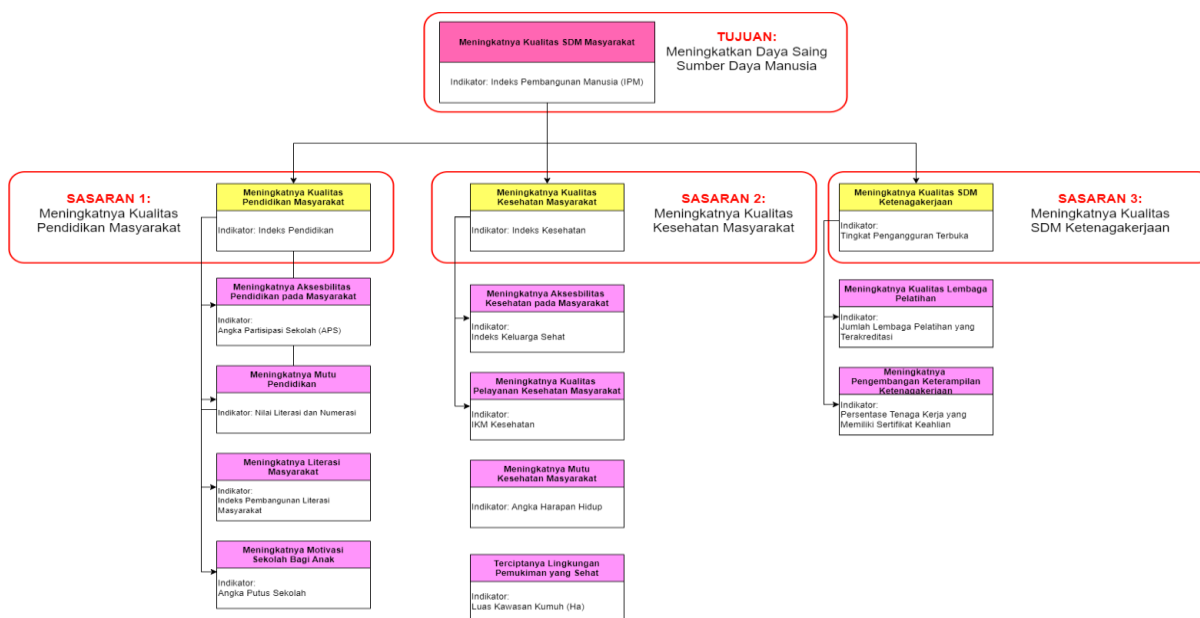
Misi RPJPD		Tujuan RPD
Misi II	Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Misi III	Mewujudkan Kabupaten Madiun Sehat	
Misi VI	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Rukun dan Damai	

Sebagai upaya mencapai Tujuan III Kabupaten Madiun, maka Tujuan III tersebut diturunkan menjadi 3 sasaran daerah, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
- b. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
- c. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan

Agar perspektif logis dari tujuan III dapat dipahami lebih lanjut, berikut akan dijabarkan mengenai cascading kinerja (pohon kinerja) dari tujuan III sebagai berikut :

Gambar 5.5 *Cascading Kinerja* (pohon kinerja) tujuan III



Berdasarkan gambar di atas, diketahui *ultimate outcome* yang menjadi tujuan adalah meningkatnya kualitas SDM masyarakat. *Ultimate outcome* tersebut di wujudkan melalui tiga *critical success factor* (CSF) sekaligus menjadi sasaran. Pertama adalah meningkatnya kualitas Pendidikan masyarakat, yang ketercapaiannya ditentukan oleh beberapa kondisi *outcome*, diantaranya meningkatnya aksesibilitas Pendidikan pada masyarakat, meningkatnya mutu Pendidikan, meningkatnya literasi masyarakat, dan meningkatnya motivasi sekolah bagi anak. CSF kedua adalah meningkatnya kualitas Kesehatan masyarakat, yang ketercapaiannya ditentukan oleh beberapa kondisi *outcome* yang harus dicapai, diantaranya adalah meningkatnya aksesibilitas Kesehatan pada masyarakat, meningkatnya kualitas pelayanan Kesehatan masyarakat, meningkatnya mutu Kesehatan masyarakat, dan terciptanya lingkungan pemukiman yang sehat. CSF ketiga adalah meningkatnya kualitas SDM ketenagakerjaan, yang ketercapaiannya ditentukan oleh beberapa kondisi *outcome* diantaranya adalah meningkatnya kualitas Lembaga pelatihan dan meningkatnya pengembangan keterampilan ketenagakerjaan.

Berikut akan dijabarkan melalui desain logical framework terkait dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada tujuan III sebagai berikut:



Gambar 5.6 *Logical Framework* Tujuan III RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

TUJUAN	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia		
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)		
SASARAN	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan
INDIKATOR SASARAN	INDEKS PENDIDIKAN	INDEKS KESEHATAN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

5.4 TUJUAN IV “MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, PROFESIONAL, DAN AKUNTABEL”

Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun merupakan mandat dari Misi VII RPJP Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. birokrasi sebagai lokomotif penggerak jalannya pemerintahan dan pembangunan memiliki peran penting. Fokus pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024 – 2026 adalah pembangunan aparatur beserta sistem birokrasinya. Dengan birokrasi yang kondusif dan suportif, hal tersebut tentunya akan memberikan dampak terhadap sistem pemerintahan yang baik dan kualitas pelayanan yang prima.

Berikut merupakan gambaran keterkaitan antara Misi RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025 dengan Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026.

Tabel 5.4 Kesesuaian Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun 2024-2026 dengan Misi RPJPD Kabupaten Madiun 2005-2025

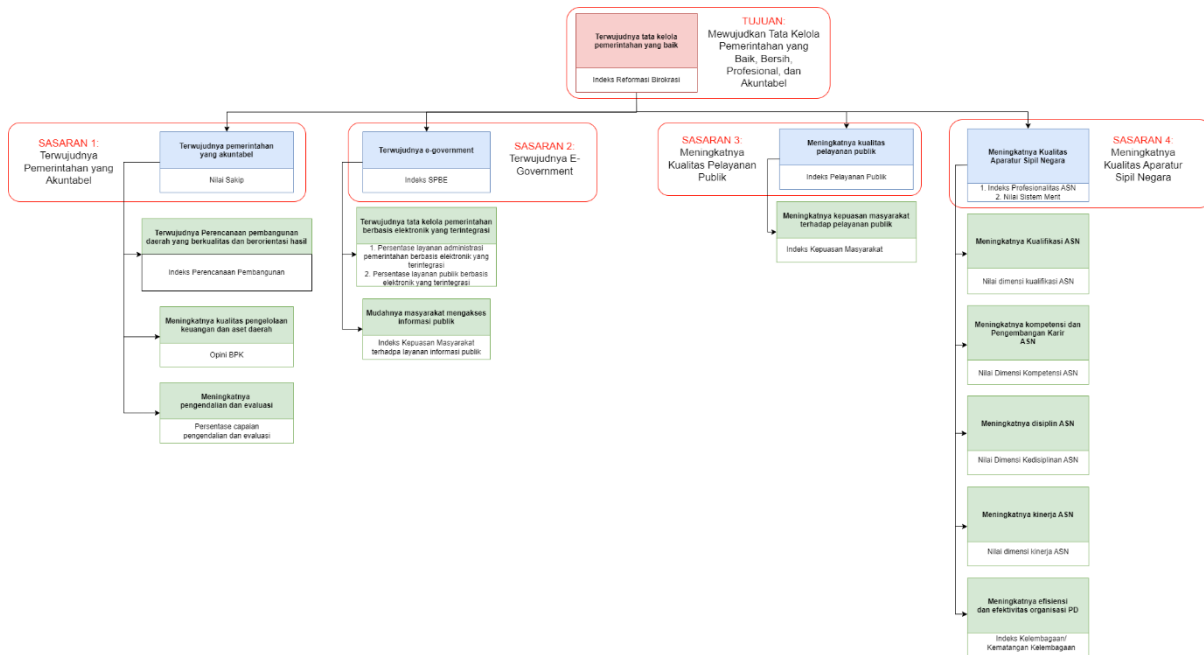
Misi RPJPD		Tujuan RPD
Misi VII	Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional, dan Akuntabel

Sebagai upaya mencapai Tujuan IV Kabupaten Madiun, maka Tujuan IV tersebut diturunkan menjadi 4 sasaran daerah, sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel
2. Terwujudnya E-Government
3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
4. Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara.

Agar pemahaman secara logis terkait penjabaran tujuan IV dapat dipahami secara komprehensif, maka berikut akan disajikan cascading kinerja (pohon kinerja) dari tujuan IV.

Gambar 5.7 Cascading kinerja (pohon kinerja) tujuan IV



Berikut akan dijabarkan melalui desain logical framework terkait dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, dan indikator sasaran pada tujuan IV sebagai berikut:

Gambar 5.8 Logical Framework Tujuan IV RPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

TUJUAN	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Profesional, dan Akuntabel				
INDIKATOR TUJUAN	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)				
SASARAN	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	Terwujudnya E-Government	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	
INDIKATOR SASARAN	NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)	INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)	ANGKA KEMATANGAN ORGANISASI

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan beserta target ukuran keberhasilan pembangunan yang tercantum pada Bab 5, maka diperlukannya perumusan strategi pembangunan daerah dalam kurun waktu periode pembangunan. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan. Adapun strategi pembangunan daerah di Kabupaten Madiun sebagai berikut :

Strategi 1.

Transformasi ekonomi melalui penguatan peran sektor potensial dengan meningkatkan daya saing sektor unggulan dan daya tarik investasi di daerah,

Strategi 2.

Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan,

Strategi 3.

Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem,

Strategi 4.

Pengoptimalan akses dan mutu Sumber Daya Manusia yang kolaboratif yang berfokus pada pemerataan mutu fasilitas pendidikan dan Kesehatan, jaminan kemudahan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian, penguatan dukungan lingkungan masyarakat dalam mendukung kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta peningkatan mutu pelatihan pengembangan keahlian ketenagakerjaan,

Strategi 5.

Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dengan basis *e-government* dan peningkatan kapasitas aparatur negara.



Berdasarkan strategi pembangunan yang telah dirumuskan diatas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1 Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan RPD Kabupaten Madiun Periode Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial	Transformasi ekonomi melalui penguatan peran sektor potensial dengan meningkatkan daya saing sektor unggulan dan daya tarik investasi di daerah
	Meningkatnya investasi daerah	
Menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan
	Menurunnya beban pengeluaran masyarakat	Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem
Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Pengoptimalan akses dan mutu Sumber Daya Manusia yang kolaboratif yang berfokus pada pemerataan mutu fasilitas pendidikan dan kesehatan, jaminan kemudahan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan pengembangan keahlian, penguatan dukungan lingkungan masyarakat dalam mendukung kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, serta peningkatan mutu pelatihan pengembangan keahlian ketenagakerjaan
	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	
	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ketenagakerjaan	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel	Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dengan basis e-government dan peningkatan kapasitas aparatur negara
	Terwujudnya E-Government	
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	
	Meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	

6.2. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode perencanaan pembangunan daerah guna mencapai Tujuan sasaran RPD secara bertahap.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada isu strategis daerah yang diperoleh melalui hasil identifikasi potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang



mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu perencanaan. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi.

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan dirumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 3 (tiga) tahun untuk penyusunan RPD. Arah kebijakan dapat dijalankan dalam 1 (satu) tahun periode. Namun, dapat pula membutuhkan lebih dari satu tahun. Namun, yang terpenting keseluruhan arah kebijakan harus menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang padu dan mampu memberdayakan segenap potensi daerah dan pemerintah daerah sekaligus memanfaatkan segala peluang yang ada. Mengingat tiap-tiap arah kebijakan melekat pada masing-masing strategi, maka secara tidak langsung perumusan horizon waktu berdasarkan strategi sama saja dengan menggunakan perspektif arah kebijakan. Berikut adalah arah kebijakan dari masing-masing strategi:

Tabel 6.2 Pemetaan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Madiun

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
Transformasi ekonomi melalui penguatan peran sektor potensial dengan meningkatkan daya saing sektor unggulan dan daya tarik investasi di daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, pengendalian bencana pertanian & peningkatan kualitas kesehatan hewan, serta penggunaan teknologi pertanian.			
	Pengembangan pasca panen hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan melalui hilirisasi hasil pertanian.			



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN			
		2024	2025	2026	
	Meningkatkan kesejahteraan petani melalui pembinaan, fasilitasi akses permodalan, dan pengelolaan pemasaran hasil pertanian.				
	Peningkatan daya saing UMKM dan IKM melalui perbaikan kualitas produk, peningkatan kreativitas dan inovasi produk, pengembangan strategi pemasaran dan pemasaran digital, kemudahan akses permodalan, serta pemenuhan legalitas usaha.				
	Pengembangan UMKM Lokal terutama untuk meningkatkan kerjasama antar lembaga/ Kemitraan, Promosi dan pemasaran dalam rangka meningkatkan angka penjualan produk UMKM				
	Fasilitasi pemasaran dan perluasan jaringan pasar produk UMKM dan IKM Kabupaten Madiun.				
	Peningkatan dan pengembangan perwilayahan industri (Kawasan Peruntukan Industri dan sentra industri potensial).				
	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadahi dan merata.				
	Pengembangan potensi pariwisata dan mendorong berkembangnya usaha ekonomi kreatif.				
	Pengembangan, publikasi, sosialisasi, dan promosi peta potensi investasi dan peluang usaha di Kabupaten Madiun.				
	Meningkatkan pelayanan perizinan melalui peningkatan kapasitas SDM, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, dan optimalisasi penggunaan Sistem OSS (<i>Online Single Submition</i>).				
	Menjaga stabilitas trantibum dan peningkatan iklim investasi yang kondusif.				
	Peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan investasi serta penyiapan dukungan skema alternatif pembiayaan KPBU dan Skema Alternatif pembiayaan lainnya.				
	Optimalisasi pembangunan ekonomi di pedesaan berbasis partisipasi masyarakat dan potensi desa.				
	Melaksanakan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penerapan <i>Green Economy</i> atau Ekonomi Hijau.				
	Meningkatkan kontribusi BUMD terhadap penerimaan asli daerah melalui peningkatan kualitas dan kapasitas BUMD				
	Penyesuaian usaha dan strategi bisnis bagi BUMD yang ada agar sesuai dengan peluang ekonomi				
	Peningkatan Jaminan sosial masyarakat dengan menggunakan sasaran data kemiskinan terpadu serta menguatkan basis data kemiskinan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar PPKS rumah tidak layak huni, sanitasi dan air minum			
		Peningkatan Kualitas Pendidikan			
		Peningkatan Jaminan Kesehatan			
Pembinaan Bagi PPKS potensial					
Pemberdayaan PSKS					
Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi PPKS					
Verifikasi Faktual DTKS					



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
Penguatan ketahanan ekonomi melalui bantuan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada profesi informal dan wilayah data kemiskinan ekstrem	Pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat dalam rangka persiapan terhadap dunia kerja			
	Penguatan kapasitas SDM pertanian			
	Bantuan permodalan usaha rumah tangga miskin			
	Pendampingan usaha berkelanjutan			
	Perluasan modal usaha kepala rumah tangga perempuan disabilitas produktif			
	Penyelenggaraan Bursa Kerja Online dan Offline			
	Penguatan Usaha Ekonomi Desa (UED) sebagai motor penggerak ekonomi lokal			
	Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung arah kebijakan pengentasan kemiskinan			
Pengoptimalan Akses dan Mutu Sumber Daya Manusia yang Kolaboratif yang Berfokus Pada Pemerataan Mutu Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, Jaminan Kemudahan Akses pada Layanan Pendidikan, Kesehatan, dan Pengembangan Keahlian, Penguatan Dukungan Lingkungan Masyarakat Dalam Mendukung Kualitas Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat, Serta Peningkatan Mutu Pelatihan Pengembangan Keahlian Ketenagakerjaan	Kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam penguatan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat			
	Pengoptimalan kapasitas fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan dalam memaksimalkan daya tampung dan pelayanan			
	Pemerataan ketersediaan tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang kompeten pada seluruh faskes dan fasilitas pendidikan			
	Peningkatan ketercukupan sarana-prasarana serta media yang tepat guna penunjang peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan			
	Program Wajib Asuransi Kesehatan bagi Masyarakat			
	Pengembangan Sekolah Inklusi yang Mengutamakan Jaminan Pendidikan Bagi Masyarakat			
	Peningkatan Daya Dukung Pada Lingkungan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan			
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Fasilitas Pelatihan Ketenagakerjaan dalam Mendukung Kebutuhan Kualifikasi Tenaga Kerja			
Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dengan basis e-government dan peningkatan kapasitas aparatur negara	Penguatan kebijakan penerapan SAKIP;			
	Penguatan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang terintegrasi (<i>e-performance based budgeting</i>)			
	Penguatan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kinerja			
	Peningkatan sinergitas pengawasan			
	Penguatan Manajemen Risiko			
	Pengoptimalan penelitian, pengembangan, pengkajian, invensi, inovasi dan teknologi yang berdampak pada pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat			
	Pengembangan pelayanan publik berbasis elektronik yang menjangkau masyarakat			
	Pembangunan sistem layanan administrasi penduduk berbasis IT			
	Peningkatan layanan berbasis kecamatan			



STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN		
		2024	2025	2026
	Kesiapan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan publik melalui pemerataan dalam persebaran fasilitas publik baik di desa-desa maupun di setiap kecamatan			
	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur sipil negara Kabupaten Madiun			

6.3. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Langkah selanjutnya menselaraskan antara sasaran, serta dengan mensinkronkan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program prioritas pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri . Suatu program prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program yang secara khusus berhubungan dengan tujuan dan sasaran. Program prioritas pada intinya merupakan substansi dasar sasaran dan arah kebijakan. sasaran tersebut kemudian didefinisikan kedalam strategi dan arah kebijakan ataupun kedalam Kegiatan atau Program sesuai nomenklatur yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial dan mendorong masuknya investasi	PERTUMBUHAN EKONOMI			%	4,32	4,87		5,11		5,35		5,35		
1.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor potensial	Persentase PENINGKATAN : PDRB SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN			%	- 4,05	1,75		1,95		2,19		2,19		
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	7,24	2	2.327.288.723	2	2.415.153.159	3	2.540.768.475	3	7.283.210.357	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase peningkatan jumlah ternak	%	1	1	300.000.000	1	306.000.000	1	315.180.000	1	921.180.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	4	4	2.455.697.315	4	2.563.855.041	4	2.822.766.201	4	7.842.318.557	Dinas Pertanian dan Perikanan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase prasarana peternakan dalam keadaan baik	%	100	100	150.000.000	100	153.000.000	100	157.590.000	100	460.590.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	7,67	9	1.602.500.000	10	1.662.500.000	11	1.672.500.000	11	4.937.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Jumlah Peternak	%	1	1	163.223.390	1	166.487.858	1	171.482.494	1	501.193.741	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Hewan Ternak dalam Keadaan Sehat	%	100	100	442.844.796	100	462.086.566	100	475.104.719	100	1.380.036.080	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,04	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	430.300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	%	85,25	86,27	25.992.643.616	86,65	27.292.275.797	87,02	28.656.889.587	87,02	81.941.808.999	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase PENINGKATAN : PDRB SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN,			%	13,31	13,40		13,50		13,60		13,60		
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	2	566.016.002	2	570.000.000	2	245.000.000	2	1.381.016.002	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terfasilitasi perijinan	%	6	8	25.161.109	8	45.000.000	8	50.000.000	8	120.161.109	Dinas Tenaga Kerja
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terbina	%	22	27	695.000.000	30	822.500.000	31	863.625.000	31	2.381.125.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
		Persentase PENINGKATAN : PDRB SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR			%	5,76	6,00		6,25		6,50		6,50		
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang tersedia	%	0	5,71	1.716.250.000	8,11	1.959.562.500	10	2.057.540.625	10	5.733.353.125	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
				Persentase Peningkatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Telah Dibina Dan Telah Diberdayakan	%	0	35,14	919.207.500	40,00	974.667.875	50,00	1.023.401.269	50,00	2.917.276.644	
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	60	30	1.994.000.000	30	2.080.000.000	30	2.124.940.000	30	6.198.940.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1.2	Meningkatnya investasi daerah	NILAI REALISASI INVESTASI			Rp. (Triliun)	1,8	2,2		2,5		2,9		2,9		
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai	92,25	89	100.000.000	89,5	110.000.000	90	125.000.000	90	335.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Perusahaan	1500	1000	90.000.000	1000	140.000.000	1000	170.000.000	3000	400.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Perusahaan	9000	12500	201.900.000	13500	230.000.000	14500	120.000.000	14500	551.900.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang	%	31,25	31,25	4.328.712.042	37,50	4.545.147.644	56,25	4.681.502.073	56,25	13.555.361.760	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	76,892	72,390	73.396.250.706	73,041	81.680.655.087	73,811	84.862.361.828	73,811	239.939.267.621	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	15,870	16,469	6.312.385.527	17,069	6.458.476.951	17,668	7.101.295.572	17,668	19.872.158.049	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%	5,895	6,398	10.210.867.679	6,965	12.071.954.447	7,595	12.087.113.080	7,595	34.369.935.206	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penataan Bangunan Gedung	Penataan bangunan gedung baik	%	17,86	17,86	18.357.949.602	17,86	19.826.585.570	17,86	20.619.648.993	17,86	58.804.184.164	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	80	85	25.165.076.856	88	26.908.448.063	90	27.788.401.185	90	79.861.926.104	Dinas Perhubungan
				Persentase Kendaraan laik jalan	%	90	92	218.000.000	94	224.500.000	96	228.000.000	96	670.500.000	Dinas Perhubungan
				Persentase Manajemen rekayasa lalu lintas	%	70	75	1.162.681.900	80	1.291.870.860	85	1.321.719.268	85	3.776.272.028	Dinas Perhubungan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	40	40	5.401.269.197	45	5.490.519.520	50	5.372.625.444	50	16.264.414.161	Dinas Lingkungan Hidup
			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1.075.397.180	100	1.347.491.822	100	1.388.646.485	100	3.811.535.487	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	1.280.400.000	100	1.887.022.400	100	2.082.024.848	100	5.249.447.248	Satuan Polisi Pamong Praja
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	%	100	100	4.601.591.699	100	4.754.507.271	100	4.887.204.656	100	14.243.303.626	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	%	100	100	225.700.000	100	264.505.792	100	266.751.410	100	756.957.202	Satuan Polisi Pamong Praja



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh layanan Mitigasi	orang	-	4000	941.910.514	4250	1.478.164.000	4500	1.279.200.000	4500	3.699.274.514	Badan Penanggulangan an Bencana Derah
				Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani	%	100	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	3.030.000.000	Badan Penanggulangan an Bencana Derah
				Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	Badan Penanggulangan an Bencana Derah
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	%	n/a	80	1.765.720.779	85	1.877.360.968	90	1.833.969.160	90	5.477.050.907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
2.	Menurunkan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Persentase PENDUDUK MISKIN			%	10,79	10,19		9,89		9,59		9,59		



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB PERKAPITA ATAS DASAR HARGA BERLAKU			Rp.	28.880.400	29.448.600		30.016.700		30.525.300		30.525.300		
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	%	19,74	14,54	4.736.628.018	11,06	4.820.325.878	7,60	4.969.896.416	7,60	14.526.850.312	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	%	80,49	80,49	4.660.960.047	82,93	4.725.425.847	85,37	4.790.925.847	85,37	14.177.311.741	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	%	5,48	5,48	3.512.436.780	5,47	4.083.580.476	5,45	4.186.850.826	6,00	11.782.868.082	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib	%	74,24	85,86	3.076.470.713	88,38	3.288.517.444	90,91	3.157.979.056	90,91	9.522.967.213	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Desa dengan kualitas perencanaan pembangunan yang baik	%	70,20	73,23	398.309.002	77,27	415.100.156	83,33	477.938.225	83,33	1.291.347.383	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa / Kelurahan yang aktif	%	66,86	72,36	1.087.624.542	75,13	1.319.974.525	78,88	1.419.535.400	78,88	3.827.134.467	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase BUMDesa Maju	%	46,46	56,57	820.500.000	63,13	1.247.725.107	73,23	1.308.051.900	73,23	3.376.277.007	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Produk	%	2,19	2,21	300.000.000	2,22	390.000.000	2,24	390.000.000	2,24	1.080.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan tenaga kerja formal	%	100	80	249.607.100	82	259.607.100	84	264.607.100	84	773.821.300	Dinas Tenaga Kerja



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
2.2	Menurunnya Beban Pengeluaran Masyarakat	PENGELUARAN PERKAPITA			Rp.	Rp. 11.848.000 (Rp/org/th)	12.015.000		12.182.000		12.350.000		12.350.000		
			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Kelompok Masyarakat Miskin PPKS kewenangan Pemberdayaan Sosial yang dibina dan diberdayakan	%	28	20	139.249.257	22	148.996.705	23	151.976.639	23	440.222.602	Dinas Sosial
				Persentase PSKS yang dibina dan diberdayakan	%	30	34	865.277.240	36	957.193.875	36	970.766.253	36	2.793.237.368	Dinas Sosial
			Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Tertangani	%	15,02	60	1.673.674.253	63	1.787.970.171	65	1.817.928.810	65	5.279.573.234	Dinas Sosial
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran (PKH dan Keluarga Miskin Kewenangan Kab/Kota)	%	48,76	45	6.990.545.016	50	7.409.977.717	53	7.486.584.315	53	21.887.107.047	Dinas Sosial



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	88,09	70	663.000.000	70	702.780.000	70	716.835.600	70	2.082.615.600	Dinas Sosial
			Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Tepat Sasaran (paska Korban bencana alam dan sosial)	%	100	90	241.100.143	90	309.282.154	90	315.467.797	90	865.850.093	Dinas Sosial
				Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	503.140.683	100	543.391.937	100	554.259.776	100	1.600.792.396	Dinas Sosial
			Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga	%	9,3	12	865.517.225	11,9	1.013.844.809	11,8	1.031.011.617	11,8	2.910.373.651	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Pelayanan Air Minum	%	3,19	3,62	13.797.622.658	3,84	15.177.384.924	4,05	16.088.028.019	4,05	45.063.035.601	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Layak	%	0,6	1,08	8.081.550.768	1,33	8.889.705.845	1,57	9.423.088.195	1,57	26.394.344.808	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Program Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	ha	54,43	104,43	5.511.761.719	154,43	5.724.918.911	204,43	5.614.257.943	204,43	16.850.938.573	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Meningkatkan daya saing sumber daya manusia	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			INDEKS	72,39	73,14		73,49		73,85		73,85		
3.1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	INDEKS PENDIDIKAN			INDEKS	0,631	0,635		0,637		0,639		0,639		
			Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	100	%	100,00	27.678.303.440	100,00	28.313.170.872	100,00	28.894.666.866	98,14	84.886.141.178	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Angka Partisipasi Sekolah Dasar	98,36	%	100,00	110.211.458.333	100,00	115.266.663.820	100,00	112.857.453.933	100,00	338.335.576.086	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	6,34	%	100,00	18.612.954.605	100,00	19.064.707.749	100,00	19.487.358.157	100,00	57.165.020.511	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rerata kemampuan literasi SD	61,46	%	66,55	517.093.765	69,10	558.243.320	71,64	570.095.876	100,00	1.645.432.962	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rerata kemampuan literasi SMP	70,32	Nilai	76,36	258.000.000	79,38	270.900.000	82,40	276.318.000	71,64	805.218.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rerata kemampuan Numerasi SD	49,34	Nilai	52,25	584.461.761	53,71	613.684.849	55,16	644.369.092	82,40	1.842.515.702	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Rerata kemampuan Numerasi SMP	58,07	Nilai	62,04	175.721.120	64,03	179.235.542	66,01	182.820.253	55,16	537.776.916	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Iklim Keamanan SD	88,45	Nilai	95,53	225.000.000	99,07	236.250.000	100,00	248.062.500	66,01	709.312.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Indeks Iklim Keamanan SMP	86	Nilai	92,68	95.140.000	96,02	97.042.800	99,36	98.983.656	100,00	291.166.456	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Iklim Kebinekaan SD	94,62	Nilai	99,60	975.937.923	100,00	995.456.681	100,00	1.015.365.815	99,36	2.986.760.420	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Iklim Kebinekaan SMP	90,74	Nilai	95,16	1.451.528.000	97,37	1.480.558.560	99,58	1.510.169.731	100,00	4.442.256.291	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Inklusivitas SD	83,33	Nilai	89,53	325.000.000	92,63	325.000.000	95,73	991.250.000	99,58	1.641.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Indeks Inklusivitas SMP	82,08	Nilai	88,28	1.098.250.000	91,38	1.153.162.500	94,48	1.176.225.750	95,73	3.427.638.250	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	49,71	%	52,69	100.000.000	55,59	105.000.000	58,49	110.250.000	58,49	315.250.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	%	2,7	3,37	683.988.000	3,40	685.988.000	3,40	686.988.000	3,40	2.056.964.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	%	75,92	81,93	349.851.227	83,13	355.367.029	83,13	363.373.625	83,13	1.068.591.881	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	%	30	30	226.067.541	31,25	229.631.753	32,5	234.805.471	32,5	690.504.765	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	168.480.489	100	171.136.776	100	174.992.573	100	514.609.838	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	INDEKS KESEHATAN			INDEKS	0,789	0,805		0,808		0,812		0,812		



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Proram Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1.000 lahir hidup	6,18	5,57	16.087.956.515	5,29	16.572.389.924	5,02	16.049.543.620	5,02	32.749.500.135	Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Ibu		per 100.000 lahir hidup	77,19	73,00	16.087.956.515	70,00	16.572.389.924	66,00	16.049.543.620	66,00	48.709.890.059	Dinas Kesehatan	
		Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)		%	76,92	84,00	16.087.956.515	92,00	16.572.389.924	100,00	16.049.543.620	100,00	48.709.890.059	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi Stunting Balita		%	17,6	14,00	16.087.956.515	12,00	16.572.389.924	10,00	16.049.543.620	10,00	48.709.890.059	Dinas Kesehatan	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas		%	57,00	61,00	16.087.956.515	65,00	16.572.389.924	69,00	16.049.543.620	69,00	48.709.890.059	Dinas Kesehatan	



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	%	65,17	66,00	19.172.157.079	67,00	19.474.427.932	68,00	19.913.196.488	68,00	58.559.781.499	RSUD Caruban
				Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	%	64,00	65,00	22.410.126.086	66,00	22.763.447.201	67,00	23.276.318.998	67,00	68.449.892.285	RSUD Dolopo
			Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	skor	1839 / 56	2150 / 57	1.363.445.460	2150 / 57	1.390.714.369	2150 / 57	1.432.435.800	2150 / 57	4.186.595.629	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	%	100	100	3.889.105.000	100	4.083.560.250	100	4.208.488.263	100	12181153513	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	1.593.724.018	0.7 : 1.000	1.641.321.481	0.9 : 1.000	1.589.120.189	0.9 : 1.000	4.824.165.687	Dinas Kesehatan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	2,0 : 1000	1.593.724.018	2.5 : 1.000	1.641.321.481	3,0 : 1000	1.589.120.189	3,0 : 1000	4.824.165.687	Dinas Kesehatan
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	726.200.597	100	747.888.986	100	724.102.804	100	2.198.192.388	Dinas Kesehatan
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKM yang dilakukan pembinaan	%	100	100	759.807.608	100	794.154.963	100	780.719.264	100	2.334.681.835	Dinas Kesehatan
3.3	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Ketenagakerjaan	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			%	5,84	5,27		4,51		4,44		4,44		
			Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta Pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	2.581.562.886	100	2.749.412.203	100	2.442.049.143	100	7.773.024.232	Dinas Tenaga Kerja



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan	%	69,890	85,230	252.806.257	90,909	267.974.632	100	313.530.320	100	834.311.209	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan akuntabel	INDEKS REFORMASI BIROKRASI (IRB)			INDEKS	63,36	70,01		75,00		80,01		80,01		
4.1	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel	NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)			NILAI	76,03	78,73		80,04		82,84		82,84		
			Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	1.450.000.000	100	1.700.000.000	100	1.237.000.000	100	4.087.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai ketentuan	%	100	100	450.000.000	100	300.000.000	100	863.000.000	100	1.913.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Baik	%	93,75	100	427.216.694.339	100	433.795.518.378	100	442.531.388.188	100	1.303.543.600.905	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	-	100	5.395.549.659	100	5.503.460.652	100	5.778.633.686	100	16.677.643.997	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	12	12	684.892.929	12	719.137.576	12	733.520.327	12	2.137.550.832	Badan Pendapatan Daerah
				Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	%	100	100	167.846.623	100	176.238.954	100	179.763.734	100	523.849.311	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	SPPT	422.500	422.500	441.409.806	423.500	463.480.297	423.500	472.749.902	423.500	1.377.640.005	Badan Pendapatan Daerah



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	%	100	100	691.411.669	100	725.982.252	100	740.501.897	100	2.157.895.818	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi (ajuan)	Ajuan	1.325	1.325	44.244.586	1.350	46.456.815	1.375	47.385.951	1.375	138.087.353	Badan Pendapatan Daerah
				Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	Dokumen	12	12	192.562.253	12	202.190.366	12	206.234.173	12	600.986.793	Badan Pendapatan Daerah
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Memuaskan	%	30	35	400.000.000	40	415.000.000	45	420.000.000	45	1.235.000.000	Inspektorat
				Persentase penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	1.834.311.248	100	1.897.537.705	100	1.900.671.519	100	5.632.520.472	Inspektorat
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	178.860.330	100	182.860.330	100	191.860.330	100	553.580.990	Bagian Organisasi



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Nilai Pelaporan	PD	53	53	59.113.415	53	59.113.415	53	60.113.415	53	178.340.245	Bagian Organisasi
4.2	Terwujudnya E-Government	INDEKS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)			INDEKS	3,21	3,22		3,23		3,24		3,24		
			Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	%	100	100	2.162.222.502	100	2.500.042.239	100	2.557.391.965	100	7.219.656.706	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	100	100	756.732.519	100	921.028.188	100	941.779.412	100	2.619.540.119	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP)			INDEKS	4,63	4,68		4,69		4,70		4,70		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	%	100	100	61.000.000	100	63.341.368	100	66.341.368	100	190.682.736	Bagian Organisasi



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Nilai IKM	Nilai	83,34	85,5	158.000.000	87,5	160.000.000	90,5	161.011.262	90,5	481.011.262	Bagian Organisasi
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	15.000.000	100	15.930.000	100	16.917.660	100	47.847.660	Kecamatan Balerejo
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	12.500.000	100	16.000.000	100	19.500.000	100	48.000.000	Kecamatan Dagangan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95	100	35.325.415	100	36.698.409	100	37.525.243	100	109.549.067	Kecamatan Dolopo
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,81	100	5.037.500	100	5.289.375	100	5.408.386	100	15.735.261	Kecamatan Geger
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	7.324.808	100	12.200.000	100	13.700.000	100	33.224.808	Kecamatan Gemarang
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	14.281.000	100	15.466.323	100	19.409.053	100	49.156.376	Kecamatan Jiwan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	20.856.500	100	22.233.029	100	22.788.855	100	65.878.384	Kecamatan Kebonsari
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	5.208.000	100	8.208.000	100	8.208.000	100	21.624.000	Kecamatan Kare
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	22.888.000	100	25.500.000	100	27.000.000	100	75.388.000	Kecamatan Madiun
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	29.956.498	100	46.606.498	100	47.106.498	100	123.669.494	Kecamatan Mejayan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	15.800.000	Kecamatan Pilangkenceng
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	11.680.000	100	22.130.000	100	24.880.000	100	58.690.000	Kecamatan Sawahan
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	9.100.000	100	9.100.000	100	22.500.000	Kecamatan Saradan



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	86,28	100	12.000.000	100	20.000.000	100	17.000.000	100	49.000.000	Kecamatan Wungu
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	10.000.000	100	14.000.000	100	15.500.000	100	39.500.000	Kecamatan Wonoasri
4.4	Meningkatnya Kualitas Aparatur Sipil Negara	INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)			INDEKS	64,79	65,00		66,00		67,00		67,00		
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN	%	100	100	877.329.341	100	899.262.574	100	989.188.832	100	2.765.780.746	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100	1.013.759.884	100	1.039.103.881	100	1.065.081.478	100	3.117.945.243	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase kedisiplinan ASN	%	90	90	149.361.606	90	153.095.646	90	156.923.037	92	459.380.289	Badan Kepegawaian Daerah



No	TUJUAN / SASARAN	IKU / IKD	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA AWAL (2022)	2024		2025		2026		KONDISI KINERJA AKHIR RPD		PERANGKAT DAERAH
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
				Persentase Penilaian Kinerja ASN	%	90	90	165.906.501	92	170.054.163	95	174.305.517	95	510.266.181	Badan Kepegawaian Daerah
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	96	97	901.850.273	98	1.324.396.530	100	1.369.156.995	100	3.595.403.798	Badan Kepegawaian Daerah
				Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi	%	96	97	229.600.000	100	638.983.289	100	541.223.500	100	1.409.806.789	Badan Kepegawaian Daerah
		ANGKA KEMATANGAN ORGANISASI			ANGKA	65,51	65,76		66,76		67,00		67,00		
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	-	47,4	47,4	198.949.013	47,4	200.949.013	47,4	201.949.013	47,4	481.011.262	Bagian Organisasi

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal suatu urusan atau program bersifat strategis, maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu karena suatu urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena pengaruhnya yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi. Suatu urusan menjadi strategis tergantung tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya.

Oleh karena itu dalam perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun ini ditetapkan adanya Program Prioritas I, Program Prioritas II dan Program Prioritas III. Program Prioritas I merupakan program yang berkaitan dengan pelayanan wajib dasar ditambahkan dengan program penunjang. Sedangkan Program Prioritas II merupakan program yang secara langsung mendukung sasaran pembangunan sebagaimana pada tujuan sasaran RPD. Sedangkan Program Prioritas III adalah program penyelenggaraan urusan sesuai urusan yang belum terakomodir pada Prioritas I dan III.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Setelah program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan strategis maupun dari rumusan permasalahan pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk setiap program. Pagu indikatif program merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demi memastikan bahwa program pembangunan daerah dapat didanai dengan baik, tentunya perlu diperhatikan



pula kapasitas riil Kabupaten Madiun. Idealnya Kapasitas Riil suatu daerah harus mampu memenuhi kebutuhan program pembangunan (belanja langsung) dalam kerangka pendanaan.



Tabel 7.1 Program Prioritas I Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1,01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan												
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,04	87,98	593.110.838	88,92	604.973.055	89,86	617.072.516	89,86	1.815.156.409	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	50.000.000	66,34	51.000.000	71,74	52.020.000	71,74	153.020.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Nilai	95,74	97	410.752.824.396	97	421.011.737.939	98	423.649.985.207	98	1.255.414.547.542	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100	100,00	27.678.303.440	100,00	28.313.170.872	100,00	28.894.666.866	100,00	84.886.141.178	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	98,36	100,00	110.211.458.333	100,00	115.266.663.820	100,00	112.857.453.933	100,00	338.335.576.086	
		Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	%	6,34	100,00	18.612.954.605	100,00	19.064.707.749	100,00	19.487.358.157	100,00	57.165.020.511	
		Rerata kemampuan literasi SD	%	61,46	66,55	517.093.765	69,10	558.243.320	71,64	570.095.876	71,64	1.645.432.962	
		Rerata kemampuan literasi SMP	Nilai	70,32	76,36	258.000.000	79,38	270.900.000	82,40	276.318.000	82,40	805.218.000	
		Rerata kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,34	52,25	584.461.761	53,71	613.684.849	55,16	644.369.092	55,16	1.842.515.702	
		Rerata kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58,07	62,04	175.721.120	64,03	179.235.542	66,01	182.820.253	66,01	537.776.916	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	88,45	95,53	225.000.000	99,07	236.250.000	100,00	248.062.500	100,00	709.312.500	
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	86	92,68	95.140.000	96,02	97.042.800	99,36	98.983.656	99,36	291.166.456	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Nilai	94,62	99,60	975.937.923	100,00	995.456.681	100,00	1.015.365.815	100,00	2.986.760.420	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	90,74	95,16	1.451.528.000	97,37	1.480.558.560	99,58	1.510.169.731	99,58	4.442.256.291	
		Indeks Inklusivitas SD	Nilai	83,33	89,53	325.000.000	92,63	325.000.000	95,73	991.250.000	95,73	1.641.250.000	
		Indeks Inklusivitas SMP	Nilai	82,08	88,28	1.098.250.000	91,38	1.153.162.500	94,48	1.176.225.750	94,48	3.427.638.250	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	%	49,71	52,69	100.000.000	55,59	105.000.000	58,49	110.250.000	58,49	315.250.000	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal	%	100	100,00	102.698.959	100,00	104.318.125	100,00	106.668.464	100,00	313.685.548	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikat pendidik	%	42,78	40,72	10.693.874	38,34	10.798.967	36,22	11.080.990	36,22	32.573.831	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	77,68	79,50	15.000.000	80,00	15.300.000	82,00	15.606.000	82,00	45.906.000	
		Jumlah				573.833.177.014		590.457.204.779		592.515.822.807		1.756.806.204.600	
1,02	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan												
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,04	80,01	68.961.666.600	83,00	71.005.933.421	86,00	68.717.195.410	86,00	208.684.795.431	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (dinkes)	Nilai	35,09	60,94	3.831.203.700	66,34	3.944.774.079	71,74	3.817.621.967	71,74	11.593.599.746	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (dinkes)	Nilai	75	85	3.831.203.700	88	3.944.774.079	88	3.817.621.967	90	11.593.599.746	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (RS Caruban)	nilai	93,36	92	120.723.499.871	94	122.627.631.403	95	125.391.619.506	95	11.593.599.746	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (RS Dolopo)	nilai	90	92	68.355.095.787	94	71.685.605.365	95	76.141.165.901	95	11.593.599.746	
		Nilai Pengawasan Kearsipan (RS Caruban)	nilai	N/A	60,94	100.000.000	66,34	100.000.000	71,74	100.000.000	71,74	11.593.599.746	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai Pengawasan Kearsipan (RS Dolopo)	nilai	40,94	60,94	100.000.000	66,34	120.000.000	71,74	150.000.000	71,74	11.593.599.746	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi	per 1.000 lahir hidup	6,18	5,57	16.087.956.515	5,29	16.572.389.924	5,02	16.049.543.620	5,02	48.709.890.059	Dinas Kesehatan, RSUD Caruban, RSUD Dolopo
		Angka Kematian Ibu	per 100.000 lahir hidup	77,19	73,00	16.087.956.515	70,00	16.572.389.924	66,00	16.049.543.620	66,00	48.709.890.059	
		Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	%	76,92	84,00	16.087.956.515	92,00	16.572.389.924	100,00	16.049.543.620	100,00	48.709.890.059	
		Prevalensi Balita Stunting	%	17,6	14,00	16.087.956.515	12,00	16.572.389.924	10,00	16.049.543.620	10,00	48.709.890.059	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	%	57,00	61,00	16.087.956.515	65,00	16.572.389.924	69,00	16.049.543.620	69,00	48.709.890.059	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	%	65,17	66,00	19.172.157.079	67,00	19.474.427.932	68,00	19.913.196.488	68,00	58.559.781.499	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	%	64,00	65,00	22.410.126.086	66,00	22.763.447.201	67,00	23.276.318.998	67,00	68.449.892.285	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	1.593.724.018	0.7 : 1.000	1.641.321.481	0.9 : 1.000	1.589.120.189	0.9 : 1.000	4.824.165.687	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	2,0 : 1000	1.593.724.018	2.5 : 1.000	1.641.321.481	3,0 : 1000	1.589.120.189	3,0 : 1000	4.824.165.687	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	726.200.597	100	747.888.986	100	724.102.804	100	2.198.192.388	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKM yang dilakukan pembinaan	%	100	100	759.807.608	100	794.154.963	100	780.719.264	100	2.334.681.835	
		Jumlah				392.598.191.637		387.392.840.087		406.255.520.784		647.026.333.659	
1.03	Usuran Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,35	80	52.874.800	83	55.518.540	86	57.739.282	86	166.132.622	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,35	60,94	49.561.936	66,34	2.864.952	71,74	636.184	71,74	53.063.072	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	14.763.283.846	90	15.501.448.038	90	16.121.505.960	90	46.386.237.844	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	%	85,25	86,27	25.992.643.616	86,65	27.292.275.797	87,02	28.656.889.587	87,02	81.941.808.999	
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Pelayanan Air Minum	%	3,19	3,62	13.797.622.658	3,84	15.177.384.924	4,05	16.088.028.019	4,05	45.063.035.601	
1.03.04	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Layak	%	0,6	1,08	8.081.550.768	1,33	8.889.705.845	1,57	9.423.088.195	1,57	26.394.344.808	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	15,870	16,469	6.312.385.527	17,069	6.458.476.951	17,668	7.101.295.572	17,668	19.872.158.049	
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%	5,895	6,398	10.210.867.679	6,965	12.071.954.447	7,595	12.087.113.080	7,595	34.369.935.206	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.03.06	Program Penataan Bangunan Gedung	Penataan bangunan gedung baik	%	17,86	17,86	18.357.949.602	17,86	19.826.585.570	17,86	20.619.648.993	17,86	58.804.184.164	
1.03.07	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	76,892	72,390	73.396.250.706	73,041	81.680.655.087	73,811	84.862.361.828	73,811	239.939.267.621	
1.03.08	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan	%	69,890	85,230	252.806.257	90,909	267.974.632	100	313.530.320	100	834.311.209	
1.03.09	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang	%	31,25	31,25	4.328.712.042	37,50	4.545.147.644	56,25	4.681.502.073	56,25	13.555.361.760	
		Jumlah				175.596.509.437		191.769.992.426		200.013.339.093		567.379.840.956	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman													
1.04.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	87	1.298.280.506	88	1.384.986.935	89	1.473.082.927	89	4.156.350.368	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	29,18	60,94	20.000.000	66,34	25.000.000	71,74	30.000.000	71,74	75.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	91	3.518.609.669	92	3.696.810.649	93	3.884.148.726	93	11.099.569.044	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	%	100	100	913.259.000	100	933.921.950	100	955.618.048	100	2.802.798.998	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	ha	54,43	104,43	5.511.761.719	154,43	5.724.918.911	204,43	5.614.257.943	204,43	16.850.938.573	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	%	100	100	3.889.105.000	100	4.083.560.250	100	4.208.488.263	100	12181153513	
		Jumlah				15.151.015.894		15.849.198.695		16.165.595.906		47.165.810.495	
1,05 Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,82	78	112.200.000	83	120.000.000	86	125.000.000	86	357.200.000	Satpol PP
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,42	60,94	15.810.000	66,34	30.000.000	71,74	25.000.000	71,74	70.810.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	7.862.658.258	85	8.040.993.659	90	8.062.927.285	90	23.966.579.202	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1.075.397.180	100	1.347.491.822	100	1.388.646.485	100	3.811.535.487	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Perda/Perkada yang memuat Sanksi yang ditegakkan	%	100	100	1.280.400.000	100	1.887.022.400	100	2.082.024.848	100	5.249.447.248	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	%	100	100	4.601.591.699	100	4.754.507.271	100	4.887.204.656	100	14.243.303.626	
		Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	%	100	100	225.700.000	100	264.505.792	100	266.751.410	100	756.957.202	
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,4	15.000.000	80,6	15.000.000	80,8	15.000.000	80,80	45.000.000	
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,39	60,94	15.000.000	66,34	15.000.000	71,74	15.000.000	71,74	45.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Nilai	79,53	80	2.986.016.496	82	3.029.664.641	84	3.344.611.783	84	9.360.292.920	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh layanan Mitigasi	orang	-	4000	941.910.514	4250	1.478.164.000	4500	1.279.200.000	4500	3.699.274.514	
		Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani	%	100	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	3.030.000.000	
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	
		Jumlah				20.241.684.147		22.092.349.585		22.601.366.467		64.935.400.199	
1,06	Usuran Pemerintah Bidang Sosial												
1.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,88	78,88	120.000.000	79	126.200.000	79,5	128.724.000	79,5	374.924.000	Dinas Sosial



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65	70	15.000.000	71	16.200.000	72	16.524.000	72	47.724.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	5.581.381.161	80	6.055.125.963	80	6.182.356.700	80	17.818.863.824	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Kelompok Masyarakat Miskin PPKS kewenangan Pemberdayaan Sosial yang dibina dan diberdayakan	%	28	20	139.249.257	22	148.996.705	23	151.976.639	23	440.222.602	
		Persentase PSKS yang dibina dan diberdayakan	%	30	34	865.277.240	36	957.193.875	36	970.766.253	36	2.793.237.368	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Tertangani	orang	15,02	60	1.673.674.253	63	1.787.970.171	65	1.817.928.810	65	5.279.573.234	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran (PKH dan Keluarga Miskin Kewenangan Kab/Kota)	%	48,76	45	6.990.545.016	50	7.409.977.717	53	7.486.584.315	53	21.887.107.047	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	88,09	70	663.000.000	70	702.780.000	70	716.835.600	70	2.082.615.600	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Tepat Sasaran (paska Korban bencana alam dan sosial)	%	100	90	241.100.143	90	309.282.154	90	315.467.797	90	865.850.093	
		Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	503.140.683	100	543.391.937	100	554.259.776	100	1.600.792.396	
		Jumlah				16.792.367.752		18.057.118.520		18.341.423.891		53.190.910.164	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Usuran Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2,07	Usuran Pemerintah Bidang Tenaga Kerja												
2.07.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	63,79	76	1.192.736.497	77	1.330.500.000	78	1.434.700.000	78	3.957.936.497	Dinas Tenaga Kerja
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,7	60,94	26.431.431	66,34	180.000.000	71,74	180.000.000	71,74	386.431.431	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	96,29	76	3.938.630.530	77	4.372.505.700	78	4.930.000.178	78	13.241.136.408	
		Jumlah				5.157.798.458		5.883.005.700		6.544.700.178		17.585.504.336	
2,08	Usuran Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2,09	Usuran Pemerintah Bidang Pangan												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	72	20.000.000	73	20.400.000	75	21.012.000	75	61.412.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,15	60,94	10.000.000	66,34	10.200.000	71,74	10.506.000	71,74	30.706.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,52	90	4.595.691.671	91	4.677.405.504	92	4.807.221.670	92	14.080.318.845	
					4.625.691.671		4.708.005.504		4.838.739.670		14.172.436.845		
2,10	Usuran Pemerintah Bidang Pertanahan												
2,11	Usuran Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup												
2.11.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86	168.916.551	87	170.000.000	88	175.000.000	88	513.916.551	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	10.000.000	66,34	20.000.000	71,74	25.000.000	71,74	55.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	13.618.020.574	95	13.715.000.000	95	13.805.000.000	95	41.138.020.574	
	Jumlah					13.796.937.125		13.905.000.000		14.005.000.000		41.706.937.125	
2,12 Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,03	87,00	7.915.050	89	8.455.196	90	8.749.823	90	25.120.069	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,78	60,94	15.000.000	66,34	16.023.644	71,74	16.581.998	71,74	47.605.642	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan	Nilai	77	90	5.064.195.101	95	5.409.790.765	96	5.598.298.181	96	16.072.284.047	
		Jumlah				5.087.110.151		5.434.269.605		5.623.630.002		16.145.009.758	
2,13 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
2.13.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,38	82,45	165.643.706	82,75	183.926.000	83,00	213.122.400	83,00	562.692.106	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,98	60,94	197.755.345	66,34	96.365.600	71,74	120.183.800	71,74	414.304.745	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,088	89	5.616.638.966	90	5.693.253.717	91	5.816.246.501	91	17.126.139.184	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				5.980.038.017		5.973.545.317		6.149.552.701		18.103.136.035	
2,14 Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.14.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,86	85,00	2.000.000	85,20	2.000.000	85,25	2.000.000	85,25	6.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,80	60,94	5.000.000	66,34	5.250.000	71,74	5.500.000	71,74	15.750.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,09	88,15	4.329.757.722	88,40	4.397.881.638	88,60	4.496.881.447	88,60	13.224.520.807	
		Jumlah				4.336.757.722		4.405.131.638		4.504.381.447		13.246.270.807	
2,15 Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan													
2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	10.000.000	80,03	10.500.000	80,05	11.025.000	80,05	31.525.000	Dinas Perhubungan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	32,56	60,94	50.000.000	66,34	55.000.000	71,74	60.000.000	71,74	165.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	6.486.079.278	100	6.951.628.606	100	6.831.326.796	100	20.269.034.680	
		Jumlah				6.546.079.278		7.017.128.606		6.902.351.796		20.465.559.680	
2,16 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika													
2.16.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,41	82,45	30.022.450	82,5	30.472.780	82,55	30.929.870	82,55	91.425.100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,31	60,94	30.000.000	66,34	31.450.000	71,74	32.906.750	71,74	94.356.750	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	88	5.406.883.109	89	5.542.963.067	90	5.666.307.565	90	16.616.153.741	
		Jumlah				5.466.905.559		5.604.885.847		5.730.144.185		16.801.935.591	
2,17 Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
2.17.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01	78	15.000.000	80	15.000.000	82	15.000.000	82	45.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	50,51	60,94	20.400.000	66,34	26.520.000	71,74	27.846.000	71,74	74.766.000	
		Kepuasan ASN Terhadap Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	95	8.185.998.436	95	8.576.784.153	100	8.714.811.253	100	25.477.593.842	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				8.221.398.436		8.618.304.153		8.757.657.253		25.597.359.842	
2,18 Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal													
2.18.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,36	81	20.000.000	81,5	25.000.000	82	30.000.000	82	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	43,57	60,94	10.000.000	66,34	20.000.000	71,74	25.000.000	71,74	55.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	85,29	86	3.912.167.721	87	4.380.314.146	88	4.598.807.070	88	12.891.288.937	
		Jumlah				3.942.167.721		4.425.314.146		4.653.807.070		13.021.288.937	
2,19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,17	80	210.000.000	81	215.000.000	81	225.000.000	81	650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	105.000.000	66,34	110.000.000	71,74	115.000.000	71,74	330.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.729.082.417	80	2.729.082.426	80	2.729.082.426	80	8.187.247.269	
		Jumlah				3.044.082.417		3.054.082.426		3.069.082.426		9.167.247.269	
2,20	Urusan Pemerintah Bidang Statistik												
2,21	Urusan Pemerintah Bidang Persandian												
2,22	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan												
2,23	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.23.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,35	82,00	75.000.000	83,00	75.000.000	84,00	75.000.000	84,00	225.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	74,34	75	5.000.000	83	5.000.000	85	5.000.000	85	15.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	77,27	77,00	3.714.657.834	88	3.727.615.962	90	3.724.938.984	90	11.167.212.780	
		Jumlah				3.794.657.834		3.807.615.962		3.804.938.984		11.407.212.780	
2,24	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan												
3	Urusan Pilihan												
3,25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan												
3,26	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata												
3,27	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.27.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,04	80	1.067.435.600	81	1.067.435.600	82	1.067.435.600	82	3.202.306.800	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,50	60,94	1.064.400	66,34	1.064.400	71,74	1.064.400	71,74	3.193.200	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	85	85	13.958.522.818	86	13.958.522.818	87	13.958.522.818	87	41.875.568.454	
		Jumlah				15.027.022.818		15.027.022.818		15.027.022.818		45.081.068.454	
3,30	Usuran Pemerintah Bidang Perdagangan												
3,31	Usuran Pemerintah Bidang Perindustrian												
3,32	Transmigrasi												
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4,01	Sekretariat Daerah												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	100	25.481.630.330	100	25.894.495.436	100	26.367.756.108	100	77.743.881.874	Bagian Umum
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	56,98	60,94	4.695.300	66,34	10.000.000	71,74	20.000.000	71,74	34.695.300	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	80,01	346.582.787	80,01	359.347.357	80,01	368.331.041	80,01	1.074.261.184	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	178.860.330	100	182.860.330	100	191.860.330	100	553.580.990	Bagian Organisasi
		Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	%	100	100	61.000.000	100	63.341.368	100	66.341.368	100	190.682.736	
		Nilai Pelaporan	PD	53	53	59.113.415	53	59.113.415	53	60.113.415	53	178.340.245	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Nilai IKM	Nilai	83,34	85,5	158.000.000	87,5	160.000.000	90,5	161.011.262	90,5	481.011.262	
		Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Nilai	-	47,4	198.949.013	47,4	200.949.013	47,4	201.949.013	47,4	481.011.262	
		Jumlah				26.488.831.175		26.930.106.919		27.437.362.537		80.737.464.854	
4.02 Sekretariat DPRD													
4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,89	70	4.468.717.934	75	2.290.825.470	80	2.323.916.800	80,01	9.083.460.204	Sekretariat DPRD
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,25	60,94	13.902.399	66,34	15.000.000	71,74	16.000.000	71,74	44.902.399	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	34.114.931.558	100	35.993.809.530	100	35.769.700.154	100	105.878.441.242	
		Jumlah				38.391.390.891		38.856.695.840		38.922.320.688		116.170.407.419	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	Perencanaan												
5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,11	81,00	148.452.373	82,00	185.555.864	83,00	194.833.657	83,00	528.841.893	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,49	60,94	5.000.000	66,34	10.000.000	71,74	11.000.000	71,74	26.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	6.495.446.253	82	6.713.015.018	85	6.707.092.051	85	19.915.553.321	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				6.648.898.626		6.908.570.881		6.912.925.708		20.470.395.215	
5,05 Penelitian dan Pengembangan													
5,02 Keuangan													
5.02.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,45	80,5	767.352.004	81	782.699.044	81	821.833.996	81,5	2.371.885.044	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,06	60,94	100.000.000	66,34	102.000.000	71,74	107.100.000	71,74	309.100.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	83,60	85	30.772.505.499	85	31.387.885.609	85	32.957.349.888	85	95.117.740.996	
5.02.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,32	87	881.616.247	87	925.697.059	87	944.211.001	87	2.751.524.307	Badan Pendapatan Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,21	60,94	61.227.785	66,30	64.289.174	71,70	65.574.958	71,70	191.091.916	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	90	90	10.762.634.614	90	11.331.845.423	90	11.595.567.580	90	33.690.047.617	
	Jumlah					43.345.336.149		44.594.416.310		46.491.637.422		134.431.389.881	
5.03 Kepegawaian													
5.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,47	80,47	54.881.090	81	132.362.991	81,15	135.672.066	81,15	322.916.147	Badan Kepegawaian Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,11	60,94	4.059.000	66,34	4.160.475	71,74	4.264.487	71,74	12.483.962	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	99	100	4.929.118.118	100	5.103.596.072	100	5.231.185.974	100	15.263.900.164	
		Jumlah				4.988.058.208		5.240.119.538		5.371.122.527		15.599.300.273	
5,04 Pendidikan dan Pelatihan													
6,01 Inspektorat													
6.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,04	80,06	80.000.000	80,08	145.000.000	81	155.000.000	100	380.000.000	Inspektorat
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	46,32	60,94	57.000.000	66,34	90.000.000	71,74	100.000.000	71,74	247.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	60	60	7.364.941.240	65	8.386.228.960	70	8.427.228.961	70	24.178.399.161	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				7.501.941.240		8.621.228.960		8.682.228.961		24.805.399.161	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8,01	Kesatuan Bangsa dan Politik												
8.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,75	86,75	50.000.000	86,75	50.000.000	86,75	70.000.000	86,75	170.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,96	60,94	10.000.000	66,34	15.000.000	71,74	25.000.000	71,74	50.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,04	89	3.601.742.162	89	3.654.473.690	89	3.708.275.284	89	10.964.491.136	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				3.661.742.162		3.719.473.690		3.803.275.284		11.184.491.136	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01	Kecamatan												
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	15.000.000	80,03	15.930.000	80,05	16.248.600	80,05	47.178.600	Kecamatan Balerejo
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	52,07	60,94	1.000.000	66,34	1.100.000	71,74	1.122.000	71,74	3.222.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87	80	2.565.359.426	85	2.705.503.905	90	2.766.322.880	90	8.037.186.211	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,99	80,01	4.000.000	80,03	6.000.000	80,05	7.000.000	80,05	17.000.000	Kecamatan Dagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,83	60,94	700.000	66,34	1.100.000	71,74	1.100.000	71,74	2.900.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	2.820.909.969	85	3.010.017.000	90	3.054.498.481	90	8.885.425.450	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,99	80,01	11.560.000	80,03	12.009.303	80,05	12.279.879	80,05	35.849.182	Kecamatan Dolopo (2 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	27,37	60,94	2.000.000	66,34	2.077.734	71,74	2.124.546	71,74	6.202.281	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	93	80	4.178.036.535	85	4.340.424.461	90	4.438.216.386	90	12.956.677.381	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,47	80,01	4.750.000	80,03	4.987.500	80,05	5.099.719	80,05	14.837.219	Kecamatan Geger



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	42,11	60,94	1.900.000	66,34	1.995.000	71,74	2.039.888	71,74	5.934.888	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.750.062.633	85	2.888.735.282	90	2.953.825.782	90	8.592.623.697	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,25	80,01	14.700.000	80,03	16.500.000	80,05	17.200.000	80,05	48.400.000	Kecamatan Gemarang
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,69	60,94	3.500.000	66,34	5.700.000	71,74	7.000.000	71,74	16.200.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	1.980.827.984	85	2.115.018.418	90	2.146.867.963	90	6.242.714.365	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	5.750.000	80,03	6.227.250	80,05	6.538.613	80,05	18.515.863	Kecamatan Jiwan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	36,63	60,94	2.550.000	66,34	2.761.650	71,74	2.899.733	71,74	8.211.383	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	2.948.409.895	85	3.184.860.051	90	3.251.220.896	90	9.384.490.842	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	80,01	28.542.200	80,03	30.425.985	80,05	31.186.635	80,05	90.154.820	Kecamatan Kebonsari
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,14	60,94	1.000.000	66,34	1.066.000	71,74	1.092.650	71,74	3.158.650	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	95	80	2.085.813.245	85	2.211.432.220	90	2.266.151.847	90	6.563.397.312	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,15	80,01	5.700.000	80,03	7.000.000	80,05	8.000.000	80,05	20.700.000	Kecamatan Kare



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	26,91	60,94	3.500.000	66,34	4.500.000	71,74	5.500.000	71,74	13.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.289.821.500	85	2.335.236.579	90	2.409.271.520	90	7.034.329.599	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,42	80,01	2.000.000	80,03	2.500.000	80,05	3.000.000	80,05	7.500.000	Kecamatan Madiun (1 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	34,99	60,94	1.000.000	66,34	1.200.000	71,74	1.500.000	71,74	3.700.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87,55	80	3.834.829.558	85	4.028.892.139	90	4.164.314.178	90	12.028.035.875	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	500.000	80,03	500.000	80,05	1.000.000	80,05	2.000.000	Kecamatan Mejayan (3 kelurahan)



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,49	60,94	1.000.000	66,34	1.000.000	71,74	1.500.000	71,74	3.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	4.711.355.946	85	4.726.158.935	90	4.781.475.146	90	14.218.990.027	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	1.400.000	80,03	1.500.000	80,05	1.600.000	80,05	4.500.000	Kecamatan Pilangkenceng
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,17	60,94	3.500.000	66,34	7.000.000	71,74	9.000.000	71,74	19.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	2.216.116.325	85	2.308.632.993	90	2.352.004.049	90	6.876.753.367	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,58	80,01	3.778.700	80,03	8.728.700	80,05	17.478.700	80,05	29.986.100	Kecamatan Sawahan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	55,4	60,94	7.350.000	66,34	25.000.000	71,74	26.250.000	71,74	58.600.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	2.757.401.897	85	2.805.901.897	90	2.851.883.632	90	8.415.187.426	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	1.400.000	80,03	1.500.000	80,05	1.600.000	80,05	4.500.000	Kecamatan Saradan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	38,88	60,94	3.500.000	66,34	10.000.000	71,74	13.000.000	71,74	26.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.959.610.816	85	3.042.376.553	90	3.052.892.568	90	9.054.879.937	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,03	80,01	2.000.000	80,03	4.000.000	80,05	6.000.000	80,05	12.000.000	Kecamatan Wungu (2 kelurahan)



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	30,66	60,94	2.500.000	66,34	4.500.000	71,74	6.500.000	71,74	13.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	79	80	4.511.078.010	85	4.637.027.340	90	4.723.488.136	90	13.871.593.486	
7.01.0 1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	2.000.000	80,03	2.000.000	80,05	2.500.000	80,05	6.500.000	Kecamatan Wonoasri
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,89	60,94	200.000	66,34	250.000	71,74	250.000	71,74	700.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	92	80	2.216.816.351	85	2.298.006.966	90	2.333.983.724	90	6.848.807.041	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				45.834.892.594		47.759.956.579		48.650.883.055		142.245.732.228	

Tabel 7.2 Program Prioritas II Kabupaten Madiun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2,07	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja												
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta Pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	2.581.562.886	100	2.749.412.203	100	2.442.049.143	100	7.773.024.232	Dinas Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan tenaga kerja formal	%	100	80	249.607.100	82	259.607.100	84	264.607.100	84	773.821.300	
		Jumlah				2.831.169.986		3.009.019.303		2.706.656.243		8.546.845.532	
2,08	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	%	75,92	81,93	349.851.227	83,13	355.367.029	83,13	363.373.625	83,13	1.068.591.881	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	%	30	30	226.067.541	31,25	229.631.753	32,5	234.805.471	32,5	690.504.765	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	168.480.489	100	171.136.776	100	174.992.573	100	514.609.838	
		Jumlah				744.399.257		756.135.558		773.171.669		2.273.706.484	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2,09 Urusan Pemerintah Bidang Pangan													
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	skor	1839 / 56	2150 / 57	1.363.445.460	2150 / 57	1.390.714.369	2150 / 57	1.432.435.800	2150 / 57	4.186.595.629	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
						230.910.049		235.528.250		242.594.097		709.032.396	
2,10 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian													
2,11 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup													
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	40	40	5.401.269.197	45	5.490.519.520	50	5.372.625.444	50	16.264.414.161	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah				5.401.269.197		5.490.519.520		5.372.625.444		16.264.414.161	
2,12 Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,03	87,00	7.915.050	89	8.455.196	90	8.749.823	90	25.120.069	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,78	60,94	15.000.000	66,34	16.023.644	71,74	16.581.998	71,74	47.605.642	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan	Nilai	77	90	5.064.195.101	95	5.409.790.765	96	5.598.298.181	96	16.072.284.047	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	n/a	100	1.079.017.375	100	1.152.652.715	100	1.192.817.593	100	3.424.487.682	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	99	100	730.600.000	100	780.458.307	100	807.653.846	100	2.318.712.153	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	99	100	725.905.080	100	775.442.991	100	802.463.769	100	2.303.811.841	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola	%	100	100	150.000.000	100	160.236.444	100	165.819.979	100	476.056.423	
Jumlah						7.772.632.606		8.303.060.062		8.592.385.189		24.668.077.857	
2,13 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib	%	74,24	85,86	3.076.470.713	88,38	3.288.517.444	90,91	3.157.979.056	90,91	9.522.967.213	Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa
		Persentase Desa dengan kualitas perencanaan pembangunan yang baik	%	70,20	73,23	398.309.002	77,27	415.100.156	83,33	477.938.225	83,33	1.291.347.383	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	66,86	72,36	1.087.624.542	75,13	1.319.974.525	78,88	1.419.535.400	78,88	3.827.134.467	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	n, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDesa Maju	%	46,46	56,57	820.500.000	63,13	1.247.725.107	73,23	1.308.051.900	73,23	3.376.277.007	
		Jumlah				5.382.904.257		6.271.317.232		6.363.504.581		18.017.726.070	
2,14 Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	%	19,74	14,54	4.736.628.018	11,06	4.820.325.878	7,60	4.969.896.416	7,60	14.526.850.312	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	%	80,49	80,49	4.660.960.047	82,93	4.725.425.847	85,37	4.790.925.847	85,37	14.177.311.741	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	%	5,48	5,48	3.512.436.780	5,47	4.083.580.476	5,45	4.186.850.826	6,00	11.782.868.082	
		Jumlah				12.910.024.845		13.629.332.201		13.947.673.089			
2,15 Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan													
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	80	85	25.165.076.856	88	26.908.448.063	90	27.788.401.185	90	79.861.926.104	Dinas Perhubungan
		Persentase Kendaraan laik jalan	%	90	92	218.000.000	94	224.500.000	96	228.000.000	96	670.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Manajemen rekayasa lalu lintas	%	70	75	1.162.681.900	80	1.291.870.860	85	1.321.719.268	85	3.776.272.028	
		Jumlah				26.545.758.756		28.424.818.923		29.338.120.453		84.308.698.132	
2,16	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika												
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	100	100	756.732.519	100	921.028.188	100	941.779.412	100	2.619.540.119	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	%	100	100	2.162.222.502	100	2.500.042.239	100	2.557.391.965	100	7.219.656.706	
		Jumlah				2.918.955.021		3.421.070.427		3.499.171.377		9.839.196.825	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2,17 Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah													
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terbina	%	22	27	695.000.000	30	822.500.000	31	863.625.000	31	2.381.125.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Produk	%	2,19	2,21	300.000.000	2,22	390.000.000	2,24	390.000.000	2,24	1.080.000.000	
Jumlah						995.000.000		1.212.500.000		1.253.625.000		3.461.125.000	
2,18 Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal													
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Perusahaan	1500	1000	90.000.000	1000	140.000.000	1000	170.000.000	3000	400.000.000	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai	92,25	89	100.000.000	89,5	110.000.000	90	125.000.000	90	335.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Investor	Perusahaan	9000	12500	201.900.000	13500	230.000.000	14500	120.000.000	14500	551.900.000	
		Jumlah				391.900.000		480.000.000		415.000.000		1.286.900.000	
2,19	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga												
2,20	Urusan Pemerintah Bidang Statistik												
2,21	Urusan Pemerintah Bidang Persandian												
2,22	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan												
2,23	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan												
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	%	2,7	3,37	683.988.000	3,40	685.988.000	3,40	686.988.000	3,40	2.056.964.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				683.988.000		685.988.000		686.988.000		2.066.964.000	
2,24	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan												
3	Urusan Pilihan												
3,25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan												
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,04	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	430.300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Jumlah				130.000.000		143.000.000		157.300.000		430.300.000	
3,26	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata												
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	60	30	1.994.000.000	30	2.080.000.000	30	2.124.940.000	30	6.198.940.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				1.994.000.000		2.080.000.000		2.124.940.000		6.198.940.000	
3,27 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian													
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	7,24	2	2.327.288.723	2	2.415.153.159	3	2.540.768.475	3	7.283.210.357	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Persentase peningkatan jumlah ternak	%	1	1	300.000.000	1	306.000.000	1	315.180.000	1	921.180.000	
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Hewan Ternak dalam Keadaan Sehat	%	100	100	442.844.796	100	462.086.566	100	475.104.719	100	1.380.036.080	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	4	4	2.455.697.315	4	2.563.855.041	4	2.822.766.201	4	7.842.318.557	Dinas Pertanian dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase prasarana peternakan dalam keadaan baik	%	100	100	150.000.000	100	153.000.000	100	157.590.000	100	460.590.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	7,67	9	1.602.500.000	10	1.662.500.000	11	1.672.500.000	11	4.937.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Jumlah Peternak	%	1	1	163.223.390	1	166.487.858	1	171.482.494	1	501.193.741	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Jumlah				7.441.554.224		7.729.082.624		8.155.391.888		23.326.028.736	
3,30	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan												
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang tersedia	%	0	5,71	1.716.250.000	8,11	1.959.562.500	10	2.057.540.625	10	5.733.353.125	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Peningkatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Telah Dibina Dan Telah Diberdayakan	%	0	35,14	919.207.500	40,00	974.667.875	50,00	1.023.401.269	50,00	2.917.276.644	
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga	%	9,3	12	865.517.225	11,9	1.013.844.809	11,8	1.031.011.617	11,8	2.910.373.651	
		Jumlah				3.500.974.725		3.948.075.184		4.111.953.511		11.561.003.419	
3,31	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian												
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	2	566.016.002	2	570.000.000	2	245.000.000	2	1.381.016.002	Dinas Tenaga Kerja
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terfasilitasi perijinan	%	6	8	25.161.109	8	45.000.000	8	50.000.000	8	120.161.109	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				591.177.111		615.000.000		295.000.000		1.501.177.111	
3,32	Transmigrasi												
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4,01	Sekretariat Daerah												
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	178.860.330	100	182.860.330	100	191.860.330	100	553.580.990	Bagian Organisasi
		Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	%	100	100	61.000.000	100	63.341.368	100	66.341.368	100	190.682.736	
		Nilai Pelaporan	PD	53	53	59.113.415	53	59.113.415	53	60.113.415	53	178.340.245	
		Nilai IKM	Nilai	83,34	85,5	158.000.000	87,5	160.000.000	90,5	161.011.262	90,5	481.011.262	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Nilai	-	47,4	198.949.013	47,4	200.949.013	47,4	201.949.013	47,4	481.011.262	
		Jumlah				655.922.758		666.264.126		681.275.388		1.884.626.495	
4.02	Sekretariat DPRD												
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5,01	Perencanaan												
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	1.450.000.000	100	1.400.000.000	100	1.237.000.000	100	4.087.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai ketentuan	%	100	100	450.000.000	100	600.000.000	100	863.000.000	100	1.913.000.000	
		Jumlah				1.900.000.000		2.000.000.000		2.100.000.000		6.000.000.000	
5,05	Penelitian dan Pengembangan												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5,02 Keuangan													
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Baik	%	93,75	100	427.216.694.339	100	433.795.518.378	100	442.531.388.188	100	1.303.543.600.905	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	-	100	5.395.549.659	100	5.503.460.652	100	5.778.633.686	100	16.677.643.997	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	12	12	684.892.929	12	719.137.576	12	733.520.327	12	2.137.550.832	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	%	100	100	167.846.623	100	176.238.954	100	179.763.734	100	523.849.311	
		Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	SPPT	422.500	422.500	441.409.806	423.500	463.480.297	423.500	472.749.902	423.500	1.377.640.005	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	%	100	100	691.411.669	100	725.982.252	100	740.501.897	100	2.157.895.818	
		Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi (ajuan)	Ajuan	1.325	1.325	44.244.586	1.350	46.456.815	1.375	47.385.951	1.375	138.087.353	
		Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	Dokumen	12	12	192.562.253	12	202.190.366	12	206.234.173	12	600.986.793	
		Jumlah				434.834.611.865		441.632.465.290		450.690.177.859		1.327.157.255.013	
5,03	Kepegawaian												
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN	%	100	100	877.329.341	100	899.262.574	100	989.188.832	100	2.765.780.746	Badan Kepegawaian Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100	1.013.759.884	100	1.039.103.881	100	1.065.081.478	100	3.117.945.243	
		Persentase kedisiplinan ASN	%	90	90	149.361.606	90	153.095.646	92	156.923.037	92	459.380.289	
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	%	90	90	165.906.501	92	170.054.163	95	174.305.517	95	510.266.181	
		Jumlah				2.206.357.331		2.261.516.264		2.385.498.864		6.853.372.459	
5,04	Pendidikan dan Pelatihan												
5.03.03	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	96	98	901.850.273	100	1.324.396.530	100	1.369.156.995	100	3.595.403.798	Badan Kepegawaian Daerah



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi	%	96	100	229.600.000	100	638.983.289	100	541.223.500	100	1.409.806.789	
		Jumlah				1.131.450.273		1.963.379.819		1.910.380.495		5.005.210.587	
6.01	Inspektorat												
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Memuaskan	%	30	35	400.000.000	40	415.000.000	45	420.000.000	45	1.235.000.000	Inspektorat
		Persentase penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	1.834.311.248	100	1.897.537.705	100	1.900.671.519	100	5.632.520.472	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	1.011.696.276	100	1.045.646.818	100	1.050.800.212	100	3.108.143.306	
		Jumlah				3.246.007.524		3.358.184.523		3.371.471.731		9.975.663.778	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik												
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	%	n/a	80	1.765.720.779	85	1.877.360.968	90	1.833.969.160	90	5.477.050.907	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				1.765.720.779		1.877.360.968		1.833.969.160		5.477.050.907	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7,01	Kecamatan												
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	15.000.000	100	15.930.000	100	16.917.660	100	47.847.660	Kecamatan Balerejo
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	12.500.000	100	16.000.000	100	19.500.000	100	48.000.000	Kecamatan Dagangan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95	100	35.925.415	100	36.698.409	100	37.525.243	100	109.549.067	Kecamatan Dolopo (2 kelurahan)



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,81	100	5.037.500	100	5.289.375	100	5.408.386	100	15.735.261	Kecamatan Geger
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	7.324.808	100	12.200.000	100	13.700.000	100	33.224.808	Kecamatan Gemarang
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	14.281.000	100	15.466.323	100	19.409.053	100	49.156.376	Kecamatan Jiwan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	20.856.500	100	22.233.029	100	22.788.855	100	65.878.384	Kecamatan Kebonsari
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	5.208.000	100	8.208.000	100	8.208.000	100	21.624.000	Kecamatan Kare
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	22.888.000	100	25.500.000	100	27.000.000	100	75.388.000	Kecamatan Madiun (1 kelurahan)



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	29.956.498	100	46.606.498	100	47.106.498	100	123.669.494	Kecamatan Mejayan (3 kelurahan)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	15.800.000	Kecamatan Pilangkenceng
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	11.680.000	100	22.130.000	100	24.880.000	100	58.690.000	Kecamatan Sawahan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	9.100.000	100	9.100.000	100	22.500.000	Kecamatan Saradan
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	86,28	100	12.000.000	100	20.000.000	100	17.000.000	100	49.000.000	Kecamatan Wungu (2 kelurahan)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	10.000.000	100	14.000.000	100	15.500.000	100	39.500.000	Kecamatan Wonoasri



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				210.657.721		274.361.634		289.043.695		774.063.050	

Tabel 7.3 Program Prioritas III Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2,07	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5	5	175.500.000	6	290.000.000	7	325.000.000	7	790.500.000	Dinas Tenaga Kerja
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	%	100	100	254.268.770	100	320.000.000	100	340.000.000	100	914.268.770	
Jumlah						429.768.770		610.000.000		665.000.000		1.704.768.770	
2,08 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	22.482.139	100	22.836.596	100	23.351.116	100	68.669.851	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Jumlah						22.482.139		22.836.596		23.351.116		68.669.851	
2,09 Urusan Pemerintah Bidang Pangan													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan	Persentase daerah berpotensi rawan pangan yang tertangani	%	100	100	230.910.049	100	235.528.250	100	242.594.097	100	709.032.396	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman	%	100	100	127.855.842	100	130.412.959	100	134.325.348	100	392.594.148	
						1.491.301.302		1.521.127.328		1.566.761.148		4.579.189.778	
2,10 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian													
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	%	100	100	155.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	530.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Dokumen Tanah kosong yang dikelola	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	%	100	100	834.750.000	100	876.487.500	100	920.311.875	100	2.631.549.375	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang terselesaikan	%	100	100	225.500.000	100	248.050.000	100	272.855.000	100	746.405.000	
		Jumlah				1.265.250.000		1.349.537.500		1.443.166.875		4.057.954.375	
2,11 Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup													
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	%	100	100	908.570.209	100	1.200.000.000	100	1.275.000.000	100	3.383.570.209	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	%	100	100	1.075.229.342	100	1.040.000.000	100	1.155.000.000	100	3.270.229.342	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	%	7	7,3	265.502.740	7,6	310.000.000	7,9	330.000.000	7,9	905.502.740	
		Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	ha	22,9	22,9	5.429.587.115	22,9	5.244.656.064	22,9	5.644.656.064	22,9	16.318.899.243	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	%	100	100	150.000.000	100	190.000.000	100	210.000.000	100	550.000.000	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	210.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	%	45	45	134.556.800	47	170.000.000	48	180.000.000	48	484.556.800	
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	penerima	5	5	174.000.000	5	185.000.000	5	190.000.000	5	549.000.000	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	100	100	331.838.000	100	360.000.000	100	370.000.000	100	1.061.838.000	
		Jumlah				8.519.284.206		8.769.656.064		9.444.656.064		26.733.596.334	
2,12	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil												
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,03	87,00	7.915.050	89	8.455.196	90	8.749.823	90	25.120.069	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,78	60,94	15.000.000	66,34	16.023.644	71,74	16.581.998	71,74	47.605.642	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan	Nilai	77	90	5.064.195.101	95	5.409.790.765	96	5.598.298.181	96	16.072.284.047	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	n/a	100	1.079.017.375	100	1.152.652.715	100	1.192.817.593	100	3.424.487.682	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	99	100	730.600.000	100	780.458.307	100	807.653.846	100	2.318.712.153	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	99	100	725.905.080	100	775.442.991	100	802.463.769	100	2.303.811.841	
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola	%	100	100	150.000.000	100	160.236.444	100	165.819.979	100	476.056.423	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				7.772.632.606		8.303.060.062		8.592.385.189		24.668.077.857	
2,13 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa													
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa dengan baik	%	100	100	386.308.515	100	392.399.108	100	401.240.055	100	1.179.947.678	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	463.731.425	100	580.885.017	100	601.660.761	100	1.646.277.203	
		Jumlah				850.039.940		973.284.125		1.002.900.816		2.826.224.881	
2,14 Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	%	100	100	424.773.261	100	431.470.294	100	441.191.534	100	1.297.435.089	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah				424.773.261		431.470.294		441.191.534		1.297.435.089	
2,15	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan												
2,16	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika												
2,17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkan	%	58,58	80	40.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	140.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	2,62	2,81	100.000.000	2,98	110.000.000	3,14	110.000.000	3,14	320.000.000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi sehat	unit usaha	149	150	100.000.000	160	110.000.000	170	110.000.000	170	320.000.000	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah dilatih	%	15	23	471.370.000	26	471.370.000	26	471.370.000	26	1.414.110.000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	%	31	40	185.000.000	40	194.250.000	41	194.250.000	41	573.500.000	
Jumlah						896.370.000		935.620.000		935.620.000		2.767.610.000	

2,18 Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	125	150	402.109.123	155	408.558.830	160	344.651.386	160	1.155.319.339	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	Nilai	-	86	52.201.898	87	50.000.000	88	60.000.000	88	162.201.898	
Jumlah						454.311.021		458.558.830		404.651.386		1.317.521.237	
2,19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Atlit	246	250	2.984.088.650	260	3.720.000.000	270	3.740.000.000	270	10.444.088.650	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda aktif dalam organisasi	%	0,546	0,620	125.000.000	0,684	130.000.000	0,747	197.682.846	0,747	452.682.846	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				3.109.088.650		3.850.000.000		3.937.682.846		10.896.771.496	
2,20 Urusan Pemerintah Bidang Statistik													
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	504.777.560	100	512.735.952	100	524.288.148	100	1.541.801.660	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah				504.777.560		512.735.952		524.288.148		1.541.801.660	
2,21 Urusan Pemerintah Bidang Persandian													
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	242.067.872	100	245.884.347	100	251.424.244	100	739.376.463	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah				242.067.872		245.884.347		251.424.244		739.376.463	
2,22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	100	100	2.392.330.900	100	2.416.023.240	100	2.458.640.595	100	7.266.994.735	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	%	77,27	81,8	118.520.220	86,36	120.388.826	90,91	123.101.246	90,91	362.010.293	
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	6,68	14,98	294.408.969	22,93	299.050.661	30,57	305.788.421	30,57	899.248.051	
Jumlah						2.805.260.089		2.835.462.728		2.887.530.262		8.528.253.079	
2,23 Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan													
2,24 Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan													
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Indeks Ketersediaan Arsip	Poin	78	83	205.000.000	85	270.000.000	87	365.000.000	87	840.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Berkas	70	13	205.000.000	18	210.000.000	23	240.000.000	23	655.000.000	
Jumlah						410.000.000		480.000.000		05.000.000		1.495.000.000	
3	Urusan Pilihan												
3,25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan												
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asalkan	%	30,6	2	125.000.000	2	137.500.000	2	151.250.000	2	413.750.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,04	0,01	75.000.000	0,01	82.500.000	0,01	90.750.000	0,01	248.250.000	
Jumlah						200.000.000		220.000.000		242.000.000		662.000.000	
3,26	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik pada destinasi pariwisata	%	284,746	288,136	1.397.000.000	291,525	1.711.296.641	294,915	1.753.000.000	294,915	4.861.296.641	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata yang masif	Kegiatan	4	4	1.735.000.000	4	1.790.000.000	4	1.900.000.000	4	5.425.000.000	
Jumlah						3.132.000.000		3.501.296.641		3.653.000.000		10.286.296.641	
3,27 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian													
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	%	87,4	98,33	175.000.000	98,36	200.000.000	98,39	225.000.000	98,39	600.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				175.000.000		200.000.000		225.000.000		600.000.000	
3,30	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan												
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase dokumen Perizinan yang diterbitkan	%	0	5,54	70.000.000	10	88.600.000	10	88.600.000	10	247.200.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
		Persentase Peningkatan pengawasan B2 pada pengguna akhir	%	0	25	50.000.000	40	62.400.000	40	62.400.000	40	174.800.000	
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pemasaran produk berkualitas ekspor	%	3	5	208.469.490	6	218.892.965	7	218.892.965	7	646.255.419	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan UTTP Yang Tertera/ Tertera Ulang	%	0,51	5,35	350.000.000	6,35	420.000.000	7,46	420.000.000	7,46	1.190.000.000	
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Terbina dan UTTP Yang Terawasi	%	12	33,33	75.000.000	35,71	86.250.000	36,84	86.250.000	36,84	247.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Fasilitas P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri)	%	0	10	179.570.965	12	193.370.965	15	193.370.965	15	566.312.895	
		Jumlah				933.040.455		1.069.513.930		1.069.513.930		3.072.068.314	
3,31 Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian													
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	46	80	28.532.540	80	55.000.000	80	60.000.000	80	143.532.540	Dinas Tenaga Kerja
		Jumlah				28.532.540		55.000.000		60.000.000		143.532.540	
3,32 Transmigrasi													
3.32.04	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran umum yang dipindahkan dan ditempatkan	%	100	100	108.368.200	100	119.000.000	100	129.000.000	100	356.368.200	Dinas Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Jumlah				108.368.200		119.000.000		129.000.000		356.368.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4,01	Sekretariat Daerah												
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	30	50	1.608.988.584	50	1.634.356.119	50	1.671.178.975	50	4.914.523.678	Bagian Hukum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	%	100	100	12.110.829.268	100	13.739.608.989	100	14.071.699.717	100	39.922.137.974	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	1.267.633.026	100	1.287.618.702	100	1.316.629.392	100	3.871.881.120	Bagian Administrasi Pemerintahan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	59,6	79	420.201.892	80	426.826.853	90	436.443.475	90	1.283.472.220	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Predikat	Cukup	Baik		Baik		Baik		Baik		
		Persentase rumusan kebijakan strategis pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	%	150	100	420.201.892	100	426.826.853	100	436.443.475	100	1.283.472.220	
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	758.539.399	100	770.498.635	100	787.858.353	100	2.316.896.387	Bagian Perekonomian
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	651.178.856	100	661.445.431	100	676.348.126	100	1.988.972.413	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah				17.237.572.917		18.947.181.582		19.396.601.512		55.581.356.011	

4.02 Sekretariat DPRD



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	23.081.341.410	100	23.617.913.951	100	24.315.617.685	100	71.014.873.046	Sekretariat DPRD
Jumlah						23.081.341.410		23.617.913.951		24.315.617.685		71.014.873.046	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5.01	Perencanaan												
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%	80	80	600.000.000	80	650.000.000	80	700.000.000	80	1.950.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	%	80	80	750.000.000	80	800.000.000	80	850.000.000	80	2.400.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	%	80	80	1.650.000.000	80	1.750.000.000	80	1.800.000.000	80	5.200.000.000	
		Jumlah				3.000.000.000		3.200.000.000		3.350.000.000		9.550.000.000	
5,05	Penelitian dan Pengembangan												
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	650.000.000	100	680.000.000	100	730.000.000	100	2.060.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	640.000.000	
		Jumlah				850.000.000		900.000.000		950.000.000		2.700.000.000	
5,02	Keuangan												
5,03	Kepegawaian												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5,04 Pendidikan dan Pelatihan													
6,01 Inspektorat													
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM													
8,01 Kesatuan Bangsa dan Politik													
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	599.783.878	100	599.082.491	100	612.580.118	100	1.801.446.487	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	nilai	n/a	80	43.456.616.858	82	3.452.472.622	83	3.530.258.549	83	50.439.348.029	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM penerima bantuan yang mencairkan bantuan pada Tahun N	%	100	100	2.966.867.232	100	3.013.643.267	100	3.081.542.150	100	9.062.052.649	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Toleransi	Nilai	80,88	81	263.779.677	82,25	267.938.463	83	273.975.250	83	805.693.390	
		Jumlah				47.277.047.645		7.333.136.843		7.498.356.067		62.108.540.555	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7,01	Kecamatan												
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	55.000.000	100	58.300.000	100	59.466.000	100	172.766.000	Kecamatan Balerejo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	15.000.000	100	15.900.000	100	16.218.000	100	47.118.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	61.000.000	100	55.650.000	100	56.763.000	100	173.413.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	43.000.000	100	47.300.000	100	48.246.000	100	138.546.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	34.700.000	100	41.824.546	100	43.000.000	100	119.524.546	Kecamatan Dagangan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	38.500.000	100	61.000.000	100	63.000.000	100	162.500.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	26.600.000	100	35.200.000	100	41.400.000	100	103.200.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	84.920.000	100	102.500.000	100	117.800.000	100	305.220.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	99	100	60.360.433	100	62.706.465	100	64.119.272	100	187.186.170	Kecamatan Dolopo (2 kelurahan)
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Mlilir)	%	99	100	749.404.649	100	761.219.865	100	778.370.528	100	2.288.995.042	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bangunsari)	%	99	100	749.404.648	100	761.219.865	100	778.370.527	100	2.288.995.040	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94	100	21.725.753	100	22.570.169	100	23.078.686	100	67.374.608	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	94	100	52.338.601	100	54.372.848	100	55.597.895	100	162.309.344	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97	100	35.736.798	100	37.125.782	100	37.962.244	100	110.824.824	Kecamatan Geger
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	84,68	100	53.000.800	100	55.650.840	100	56.902.984	100	165.554.624	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94,81	100	33.375.000	100	35.043.750	100	35.832.234	100	104.250.984	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99,01	100	41.850.000	100	43.942.500	100	44.931.206	100	130.723.706	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	96,47	100	43.000.000	100	45.150.000	100	46.165.875	100	134.315.875	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	39.700.000	100	43.525.000	100	46.425.000	100	129.650.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	5.100.000	100	7.400.000	100	8.200.000	100	20.700.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	46.400.000	100	49.700.000	100	56.200.000	100	152.300.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	14.000.000	100	26.850.000	100	32.600.000	100	73.450.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	24.525.000	100	25.600.000	100	25.950.000	100	76.075.000	Kecamatan Jiwan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	7.000.000	100	10.288.500	100	10.802.925	100	28.091.425	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	18.260.000	100	32.231.055	100	33.844.607	100	84.335.662	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	29.844.919	100	24.435.720	100	25.597.508	100	79.878.147	Kecamatan Kebonsari
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,29	100	57.930.150	100	61.753.540	100	63.297.378	100	182.981.068	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	35.257.000	100	32.253.962	100	32.899.041	100	100.410.003	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	90.213.615	100	96.167.714	100	98.571.906	100	284.953.235	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,64	100	48.338.000	100	51.528.308	100	47.353.266	100	147.219.574	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	16.454.000	100	22.500.000	100	26.500.000	100	65.454.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	12.362.000	100	29.624.000	100	36.000.000	100	77.986.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	85	100	66.115.700	100	76.510.700	100	89.908.200	100	232.534.600	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	28.286.000	100	83.716.000	100	41.750.000	100	153.752.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	71	100	40.050.400	100	52.600.000	100	61.000.000	100	153.650.400	Kecamatan Madiun (1 kelurahan)
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Nglames)	%	100	100	749.404.648	100	761.219.865	100	778.370.527	100	2.288.995.040	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	92	100	31.724.000	100	45.500.000	100	51.000.000	100	128.224.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99	100	51.292.100	100	63.000.000	100	67.000.000	100	181.292.100	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	87	100	60.000.000	100	91.500.000	100	100.000.000	100	251.500.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	78.305.000	100	114.680.000	100	114.680.000	100	307.665.000	Kecamatan Mejayan (3 kelurahan)
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Krajan)	%	100	100	686.775.832	100	697.603.634	100	713.320.991	100	2.097.700.457	
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Pandean)	%	100	100	696.875.745	100	706.847.018	100	722.772.633	100	2.125.495.396	
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Bangunsari)	%	100	100	678.746.496	100	689.447.706	100	704.981.306	100	2.073.175.508	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	30.189.400	100	32.761.500	100	32.761.500	100	95.712.400	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	86.603.543	100	100.379.803	100	165.751.805	100	352.735.151	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	101.149.500	100	101.149.500	100	101.149.500	100	303.448.500	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	56.100.000	100	68.525.000	100	73.025.000	100	197.650.000	Kecamatan Pilangkenceng
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	14.600.000	100	18.500.000	100	21.700.000	100	54.800.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	49.325.000	100	57.350.000	100	63.400.000	100	170.075.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	48.400.000	100	66.050.000	100	63.400.000	100	177.850.000	Kecamatan Sawahan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	44.731.483	100	53.731.483	100	63.231.483	100	161.694.449	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	93.795.400	100	105.159.661	100	114.159.661	100	313.114.722	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	18.000.000	100	21.000.000	100	30.500.000	100	69.500.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	27.695.000	100	71.095.000	100	54.495.000	100	153.285.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	56.100.000	100	71.525.000	100	86.025.000	100	213.650.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	29.000.000	100	37.000.000	100	75.000.000	100	141.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	49.325.000	100	58.850.000	100	75.400.000	100	183.575.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	48.400.000	100	72.550.000	100	64.300.000	100	185.250.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	93	100	49.311.497	100	52.831.497	100	59.311.497	100	161.454.491	Kecamatan Wungu (2 kelurahan)
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (Wungu)	%	100	100	703.639.333	100	826.467.282	100	845.088.002	100	2.375.194.617	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (Munggut)	%	100	100	709.404.648	100	761.219.865	100	778.370.528	100	2.248.995.041	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	86	100	15.075.000	100	20.100.000	100	22.100.000	100	57.275.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	50	100	46.791.640	100	62.000.000	100	70.000.000	100	178.791.640	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	86	100	78.257.000	100	92.500.000	100	98.800.000	100	269.557.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	69.000.000	100	179.000.000	Kecamatan Wonoasri
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	36.000.000	100	44.000.000	100	47.000.000	100	127.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	64.000.000	100	87.500.000	100	91.000.000	100	242.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Perangkat Daerah
					2024		2025		2026		Target	Rp.	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	54.300.000	100	67.500.000	100	72.000.000	100	193.800.000	
		Jumlah				7.500.909.127		8.270.732.224		8.707.363.811		24.479.005.162	



Tabel 7.4 Program Pembangunan Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar												
1,01	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan												
1.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,04	87,98	593.110.838	88,92	604.973.055	89,86	617.072.516	89,86	1.815.156.409	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	50.000.000	66,34	51.000.000	71,74	52.020.000	71,74	153.020.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Nilai	95,74	97	410.752.824.396	97	421.011.737.939	98	423.649.985.207	98	1.255.414.547.542	
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100	100,00	27.678.303.440	100,00	28.313.170.872	100,00	28.894.666.866	100,00	84.886.141.178	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	98,36	100,00	110.211.458.333	100,00	115.266.663.820	100,00	112.857.453.933	100,00	338.335.576.086	
		Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	%	6,34	100,00	18.612.954.605	100,00	19.064.707.749	100,00	19.487.358.157	100,00	57.165.020.511	
		Rerata kemampuan literasi SD	%	61,46	66,55	517.093.765	69,10	558.243.320	71,64	570.095.876	71,64	1.645.432.962	
		Rerata kemampuan literasi SMP	Nilai	70,32	76,36	258.000.000	79,38	270.900.000	82,40	276.318.000	82,40	805.218.000	
		Rerata kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,34	52,25	584.461.761	53,71	613.684.849	55,16	644.369.092	55,16	1.842.515.702	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Rerata kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58,07	62,04	175.721.120	64,03	179.235.542	66,01	182.820.253	66,01	537.776.916	
		Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	88,45	95,53	225.000.000	99,07	236.250.000	100,00	248.062.500	100,00	709.312.500	
		Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	86	92,68	95.140.000	96,02	97.042.800	99,36	98.983.656	99,36	291.166.456	
		Indeks Iklim Kebinekaan SD	Nilai	94,62	99,60	975.937.923	100,00	995.456.681	100,00	1.015.365.815	100,00	2.986.760.420	
		Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	90,74	95,16	1.451.528.000	97,37	1.480.568.560	99,58	1.510.169.731	99,58	4.442.266.291	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Indeks Inklusivitas SD	Nilai	83,33	89,53	325.000.000	92,63	325.000.000	95,73	991.250.000	95,73	1.641.250.000	
		Indeks Inklusivitas SMP	Nilai	82,08	88,28	1.098.250.000	91,38	1.163.162.500	94,48	1.176.225.750	94,48	3.427.638.250	
		Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	%	49,71	52,69	100.000.000	55,59	105.000.000	58,49	110.250.000	58,49	315.250.000	
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal	%	100	100,00	102.698.959	100,00	104.318.125	100,00	106.668.464	100,00	313.685.548	
1.01.04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik yang bersertifikat pendidik	%	42,78	40,72	10.693.874	38,34	10.798.967	36,22	11.080.990	36,22	32.573.831	
		Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	77,68	79,50	15.000.000	80,00	15.300.000	82,00	15.606.000	82,00	45.906.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				573.833.177.014		590.457.204.779		592.515.822.807		1.756.806.204.600	
1,02 Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan													
1.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,04	80,01	68.961.666.600	83,00	71.005.933.421	86,00	68.717.195.410	86,00	208.684.795.431	Dinas Kesehatan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (dinkes)	Nilai	35,09	60,94	3.831.203.700	66,34	3.944.774.079	71,74	3.817.621.967	71,74	11.593.599.746	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (dinkes)	Nilai	75	85	3.831.203.700	88	3.944.774.079	88	3.817.621.967	90	11.593.599.746	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (RS Caruban)	nilai	93,36	92	120.723.499.871	94	122.627.631.403	95	125.391.619.506	95	11.593.599.746	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah (RS Dolopo)	nilai	90	92	68.355.095.787	94	71.685.605.365	95	76.141.165.901	95	11.593.599.746	
		Nilai Pengawasan Kearsipan (RS Caruban)	nilai	N/A	60,94	100.000.000	66,34	100.000.000	71,74	100.000.000	71,74	11.593.599.746	
		Nilai Pengawasan Kearsipan (RS Dolopo)	nilai	40,94	60,94	100.000.000	66,34	120.000.000	71,74	150.000.000	71,74	11.593.599.746	
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Angka Kematian Bayi	per 1.000 lahir hidup	6,18	5,57	16.087.956.515	5,29	16.572.389.924	5,02	16.049.543.620	5,02	32.749.500.135	Dinas Kesehatan, RSUD Caruban, RSUD Dolopo



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	per 100.000 lahir hidup	77,19	73,00	16.087.956.515	70,00	16.572.389.924	66,00	16.049.543.620	66,00	48.709.890.059	
		Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	%	76,92	84,00	16.087.956.515	92,00	16.572.389.924	100,00	16.049.543.620	100,00	48.709.890.059	
		Prevalensi Balita Stunting	%	17,6	14,00	16.087.956.515	12,00	16.572.389.924	10,00	16.049.543.620	10,00	48.709.890.059	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	%	57,00	61,00	16.087.956.515	65,00	16.572.389.924	69,00	16.049.543.620	69,00	48.709.890.059	
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	%	65,17	66,00	19.172.157.079	67,00	19.474.427.932	68,00	19.913.196.488	68,00	58.559.781.499	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	%	64,00	65,00	22.410.126.086	66,00	22.763.447.201	67,00	23.276.318.998	67,00	68.449.892.285	
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	nilai	0.31 : 1.000	0.5 : 1.000	1.593.724.018	0.7 : 1.000	1.641.321.481	0.9 : 1.000	1.589.120.189	0.9 : 1.000	4.824.165.687	Dinas Kesehatan
		Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1.4 : 1.000	2,0 : 1000	1.593.724.018	2.5 : 1.000	1.641.321.481	3,0 : 1000	1.589.120.189	3,0 : 1000	4.824.165.687	
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase sarana farmasi , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	726.200.597	100	747.888.986	100	724.102.804	100	2.198.192.388	Dinas Kesehatan
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase UKM yang dilakukan pembinaan	%	100	100	759.807.608	100	794.154.963	100	780.719.264	100	2.334.681.835	Dinas Kesehatan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				392.598.191.637		387.392.840.087		406.255.520.784		647.026.333.659	
1,03 Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
1.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,35	80	52.874.800	83	55.518.540	86	57.739.282	86	166.132.622	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,35	60,94	49.561.936	66,34	2.864.952	71,74	636.184	71,74	53.063.072	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	14.763.283.846	90	15.501.448.038	90	16.121.505.960	90	46.386.237.844	
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	%	85,25	86,27	25.992.643.616	86,65	27.292.275.797	87,02	28.656.889.587	87,02	81.941.808.999	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.03	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Meningkatnya Pelayanan Air Minum	%	3,19	3,62	13.797.622.658	3,84	15.177.384.924	4,05	16.088.028.019	4,05	45.063.035.601	
1.03.04	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Layak	%	0,6	1,08	8.081.550.768	1,33	8.889.705.845	1,57	9.423.088.195	1,57	26.394.344.808	
1.03.05	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	15,870	16,469	6.312.385.527	17,069	6.458.476.951	17,668	7.101.295.572	17,668	19.872.158.049	
		Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%	5,895	6,398	10.210.867.679	6,965	12.071.954.447	7,595	12.087.113.080	7,595	34.369.935.206	
1.03.06	Program Penataan Bangunan Gedung	Penataan bangunan gedung baik	%	17,86	17,86	18.357.949.602	17,86	19.826.585.570	17,86	20.619.648.993	17,86	58.804.184.164	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.03.07	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	76,892	72,390	73.396.250.706	73,041	81.680.655.087	73,811	84.862.361.828	73,811	239.939.267.621	
1.03.08	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase dokumen pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan	%	69,890	85,230	252.806.257	90,909	267.974.632	100	313.530.320	100	834.311.209	
1.03.09	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang	%	31,25	31,25	4.328.712.042	37,50	4.545.147.644	56,25	4.681.502.073	56,25	13.555.361.760	
		Jumlah				175.596.509.437		191.769.992.426		200.013.339.093		567.379.840.956	

1,04 Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	87	1.298.280.506	88	1.384.986.935	89	1.473.082.927	89	4.156.350.368	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	29,18	60,94	20.000.000	66,34	25.000.000	71,74	30.000.000	71,74	75.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	91	3.518.609.669	92	3.696.810.649	93	3.884.148.726	93	11.099.569.044	
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	%	100	100	913.259.000	100	933.921.950	100	955.618.048	100	2.802.798.998	
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	ha	54,43	104,43	5.511.761.719	154,43	5.724.918.911	204,43	5.614.257.943	204,43	16.850.938.573	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	%	100	100	3.889.105.000	100	4.083.560.250	100	4.208.488.263	100	12181153513	
		Jumlah				15.151.015.894		15.849.198.695		16.165.595.906		47.165.810.495	
1,05 Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat													
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,82	78	112.200.000	83	120.000.000	86	125.000.000	86	357.200.000	Satpol PP
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,42	60,94	15.810.000	66,34	30.000.000	71,74	25.000.000	71,74	70.810.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	7.862.658.258	85	8.040.993.659	90	8.062.927.285	90	23.966.579.202	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.05.02	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	1.075.397.180	100	1.347.491.822	100	1.388.646.485	100	3.811.535.487	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	1.280.400.000	100	1.887.022.400	100	2.082.024.848	100	5.249.447.248	
1.05.04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	%	100	100	4.601.591.699	100	4.754.507.271	100	4.887.204.656	100	14.243.303.626	
		Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	%	100	100	225.700.000	100	264.505.792	100	266.751.410	100	756.957.202	
1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,4	15.000.000	80,6	15.000.000	80,8	15.000.000	80,80	45.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,39	60,94	15.000.000	66,34	15.000.000	71,74	15.000.000	71,74	45.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Nilai	79,53	80	2.986.016.496	82	3.029.664.641	84	3.344.611.783	84	9.360.292.920	
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh layanan Mitigasi	orang	-	4000	941.910.514	4250	1.478.164.000	4500	1.279.200.000	4500	3.699.274.514	
		Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani	%	100	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	1.010.000.000	100	3.030.000.000	
		Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan	%	100	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	300.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				20.241.684.147		22.092.349.585		22.601.366.467		64.935.400.199	
1,06 Urusan Pemerintah Bidang Sosial													
1.06.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,88	78,88	120.000.000	79	126.200.000	79,5	128.724.000	79,5	374.924.000	Dinas Sosial
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65	70	15.000.000	71	16.200.000	72	16.524.000	72	47.724.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	5.581.381.161	80	6.055.125.963	80	6.182.356.700	80	17.818.863.824	
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Kelompok Masyarakat Miskin PPKS kewenangan Pemberdayaan Sosial yang dibina dan diberdayakan	%	28	20	139.249.257	22	148.996.705	23	151.976.639	23	440.222.602	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase PSKS yang dibina dan diberdayakan	%	30	34	865.277.240	36	957.193.875	36	970.766.253	36	2.793.237.368	
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah PPKS yang Tertangani	orang	15,02	60	1.673.674.253	63	1.787.970.171	65	1.817.928.810	65	5.279.573.234	
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran (PKH dan Keluarga Miskin Kewenangan Kab/Kota)	%	48,76	45	6.990.545.016	50	7.409.977.717	53	7.486.584.315	53	21.887.107.047	
		Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	88,09	70	663.000.000	70	702.780.000	70	716.835.600	70	2.082.615.600	
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Tepat Sasaran (paska Korban bencana alam dan sosial)	%	100	90	241.100.143	90	309.282.154	90	315.467.797	90	865.850.093	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	503.140.683	100	543.391.937	100	554.259.776	100	1.600.792.396	
		Jumlah				16.792.367.752		18.057.118.520		18.341.423.891		53.190.910.164	
2	Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar												
2,07	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja												
2.07.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,79	76	1.192.736.497	77	1.330.500.000	78	1.434.700.000	78	3.957.936.497	Dinas Tenaga Kerja
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,7	60,94	26.431.431	66,34	180.000.000	71,74	180.000.000	71,74	386.431.431	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	96,29	76	3.938.630.530	77	4.372.505.700	78	4.930.000.178	78	13.241.136.408	
2.07.03	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase peserta Pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	2.581.562.886	100	2.749.412.203	100	2.442.049.143	100	7.773.024.232	
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Penempatan tenaga kerja formal	%	100	80	249.607.100	82	259.607.100	84	264.607.100	84	773.821.300	
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	5	5	175.500.000	6	290.000.000	7	325.000.000	7	790.500.000	
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan	%	100	100	254.268.770	100	320.000.000	100	340.000.000	100	914.268.770	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				8.418.737.214		9.502.025.003		9.916.356.421		27.837.118.638	
2,08 Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
2.08.02	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	%	75,92	81,93	349.851.227	83,13	355.367.029	83,13	363.373.625	83,13	1.068.591.881	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	22.482.139	100	22.836.596	100	23.351.116	100	68.669.851	
2.08.06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	%	30	30	226.067.541	31,25	229.631.753	32,5	234.805.471	32,5	690.504.765	
2.08.07	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	168.480.489	100	171.136.776	100	174.992.573	100	514.609.838	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				766.881.396		778.972.154		796.522.785		2.342.376.335	
2.09	Urusan Pemerintah Bidang Pangan												
2.09.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70/BB	72	20.000.000	73	20.400.000	75	21.012.000	75	61.412.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,15	60,94	10.000.000	66,34	10.200.000	71,74	10.506.000	71,74	30.706.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,52	90	4.595.691.671	91	4.677.405.504	92	4.807.221.670	92	14.080.318.845	
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	skor	1839 / 56	2150 / 57	1.363.445.460	2150 / 57	1.390.714.369	2150 / 57	1.432.435.800	2150 / 57	4.186.595.629	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah berpotensi rawan pangan yang tertangani	%	100	100	230.910.049	100	235.528.250	100	242.594.097	100	709.032.396	
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman	%	100	100	127.855.842	100	130.412.959	100	134.325.348	100	392.594.148	
						6.347.903.022		6.464.661.082		6.648.094.915		19.460.659.019	
2,10 Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan													
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	%	100	100	155.000.000	100	175.000.000	100	200.000.000	100	530.000.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Dokumen Tanah kosong yang dikelola	%	100	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	150.000.000	
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	%	100	100	834.750.000	100	876.487.500	100	920.311.875	100	2.631.549.375	
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang terselesaikan	%	100	100	225.500.000	100	248.050.000	100	272.855.000	100	746.405.000	
		Jumlah				1.265.250.000		1.349.537.500		1.443.166.875		4.057.954.375	
2,11	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup												
2.11.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86	168.916.551	87	170.000.000	88	175.000.000	88	513.916.551	Dinas Lingkungan Hidup



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	10.000.000	66,34	20.000.000	71,74	25.000.000	71,74	55.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	13.618.020.574	95	13.715.000.000	95	13.805.000.000	95	41.138.020.574	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	%	100	100	908.570.209	100	1.200.000.000	100	1.275.000.000	100	3.383.570.209	
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	%	100	100	1.075.229.342	100	1.040.000.000	100	1.155.000.000	100	3.270.229.342	
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	%	7	7,3	265.502.740	7,6	310.000.000	7,9	330.000.000	7,9	905.502.740	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	(KEHATI)	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	ha	22,9	22,9	5.429.587.115	22,9	5.244.656.064	22,9	5.644.656.064	22,9	16.318.899.243	
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	%	100	100	150.000.000	100	190.000.000	100	210.000.000	100	550.000.000	
2.11.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	100	50.000.000	100	70.000.000	100	90.000.000	100	210.000.000	
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup	%	45	45	134.556.800	47	170.000.000	48	180.000.000	48	484.556.800	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	penerima	5	5	174.000.000	5	185.000.000	5	190.000.000	5	549.000.000	
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	100	100	331.838.000	100	360.000.000	100	370.000.000	100	1.061.838.000	
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah yang tertangani	%	40	40	5.401.269.197	45	5.490.519.520	50	5.372.625.444	50	16.264.414.161	
		Jumlah				27.717.490.528		28.165.175.584		28.822.281.508		84.704.947.620	
2,12 Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil													
2.12.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,03	87,00	7.915.050	89	8.455.196	90	8.749.823	90	25.120.069	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,78	60,94	15.000.000	66,34	16.023.644	71,74	16.581.998	71,74	47.605.642	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan	Nilai	77	90	5.064.195.101	95	5.409.790.765	96	5.598.298.181	96	16.072.284.047	
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	n/a	100	1.079.017.375	100	1.152.652.715	100	1.192.817.593	100	3.424.487.682	
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	99	100	730.600.000	100	780.458.307	100	807.653.846	100	2.318.712.153	
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	99	100	725.905.080	100	775.442.991	100	802.463.769	100	2.303.811.841	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola	%	100	100	150.000.000	100	160.236.444	100	165.819.979	100	476.056.423	
	Jumlah					7.772.632.606		8.303.060.062		8.592.385.189		24.668.077.857	
2,13	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa												
2.13.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,38	82,45	165.643.706	82,75	183.926.000	83,00	213.122.400	83,00	562.692.106	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,98	60,94	197.755.345	66,34	96.365.600	71,74	120.183.800	71,74	414.304.745	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,088	89	5.616.638.966	90	5.693.253.717	91	5.816.246.501	91	17.126.139.184	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase desa yang telah menyelenggarakan penataan desa dengan baik	%	100	100	386.308.515	100	392.399.108	100	401.240.055	100	1.179.947.678	
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	463.731.425	100	580.885.017	100	601.660.761	100	1.646.277.203	
2.13.04	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib	%	74,24	85,86	3.076.470.713	88,38	3.288.517.444	90,91	3.157.979.056	90,91	9.522.967.213	
		Persentase Desa dengan kualitas perencanaan pembangunan yang baik	%	70,20	73,23	398.309.002	77,27	415.100.156	83,33	477.938.225	83,33	1.291.347.383	
2.13.05	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat	Persentase Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan yang aktif	%	66,86	72,36	1.087.624.542	75,13	1.319.974.525	78,88	1.419.535.400	78,88	3.827.134.467	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase BUMDesa Maju	%	46,46	56,57	820.500.000	63,13	1.247.725.107	73,23	1.308.051.900	73,23	3.376.277.007	
		Jumlah				12.212.982.214		13.218.146.674		13.515.958.098		38.947.086.986	
2,14 Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana													
2.14.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,86	85,00	2.000.000	85,20	2.000.000	85,25	2.000.000	85,25	6.000.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,80	60,94	5.000.000	66,34	5.250.000	71,74	5.500.000	71,74	15.750.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,09	88,15	4.329.757.722	88,40	4.397.881.638	88,60	4.496.881.447	88,60	13.224.520.807	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	%	100	100	424.773.261	100	431.470.294	100	441.191.534	100	1.297.435.089	
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pasangan usia subur yang tidak ber KB karena Unmeet Need	%	19,74	14,54	4.736.628.018	11,06	4.820.325.878	7,60	4.969.896.416	7,60	14.526.850.312	
		Persentase faskes yang siap melayani KB MKJP	%	80,49	80,49	4.660.960.047	82,93	4.725.425.847	85,37	4.790.925.847	85,37	14.177.311.741	
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	%	5,48	5,48	3.512.436.780	5,47	4.083.580.476	5,45	4.186.850.826	6,00	11.782.868.082	
		Jumlah				17.671.555.828		18.465.934.133		18.893.246.070			



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD	
					2024		2025		2026		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
2,15 Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan														
2.15.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	10.000.000	80,03	10.500.000	80,05	11.025.000	80,05	31.525.000	Dinas Perhubungan	
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	32,56	60,94	50.000.000	66,34	55.000.000	71,74	60.000.000	71,74	165.000.000		
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	6.486.079.278	100	6.951.628.606	100	6.831.326.796	100	20.269.034.680		
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	80	85	25.165.076.856	88	26.908.448.063	90	27.788.401.185	90	79.861.926.104		
		Persentase Kendaraan laik jalan	%	90	92	218.000.000	94	224.500.000	96	228.000.000	96	670.500.000		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Manajemen rekayasa lalu lintas	%	70	75	1.162.681.900	80	1.291.870.860	85	1.321.719.268	85	3.776.272.028	
		Jumlah				33.091.838.034		35.441.947.529		36.240.472.249		104.774.257.812	
2,16 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika													
2.16.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,41	82,45	30.022.450	82,5	30.472.780	82,55	30.929.870	82,55	91.425.100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,31	60,94	30.000.000	66,34	31.450.000	71,74	32.906.750	71,74	94.356.750	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	88	5.406.883.109	89	5.542.963.067	90	5.666.307.565	90	16.616.153.741	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.16.02	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	100	100	756.732.519	100	921.028.188	100	941.779.412	100	2.619.540.119	
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	%	100	100	2.162.222.502	100	2.500.042.239	100	2.557.391.965	100	7.219.666.706	
		Jumlah				8.385.860.580		9.025.956.274		9.229.315.562		26.641.132.416	
2,17	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
2.17.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,01	78	15.000.000	80	15.000.000	82	15.000.000	82	45.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	50,51	60,94	20.400.000	66,34	26.520.000	71,74	27.846.000	71,74	74.766.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN Terhadap Layanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	95	8.185.998.436	95	8.576.784.153	100	8.714.811.253	100	25.477.593.842	
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkan	%	58,58	80	40.000.000	80	50.000.000	80	50.000.000	80	140.000.000	
2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	2,62	2,81	100.000.000	2,98	110.000.000	3,14	110.000.000	3,14	320.000.000	
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Jumlah Koperasi sehat	unit usaha	149	150	100.000.000	160	110.000.000	170	110.000.000	170	320.000.000	
2.17.05	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi yang telah dilatih	%	15	23	471.370.000	26	471.370.000	26	471.370.000	26	1.414.110.000	
2.17.06	Program Pemberdayaan dan	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	%	31	40	185.000.000	40	194.250.000	41	194.250.000	41	573.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD	
					2024		2025		2026		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Perlindungan Koperasi													
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terbina	%	22	27	695.000.000	30	822.500.000	31	863.625.000	31	2.381.125.000		
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Produk	%	2,19	2,21	300.000.000	2,22	390.000.000	2,24	390.000.000	2,24	1.080.000.000		
		Jumlah				10.112.768.436		10.766.424.153		10.946.902.253		31.826.094.842		
2,18	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal													
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,36	81	20.000.000	81,5	25.000.000	82	30.000.000	82	75.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	43,57	60,94	10.000.000	66,34	20.000.000	71,74	25.000.000	71,74	55.000.000	Pintu
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	85,29	86	3.912.167.721	87	4.380.314.146	88	4.598.807.070	88	12.891.288.937	
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Baru	Perusahaan	1500	1000	90.000.000	1000	140.000.000	1000	170.000.000	3000	400.000.000	
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai	92,25	89	100.000.000	89,5	110.000.000	90	125.000.000	90	335.000.000	
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	125	150	402.109.123	155	408.558.830	160	344.651.386	160	1.155.319.339	
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman	Jumlah Investor	Perusahaan	9000	12500	201.900.000	13500	230.000.000	14500	120.000.000	14500	551.900.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Modal												
2.18.06	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai SKM atas Pelayanan Data dan Informasi	Nilai	-	86	52.201.898	87	50.000.000	88	60.000.000	88	162.201.898	
		Jumlah				4.788.378.742		5.363.872.976		5.473.458.456		15.625.710.174	
2,19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga													
2.18.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,17	80	210.000.000	81	215.000.000	81	225.000.000	81	650.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	105.000.000	66,34	110.000.000	71,74	115.000.000	71,74	330.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.729.082.417	80	2.729.082.426	80	2.729.082.426	80	8.187.247.269	
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah atlit berprestasi	Atlit	246	250	2.984.088.650	260	3.720.000.000	270	3.740.000.000	270	10.444.088.650	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Presentase pemuda aktif dalam organisasi	%	0,546	0,620	125.000.000	0,684	130.000.000	0,747	197.682.846	0,747	452.682.846	
		Jumlah				6.153.171.067		6.904.082.426		7.006.765.272		20.064.018.765	
2,20 Urusan Pemerintah Bidang Statistik													
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	504.777.560	100	512.735.952	100	524.288.148	100	1.541.801.660	Dinas Komunikasi dan Informatika



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD	
					2024		2025		2026		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Jumlah				.							1.541.801.660	
2,21 Urusan Pemerintah Bidang Persandian														
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	242.067.872	100	245.884.347	100	251.424.244	100	739.376.463	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah				242.067.872		245.884.347		251.424.244		739.376.463		
2,22 Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan														
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	100	100	2.392.330.900	100	2.416.023.240	100	2.458.640.595	100	7.266.994.735	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	%	77,27	81,8	118.520.220	86,36	120.388.826	90,91	123.101.246	90,91	362.010.293		



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	6,68	14,98	294.408.969	22,93	299.050.661	30,57	305.788.421	30,57	899.248.051	
		Jumlah				2.805.260.089		2.835.462.728		2.887.530.262		8.528.253.079	
2,23 Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan													
2.23.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,35	82,00	75.000.000	83,00	75.000.000	84,00	75.000.000	84,00	225.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	74,34	75	5.000.000	83	5.000.000	85	5.000.000	85	15.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	77,27	77,00	3.714.657.834	88	3.727.615.962	90	3.724.938.984	90	11.167.212.780	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	%	2,7	3,37	683.988.000	3.40	685.988.000	3.40	686.988.000	3.40	2.056.964.000	
		Jumlah				4.478.645.834		4.493.603.962		4.491.926.984		13.464.176.780	
2,24 Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan													
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Indeks Ketersediaan Arsip	Poin	78	83	205.000.000	85	270.000.000	87	365.000.000	87	840.000.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.24.03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Berkas	70	13	205.000.000	18	210.000.000	23	240.000.000	23	655.000.000	
		Jumlah				410.000.000		480.000.000		605.000.000		1.495.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Urusan Pilihan												
3,25	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan												
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,04	1	130.000.000	1	143.000.000	1	157.300.000	1	430.300.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	%	30,6	2	125.000.000	2	137.500.000	2	151.250.000	2	413.750.000	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,04	0,01	75.000.000	0,01	82.500.000	0,01	90.750.000	0,01	248.250.000	
	Jumlah					330.000.000		363.000.000		399.300.000		1.092.300.000	
3,26	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata												
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan daya tarik pada destinasi pariwisata	%	284,746	288,136	1.397.000.000	291,525	1.711.296.641	294,915	1.753.000.000	294,915	4.861.296.641	Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata yang masif	Kegiatan	4	4	1.735.000.000	4	1.790.000.000	4	1.900.000.000	4	5.425.000.000	
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	60	30	1.994.000.000	30	2.080.000.000	30	2.124.940.000	30	6.198.940.000	
		Jumlah				5.126.000.000		5.581.296.641		5.777.940.000		16.485.236.641	
3,27 Urusan Pemerintah Bidang Pertanian													
3.27.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,04	80	1.067.435.600	81	1.067.435.600	82	1.067.435.600	82	3.202.306.800	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,50	60,94	1.064.400	66,34	1.064.400	71,74	1.064.400	71,74	3.193.200	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	85	85	13.958.522.818	86	13.958.522.818	87	13.958.522.818	87	41.875.568.454	
3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	7,24	2	2.327.288.723	2	2.415.153.159	3	2.540.768.475	3	7.283.210.357	
		Persentase peningkatan jumlah ternak	%	1	1	300.000.000	1	306.000.000	1	315.180.000	1	921.180.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Hewan Ternak dalam Keadaan Sehat	%	100	100	442.844.796	100	462.086.566	100	475.104.719	100	1.380.036.080	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	%	87,4	98,33	175.000.000	98,36	200.000.000	98,39	225.000.000	98,39	600.000.000	Dinas Pertanian dan Perikanan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	4	4	2.455.697.315	4	2.563.855.041	4	2.822.766.201	4	7.842.318.557	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Persentase prasarana peternakan dalam keadaan baik	%	100	100	150.000.000	100	153.000.000	100	157.590.000	100	460.590.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	7,67	9	1.602.500.000	10	1.662.500.000	11	1.672.500.000	11	4.937.500.000	Dinas Pertanian dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Jumlah Peternak	%	1	1	163.223.390	1	166.487.858	1	171.482.494	1	501.193.741	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
		Jumlah				22.643.577.042		22.956.105.442		23.407.414.706		69.007.097.190	

3,30 Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase peningkatan dokumen Perizinan yang diterbitkan	%	0	5,54	70.000.000	10	91.000.000	10	91.000.000	10	252.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro
		Persentase Peningkatan pengawasan B2 pada pengguna akhir	%	0	25	50.000.000	40	62.400.000	40	62.400.000	40	174.800.000	
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang tersedia	%	0	5,71	1.716.250.000	8,11	1.959.562.500	10	2.057.540.625	10	5.733.353.125	
		Persentase Peningkatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Telah Dibina Dan Telah Diberdayakan	%	0	35,14	919.207.500	40,00	974.667.875	50,00	1.023.401.269	50,00	2.917.276.644	
3.30.04	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Koefisien Variasi Harga	%	9,3	12	865.517.225	11,9	1.013.844.809	11,8	1.031.011.617	11,8	2.910.373.651	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pemasaran produk berkualitas ekspor	%	3	5	208.469.490	6	218.892.965	7	218.892.965	7	646.255.419	
3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase Peningkatan UTTP Yang Tertera/ Tertera Ulang	%	0,51	5,35	350.000.000	6,35	420.000.000	7,46	420.000.000	7,46	1.190.000.000	
		Persentase Peningkatan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Terbina dan UTTP Yang Terawasi	%	12	33,33	75.000.000	35,71	86.250.000	36,84	86.250.000	36,84	247.500.000	
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Peningkatan Fasilitas P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri)	%	0	10	179.570.965	12	193.370.965	15	193.370.965	15	566.312.895	
		Jumlah				4.434.015.180		5.017.589.113		5.181.467.440		14.633.071.733	
3,31	Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	2	566.016.002	2	570.000.000	2	245.000.000	2	1.381.016.002	Dinas Tenaga Kerja
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase IKM yang terfasilitasi perijinan	%	6	8	25.161.109	8	45.000.000	8	50.000.000	8	120.161.109	
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	46	80	28.532.540	80	55.000.000	80	60.000.000	80	143.532.540	
Jumlah						619.709.651		670.000.000		355.000.000		1.644.709.651	
3,32 Transmigrasi													
3.32.04	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran umum yang dipindahkan dan ditempatkan	%	100	100	108.368.200	100	119.000.000	100	129.000.000	100	356.368.200	Dinas Tenaga Kerja



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				108.368.200		119.000.000		129.000.000		356.368.200	
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN												
4.01	Sekretariat Daerah												
4.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	100	25.481.630.330	100	25.894.495.436	100	26.367.756.108	100	77.743.881.874	Bagian Umum
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	56,98	60,94	4.695.300	66,34	10.000.000	71,74	20.000.000	71,74	34.695.300	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	80,01	346.582.787	80,01	369.347.357	80,01	368.331.041	80,01	1.074.261.184	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	178.860.330	100	182.860.330	100	191.860.330	100	553.580.990	Bagian Organisasi



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	%	100	100	61.000.000	100	63.341.368	100	66.341.368	100	190.682.736	
		Nilai Pelaporan	PD	53	53	59.113.415	53	59.113.415	53	60.113.415	53	178.340.245	
		Nilai IKM	Nilai	83,34	85,5	158.000.000	87,5	160.000.000	90,5	161.011.262	90,5	481.011.262	
		Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Nilai	-	47,4	198.949.013	47,4	200.949.013	47,4	201.949.013	47,4	481.011.262	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang di fasilitasi	%	100	100	1.102.102.613	100	1.424.208.355	100	1.456.296.478	100	3.982.607.446	Bagian Protokol



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	30	50	1.608.988.584	50	1.634.356.119	50	1.671.178.975	50	4.914.523.678	Bagian Hukum
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan	%	100	100	12.110.829.268	100	13.739.608.989	100	14.071.699.717	100	39.922.137.974	Bagian Kesejahteraan Rakyat
4.01.02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	1.267.633.026	100	1.287.618.702	100	1.316.629.392	100	3.871.881.120	Bagian Administrasi Pemerintahan
4.01.03	Program Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Nilai	59,6	79	420.201.892	80	426.826.853	90	436.443.475	90	1.283.472.220	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
			Predikat	Cukup	Baik		Baik		Baik		Baik		
		Persentase rumusan kebijakan strategis pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang ditindaklanjuti	%	150	100	420.201.892	100	426.826.853	100	436.443.475	100	1.283.472.220	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	758.539.399	100	770.498.635	100	787.858.353	100	2.316.896.387	Bagian Perekonomian
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti	%	100	100	651.178.856	100	661.445.431	100	676.348.126	100	1.988.972.413	Bagian Administrasi Pembangunan
		Jumlah				44.828.506.705		47.301.496.856		48.290.260.527		140.301.428.311	
4.02 Sekretariat DPRD													
4.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,89	70	4.468.717.934	75	2.290.825.470	80	2.323.916.800	80,01	9.083.460.204	Sekretariat DPRD
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,25	60,94	13.902.399	66,34	15.000.000	71,74	16.000.000	71,74	44.902.399	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	34.114.931.558	100	35.993.809.530	100	35.769.700.154	100	105.878.441.242	
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	23.081.341.410	100	23.617.913.951	100	24.315.617.685	100	71.014.873.046	
		Jumlah				61.678.893.301		61.917.548.951		62.425.234.639		186.021.676.891	
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
5,01	Perencanaan												
5.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,11	81,00	148.452.373	82,00	185.555.864	83,00	194.833.657	83,00	528.841.893	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,49	60,94	5.000.000	66,34	10.000.000	71,74	11.000.000	71,74	26.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	6.495.446.253	82	6.713.015.018	85	6.707.092.051	85	19.915.553.321	
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	1.450.000.000	100	1.400.000.000	100	1.237.000.000	100	4.087.000.000	
		Persentase Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai ketentuan	%	100	100	450.000.000	100	600.000.000	100	863.000.000	100	1.913.000.000	
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai	%	80	80	600.000.000	80	650.000.000	80	700.000.000	80	1.950.000.000	
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	%	80	80	750.000.000	80	800.000.000	80	850.000.000	80	2.400.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Wilayah yang tercapai	%	80	80	1.650.000.000	80	1.750.000.000	80	1.800.000.000	80	5.200.000.000	
		Jumlah				11.548.898.626		12.108.570.881		12.362.925.708		36.020.395.215	
5,05 Penelitian dan Pengembangan													
5.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	650.000.000	100	680.000.000	100	730.000.000	100	2.060.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	200.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	640.000.000	
		Jumlah				850.000.000		900.000.000		950.000.000		2.700.000.000	
5,02 Keuangan													



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,45	80,5	767.352.004	81	782.699.044	81	821.833.996	81,5	2.371.885.044	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,06	60,94	100.000.000	66,34	102.000.000	71,74	107.100.000	71,74	309.100.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	83,60	85	30.772.505.499	85	31.387.885.609	85	32.957.349.888	85	95.117.740.996	
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Daerah yang Baik	%	93,75	100	427.216.694.339	100	433.795.518.378	100	442.531.388.188	100	1.303.543.600.905	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	-	100	5.395.549.659	100	5.503.460.652	100	5.778.633.686	100	16.677.643.997	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.02.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,32	87	881.616.247	87	925.697.059	87	944.211.001	87	2.751.524.307	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,21	60,94	61.227.785	66,30	64.289.174	71,70	65.574.958	71,70	191.091.916	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	90	90	10.762.634.614	90	11.331.845.423	90	11.595.567.580	90	33.690.047.617	
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	12	12	684.892.929	12	719.137.576	12	733.520.327	12	2.137.550.832	Badan Pendapatan Daerah
		Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	%	100	100	167.846.623	100	176.238.954	100	179.763.734	100	523.849.311	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	SPPT	422.500	422.500	441.409.806	423.500	463.480.297	423.500	472.749.902	423.500	1.377.640.005	
		Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	%	100	100	691.411.669	100	725.982.252	100	740.501.897	100	2.157.895.818	
		Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi (ajuan)	Ajuan	1.325	1.325	44.244.586	1.350	46.456.815	1.375	47.385.951	1.375	138.087.353	
		Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	Dokumen	12	12	192.562.253	12	202.190.366	12	206.234.173	12	600.986.793	
		Jumlah				478.179.948.014		486.226.881.599		497.181.815.281		1.461.588.644.894	
5,03	Kepegawaian												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5.03.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,47	80,47	54.881.090	81	132.362.991	81,15	135.672.066	81,15	322.916.147	Badan Kepegawaian Daerah
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,11	60,94	4.059.000	66,34	4.160.475	71,74	4.264.487	71,74	12.483.962	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	99	100	4.929.118.118	100	5.103.596.072	100	5.231.185.974	100	15.263.900.164	
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase penetapan kebutuhan ASN	%	100	100	877.329.341	100	899.262.574	100	989.188.832	100	2.765.780.746	
		Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi dan Kompetensi	%	100	100	1.013.759.884	100	1.039.103.881	100	1.065.081.478	100	3.117.945.243	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase kedisiplinan ASN	%	90	90	149.361.606	90	153.095.646	92	156.923.037	92	459.380.289	
		Persentase Penilaian Kinerja ASN	%	90	90	165.906.501	92	170.054.163	95	174.305.517	95	510.266.181	
		Jumlah				7.194.415.539		7.501.635.802		7.756.621.390		22.452.672.732	
5,04	Pendidikan dan Pelatihan												
5.03.03	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	96	98	901.850.273	100	1.324.396.530	100	1.369.156.995	100	3.595.403.798	Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi	%	96	100	229.600.000	100	638.983.289	100	541.223.500	100	1.409.806.789	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Jumlah				1.131.450.273		1.963.379.819		1.910.380.495		5.005.210.587	
6,01 Inspektorat													
6.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,04	80,06	80.000.000	80,08	145.000.000	81	155.000.000	100	380.000.000	Inspektorat
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	46,32	60,94	57.000.000	66,34	90.000.000	71,74	100.000.000	71,74	247.000.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	60	60	7.364.941.240	65	8.386.228.960	70	8.427.228.961	70	24.178.399.161	
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Memuaskan	%	30	35	400.000.000	40	415.000.000	45	420.000.000	45	1.235.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	1.834.311.248	100	1.897.537.705	100	1.900.671.519	100	5.632.520.472	
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	1.011.696.276	100	1.045.646.818	100	1.050.800.212	100	3.108.143.306	
		Jumlah				10.747.948.764		11.979.413.483		12.053.700.692		34.781.062.939	
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
8,01	Kesatuan Bangsa dan Politik												
8.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,75	86,75	50.000.000	86,75	50.000.000	86,75	70.000.000	86,75	170.000.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,96	60,94	10.000.000	66,34	15.000.000	71,74	25.000.000	71,74	50.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,04	89	3.601.742.162	89	3.654.473.690	89	3.708.275.284	89	10.964.491.136	
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	589.783.878	100	599.082.491	100	612.580.118	100	1.801.446.487	
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Indeks Demokrasi Indonesia	nilai	80	80	43.456.616.858	82	3.452.472.622	83	3.530.258.549	83	50.439.348.029	
8.01.04	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas/LSM penerima bantuan yang mencairkan bantuan pada Tahun N	%	100	100	2.966.867.232	100	3.013.643.267	100	3.081.542.150	100	9.062.052.649	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	%	n/a	80	1.765.720.779	85	1.877.360.968	90	1.833.969.160	90	5.477.050.907	
8.01.05	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks Toleransi	Nilai	80,88	81	263.779.677	82,25	267.938.463	83	273.975.250	83	805.693.390	
		Jumlah				52.704.510.586		12.929.971.501		13.135.600.511		78.770.082.598	
7	UNSUR KEWILAYAHAN												
7,01	Kecamatan												



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	15.000.000	80,03	15.930.000	80,05	16.248.600	80,05	47.178.600	Kecamatan Balerejo
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	52,07	60,94	1.000.000	66,34	1.100.000	71,74	1.122.000	71,74	3.222.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87	80	2.565.359.426	85	2.705.503.905	90	2.766.322.880	90	8.037.186.211	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	15.000.000	100	15.930.000	100	16.917.660	100	47.847.660	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	55.000.000	100	58.300.000	100	59.466.000	100	172.766.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	15.000.000	100	15.900.000	100	16.218.000	100	47.118.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	61.000.000	100	55.650.000	100	56.763.000	100	173.413.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	43.000.000	100	47.300.000	100	48.246.000	100	138.546.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,99	80,01	4.000.000	80,03	6.000.000	80,05	7.000.000	80,05	17.000.000	Kecamatan Dagangan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,83	60,94	700.000	66,34	1.100.000	71,74	1.100.000	71,74	2.900.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	2.820.909.969	85	3.010.017.000	90	3.054.498.481	90	8.885.425.450	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	12.500.000	100	16.000.000	100	19.500.000	100	48.000.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	34.700.000	100	41.824.546	100	43.000.000	100	119.524.546	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	38.500.000	100	61.000.000	100	63.000.000	100	162.500.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	26.600.000	100	35.200.000	100	41.400.000	100	103.200.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	84.920.000	100	102.500.000	100	117.800.000	100	305.220.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,99	80,01	11.560.000	80,03	12.009.303	80,05	12.279.879	80,05	35.849.182	Kecamatan Dolopo (2 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	27,37	60,94	2.000.000	66,34	2.077.734	71,74	2.124.546	71,74	6.202.281	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	93	80	4.178.036.535	85	4.340.424.461	90	4.438.216.386	90	12.956.677.381	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	95	100	35.325.415	100	36.698.409	100	37.525.243	100	109.549.067	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	99	100	60.360.433	100	62.706.465	100	64.119.272	100	187.186.170	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Mlilir)	%	99	100	749.404.649	100	761.219.865	100	778.370.528	100	2.288.995.042	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Bangunsari)	%	99	100	749.404.648	100	761.219.865	100	778.370.527	100	2.288.995.040	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94	100	21.725.753	100	22.570.169	100	23.078.686	100	67.374.608	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	94	100	52.338.601	100	54.372.848	100	55.597.895	100	162.309.344	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97	100	35.736.798	100	37.125.782	100	37.962.244	100	110.824.824	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,47	80,01	4.750.000	80,03	4.987.500	80,05	5.099.719	80,05	14.837.219	Kecamatan Geger
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	42,11	60,94	1.900.000	66,34	1.995.000	71,74	2.039.888	71,74	5.934.888	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.750.062.633	85	2.888.735.282	90	2.953.825.782	90	8.592.623.697	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,81	100	5.037.500	100	5.289.375	100	5.408.386	100	15.735.261	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	84,68	100	53.000.800	100	55.650.840	100	56.902.984	100	165.554.624	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94,81	100	33.375.000	100	35.043.750	100	35.832.234	100	104.250.984	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99,01	100	41.850.000	100	43.942.500	100	44.931.206	100	130.723.706	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	96,47	100	43.000.000	100	45.150.000	100	46.165.875	100	134.315.875	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,25	80,01	14.700.000	80,03	16.500.000	80,05	17.200.000	80,05	48.400.000	Kecamatan Gemarang



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,69	60,94	3.500.000	66,34	5.700.000	71,74	7.000.000	71,74	16.200.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	1.980.827.984	85	2.115.018.418	90	2.146.867.963	90	6.242.714.365	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	7.324.808	100	12.200.000	100	13.700.000	100	33.224.808	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	39.700.000	100	43.525.000	100	46.425.000	100	129.650.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	5.100.000	100	7.400.000	100	8.200.000	100	20.700.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	46.400.000	100	49.700.000	100	56.200.000	100	152.300.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	14.000.000	100	26.850.000	100	32.600.000	100	73.450.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	5.750.000	80,03	6.227.250	80,05	6.538.613	80,05	18.515.863	Kecamatan Jiwan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	36,63	60,94	2.550.000	66,34	2.761.650	71,74	2.899.733	71,74	8.211.383	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	2.948.409.895	85	3.184.860.051	90	3.251.220.896	90	9.384.490.842	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	14.281.000	100	15.486.323	100	19.409.053	100	49.156.376	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	24.525.000	100	25.600.000	100	25.950.000	100	76.075.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	7.000.000	100	10.288.500	100	10.802.925	100	28.091.425	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	18.260.000	100	32.231.055	100	33.844.607	100	84.335.662	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	29.844.919	100	24.435.720	100	25.597.508	100	79.878.147	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	80,01	28.542.200	80,03	30.425.985	80,05	31.186.635	80,05	90.154.820	Kecamatan Kebonsari
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,14	60,94	1.000.000	66,34	1.066.000	71,74	1.092.650	71,74	3.158.650	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	95	80	2.085.813.245	85	2.211.432.220	90	2.266.151.847	90	6.563.397.312	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	20.856.500	100	22.233.029	100	22.788.855	100	65.878.384	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,29	100	57.930.150	100	61.763.540	100	63.297.378	100	182.981.068	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	35.257.000	100	32.253.962	100	32.899.041	100	100.410.003	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	90.213.615	100	96.167.714	100	98.571.906	100	284.953.235	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,64	100	48.338.000	100	51.528.308	100	47.353.266	100	147.219.574	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,15	80,01	5.700.000	80,03	7.000.000	80,05	8.000.000	80,05	20.700.000	Kecamatan Kare



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	26,91	60,94	3.500.000	66,34	4.500.000	71,74	5.500.000	71,74	13.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.289.821.500	85	2.335.236.579	90	2.409.271.520	90	7.034.329.599	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	5.208.000	100	8.208.000	100	8.208.000	100	21.624.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	16.454.000	100	22.500.000	100	26.500.000	100	65.454.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	12.362.000	100	29.624.000	100	36.000.000	100	77.986.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	85	100	66.115.700	100	76.510.700	100	89.908.200	100	232.534.600	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	28.286.000	100	83.716.000	100	41.750.000	100	153.752.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,42	80,01	2.000.000	80,03	2.500.000	80,05	3.000.000	80,05	7.500.000	Kecamatan Madiun (1 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	34,99	60,94	1.000.000	66,34	1.200.000	71,74	1.500.000	71,74	3.700.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87,55	80	3.834.829.558	85	4.028.892.139	90	4.164.314.178	90	12.028.035.875	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	22.888.000	100	25.500.000	100	27.000.000	100	75.388.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	71	100	40.050.400	100	52.600.000	100	61.000.000	100	153.650.400	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Nglames)	%		100	749.404.648	100	761.219.865	100	778.370.527	100	2.288.995.040	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	92	100	31.724.000	100	45.500.000	100	51.000.000	100	128.224.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99	100	51.292.100	100	63.000.000	100	67.000.000	100	181.292.100	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	87	100	60.000.000	100	91.500.000	100	100.000.000	100	251.500.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	500.000	80,03	500.000	80,05	1.000.000	80,05	2.000.000	Kecamatan Mejayan (3 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,49	60,94	1.000.000	66,34	1.000.000	71,74	1.500.000	71,74	3.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	4.711.355.946	85	4.726.158.935	90	4.781.475.146	90	14.218.990.027	
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	29.956.498	100	46.606.498	100	47.106.498	100	123.669.494	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	100	100	76.305.000	100	114.680.000	100	114.680.000	100	307.665.000	
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Krajan)	%	100	100	686.775.832	100	697.603.634	100	713.320.991	100	2.097.700.457	
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Pandean)	%	100	100	695.875.745	100	706.847.018	100	722.772.633	100	2.125.495.396	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Bangunsari)	%	100	100	678.746.496	100	689.447.706	100	704.981.306	100	2.073.175.508	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	30.189.400	100	32.761.500	100	32.761.500	100	95.712.400	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	86.603.543	100	100.379.803	100	165.751.805	100	352.735.151	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	101.149.500	100	101.149.500	100	101.149.500	100	303.448.500	
7.01.01	Program penunjang urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	1.400.000	80,03	1.500.000	80,05	1.600.000	80,05	4.500.000	Kecamatan Pilangkenceng



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,17	60,94	3.500.000	66,34	7.000.000	71,74	9.000.000	71,74	19.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	2.216.116.325	85	2.308.632.993	90	2.352.004.049	90	6.876.753.367	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	5.500.000	100	6.000.000	100	15.800.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	56.100.000	100	68.525.000	100	73.025.000	100	197.650.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	14.600.000	100	18.500.000	100	21.700.000	100	54.800.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	49.325.000	100	57.350.000	100	63.400.000	100	170.075.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	48.400.000	100	66.050.000	100	63.400.000	100	177.850.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,58	80,01	3.778.700	80,03	8.728.700	80,05	17.478.700	80,05	29.986.100	Kecamatan Sawahan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	55,4	60,94	7.350.000	66,34	25.000.000	71,74	26.250.000	71,74	58.600.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	2.757.401.897	85	2.805.901.897	90	2.851.883.632	90	8.415.187.426	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	11.680.000	100	22.130.000	100	24.880.000	100	58.690.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	44.731.483	100	53.731.483	100	63.231.483	100	161.694.449	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	93.795.400	100	105.159.661	100	114.159.661	100	313.114.722	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	18.000.000	100	21.000.000	100	30.500.000	100	69.500.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	27.695.000	100	71.095.000	100	54.495.000	100	153.285.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	1.400.000	80,03	1.500.000	80,05	1.600.000	80,05	4.500.000	Kecamatan Saradan
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	38,88	60,94	3.500.000	66,34	10.000.000	71,74	13.000.000	71,74	26.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	2.959.610.816	85	3.042.376.553	90	3.052.892.568	90	9.054.879.937	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	4.300.000	100	9.100.000	100	9.100.000	100	22.500.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	56.100.000	100	71.525.000	100	86.025.000	100	213.650.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	29.000.000	100	37.000.000	100	75.000.000	100	141.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	49.325.000	100	58.850.000	100	75.400.000	100	183.575.000	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	48.400.000	100	72.550.000	100	64.300.000	100	185.250.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,03	80,01	2.000.000	80,03	4.000.000	80,05	6.000.000	80,05	12.000.000	Kecamatan Wungu (2 kelurahan)
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	30,66	60,94	2.500.000	66,34	4.500.000	71,74	6.500.000	71,74	13.500.000	
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	79	80	4.511.078.010	85	4.637.027.340	90	4.723.488.136	90	13.871.593.486	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	86,28	100	12.000.000	100	20.000.000	100	17.000.000	100	49.000.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	93	100	49.311.497	100	52.831.497	100	59.311.497	100	161.454.491	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (Wungu)	%	100	100	703.639.333	100	826.467.282	100	845.088.002	100	2.375.194.617	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD	
					2024		2025		2026		2026			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan (Munggut)	%	100	100	709.404.648			761.219.865	100	778.370.528	100	2.248.995.041	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	86	100	15.075.000		100	20.100.000	100	22.100.000	100	57.275.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	50	100	46.791.640		100	62.000.000	100	70.000.000	100	178.791.640	
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	86	100	78.257.000		100	92.500.000	100	98.800.000	100	269.557.000	
7.01.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	2.000.000		80,03	2.000.000	80,05	2.500.000	80,05	6.500.000	Kecamatan Wonoasri
		Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,89	60,94	200.000		66,34	250.000	71,74	250.000	71,74	700.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	92	80	2.216.816.351	85	2.298.006.966	90	2.333.983.724	90	6.848.807.041	
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	10.000.000	100	14.000.000	100	15.500.000	100	39.500.000	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	50.000.000	100	60.000.000	100	69.000.000	100	179.000.000	
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	36.000.000	100	44.000.000	100	47.000.000	100	127.000.000	
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	64.000.000	100	87.500.000	100	91.000.000	100	242.500.000	



Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kinerja Akhir		OPD
					2024		2025		2026		2026		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	54.300.000	100	67.500.000	100	72.000.000	100	193.800.000	
		Jumlah				53.546.459.442		56.305.050.437		57.647.290.560		167.498.800.439	
						2.090.277.755.133		2.108.644.967.420		2.157.686.394.780		5.762.129.104.236	
		JUMLAH TOTAL BELANJA											

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGRAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Madiun, khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Pencapaian tujuan ini dapat ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program atau indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri pada setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis dirumuskan dengan mengambil indikator dari indikator sasaran dan indikator tujuan (*Impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada dasarnya merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2024-2026 yang telah direncanakan. Dengan kata lain pencapaian indikator kinerja daerah berkontribusi signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sedangkan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah merupakan indikator utama tercapainya pembangunan Kabupaten Madiun periode tahun 2024-2026.

Sejajar dengan itu, indikator kinerja daerah sesungguhnya juga diperlukan karena keberhasilan pencapaiannya dapat menggambarkan kemajuan pembangunan daerah. Indikator kinerja daerah juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.



Tabel 8.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (Th. 2022)	Target		
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
1	Persentase Pertumbuhan Ekonomi	%	4,32	4,87	5,11	5,35
2	Persentase Penduduk Miskin	%	10,79	10,19	9,89	9,59
3	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,39	73,14	73,49	73,85
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63,36	70,01	75,00	80,01

Tabel 8.2 Indikator Kinerja Sasaran Daerah Kabupaten Madiun 2024-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Kinerja (Th. 2022)	Target		
				Th. 2024	Th. 2025	Th. 2026
1	Persentase peningkatan PDRB Sektor Pertanian, Perhutanan, Peternakan dan Perikanan	%	-4,05	1,75	1,93	2,19
2	Persentase peningkatan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	13,31	13,40	13,50	13,60
3	Persentase peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	%	5,76	6,00	6,25	6,50
4	Nilai Realisasi Investasi	Triliun	1,8 Triliun	2,2 Triliun	2,5 Triliun	2,9 Triliun
5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	Rupiah	28.880.400	29.448.600	30.016.700	30.525.300
6	Pengeluaran Perkapita	Rupiah	11.848 ribu rupiah/org/tahun	12.015 ribu rupiah/org/tahun	12.182 ribu rupiah/org/tahun	12.350 ribu rupiah/org/tahun
7	Indeks Pendidikan	Indeks	0,631	0,635	0,637	0,639
8	Indeks Kesehatan	Indeks	0,789	0,805	0,808	0,812
9	Tingkat	Persen	5,84	5,27	4,51	4,44



	Pengangguran Terbuka					
10	Nilai SAKIP	Nilai	76,03	78,73	80,04	82,84
11	Indeks SPBE	Indeks	3,21	3,22	3,23	3,24
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,63	4,68	4,69	4,70
13	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	64,79	65	66	67
14	Angka Kematangan Organisasi	Persen	65,51	65,76	66,76	67

Tabel 8.3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Madiun 2023

No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
A.	Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar						
1.	Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan						
	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	87,04	87,98	88,92	89,86	89,86
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat perangkat daerah	Nilai	95,74	97	97	98	98,14
	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	%	100	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar	%	98,36	100,00	100,00	100,00	100,00
	Angka partisipasi pendidikan kesetaraan	%	6,34	100,00	100,00	100,00	100,00
	Rerata kemampuan literasi SD	%	61,46	66,55	69,10	71,64	71,64
	Rerata kemampuan literasi SMP	Nilai	70,32	76,36	79,38	82,40	82,40
	Rerata kemampuan Numerasi SD	Nilai	49,34	52,25	53,71	55,16	55,16
	Rerata kemampuan Numerasi SMP	Nilai	58,07	62,04	64,03	66,01	66,01
	Indeks Iklim Keamanan SD	Nilai	88,45	95,53	99,07	100,00	100,00
	Indeks Iklim Keamanan SMP	Nilai	86	92,68	96,02	99,36	99,36
	Indeks Iklim Kebinekaan SD	Nilai	94,62	99,60	100,00	100,00	100,00
	Indeks Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	90,74	95,16	97,37	99,58	99,58
	Indeks Inklusivitas SD	Nilai	83,33	89,53	92,63	95,73	95,73
	Indeks Inklusivitas SMP	Nilai	82,08	88,28	91,38	94,48	94,48
	Persentase satuan pendidikan PAUD yang terakreditasi minimal B	%	49,71	52,69	55,59	58,49	58,49



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase Peserta didik yang memenuhi KKM muatan lokal	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase pendidik yang bersertifikat pendidik	%	42,78	40,72	38,34	36,22	36,22
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	%	77,68	79,50	80,00	82,00	82,00
2.	Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan						
	Dinas Kesehatan, RSUD Dolopo, RSUD Caruban						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,04	80,01	83,00	86,00	86,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,09	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	75	77	88	90	90
	Angka Kematian Bayi	per 1.000 lahir hidup	6,18	5,57	5,29	5,02	5,02
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 lahir hidup	77,19	73,00	70,00	66,00	66,00
	Persentase pemenuhan tenaga kesehatan pada puskesmas (9 tenaga kesehatan)	%	76,92	84,00	92,00	100,00	100,00
	Prevalensi Balita Stunting	%	17,6	14,00	12,00	10,00	10,00
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan puskesmas	%	57,00	61,00	65,00	69,00	69,00
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Caruban)	%	65,17	66,00	67,00	68,00	68,00
	Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan rumah sakit (RSUD Dolopo)	%	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
	Rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk	nilai	0,31 : 1.000	0,5 : 1.000	0,7 : 1.000	0,9 : 1.000	1 : 1.000
	Rasio tenaga kesehatan (paramedis) terhadap jumlah penduduk	nilai	1,4 : 1.000	2,0 : 1000	2,5 : 1.000	3,0 : 1000	3,0 : 1000
	Persentase sarana farmasi , alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standard	%	100	100	100	100	100
	Persentase UKM yang dilakukan pembinaan	%	100	100	100	100	100
3.	Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,35	80	83	86	86



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,35	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	90	90	90
	Persentase Luas Baku Sawah yang Terlayani Air Irigasi	%	85,25	86,27	86,65	87,02	87,02
	Persentase Meningkatnya Pelayanan Air Minum	%	3,19	3,62	3,84	4,05	4,05
	Persentase Meningkatnya Pelayanan Sanitasi Layak	%	0,6	1,08	1,33	1,57	1,57
	Persentase panjang drainase dalam kondisi baik	%	15,870	16,469	17,069	17,668	17,668
	Persentase panjang trotoar dalam kondisi baik	%	5,895	6,398	6,965	7,595	7,595
	Penataan bangunan gedung baik	%	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap	%	76,892	72,390	73,041	73,811	73,811
	Persentase dokumen pengembangan jasa konstruksi yang sesuai dengan ketentuan	%	69,890	85,230	90,909	100	100
	Ketaatan terhadap dokumen rencana tata ruang	%	31,25	31,25	37,50	56,25	56,25
4.	Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	87	88	89	89
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	29,18	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	91	92	93	93
	Persentase rumah layak huni yang terbangun bagi korban bencana atau terkena relokasi program pemerintah	%	100	100	100	100	100
	Cakupan kawasan kumuh yang tertangani	ha	54,43	104,43	154,43	204,43	204,43
	Cakupan perumahan yang telah ditingkatkan prasarana, sarana, dan utilitas umumnya	%	100	100	100	100	100
5.	Urusan Pemerintah Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat						
	Satuan Polisi Pamong Praja						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	66,82	78	83	86	86
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,42	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	80	80	85	90	90



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Perangkat Daerah						
	Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
	Persentase kasus kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase kasus non kebakaran yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,2	80,4	80,6	80,8	80,80
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,39	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah (Skor)	Nilai	79,53	80	82	84	84
	Jumlah Warga Negara di Kawasan Rawan Bencana yang memperoleh layanan Mitigasi	orang	-	4000	4250	4500	4500
	Persentase Kejadian Bencana yang Ditangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase Pemulihan Pasca Bencana yang Direalisasikan	%	100	100	100	100	100
6.	Urusan Pemerintah Bidang Sosial						
	Dinas Sosial						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,88	78,88	79	79,5	79,8
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65	70	71	72	72
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	80	80	80
	Persentase PSKS yang dibina	%	30	34	36	36	38
	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran kewenangan Pemberdayaan Sosial	%	28	20	22	23	23
	Jumlah PPKS yang Tertangani	orang	15,02	60	63	65	65
	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan tepat sasaran (PKH dan Keluarga Miskin Kewenangan Kab/Kota)	%	48,76	45	50	53	53
	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Jaminan Kesehatan	%	88,09	70	70	70	70
	Persentase Masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Tepat Sasaran (paska Korban bencana alam dan sosial)	%	100	90	90	90	90
	Persentase PSKS yang dibina	%	100	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
B.	Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar						
1.	Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja						
	<i>Dinas Tenaga Kerja</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,79	76	77	78	78
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,7	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	96,29	76	77	78	78
	Persentase peserta Pelatihan yang bersertifikat	%	100	100	100	100	100
	Persentase Penempatan tenaga kerja	%	100	80	82	84	84
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%		5	6	7	7
	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan di luar pengadilan (%)	%	100	100	100	100	100
2.	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
	<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>						
	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang aktif	%	75,92	81,93	83,13	83,13	83,13
	Persentase kasus kekerasan pada perempuan yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100
	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang aktif	%	30	30	31,25	32,5	32,5
	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan	%	100	100	100	100	100
3.	Urusan Pemerintah Bidang Pangan						
	<i>Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	72	73	75	75
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,15	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap	Nilai	88,52	90	91	92	92



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	elayanan kesekretariatan Perangkat Daerah						
	Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	skor	1839 / 56	2150 / 57	2150 / 57	2150 / 57	2150 / 57
	Persentase daerah berpotensi rawan pangan yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang aman	%	100	100	100	100	100
4.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan						
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						
	Persentase Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Dokumen Tanah kosong yang dikelola	%	100	100	100	100	100
	Persentase Sengketa Tanah Yang Tertangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase dokumen penatagunaan tanah yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
5.	Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup						
	Dinas Lingkungan Hidup						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86	86	87	88	88
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	48,54	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	90	95	95	95
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase layanan pelaku usaha dan kegiatan yang menerapkan dokumen lingkungan	%	100	100	100	100	100
	Cakupan penghijauan wilayah potensi longsor dan sumber mata air	%	7	7,3	7,6	7,9	7,9
	Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dikelola	ha	22,9	22,9	22,9	22,9	22,9
	Persentase industri yang menerapkan sistem pengolahan limbah B3	%	100	100	100	100	100
	Persentase izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
	Cakupan masyarakat yang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan	%	45	45	47	48	48



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	lingkungan hidup						
	Jumlah penerima penghargaan lingkungan hidup	penerima	5	5	5	5	5
	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang tertangani	%	100	100	100	100	100
	Persentase sampah yang tertangani	%	40	40	45	50	50
6.	Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil						
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,03	87	89	90	90
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,78	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan Kesekretariatan	Nilai	77	90	95	96	96
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	%	n/a	100	100	100	100
	Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	%	99	100	100	100	100
	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	%	99	100	100	100	100
	Persentase Profil Kependudukan Yang Terkelola	%	100	100	100	100	100
7.	Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa						
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,38	82,45	82,75	83,00	83,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,98	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,088	89	90	91	91
	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Penataan Desa	%	100	100	100	100	100
	Persentase Kerjasama Desa yang berjalan dengan baik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Desa dengan penyelenggaraan pemerintahan desa yang tertib	%	74,24	85,86	88,38	90,91	90,91
	Persentase Desa dengan kualitas perencanaan pembangunan yang baik	%	70,20	73,23	77,27	83,33	83,33
	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif	%	66,86	72,36	75,13	78,88	78,88



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase BUMDesa Maju	%	46,46	56,57	63,13	73,23	73,23
8.	Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
	<i>Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	85,86	85,00	85,20	85,25	85,25
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,80	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,09	88,15	88,40	88,60	88,60
	Persentase dokumen data informasi kependudukan yang tersusun	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Persentase Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB karena Unmet Need	%	19,74	14,54	11,06	7,60	7,60
	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	%	80,49	80,49	82,93	85,37	85,37
	Persentase perkawinan dengan usia istri dibawah 20 Tahun	%	5,48	5,48	5,47	5,45	6,00
9.	Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan						
	<i>Dinas Perhubungan</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	32,56	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	100	100	100
	Persentase sarana prasarana perlengkapan jalan kondisi baik	%	80	85	88	90	90
	Persentase Kendaraan laik jalan	%	90	92	94	96	96
	Persentase Manajemen rekayasa lalu lintas	%	70	75	80	85	85
10.	Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika						
	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	82,41	82,45	82,5	82,55	82,55
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,31	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	88	89	90	90



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase Desiminasi layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan aplikasi layanan SPBE	%	100	100	100	100	100
11.	Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
	<i>Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,1	78	80	82	82
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	50,51	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	95	95	100	100
	Persentase izin usaha simpan pinjam yang telah diterbitkan	%	58,58	80	80	80	80
	Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	%	2,62	2,81	2,98	3,14	3,14
	Jumlah Koperasi sehat	unit usaha	149	150	160	170	170
	Pesentase koperasi yang telah dilatih	%	15	23	26	26	26
	Persentase koperasi yang telah diberdayakan dan dilindungi	%	31	40	40	41	41
	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terbina	%	22	27	30	31	31
	Persentase Usaha Mikro Yang Telah Terfasilitasi Pengembangan Produk	%	2,19	2,21	2,22	2,24	2,24
12.	Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal						
	<i>Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,36	81	81,5	82	82
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	43,57	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan	Nilai	85,29	86	87	88	88
	Jumlah Investor Baru	Perusahaan	1500	1000	1000	1000	3000
	Nilai SKM Pelayanan Perizinan Non Perizinan	Nilai	86,53	89	89,5	90	90
	Jumlah perusahaan yang menyampaikan LKPM	Perusahaan	125	150	155	160	160
	Jumlah Investor	Perusahaan	9000	12500	13500	14500	14500
	Nilai SKM atas Pelayanan	Nilai	-	86	87	88	88



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Data dan Informasi						
13.	Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olah Raga						
	<i>Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,17	80	81	81	81
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	80	80	80	80	80
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	48,54	60,94	66,34	71,74	71,74
	Jumlah atlit berprestasi	Atlit	246	250	260	270	270
	Presentase pemuda aktif dalam organisasi	%	0,546	0,620	0,684	0,747	0,747
14.	Urusan Pemerintah Bidang Statistik						
	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>						
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
15.	Urusan Pemerintah Bidang Persandian						
	<i>Dinas Komunikasi dan Informatika</i>						
	Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah	%	100	100	100	100	100
16.	Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan						
	<i>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</i>						
	Persentase budaya lokal yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100
	Cakupan pembinaan sejarah	%	77,27	81,8	86,36	90,91	90,91
	Persentase cagar budaya yang ditetapkan	%	6,68	14,98	22,93	30,57	30,57
17.	Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan						
	<i>Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</i>						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,35	82,00	83,00	84,00	84,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	74,34	75	83	85	85
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	77,27	77,00	88	90	90
	Persentase Perpustakaan Terakreditasi	%	2,7	3,37	3,40	3,40	3,40



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
18.	Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan						
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						
	Indeks Ketersediaan Arsip	Poin	78	83	85	87	87
	Indeks Keberadaan dan Keutuhan Arsip	Berkas	70	13	18	23	23
C.	Urusan Pilihan						
1.	Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan						
	Dinas Pertanian dan Perikanan						
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	1,04	1	1	1	1
	Persentase peningkatan hasil Produk Olahan Asal Ikan	%	30,6	2	2	2	2
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01
2.	Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata						
	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga						
	Persentase peningkatan daya tarik pada destinasi pariwisata	%	284,746	288,136	291,525	294,915	294,915
	Jumlah pemasaran pariwisata yang masif	Kegiatan	4	4	4	4	4
	Peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif	orang	60	30	30	30	30
3.	Urusan Pemerintah Bidang Pertanian						
	Dinas Pertanian dan Perikanan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,04	80	81	82	82
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	28,50	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	85	85	86	87	87
	Persentase kelompok tani yang mendapatkan sarana pertanian	%	7,24	1,94	2,43	2,67	2,67
	Persentase lahan pertanian yang bebas dari bencana pertanian	%	87,4	98,33	98,36	98,39	98,39
	Persentase peningkatan jumlah prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	4	4	4	4	4
	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	%	7,67	9	10	11	11
	Dinas Ketahanan Pangan						



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	dan Peternakan						
	Persentase peningkatan jumlah ternak	%	1	1	1	1	1
	Persentase Hewan Ternak dalam Keadaan Sehat	%	100	100	100	100	100
	Persentase prasarana peternakan dalam keadaan baik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Jumlah Peternak	%	1	1	1	1	1
4.	Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan						
	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro						
	Persentase dokumen Perizinan yang diterbitkan	%	0	5,54	10	10	10
	Persentase Peningkatan pengawasan B2 pada pengguna akhir	%	0	25	40	40	40
	Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Yang tersedia	%	0	5,71	8,11	10	10
	Persentase Peningkatan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Yang Telah Dibina Dan Telah Diberdayakan	%	0	35,14	40,00	50,00	50,00
	Persentase Koefisien Variasi Harga	%	9,3	12	11,9	11,8	11,8
	Persentase peningkatan pemasaran produk berkualitas ekspor	%	3	5	6	7	7
	Persentase Peningkatan UTTP Yang Tertera/ Tertera Ulang	%	0,51	5,35	6,35	7,46	7,46
	Persentase Peningkatan Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal Yang Terbina dan UTTP Yang Terawasi	%	12	33,33	35,71	36,84	36,84
	Persentase Peningkatan Fasilitasi P3DN (Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri)	%	0	10	12	15	15
5.	Urusan Pemerintah Bidang Industri						
	Dinas Tenaga Kerja						
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	1	2	2	2	2
	Persentase IKM yang terfasilitasi perijinan	%	6	8	8	8	8
	Persentase IKM yang memanfaatkan SIINas	%	46	80	80	80	80
6.	Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi						



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Dinas Tenaga Kerja						
	Persentase Transmigran umum yang dipindahkan dan ditempatkan	%	100	100	100	100	100
D.	Unsur pendukung urusan pemerintahan						
1.	Unsur Sekretariat Daerah						
	Bagian Umum						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,50	80,01	80,01	80,01	80,01
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	56,98	60,94	66,34	71,74	71,74
	Meningkatnya kepuasan layanan sekretariat daerah	Nilai	80	100	100	100	100
	Bagian Organisasi						
	Persentase Rumusan Kebijakan Ketatalaksanaan Organisasi yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100
	Persentase PD Pengampu pelayanan masyarakat yang sesuai dengan mutu	%	100	100	100	100	100
	Nilai Pelaporan	PD	53	53	53	53	53
	Nilai IKM	Nilai	83,34	85,5	87,5	90,5	90,5
	Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat sasaran	Nilai	-	47,4	47,4	47,4	47,4
	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	Persentase kegiatan keprotokolan dan komunikasi Pimpinan yang di fasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Bagian Hukum						
	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	30	50	50	50	50
	Bagian Kesejahteraan Rakyat						
	% Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang ditetapkan	%	100	100	100	100	100
	Bagian Administrasi Pemerintahan						
	Persentase rumusan kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan sesuai kebutuhan	%	100	100	100	100	100
	Bagian Administrasi Pembangunan						
	Persentase Rumusan	%	100	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Kebijakan Bidang Pembangunan yang ditindaklanjuti						
	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Predikat	59,6	79	80	90	90
		Nilai	Cukup	Baik	Baik	Baik	Baik
	Persentase Jumlah Rumusan Kebijakan Strategis Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang ditindaklanjuti	Jumlah Kebijakan	150	100	100	100	100
	Bagian Perekonomian						
	Persentase Rumusan Kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
2	Unsur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						
	Sekretariat DPRD						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,89	70	75	80	80
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	45,25	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	100	100	100	100	100
	Persentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	100	100	100	100	100
E.	Unsur penunjang urusan pemerintahan						
1.	Unsur Perencanaan						
	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,11	81,00	82,00	83,00	83,00
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,49	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	82	85	85
	Persentase perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai ketentuan	%	100	100	100	100	100
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan	%	80	80	80	80	80



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Pembangunan Manusia yang tercapai						
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA yang tercapai	%	80	80	80	80	80
	Persentase indikator program perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang tercapai	%	80	80	80	80	80
2.	Unsur Keuangan						
	Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,45	80,5	81	81	81,5
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	39,06	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	83,60	85	85	85	85
	Persentase Penyerapan Anggaran	%	93,75	100	100	100	100
	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Baik	%	-	100	100	100	100
	Badan Pendapatan Daerah						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,32(A)	87(A)	87(A)	87(A)	87(A)
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	35,21	60,94	66,30	71,70	71,70
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan sekretariat Perangkat Daerah	Nilai	90	90	90	90	90
	Persentase peningkatan target pajak daerah	%	12	12	12	12	12
	Persentase pengajuan pelayanan pajak daerah yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah ketetapan pajak daerah yang telah ditetapkan	SPPT	422.500	422.500	423.000	423.500	423.500
	Persentase realisasi PAD tahun berkenaan	%	100	100	100	100	100
	Jumlah pengajuan keberatan/pengurangan yang diverifikasi (ajuan)	Ajuan	1.325	1.325	1.350	1.375	1.375
	Jumlah laporan PAD yang tertib administrasi	Dokumen	12	12	12	12	12
3.	Unsur Kepegawaian						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	80,47	80,47	81	81,15	81,15
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	65,11	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap	Nilai	99	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah						
	Persentase penetapan kebutuhan ASN	%	100	100	100	100	100
	Persentase Mutasi jabatan sesuai kualifikasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase kedisiplinan ASN	%	90	90	92	92	92
	Persentase Penilaian Kinerja ASN	%	90	92	95	95	95
4.	Unsur Pendidikan dan Pelatihan						
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	96	98	100	100	100
	Persentase ASN yang Lulus Pengembangan Kompetensi	%	96	100	100	100	100
5.	Unsur Penelitian dan Pengembangan						
	Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah						
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	%	100	100	100	100	100
F.	Unsur pengawasan urusan pemerintahan						
	Inspektorat						
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	60	60	65	70	70
	Nilai SAKIP PD	Nilai	80,04	80,06	80,08	81	81
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	46,32	60,94	66,34	71,74	71,74
	Persentase penyelenggaraan Pengawasan	%	100	100	100	100	100
	Persentase OPD yang mendapatkan nilai hasil evaluasi SAKIP Memuaskan	%	30	35	40	45	45
	Persentase terlaksananya Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	%	100	100	100	100	100
G.	Unsur Kewilayahan						
	Kecamatan Balerejo						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan	Nilai	52,07	60,94	66,34	71,74	71,74



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Internal						
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Dagangan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,99	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	37,83	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Dolopo (2 Kelurahan)						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,99	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	27,37	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	93	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	%	95	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	publik						
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	%	99	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	99	100	100	100	
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	94	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	97	100	100	100	100
	Kecamatan Geger						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,47	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	42,11	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99,81	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	84,68	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	94,81	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99,01	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	96,47	100	100	100	100
	Kecamatan Gemarang						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63,25	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,69	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan	%	100	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	koordinasi ketentraman dan ketertiban umum						
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Jiwan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	36,63	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	90	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Kebonsari						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,14	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	95	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	91,29	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	95,64	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Kecamatan Kare						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,15	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	26,91	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	85	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Madiun (1 Kelurahan)						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	65,42	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	34,99	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	87,55	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	99	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	71	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%		100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	92	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	99	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	87	100	100	100	100
	Kecamatan Mejayan (3 Kelurahan)						



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	41,49	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Pilangkenceng						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	44,17	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Sawahan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	62,58	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	55,4	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai		80	85	90	90



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Saradan						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,54	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	38,88	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	80	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
	Kecamatan Wungu (2 Kelurahan)						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,03	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	30,66	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	79	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	%	86,28	100	100	100	100



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa	%	93	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pemberdayaan Masyarakat kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	86	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	50	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	86	100	100	100	100
	Kecamatan Wonoasri						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,63	80,01	80,03	80,05	80,05
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	31,89	60,94	66,34	71,74	71,74
	Kepuasan ASN terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	92	80	85	90	90
	Persentase Layanan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100
	Persentase Layanan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100
H.	Urusan Pemerintah Bidang Pemerintahan Umum						
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	86,75	86,75	86,75	86,75	86,75
	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Nilai	40,96	60,94	66,34	71,74	71,74
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Aparatur Terhadap pelayanan kesekretariatan Perangkat Daerah	Nilai	88,04	89	89	89	89
	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	100	100	100	100	100
	Indeks Demokrasi Indonesia	nilai	n/a	80	82	83	83



No	ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja awal 2021 / 2022	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
				Tahun-1 (2024)	Tahun-2 (2025)	Tahun-3 (2026)	
	Persentase Ormas/LSM penerima bantuan yang mencairkan bantuan pada Tahun N	%	100	100	100	100	100
	Persentase penyelesaian konflik sosial yang terjadi di wilayah	%	n/a	80	85	90	90
	Indeks Toleransi	Nilai	80,88	81	82,25	83	83



BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kabupaten Madiun pada periode transisi. Dokumen RPD akan menjadi dokumen yang menerjemahkan RPJPD Kabupaten Madiun Tahun 2005-2025. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, termasuk perangkat daerah apa yang berperan dalam pencapaian indikator tersebut.

9.1 Pedoman Transisi

Dokumen RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 menjadi panduan dalam merencanakan dan mewujudkan pembangunan yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk tahun 2024 hingga tahun 2026. Setelah berakhirnya RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026, perlu disusun RPJMD Kabupaten Madiun sebagai pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lima tahun berikutnya. Pada masa transisi tersebut, diperlukan sebuah pedoman bagi penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026. Pedoman penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2026 akan mendasarkan pada RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026, amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2024-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026. Selain itu, transisi RPD pada tahun 2026 tentunya akan memberikan dampak terhadap tahun awal dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Madiun tahun 2026-2031.

9.2 Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 ini merupakan panduan bagi Pemerintah Kabupaten Madiun serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu konsistensi, kerja sama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi sangat diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 kepada masyarakat;
- b. Penyusunan RKPD Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 berpedoman pada RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026;




- c. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026;
- d. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 dengan sebaik-baiknya;
- e. Seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 pasca penetapan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 ini;
- f. Penyusunan RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026 ini telah dilakukan melalui konsultasi publik, dengan harapan program-program yang tertuang dalam RPD sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik tersebut dapat meningkatkan peran serta para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku institusi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah, bertugas untuk melakukan fasilitasi, monitoring dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Madiun;
- g. Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026; dan
- h. DPRD berkewajiban membahas KUA-PPAS yang diajukan oleh Bupati dalam rangka penyusunan RAPBD dan pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang RAPBD untuk menjamin agar sesuai dengan Peraturan Bupati tentang RPD Kabupaten Madiun tahun 2024-2026. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “DPRD mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD”.

9.3 Penutup

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 dalam pelaksanaannya perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024-2026, yang memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaannya yang nantinya ditetapkan setiap tahunnya dengan Peraturan Bupati.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Madiun Tahun 2024-2026 merupakan pedoman bagi institusi Pemerintahan Kabupaten Madiun dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2024-2026 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Madiun dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun bersama dengan DPRD Kabupaten Madiun bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPD Kabupaten Madiun ini dan RKPD Kabupaten Madiun tahun 2024 hingga tahun 2026 demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Caruban 24 Maret 2023
BUPATI MADIUN,

AHMAD DAWAMI RAGIL SAPUTRO